



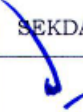
GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU, TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                               | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah

| KARO HUKUM                                                                          | KADIS PU, TATA RUANG, DAN PERKIM                                                    | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

7. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
- b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; dan
- c. pedoman percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan
- b. mencapai target akses Sanitasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU,TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                                | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

BAB III  
DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI

Pasal 4

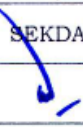
- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Ruang lingkup Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendahuluan
  - b. profil Sanitasi Daerah;
  - c. isu strategis, tujuan dan sasaran;
  - d. strategi dan kebijakan;
  - e. rencana aksi pengelolaan sanitasi;
  - f. program kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan; dan
  - g. penutup
- (3) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (4) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dilakukan oleh

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU,TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                                | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan
  - b. air limbah domestik.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PPKP.
- (5) Pembentukan Pokja PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Pokja PPKP;
  - c. Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota di Daerah;
  - d. Kelompok Kerja Sanitasi di dalam Daerah;
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - f. pihak lain yang terkait.

##### Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyusunan dan

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU, TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                               | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PPKP.
- (3) Kegiatan Pokja PPKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi;
  - b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis elektronik yaitu situs web resmi NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*) sebagai perangkat pemantauan dan evaluasi;
  - c. menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan Program PPSP; dan
  - d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program PPSP dilaporkan melalui website <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU, TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                               | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPKP.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan internal Pemerintah.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO<br>HUKUM                                                                       | KADIS PU, TATA<br>RUANG, DAN<br>PERKIM                                               | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 | WAGUB                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

~ 9 ~

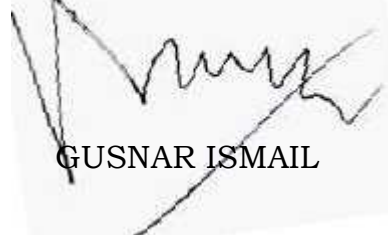
## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 24 November 2025  
GUBERNUR GORONTALO



GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2025-2029

ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

## 1. Latar Belakang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program yang dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk mewujudkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan), merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *(tidak termasuk pasal yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)*).

Kewenangan Pemerintah Provinsi dimuat dalam lampiran undang-undang tersebut, yang terdiri dari:

- (1) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- (2) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

*(sumber : lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf C Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, angka 3 (halaman 10, sheet 323) : pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, angka 4 (halaman 11, sheet 324 : pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional).*

Dalam rangka mencapai target sanitasi layak dan aman 100% pada tahun 2030 sebagaimana termaktub dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk hal tersebut dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal:

- (1) meningkatkan peran fasilitasi dalam Pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di kabupaten/kota;
- (2) memaksimalkan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya dalam pembangunan sanitasi;
- (3) memprioritaskan alokasi pembiayaan pembangunan sanitasi melalui APBD provinsi.

## 2. Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan

Dasar pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, sebagaimana diuraikan pada point mengingat dalam peraturan ini.

3. Ruang Lingkup

Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo sesuai dengan Permendagri 87 Tahun 2022 dibatasi hanya pada dua bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Pasal 4, angka (1) dan Pasal 6 angka (1).

Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

- 1) **Aspek Regulasi**, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.
- 2) **Aspek Kelembagaan**, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
- 3) **Aspek Infrastruktur**, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
- 4) **Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat**, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
- 5) **Aspek Pendanaan**, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

4. Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

Target dan sebaran arget akses sanitasi ditentukan berdasarkan kesepakatan pokja terkait pencapaian eksisting masing-masing kabupaten/kota,, sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel-1  
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

| No.   | Komponen                                                   | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |         |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|       |                                                            | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| A.    | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)                |                       |        |        |        |         |
| 1.    | Layak                                                      | 92,50%                | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2     | Aman                                                       | 4,88%                 | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 2.a   | SPALD Setempat                                             | 4,03%                 | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |
| 2.b   | SPALD Terpusat                                             | 0,83%                 | 1,41%  | 1,91%  | 2,41%  | 3,04%   |
| 2.b.1 | SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi | 0,66%                 | 1,13%  | 1,53%  | 1,93%  | 2,43%   |
| 2.b.2 | SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat              | 0,13%                 | 0,23%  | 0,31%  | 0,39%  | 0,49%   |
| 3     | BABs                                                       | 7,23%                 | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  | 1,90%   |
| B.    | Target Akses Sanitasi persampahan)                         |                       |        |        |        |         |
| 5     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah  | 50,05%                | 56,62% | 63,19% | 69,75% | 85,00%  |
| 5.a   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug                   | 30,03%                | 32,77% | 35,50% | 38,23% | 49,18%  |

| No.   | Komponen                                      | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                               | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|       | Residu)                                       |                       |        |        |        |        |
| 5.b   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 20,02%                | 23,85% | 27,69% | 31,53% | 35,82% |
| 5.b.1 | sampah terdaur ulang                          | 6,12%                 | 7,58%  | 9,04%  | 10,51% | 12,09% |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting, dengan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, DPUPRKP Provinsi Gorontalo dan OPD Provinsi terkait

Tabel-2  
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Lokasi                    | NILAI PERATURAN | NILAI KELEMBAGAAN | NILAI INFRASTRUKTUR |                |                   |               |                |                | NILAI PERILAKU MASYARAKAT | NILAI PENDANAAN | NILAI PROFIL PERNGELOLAN PERSAMPAHAN |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                           |                 |                   | NILAI TPA           | NILAI TPST/PDU | NILAI BANK SAMPAH | NILAI TPS 3R  | NILAI INFORMAL | NILAI ANGKUTAN |                           |                 |                                      |
| Kabupaten Boalemo         | 66,67%          | 25,00%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 2,83%          | 10,00%                    | 4,40%           | 30,00%                               |
| Kabupaten Gorontalo       | 66,67%          | 12,50%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 9,88%          | 10,00%                    | 8,00%           | 32,53%                               |
| Kabupaten Pohuwato        | 66,67%          | 20,00%            | 13,33%              | 33,33%         | 33,33%            | 33,33%        | 33,33%         | 16,81%         | 10,00%                    | 4,40%           | 46,11%                               |
| Kabupaten Bone Bolango    | 66,67%          | 31,25%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 33,33%        | 33,33%         | 7,05%          | 10,00%                    | 4,40%           | 39,06%                               |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 100%            | 25,00%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 13,15%         | 10,00%                    | 4,40%           | 31,18%                               |
| Kota Gorontalo            | 66,67%          | 33,33%            | 40,00%              | 0,00%          | 33,33%            | 33,33%        | 33,33%         | 67,83%         | 10,00%                    | 4,40%           | 53,17%                               |
| <b>Total</b>              | <b>66,67%</b>   | <b>24,51%</b>     | <b>17,78%</b>       | <b>5,56%</b>   | <b>11,11%</b>     | <b>16,67%</b> | <b>16,67%</b>  | <b>19,59%</b>  | <b>10,00%</b>             | <b>5,00%</b>    | <b>38,67%</b>                        |

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan



Tabel-3  
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Lokasi             | score<br>peraturan | score<br>Kelembagaan | Nilai Infrastruktur Eksisting |                  |                   | Score<br>infrastruktur<br>eksisting | Score Perilaku<br>Masyarakat | Score<br>Pendanaan | Score Total<br>Air Limbah |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                      | score SPALD-T                 | Score<br>SPALD-S | score<br>angkutan |                                     |                              |                    |                           |
| Boalemo            | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 11,11%           | 5,33%             | 19,11%                              | 10,00%                       | 4,27%              | 52,63%                    |
| Gorontalo          | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 8,59%            | 5,33%             | 16,59%                              | 10,00%                       | 2,29%              | 48,13%                    |
| Pohuwato           | 10,00%             | 5,89%                | 2,67%                         | 4,91%            | 0,00%             | 7,57%                               | 10,00%                       | 0,00%              | 33,47%                    |
| Bone<br>Bolango    | 10,00%             | 6,96%                | 2,67%                         | 5,03%            | 0,00%             | 7,70%                               | 10,00%                       | 0,00%              | 34,66%                    |
| Gorontalo<br>Utara | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 13,53%           | 5,33%             | 18,17%                              | 10,00%                       | 14,00%             | 61,42%                    |
| Kota<br>Gorontalo  | 10,00%             | 7,13%                | 2,67%                         | 9,73%            | 5,33%             | 17,73%                              | 10,00%                       | 4,25%              | 49,10%                    |
| <b>Rata-rata</b>   | <b>10,00%</b>      | <b>7,96%</b>         | <b>2,67%</b>                  | <b>8,82%</b>     | <b>3,56%</b>      | <b>14,48%</b>                       | <b>10,00%</b>                | <b>4,13%</b>       | <b>46,57%</b>             |

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Note : Pendanaan retribusi terinput dalam sistem, sehingga nilainya >



## 5. Pengelolaan Sanitasi Oleh Provinsi Gorontalo

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi kewenangan Provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel-4  
Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi Kewenangan Provinsi

| No. | Uraian                 | Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ketersediaan Peraturan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah</li> <li>Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah (pasal 53, angka 1 huruf b)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo (proses legalisasi)</li> <li>Peraturan Gubernur Gorontalo No. 66 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022</li> <li>Peraturan Gubernur Gorontalo No. 39 Tahun 2015 tentang road map sanitasi Tahun 2015-2019</li> </ul> |
| 2   | Kondisi Kelembagaan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operator : UPTD TPA Regional Talumelito</li> <li>Regulator : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operator : Belum Ada operator IPAL regional di Provinsi Gorontalo</li> <li>Regulator : Belum ada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Kondisi Infrastruktur  | <p><u>Yang sudah beroperasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango</li> <li>Lokasi TPA : Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo</li> <li>Operator Layanan : UPTD TPA Regional Talumelito</li> <li>Sistem Operasi : <i>controlled landfill</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <p><u>Yang sudah beroperasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten/Kota : belum ada</li> <li>Lokasi IPAL : belum ada</li> <li>Operator Layanan : belum ada</li> <li>Sistem Operasi : belum ada</li> <li>Kapasitas : belum ada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | Uraian    | Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas : 21,05 hektar, 19.430 m<sup>3</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |           | <u>Yang Direncanakan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Yang Direncanakan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi : TPA Talumelito</li> <li>FS : disusun tahun 2023</li> <li>DED : Tahun 2022 (Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito)</li> <li>AMDAL : belum disusun</li> <li>LARAP : belum disusun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi : belum ada</li> <li>FSi IPAL : belum ada</li> <li>DED : belum ada</li> <li>AMDAL : belum ada</li> <li>LARAP : belum ada</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 4   | Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis di Provinsi Gorontalo dengan insinerator kapasitas 200 kg/jam, hibah 1 unit truk hino dengan box pendingin.</li> <li>Kerjasama JICA dengan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir danau Limboto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama city to city dengan Prefektur Ehime Jepang terkait manajemen lingkungan dan pengolahan limbah pabrik kelapa</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Mondylia Amerta untuk mengembangkan sistem pemantauan air secara kontinu, otomatis dan online (<i>data real time</i>) di Danaiu Limbot</li> </ul> |
| 5   | Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000 pada tahun 2022 untuk penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendanaan APBD Provinsi untuk air limbah domestik sebesar Rp. 3.507.683.992 dari Tahun 2019-2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP, Tahun 2024

## 6. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/kota

Permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Kabupaten/kota diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-5  
Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                              |
| 1. | Boalemo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 2. | Gorontalo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 3. | Pohuwato        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sudah berumur 8 tahun sehingga harus disusun Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan dengan rencana program jangka menengah nasional Tahun 2025-2029</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya peraturan daerah yang secara pokok mengatur institusi, ketentuan umum kebersihan serta retribusi sampah</li> <li>• Belum ada peraturan daerah terkait pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar-pelanggar dalam pengelolaan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Regulasi                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                        | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                          |
|    |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Kota Gorontalo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-6  
Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                       |
| 1. | Boalemo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UPTD</li> <li>Peningkatan SDM UPTD</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 2. | Gorontalo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UPTD</li> <li>Peningkatan SDM UPTD</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 3. | Pohuwato        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk dinas yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan anggaran operasi dan pemeliharaan</li> <li>Kurang dapat mengembangkan SDM dalam pengelola berbentuk dinas karena terbentuk aturan kepegawaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>UPTD</li> <li>Peningkatan SDM UPTD</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 6. | Kota Gorontalo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-7  
Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Polohungo kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Boalemo</li> <li>• Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal</li> <li>• Instalasi Pengolahan Lindi rusak dan tidak terawat</li> <li>• Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i></li> <li>• Dari 2 unit TPS 3 R, 2 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> <li>• Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Desa Polohungo Kecamatan Dulupi</li> <li>• Belum ada penjaga di lokasi IPLT</li> <li>• Sudah mulai ditumbuhi rumput liar</li> <li>• <i>Screen chamber</i> tidak terpasang</li> <li>• 5 m3 dengan 2 truk tinja</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul>             |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 1 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai komposting skala RT RW dan rumah kompos</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> <li>• Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, mempunyai permasalahan seperti areal IPLT ditanami jagung, pipa outlet <i>settling thickening</i> terputus, sehingga kapasitas IPLT sebesar 12 m<sup>3</sup>/hari tidak dapat dipergunakan</li> <li>• Truk Tinja 2 buah dengan kapasitas 8 m<sup>3</sup>,</li> </ul> |
| 3. | Pohuwato       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Delo Indah kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Pohuwato</li> <li>• Jalan operasional berupa jalan tanah</li> <li>• Kolam lindi tidak berfungsi dan rusak</li> <li>• Geomembran robek</li> <li>• Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i></li> <li>• Dari 8 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mempunyai komposting skala RT RW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPA Lonuo belum berfungsi karena belum adanya alat berat</li> <li>• Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Molantadu Kecamatan Tomilito kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Gorontalo Utara</li> <li>• Alat berat tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya</li> <li>• Saluran dan unit pengolahan lindi tidak berfungsi baik</li> <li>• Beberapa titik geomembran robek</li> <li>• Sel landfill terisi tanaman air</li> <li>• TPA belum dilengkapi jembatan timbang, pagar keliling, sarana listrik dan air bersih</li> <li>• Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal</li> <li>• TPST Bukit Ru'ya belum berfungsi optimal terkait dengan pemilahan dan daur ulang sampah</li> <li>• Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil tinja bantuan DAK Tahun 2019 tidak berfungsi optimal</li> <li>• IPLT Mootinelo Kecamatan Kwandang belum berfungsi maksimal</li> <li>• Scrren chamber tidak terpasang</li> <li>• Jalan akses belum ada pengerasan</li> <li>• Belum ada petugas di IPLT</li> <li>• Kapasitas 8 m<sup>3</sup> dengan 3 truk tinja</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul> |
| 6. | Kota Gorontalo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 10 unit TPS 3 R, 6 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah berkurang</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Kecamatan Kota Utara</li> <li>• Masih ada kegiatan lain di sekitar lokasi IPLT</li> <li>• Pembuangan langsung ke bak pengering lumpur</li> <li>• Kapasitas 10 m<sup>3</sup> dengan 2 truk kapasitas 5000 L</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul>                                                                                                      |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-8  
Permasalahan Perilaku Masyarakat Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                   |                                                                                                            |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                                                                                        |
| 1. | Boalemo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi program 3 R sangat rendah</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 2. | Gorontalo       |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 3. | Pohuwato        |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango    |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat belum seluruhnya menerapkan pola pengolahan 3 R di sumber sampah rumah tangga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 6. | Kota Gorontalo  |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-9  
Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Air Limbah Domestik                           |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,086% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan</li> </ul> | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,173% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 76% dari target yang ditetapkan</li> </ul> | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |
| 3. | Pohuwato       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,4% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan</li> </ul>    |                                               |

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Air Limbah Domestik                           |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,183% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 42% dari target yang ditetapkan</li> </ul> |                                               |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,02% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan</li> </ul>   | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |
| 6. | Kota Gorontalo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 57% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan</li> </ul>    | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

## 7. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi Provinsi

Permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Provinsi diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-10  
Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi

| No | Aspek         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan terkait pengelolaan sampah yang disusun pada Tahun 2013 sudah selayaknya diperbaharui dengan peraturan sejenis di tahun 2025.</li> <li>Belum disusunnya peraturan kepala daerah terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah pada wilayah kewenangan provinsi</li> <li>Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Provinsi Gorontalo</li> <li>Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>Pemerintah provinsi belum menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat diakses masyarakat</li> <li>Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara kontinu</li> <li>Belum disusunnya peraturan terkait penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul> |
| 2. | Kelembagaam   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah khususnya karyawan dan petugas pada UPTD TPA Regional Talumelito</li> <li>Belum terjalinya penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait lembaga pengelola TPA regional Talumelito</li> <li>Belum kontinunya peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</li> <li>Belum ada sistem informasi terintegrasi antara UPTD dengan Provinsi dan Pusat</li> <li>Belum terdapat sinergi antara OPD pengelola sampah dengan kelurahan dan kecamatan serta masyarakat, serta belum dijalankannya insentif dan disinsentif secara terprogram dan konsisten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapat kepastian dalam pengembangan landfill TPA Regional Talumelito terkait penuhnya sampah pada lahan penimbunan eksisting</li> <li>Belum terdapat upaya pembatasan timbulan sampah dari kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanan TPA Sampah Regional Talumelito</li> <li>Belum menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya</li> <li>Belum adanya produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Aspek               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya sarana pendauran ulang sampah</li> <li>• Belum seluruh masyarakat melakukan pemanfaatan kembali sampah</li> <li>• Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah</li> <li>• Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan</li> <li>• Kurangnya fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</li> <li>• Belum adanya penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Belum adanya penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li> <li>• Belum seluruh desa/kelurahan memiliki unit pengelola sampah (bank sampah) dan terdapat unit pengelola sampah (bank sampah) yang tidak aktif melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce reuse, recycle)</li> <li>• Belum semua unit pengelola sampah mempunyai bentuk pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Perilaku Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan.</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pertama dalam hal pengurangan dan penanganan sampah belum diatur secara jelas, sifatnya hanya himbauan. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk kepengurusan bank sampah juga tidak dengan jelas diatur tugas dan fungsinya</li> <li>• Kurangnya pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal, provinsi dan nasional maupun sektor swasta</li> <li>• Kurangnya penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi</li> <li>• Belum terdapat partisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya.</li> <li>• Minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pembentukan bank sampah di setiap desa/kelurahan</li> <li>• Belum tersosialisasinya kegiatan pemilahan menjadi tanggungjawab dari setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota</li> </ul> |
| 5. | Pendanaan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih berkisar antara 0,1%-2% dari APBD Provinsi, sehingga menyulitkan operasional pengelolaan sampah</li> <li>• Kurangnya langkah-langkah penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No | Aspek | Permasalahan                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-11  
Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

| No | Aspek               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada peraturan daerah terkait air limbah domestik, yang ada tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Pengelola IPAL Regional belum ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi naskah akademik terkait pengelolaan SPAL di Provinsi Gorontalo dapat dipersiapkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Kelembagaan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah yang menjadi garda terdepan pengelolaan air limbah (sanitasi) masih belum dilengkapi dengan kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada.</li> <li>• Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Infrastruktur       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya IPAL Regional yang melayani wilayah perkotaan di Provinsi Gorontalo, hal ini dapat difahami dengan kondisi kepadatan penduduk yang <math>&lt; 15.000</math> jiwa/km<sup>2</sup>.</li> <li>• Data-data yang reliable dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan</li> <li>• Perhatian yang terbatas kepada air limbah juga ditandai dengan keterbatasan pilihan teknologi alternatif sehingga aplikasinya pada masalah dan lingkungan yang beragam, misalnya untuk jenis buangan padat dan cair, dari kawasan industri maupun rumah tangga, menjadi jauh dari optimal</li> </ul>                                                                                                                          |
| 4. | Perilaku Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi, sayangnya tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban itu sendiri.</li> <li>• Sanitasi juga masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah perdesaan, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan masyarakat. Sayangnya LSM yang bergerak di bidang sanitasi masih sangat sedikit.</li> <li>• Keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah, para wakil rakyat, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembuk dan bertindak sesuai kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah</li> </ul> |
| 5. | Pendanaan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya kepedulian pemerintah dan wakil rakyat akan persoalan sanitasi tercermin dari alokasi anggaran yang sangat sedikit untuk pembangunan fasilitas sanitasi dasar. Padahal, bahaya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas air baku karena kurangnya perhatian pada masalah sanitasi dapat menyebabkan upaya perbaikan yang 10 kali lebih mahal daripada biaya pencegahannya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

## 8. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

### a) Visi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Visi

***"Terwujudnya Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo "***

### b) Misi Sanitasi Provinsi Gorontalo

#### **Pengelolaan Sampah**

- 1). Mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dengan gerakan BASNOL (gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol), dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi aman yang merupakan bagian dari sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*)
- 3). Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman
- 4). Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 5). Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 6). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *good corporate governance*
- 7). Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman

#### **Pengelolaan Air Limbah**

- 1). Meningkatkan perubahan perilaku terutama persepsi dan tanggungjawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- 2). Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dengan mengedepankan tanggungjawab individu.
- 3). Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
- 4). Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta
- 5). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*, yang berupa:
  - a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
  - b) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
  - c) Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan

- d) Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien dan profesional
  - e) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan
  - f) Peningkatan jumlah sampah pada Bank Sampah induk dan Bank Sampah Unit
  - g) Mewujudkan pengelolaan sampah organik langsung dari sumbernya
- 6). Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan:
- a) Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan
  - b) Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan, baik melalui anggaran kabupaten/kota, provinsi, pusat dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta
  - c) Pengembangan dan perkuatan bagi kota-kota yang belum mampu menyediakan pelayanan minimal
  - d) Membentuk wadah promosi dan publikasi produk daur ulang melalui galeri produk daur ulang sampah
  - e) Merencanakan rumah pintar belajar sampah (trash Play House), yaitu gerakan produktif pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan strategis destinasi wisata
  - f) Mengembangkan solusi dan peningkatan nilai tambah pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace) secara produktif dan inovatif serta berdampak ekonomis bagi masyarakat;
  - g) Diversifikasi bisnis TPS3R untuk menghasilkan pendapatan serta nilai tambah dalam pengelolaan sampah bagi Komunitas, Masyarakat dan Desa;
- 7). Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan:
- a) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan stakeholder terkait
  - b) Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

## 9. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

Isu strategis dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo untuk pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel-12  
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

| Komponen Sanitasi               | Aspek                                  | Isu Strategis                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Air limbah Domestik | Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan) | 1 Inisiatif pembentukan Perda Air Limbah Domestik di 6 (enam) kabupaten/kota                                                                                                                      |
|                                 |                                        | 2 Inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 6 Kab/kota sesuai amanat Perda                                         |
|                                 |                                        | 3 Komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini                                                                            |
|                                 |                                        | 4 Kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik |
|                                 |                                        | 5 Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman                                                                                 |
|                                 |                                        | 6 masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah                                                                               |
|                                 |                                        | 7 belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah                                                                               |
|                                 |                                        | 8 pengawasan dan penerapan aturan terhadap oknum yang melakukan pencemaran lingkungan                                                                                                             |
|                                 | Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola      | 1 lemahnya fungsi kelembagaan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman                                                                                                      |
|                                 |                                        | 2 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman                                                                                                         |
|                                 |                                        | 3 kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih belum terampil                                                                                          |
|                                 |                                        | 4 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman                                                                               |
|                                 |                                        | 5 Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekologi, sosial dan lingkungan hidup                                                                                           |
|                                 |                                        | 6 Tuntutan penerapan <i>good governance</i> melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan                                                                     |
|                                 |                                        | 8 Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim                                                                                                                                 |

| Komponen Sanitasi | Aspek                             | Isu Strategis                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Aspek Infrastruktur dan Teknologi | 1 Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan dan pedesaan                                                                                                                  |
|                   |                                   | 2 Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat (on site) yang aman dan melalui sistem terpusat (off site)                                           |
|                   |                                   | 3 Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan                                                                                   |
|                   |                                   | 4 Masih adanya masyarakat buang air besar sembarangan                                                                                                                                           |
|                   |                                   | 5 Sub sistem pengolahan setempat yang belum memenuhi kriteria teknis                                                                                                                            |
|                   |                                   | 6 Sub sistem pengangkutan belum memadai dibandingkan dengan volume air limbah dan lumpur tinja                                                                                                  |
|                   |                                   | 7 Kapasitas dan teknologi dalam Sub sistem pengolahan lumpur tinja kurang sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan                                                                |
|                   |                                   | 8 Terbatasnya lahan untuk sub sistem pengolahan setempat skala komunal (2-10 rumah tinggal)                                                                                                     |
|                   |                                   | 9 Belum adanya peraturan penyedotan lumpur tinja swasta                                                                                                                                         |
|                   |                                   | 10 terdapat infrastruktur sanitasi yang sudah terbangun, tetapi terkendala operasionalisasinya                                                                                                  |
|                   |                                   | 11 Tidak adanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), karena sementara masih mempergunakan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)                                                         |
|                   |                                   | 12 Kualitas air limbah yang dianalisis masih diatas baku mutu untuk parameter total coliform, COD dan BOD (untuk IPLT Dulomo Kota Gorontalo) serta untuk IPAL Komunal di Komplek Gah 42         |
|                   |                                   | 13 Tidak ada pengukuran kualitas efluen                                                                                                                                                         |
|                   |                                   | 14 Kurangnya media untuk upaya komunikasi tentang air limbah kepada masyarakat                                                                                                                  |
|                   |                                   | 15 Pengelolaan air limbah domestik menggunakan SPALD Terpusat belum sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penduduk terkait topografi wilayah dan retribusi IPAL Komunal berbasis masyarakat |
|                   | Aspek Partisipasi Masyarakat      | 1 Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman                                                                                                              |
|                   |                                   | 2 terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat                                                                                    |
|                   |                                   | 3 potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah                                                                                               |
|                   |                                   | 4 Belum adanya komunitas sosial untuk menggerakkan masyarakat agar peduli lingkungan                                                                                                            |
|                   |                                   | 5 Praktek pengurasan lumpur tinja sangat rendah setiap tahun                                                                                                                                    |
|                   | Aspek Pendanaan                   | 1 rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah                                    |

| Komponen Sanitasi | Aspek | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | 2 terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat                                                                                                                         |
|                   |       | 3 kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya pengalihan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi                                                                                                         |
|                   |       | 4 rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman                                                                                                                                                                                       |
|                   |       | 5 rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah                                                                                                                                                                      |
|                   |       | 6 Belum optimalnya penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "win-win solution" |
|                   |       | 7 pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas                                                                                                                                     |
|                   |       | 8 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (% APBD murni untuk sanitasi sebesar < 1%)                                                                              |
|                   |       | 9 Rendahnya skala prioritas penanganan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah                                                                                                                                                                                  |

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Tabel-13  
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Persampahan

| Komponen Sanitasi       | Aspek                                  | Isu Strategis                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Persampahan | Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan) | 1 Masih lemahnya penegakan hukum sebagai upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup                         |
|                         |                                        | • Pengoperasian TPA dengan <i>sanitary Landfil</i> belum berjalan                                                    |
|                         |                                        | • Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah (pasal 45 Undang-undang 18 Tahun 2008) |
|                         |                                        | • Pelaporan pengelolaan sampah kepada Kementerian/Lembaga (pasal 41 Permendagri No. 33 Tahun 2010)                   |
|                         |                                        | 2 Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar belum menjadi prioritas                                                      |

| Komponen Sanitasi | Aspek                             | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terakut belum terinformasikan secara sistematis</li> </ul>                                                                                      |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum disusunnya peraturan terkait sanksi hukum pelanggaran sampah</li> </ul>                                                                                                                 |
|                   |                                   | 3 Belum ada peraturan terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah                                                                                                                                                               |
|                   |                                   | 4 Meningkatnya komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi pengangkutan sampah berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini                                                                                          |
|                   |                                   | 5 Meningkatnya kesiapan Kabupaten/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi persampahan                               |
|                   |                                   | 6 Peraturan yang secara khusus mengatur tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah                                                                                            |
|                   |                                   | 7 Belum ada peraturan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah                                                                                                                                          |
|                   |                                   | 8 Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan daerah                                                                                                                                             |
|                   |                                   | 9 Peraturan terkait industri dan pelaku daur ulang sampah                                                                                                                                                                            |
|                   | Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola | 1 Sarana prasarana TPA belum lengkap, sehingga kelembagaan daerah tidak bersedia menerima infrastruktur yang dibangun                                                                                                                |
|                   |                                   | 2 Peranan lembaga/institusi pengelola sampah sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, masih menyatu antara peran operator dan regulator yaitu SKPD Dinas.                                 |
|                   |                                   | 3 Keterpaduan antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah belum diterapkan sesuai amanat Undang-undang (dalam masalah sampah dan produk kemasan, dalam masalah penutupan dan/atau rehabilitasi TPA) |
|                   | Aspek Infrastruktur dan Teknologi | 1 Belum diterapkannya pengurangan sampah dari sumber (produsen) yaitu dengan menerapkan <i>EPR (extended producer responsibility)</i> /kewajiban produsen                                                                            |
|                   |                                   | Upaya masyarakat dalam daur ulang sampah masih terhambat dalam pemasaran hasil produk                                                                                                                                                |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampah belum dipilah sesuai jenis sampah</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pewadahan masih tercampur</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan kualitas wadah sampah terbatas</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                   |                                   | 2 Pengumpulan                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan sampah organik belum dilakukan setiap hari</li> </ul>                                                                                                                             |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan sampah dengan sarana prasarana pengumpul yang belum tersekat dan terpilah</li> </ul>                                                                                              |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih sulitnya pengadaan lokasi lahan untuk TPS 3R</li> </ul>                                                                                                                                 |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat cenderung resisten terhadap pembangunan TPS3R</li> </ul>                                                                                                                           |

| Komponen Sanitasi | Aspek | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat pengumpul sampah masih menggunakan gerobak dorong</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas dan kualitas TPS3R masih rendah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditetapkan lokasi, jumlah dan luasan TPS dalam Rencana Detail Tata Ruang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |       | 3 Pengangkutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan sampah organik belum dilakukan setiap hari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadual pengangkutan sampah yang belum berkoordinasi dengan jadual pengumpulan oleh gerobak/gerobak motor sehingga menyebabkan antrian gerobak/gerobak motor di titik angkut sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas dan kualitas kendaraan pengangkut sampah belum mampu mengangkut volume sampah yang dihasilkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |       | 4 Pengolahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan untuk TPST dan/atau <i>intermediate treatment facility (ITF)</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada implementasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi di Provinsi Gorontalo sebagai <i>best practice</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       | 5 kapasitas pengelolaan sampah sangat terbatas, mengingat TPA sampah regional Talumelito sudah hampir habis kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |       | 6. Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dilakukan penutupan TPA dengan <i>cover soil</i> secara rutin setiap hari sesuai amanat Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan UKL/UPL di TPA yang kurang disiplin menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun resistensi masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulit menyediakan lahan TPS sesuai kebutuhan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jenis dan jumlah alat berat di TPA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan air lindi di TPA masih belum memenuhi syarat teknis untuk dibuang ke badan air</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan gas di TPA belum optimal yang menyebabkan terlepasnya gas metana ke udara bebas, yang berpotensi menjadi penyumbang terbesar efek gas rumah kaca (GRK) yang tidak sejalan dengan <i>clean development mechanism (CDM)</i>. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat peraturan menteri No. 01 Tahun 2014 yang menyebutkan sistem pengoperasian TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.</li> </ul> |
|                   |       | 7 cakupan layanan pengelolaan sampah UPTD TPA Regional Talumelito hanya sampai kepada TPS/TPS3R/TST dan kawasan permukiman belum melakukan pengelolaan sampah sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Komponen Sanitasi | Aspek                        | Isu Strategis |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                              | 8             | Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah                                                                                                          |
|                   |                              | 9             | Sarana prasarana pendukung Tempat Pemrosesan Sampah kurang memadai                                                                                                                   |
|                   |                              | 10            | Tidak adanya alat berat di TPA Kabupaten Bone Bolango                                                                                                                                |
|                   | Aspek Partisipasi Masyarakat | 1             | Perilaku yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang benar                                                                                                                      |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebiasaan belum memilah sampah dan/atau belum mewadahi sesuai jenis sampah (pasal 12 ayat 1 Undang-undang 18 Tahun 2008)</li> </ul>           |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kedisiplinan masyarakat atau warga membuang sampah sesuai aturan yang berlaku</li> </ul>                                                      |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebiasaan lain yang ada di masyarakat tetapi tidak sejalan dengan Undang-undang seperti ‘membakar sampah’</li> </ul>                          |
|                   |                              | 2             | Kedisiplinan dalam pengelolaan sampah (keberlanjutan program pengelolaan sampah)                                                                                                     |
|                   |                              | 3             | Pengetahuan masyarakat tentang sampah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang benar                                                                                    |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku membuang sampah belum terpilah maupun membakar sampah</li> </ul>                                                                     |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan membakar sampah dipandang masyarakat sebagai hal yang biasa dan aman</li> </ul>                                                      |
|                   |                              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan warga tentang 3 R</li> </ul>                                                                                                      |
|                   |                              | 4             | Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah masih rendah                                                                                                        |
|                   | Aspek Pendanaan              |               | Belum ditetapkan standar biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, pengolahan dan pengolahan akhir dalam Rp.ton                                                           |
|                   |                              |               | Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota                                                                                   |
|                   |                              |               | Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah                                                                                  |
|                   |                              |               | Belum dimanfaatkannya dana desa yang diamanatkan oleh Perpres No. 60 Tahun 2014                                                                                                      |
|                   |                              | 1             | Perbandingan jumlah pendapatan biaya jasa pelayanan terhadap anggaran biaya operasional pengelolaan sampah relatif kecil                                                             |
|                   |                              | 2             | Penggunaan anggaran Dinas masih belum optimal, mengingat pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum memenuhi standar operasional sistem <i>sanitary landfill</i> |
|                   |                              | 3             | Tarif retribusi belum memperhitungkan biaya mulai dari sumber sampah sampai ke TPA                                                                                                   |
|                   |                              | 4             | Kerjasama Badan Usaha dalam pengelolaan sampah masih kurang                                                                                                                          |
|                   |                              | 5             | Belum terkelolanya sumber-sumber pendanaan lain dari Badan Usaha seperti CSR                                                                                                         |

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

## 10. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Persampah di Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-14  
Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                                      | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                                        | Strategi                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ASPEK<br>PERATURAN DAN<br>KEBIJAKAN        | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik di Kabupaten/ Kota<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota | <u>Strategi-1</u><br><br>Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                  |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Strategi-2</u><br><br>Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Strategi-3</u><br><br>Menerapkan peraturan perundangan terkait air limbah domestik                                                                                                                |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Strategi-4</u><br><br>Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Strategi-5</u><br><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah                                                                                                          |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Strategi-6</u><br><br>Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi                                                                         |
| 2  | ASPEK<br>KELEMBAGAAN<br>dan TATA<br>KELOLA | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                       | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah                                    |

| No | Aspek                              | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                                     | Strategi                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <u>Sasaran:</u><br><br>Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-2</u><br>Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;                                                                 |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-3</u><br>Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;                                                                                  |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-4</u><br>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;                                                                                                                      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-5</u><br>Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-6</u><br>Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan air limbah                                                                                                           |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-7</u><br>Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator                                                                                                               |
| 3. | ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik<br><br><u>Sasaran:</u><br>Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik | <u>Strategi-1</u><br>Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah  |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-2</u><br>Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-3</u><br>Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                                              |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Strategi-4</u><br>Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.                         |

| No | Aspek                        | Tujuan dan Sasaran                                                                                                       | Strategi                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-5</u><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                                       |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-6</u><br>Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai pihak                                                                                  |
| 4. | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS<br><u>Sasaran:</u><br>Tercapainya target 0% BABS | <u>Strategi-1</u><br>Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik dan peningkatan akses sanitasi aman                                                                |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-2</u><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                                |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-3</u><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat    |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-4</u><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                            |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-5</u><br>Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-6</u><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                                |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-7</u><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Kawasan perkotaan                                                                              |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-8</u><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                            |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-9</u><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                                       |
|    |                              |                                                                                                                          | <u>Strategi-10</u>                                                                                                                                                                                            |

| No | Aspek                             | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-11</u><br>Penyiapan tim yang rutin melakukan pemecuan dan promosi kesehatan                                                                                                                         |
| 5. | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | <u>Tujuan:</u><br><br>Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik | <u>Strategi-1</u><br>Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi                                                                                                                                        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-2</u><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi                                                                                                                              |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-3</u><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                                                                                                   |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-4</u><br><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah                                                                                                                 |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-5</u><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                                                                                                        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-6</u><br>Pembangunan infrastruktur Sanitasi                                                                                                                                                         |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-7</u><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                                                                                    |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-8</u><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-9</u><br>Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                            |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-10</u><br>melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah                                                                                              |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <u>Strategi-11</u>                                                                                                                                                                                              |

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran | Strategi                                                                                                   |
|----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                    | Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan       |
|    |       |                    | <u>Strategi-12</u><br>Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota                         |
|    |       |                    | <u>Strategi-13</u><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                      |
|    |       |                    | <u>Strategi-14</u><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                                      |
|    |       |                    | <u>Strategi-15</u><br>Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

Tabel-15  
Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan  
Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                               | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                          | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ASPEK<br>PERATURAN DAN<br>KEBIJAKAN | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan di Kabupaten/Kota<br><br><u>Sasaran:</u><br>Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota | <u>Strategi-1</u><br>Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-2</u><br>Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-3</u><br>Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta |

| No | Aspek                              | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                   | Strategi                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                          |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-4</u><br>melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-5</u><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                               |
| 2  | ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA  | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota<br><br><u>Sasaran:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul> | <u>Strategi-1</u><br>Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                           |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-2</u><br>Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan persampahan                                                                                                       |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-3</u><br>Penguatan peran dan kapasitas UPTD air limbah domestik regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik                                    |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-4</u><br>Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi                                         |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-5</u><br>Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah                                                          |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-6</u><br>Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan persampahan                                                                                                 |
| 3  | ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan<br><br><u>Sasaran:</u><br>Tercapainya kerjasama                                                                                                      | <u>Strategi-1</u><br>Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat                                                                                       |

| No | Aspek                        | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                    | Strategi                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan                                                                                                |                                                                                                                                                           |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-2</u><br>Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan sanitasi |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-3</u><br>Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan              |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-4</u><br>Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi                                                                       |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-5</u><br>Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar                                               |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-6</u><br><br>Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah                         |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-7</u><br>Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>                                                                                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-8</u><br>Melaksanakan CSR                                                                                                                     |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-9</u><br>Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>                                                                                                |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-10</u><br>Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan                                                                                           |
| 4  | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat | <u>Strategi-1</u><br>Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang                                                             |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-2</u><br>Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga                                                                          |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-3</u><br><br>Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah                                                                               |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-4</u><br>Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah                                                         |

| No | Aspek                                   | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                            | Strategi                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | rumah tangga                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | ASPEK<br>INFRASTRUKTUR<br>DAN TEKNOLOGI | <p><u>Tujuan:</u></p> <p>Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan</p> <p><u>Sasaran:</u></p> <p>Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak</p> | <p><u>Strategi-1</u></p> <p>Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi</p>                                                                                                                             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-2</u><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi                                                                                                                              |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-3</u><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                                                                                                   |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-4</u><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                                     |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-5</u><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                                                                                                        |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-6</u><br>Pembangunan infrastruktur Sanitasi                                                                                                                                                         |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-7</u><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                                                                                    |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-8</u><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-9</u><br>Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                                                       |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-10</u><br><br>Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi                                                                                                                             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-11</u><br>melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                              |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                               | <u>Strategi-12</u><br>Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem                                                                                                                        |

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran | Strategi                                                                              |
|----|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                    | pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir                                           |
|    |       |                    | <u>Strategi-13</u><br>Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota    |
|    |       |                    | <u>Strategi-14</u><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan |
|    |       |                    | <u>Strategi-15</u><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                 |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

## 11. Skenario Pengelolaan

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Persampahan di Provinsi Gorontalo dengan target akses aman Sanitasi Tahun 2030 diharapkan dapat dicapai melalui beberapa tujuan dan sasaran, yaitu:

- a) Pemenuhan akses sanitasi yang aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim
- b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- c) Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti sanitasi aman dan pengelolaan persampahan

Tabel-16  
Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah  
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                                          | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|       |                                                                   | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| A.    | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)                       |                       |        |        |        |         |
| 1.    | Layak                                                             | 92,50%                | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2     | Aman                                                              | 4,88%                 | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 2.a   | SPALD Setempat                                                    | 4,03%                 | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |
| 2.b   | SPALD Terpusat                                                    | 0,83%                 | 1,41%  | 1,91%  | 2,41%  | 3,04%   |
| 2.b.1 | <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> | 0,66%                 | 1,13%  | 1,53%  | 1,93%  | 2,43%   |
| 2.b.2 | <i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>              | 0,13%                 | 0,23%  | 0,31%  | 0,39%  | 0,49%   |
| 3     | BABs                                                              | 7,23%                 | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  | 1,90%   |
| B.    | Target Akses Sanitasi persampahan)                                |                       |        |        |        |         |
| 5     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah         | 50,05%                | 56,62% | 63,19% | 69,75% | 85,00%  |
| 5.a   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)                  | 30,03%                | 32,77% | 35,50% | 38,23% | 49,18%  |
| 5.b   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                     | 20,02%                | 23,85% | 27,69% | 31,53% | 35,82%  |
| 5.b.1 | sampah terdaur ulang                                              | 6,12%                 | 7,58%  | 9,04%  | 10,51% | 12,09%  |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

## 12. Rencana Aksi Sanitasi

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;

Tabel-17  
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Sampah)  
Tahun 2025-2029

**TUJUAN :** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah di sumber, menurunkan timbulan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah, meningkatkan sampah yang terolah menjadi bahan baku, meningkatkan sampah yang termanfaatkan menjadi energi

**SASARAN :** Rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 62,98% pada Tahun 2029, sampah residu tersisa di LUR sebesar 34,79%, sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah = 31,52% dan sampah terdaur ulang = 12,79 % pada Tahun 2029

**STRATEGI :** Pemenuhan Akses aman dan layanan berkelanjutan

| Kebijakan                                                                                                                                                           | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ASPEK STANDAR DAN REGULASI</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| a. melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah | 1 Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota |
|                                                                                                                                                                     | 2 Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     | 3 Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi                                                                                                                     |
| b. Penyusunan sistem informasi pengelolaan persampahan Provinsi Gorontalo                                                                                           | 1 Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     | 2 Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah                                                              |
|                                                                                                                                                                     | 3 Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan                                                                                     |

| Kebijakan                                                                                                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | sampah                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            | 4 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan <i>EPR (extended producer Responsibility)</i> atau kewajiban produsen pengelolaan sampah   |
|                                                                                                                                            | 5 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan <i>CSR (corporate social responsibility)</i> untuk pengelolaan sampah                      |
| c. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1 Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah                                          |
|                                                                                                                                            | 2 Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran                                                                      |
|                                                                                                                                            | 3 Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah                                          |
| d. Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah                                                                          | 1 Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu |
| e. Penguatan penegakan hukum                                                                                                               | 2 Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten                          |
| f. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga  | 1 menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah                                |
|                                                                                                                                            | 2 Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah                                               |
|                                                                                                                                            | 3 pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah                                   |
|                                                                                                                                            | 4 pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah                                                         |
|                                                                                                                                            | 5 pengembangan SOP dalam pengurangan sampah                                                                                           |
| <b>2 ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| a. Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi                | 1 Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah                             |
|                                                                                                                                            | 2 Pembentukan badan koordinasi                                                                                                        |

| Kebijakan                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | pengelolaan sampah provinsi                                                                                                                                         |
| b. Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah | 1 Penyusunan nomenklatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota                |
| c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah                    | 1 Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah                                                                                                  |
| d. Peningkatan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan                                       | 1 Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                                       |
| e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder                                                | 1 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah                                                                                                          |
| f. Memisahkan fungsi /unit regulator dan operator                                                         | 1 meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah                                                                             |
| g. Peningkatan komitmen Kepala Daerah                                                                     | 1 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                 |
|                                                                                                           | 2 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                                                                                               |
|                                                                                                           | 3 Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                   |
|                                                                                                           | 4 Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi                                                                                                           |
|                                                                                                           | 5 koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan |
|                                                                                                           | 6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi                                               |
| h. Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan                                                           | 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                                                                           |
|                                                                                                           | 2 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                                                                                   |
|                                                                                                           | 3 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                      |
|                                                                                                           | 4 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                  |
|                                                                                                           | 5 Perencanaan Kawasan Strategis                                                                                                                                     |

| Kebijakan                                                                                                                                                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                            | 6 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | 7 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                               |
| <b>3 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| a. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah                                                                                | 1 Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton          |
|                                                                                                                                                                                            | 2 mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota                                                                                         |
| b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan provinsi serta daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1. Mengalokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota |
|                                                                                                                                                                                            | 2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                            | 3. pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah                                                                                                                                         |
| c. Melaksanakan extended producer responsibility                                                                                                                                           | 1 pemanfaatan program Extended Producer Responsibility (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 2 Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            | 3 Pengaturan standarisasi produk daur ulang                                                                                                                                               |
| d. Melaksanakan CSR                                                                                                                                                                        | 1 Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                            | 2 memperkuat komitmen dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas                                                                        |
|                                                                                                                                                                                            | 3 memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah                                                                                        |
| e. Pengkajian ulang terkait <i>Tipping Fee</i> pada TPA Regional                                                                                                                           | 1 Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah                                                                                                              |

| Kebijakan |                                                                                                                                                            | Rencana Aksi |                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f.        | Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan                                                                                                                  | 1            | Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 2            | Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                            | 3            | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                            | 4            | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |
|           |                                                                                                                                                            | 5            | Fasilitasi Kersa Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 6            | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                            | 7            | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                        |
| <b>4</b>  | <b>ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT</b>                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |
| a.        | Perubahan paradigma pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                                                | 1            | Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah                                                           |
| b.        | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 2            | Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial                                                         |
| c.        | Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)                                                                          | 3.           | Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah                                                                               |
| d.        | Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga          | 4.           | Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                            | 5            | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat                                                                           |
|           |                                                                                                                                                            | 6            | Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 7            | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                                 |
|           |                                                                                                                                                            | 8            | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                |
| <b>5</b>  | <b>ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI</b>                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                 |
| a         | Menyusun Rencana Induk Sistem                                                                                                                              | 1            | Penyusunan rencana induk sistem                                                                                                                 |

| Kebijakan                                                                                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                        | pengelolaan sampah                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | 2 Penyusunan reuiu rencana induk sistem pengelolaan sampah                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | 3 membangun sistem informasi pengurangan sampah                                                                                           |
| b Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi                                                                                                               | 1 pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | 2 pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 3 Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah                                                                                               |
| c. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan | 1 pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | 2 pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu                                                                |
|                                                                                                                                                                           | 3 penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | 4 melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di sumber                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 5 menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 6 memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah                                                                             |
| d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah                                                                               | 1 penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah            |
|                                                                                                                                                                           | 2 Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan                                                                                 |
| e. Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir                                                         | 1 penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai denan pemrosesan akhir                               |
| f. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota                                                                        | 1 pelaksanaan pilot projec sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango |
| g. meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                                                                                                        | 1 Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah pusat             |
| h. Pengembangan infrastruktur dan                                                                                                                                         | 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan                                                                                                     |

| Kebijakan                                                                                                                        | Rencana Aksi |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| layanan sanitasi                                                                                                                 |              | Persampahan Regional                                                                                             |
|                                                                                                                                  | 2            | Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                |
|                                                                                                                                  | 3            | Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                     |
|                                                                                                                                  | 4            | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                    |
|                                                                                                                                  | 5            | Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                     |
|                                                                                                                                  | 6            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan                                                                      |
|                                                                                                                                  | 7            | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                                                            |
| i. Meningkatkan TPA Regional Talumelito                                                                                          | 1            | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                                 |
|                                                                                                                                  | 2            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                   |
| j. Mengembangkan TPA ke arah <i>sanitary landfill/controlled landfill</i>                                                        | 1            | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional               |
|                                                                                                                                  | 2            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                           |
|                                                                                                                                  | 3            | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                               |
| k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk aplikasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna dan berwawasan lingkungan | 1            | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |
|                                                                                                                                  | 2            | Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                       |
|                                                                                                                                  | 3            | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi         |

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

---

### 5.3.1 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel-18  
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)  
Tahun 2025-2029

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN   | : | Pencapaian akses aman Tahun 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SASARAN  | : | Rumah tangga dengan akses layak sebesar 100,00%, akses aman sebesar 17,27%, SPALD Setempat sebesar 14,33%, SPALD Terpusat sebesar 3,04%, SPALD Terpusat berbasis institusi sebesar 2,43% dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat sebesar 0,49%, BABs sebesar 1,90%, desa stop BABs sebesar 53% dan desa STBM sebesar 11,23% pada Tahun 2029 |
| STRATEGI | : | Peningkatan sarana prasarana SPALD-T dan SPALD-S, perkuatan fungsi regulator dan operator, melengkapi perangkat peraturan, peningkatan alokasi dana pembangunan air limbah, akses dan peningkatan peran masyarakat dan swasta                                                                                                              |

| Kebijakan                                                                                                                                                                                | Rencana Aksi                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                             | 1 Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat; |
| b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                             | 1 Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);                                              |
| c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat | 1 Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS ( <i>Community Lead Total Sanitation</i> ) di kawasan perdesaan;                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 2 Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang;                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 3 Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | 4 Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan                                                                                  |

| Kebijakan                                                                                                                                                                                   | Rencana Aksi                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.                                                                                        |
| d. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                            | 1 Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                      |
| e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                                       | 1 Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;                                                              |
|                                                                                                                                                                                             | 2 Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                             | 3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;                                                |
|                                                                                                                                                                                             | 4 Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman;                                                                                      |
| f. Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota | 1 Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..                      |
| 2 <b>ASPEK STANDAR DAN REGULASI</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| a. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                               | 1 Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                             | 2 Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi |
|                                                                                                                                                                                             | 3 Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 4 Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                                                                             |
| b. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait                                                                                                                                  | 1 Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam                                                                                                             |

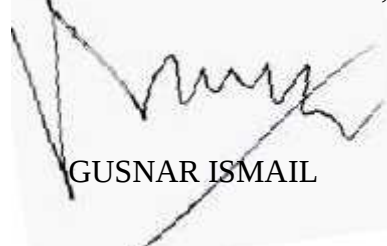
| Kebijakan                                                                                                                                                                      | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                                             | pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                                                                                   |
| c. Menerapkan peraturan perundangan.                                                                                                                                           | 1 Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | 2 Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                | 3 Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;                                |
|                                                                                                                                                                                | 4 Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota                                                             |
|                                                                                                                                                                                | 5 Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah                                                                                                                                           |
| d. Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi | 1 Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                | 2 Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                | 3 Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;                                                       |
|                                                                                                                                                                                | 4 Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.                                              |
| 3 <b>ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| a. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;                                                                   | 1 Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;                                                                                   |
| b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;                                                                                    | 1 Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;                                                                  |
| c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;                                                                                                                        | 1 Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas; |

| Kebijakan                                                                                                                                                                             | Rencana Aksi                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Mendorong peningkatan kemauan politik ( <i>political will</i> ) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. | 1 Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                       |
| e. Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah                                           | 1 Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 2 Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;                                            |
|                                                                                                                                                                                       | 3 Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;                               |
|                                                                                                                                                                                       | 4 Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses ( <i>best practices</i> ) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman                            |
| 4 <b>ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| a. Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan sanitasi                         | 1 Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;                       |
| b. Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan                                     | 2 Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;                          |
| c. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                                                       | 1 Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. |
| d. Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.                                  | 1 Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 2 Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       | 3 Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman                                            |

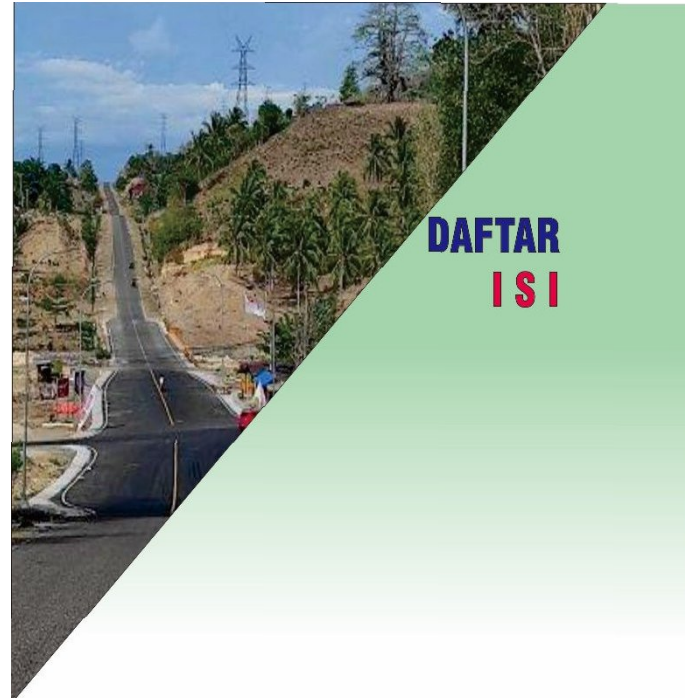
| Kebijakan                                                                                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                     | 1 Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | 2 Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD                                                                                                                                                                                        |
| 5 <b>ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan | 1. Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi dan masyarakat, serta sarana pendukungnya di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                         |
|                                                                                                                                                                           | 2. Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | 3. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           | 4. Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan padat penduduk di perkotaan) ataupun septik tank yang sesuai standar |
|                                                                                                                                                                           | 5. Pemanfaatan IoT ( <i>internet of things</i> ) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi                                                                                                                                                                  |

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

GUBERNUR GORONTALO,



GUSNAR ISMAIL



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

|     |                                            |   |   |    |
|-----|--------------------------------------------|---|---|----|
| 1.1 | Latar Belakang .....                       | 1 | - | 1  |
| 1.2 | Tujuan, manfaat dan Sasaran.....           | 1 | - | 4  |
| 1.3 | Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan..... | 1 | - | 6  |
| 1.4 | Ruang Lingkup .....                        | 1 | - | 12 |
| 1.5 | Sistematika Penulisan Laporan .....        | 1 | - | 13 |

## **BAB 2 PROFIL SANITASI PROVINSI**

|       |                                                           |   |   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|---|---|----|
| 2.1   | Gambaran Umum .....                                       | 2 | - | 1  |
| 2.1.1 | Gambaran Wilayah Provinsi .....                           | 2 | - | 1  |
| 2.1.2 | Akses Sanitasi Layak dan Aman Provinsi ....               | 2 | - | 23 |
| 2.2   | Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.....  | 2 | - | 43 |
| 2.2.1 | Umum .....                                                | 2 | - | 43 |
| 2.3   | Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi .....       | 2 | - | 75 |
| 2.3.1 | Pengelolaan Persampahan.....                              | 2 | - | 80 |
| 2.3.2 | Pengelolaan Air Limbah Domestik.....                      | 2 | - | 82 |
| 2.4   | Permasalahan Pengelolaan Sanitasi.....                    | 2 | - | 86 |
| 2.4.1 | Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota ..... | 2 | - | 86 |
| 2.4.2 | Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi.....        | 2 | - | 95 |
| 2.5   | Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi .....                  | 2 | - | 99 |

### **BAB 3 ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN**

|     |                                              |   |   |    |
|-----|----------------------------------------------|---|---|----|
| 3.1 | Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi .....     | 3 | - | 2  |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi..... | 3 | - | 14 |

### **BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

|     |                                                     |   |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------|---|---|----|
| 4.1 | Strategi Pengelolaan Sanitasi .....                 | 4 | - | 1  |
|     | 4.1.1 Strategi Pengelolaan Persampahan.....         | 4 | - | 1  |
|     | 4.1.2 Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik..... | 4 | - | 8  |
| 4.2 | Kebijakan Pengelolaan Sanitasi.....                 | 4 | - | 16 |
|     | 4.2.1 Kebijakan Pengelolaan Persampahan.....        | 4 | - | 18 |
|     | 4.2.2 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik..   | 4 | - | 26 |

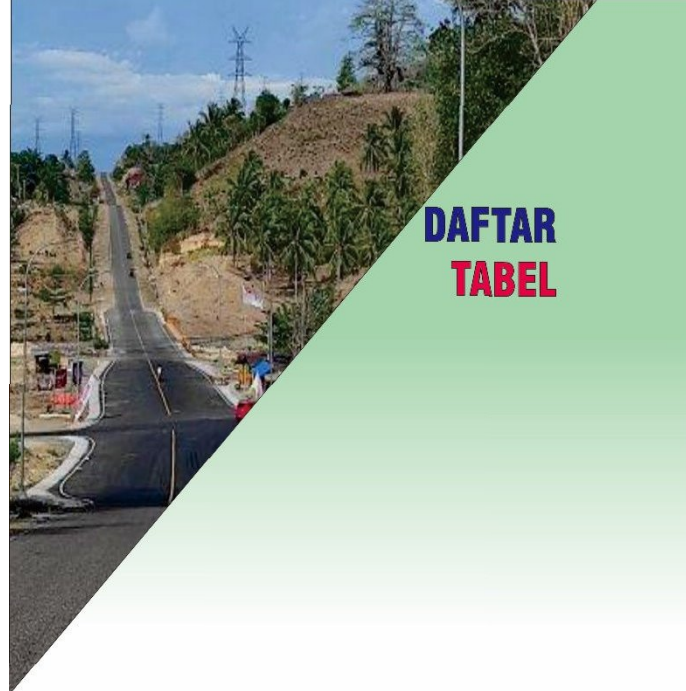
### **BAB 5 RENCANA AKSI PENGELOLAAN SANITASI**

|     |                                                         |   |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------|---|---|----|
| 5.1 | Skenario Pengelolaan .....                              | 5 | - | 2  |
| 5.2 | Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo.....           | 5 | - | 4  |
|     | 5.2.1 Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan.....         | 5 | - | 4  |
|     | 5.2.2 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik..... | 5 | - | 13 |
| 5.3 | Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo .....  | 5 | - | 19 |

### **BAB 6 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN**

|     |                                                                                                                           |   |   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6.1 | Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan ..... | 6 | - | 1 |
| 6.2 | Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan .....                                                   | 6 | - | 7 |

### **BAB 7 PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

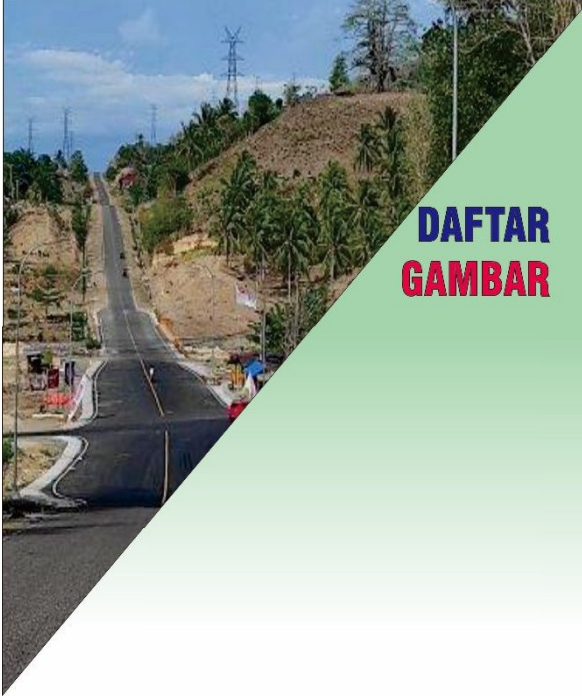
|            |                                                                                                                                                                     |   |   |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| Tabel 2.1  | Ibukota, Luas dan Prosentase Luas<br>Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo<br>Tahun 2023 .....                                                                       | 2 | - | 3  |
| Tabel 2.2  | Jumlah kecamatan, Desa/Kelurahan<br>Masing-masing Kabupaten/kota<br>di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....                                                          | 2 | - | 4  |
| Tabel 2.3  | Data Dasar <i>Roadmap</i> Sanitasi<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....                                                                                           | 2 | - | 7  |
| Tabel 2.4  | Rekapitulasi Data Dasar <i>Roadmap</i> Sanitasi<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....                                                                              | 2 | - | 12 |
| Tabel 2.5  | Nilai-nilai Standar yang Digunakan untuk Proses<br>Perhitungan awal <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP)<br>Gorontalo Tahun 2024 .....                            | 2 | - | 13 |
| Tabel 2.6  | Hasil Perhitungan Awal sebagai Data Dasar<br><i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP)<br>Gorontalo Tahun 2024 .....                                                   | 2 | - | 17 |
| Tabel 2.7  | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Awal<br>Berdasarkan nilai-nilai Standar yang digunakan<br>Dalam <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP)<br>Gorontalo Tahun 2024 ..... | 2 | - | 22 |
| Tabel 2.8  | Target Akses Sanitasi Berdasarkan Draft RPJMN<br>Tahun 2025-2029 .....                                                                                              | 2 | - | 23 |
| Tabel 2.9  | Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo<br>Tahun 2024-2030 .....                                                                                                   | 2 | - | 24 |
| Tabel 2.10 | Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                                                                         | 2 | - | 26 |
| Tabel 2.11 | Rekapitulasi Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                                                            | 2 | - | 27 |
| Tabel 2.12 | Perbandingan Capaian dan Target Akses Sanitasi<br>(air limbah domestik)<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                                      | 2 | - | 28 |

|            |                                                                                                                                |   |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Tabel 2.13 | Sebaran Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) Berdasarkan Draft RPJMN Tahun 2025-2029 .....                              | 2 | - 29 |
| Tabel 2.14 | Volume Sampah Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ..                                         | 2 | - 30 |
| Tabel 2.15 | Volume Sampah Perkotaan Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                            | 2 | - 31 |
| Tabel 2.16 | Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                     | 2 | - 32 |
| Tabel 2.17 | Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pengurangan Sampah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                       | 2 | - 33 |
| Tabel 2.18 | Rekapitulasi Sampah yang Dikelola (Proses Pengurangan Sampah) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                              | 2 | - 36 |
| Tabel 2.19 | Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                     | 2 | - 37 |
| Tabel 2.20 | Target dan Sebaran Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                                     | 2 | - 38 |
| Tabel 2.21 | Target dan Sebaran Akses Sanitasi Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                      | 2 | - 39 |
| Tabel 2.22 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pengaturan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik ..... | 2 | - 44 |
| Tabel 2.23 | Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                              | 2 | - 46 |
| Tabel 2.24 | Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                      | 2 | - 47 |
| Tabel 2.25 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Kelembagaan Pengelolaan Persampahan .....                        | 2 | - 48 |
| Tabel 2.26 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik .....                | 2 | - 50 |
| Tabel 2.27 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengelolaan TPA) ...                    | 2 | - 52 |

|            |                                                                                                                                            |   |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Tabel 2.28 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (TPST/Pusat Daur Ulang (PDU) .....                   | 2 | - 53 |
| Tabel 2.29 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Bank Sampah Induk/unit) .....                       | 2 | - 54 |
| Tabel 2.30 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting Aspek Infrastruktur Eksisting (TPS-3R) .....         | 2 | - 55 |
| Tabel 2.31 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Sektor Informal yang Telah Bekerjasama) .....       | 2 | - 55 |
| Tabel 2.32 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengangkutan Sampah) .....                          | 2 | - 56 |
| Tabel 2.33 | Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-T) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                | 2 | - 58 |
| Tabel 2.34 | Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                | 2 | - 59 |
| Tabel 2.35 | Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) (BABs dan IPLT) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .... | 2 | - 60 |
| Tabel 2.36 | Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengangkutan .....                                           | 2 | - 61 |
| Tabel 2.37 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Perilaku Masyarakat (pengelolaan persampahan dan air limbah domestik) .....  | 2 | - 62 |
| Tabel 2.38 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pendanaan Persampahan (pendanaan pemerintah) .....                           | 2 | - 65 |
| Tabel 2.39 | Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (pendanaan pemerintah) .....       | 2 | - 68 |
| Tabel 2.40 | Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                                      | 2 | - 71 |
| Tabel 2.41 | Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....                                              | 2 | - 73 |
| Tabel 2.42 | Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                                                               | 2 | - 75 |

|            |                                                                                                                                         |   |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Tabel 2.43 | Kewenangan Provinsi Berdasarkan Tata Ruang .....                                                                                        | 2 | - 76 |
| Tabel 2.44 | Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi<br>Kewenangan Provinsi .....                                                                     | 2 | - 78 |
| Tabel 2.45 | Peraturan Tentang Pengelolaan Persampahan .....                                                                                         | 2 | - 80 |
| Tabel 2.46 | Kelembagaan Persampahan Provinsi .....                                                                                                  | 2 | - 80 |
| Tabel 2.47 | Infrastruktur Persampahan Provinsi .....                                                                                                | 2 | - 80 |
| Tabel 2.48 | Pendanaan Persampahan Provinsi .....                                                                                                    | 2 | - 82 |
| Tabel 2.49 | Peraturan Tentang Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik Provinsi .....                                                                     | 2 | - 83 |
| Tabel 2.50 | Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik<br>Provinsi .....                                                                                 | 2 | - 83 |
| Tabel 2.51 | Infrastruktur Air Limbah Provinsi.....                                                                                                  | 2 | - 83 |
| Tabel 2.52 | Pendanaan Air Limbah Provinsi .....                                                                                                     | 2 | - 85 |
| Tabel 2.53 | Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi<br>Kabupaten/kota .....                                                                      | 2 | - 87 |
| Tabel 2.54 | Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi<br>Kabupaten/kota .....                                                                   | 2 | - 88 |
| Tabel 2.55 | Permasalahan Infrastruktur Sanitasi<br>Kabupaten/kota .....                                                                             | 2 | - 90 |
| Tabel 2.56 | Permasalahan Perilaku Masyarakat<br>Kabupaten/kota .....                                                                                | 2 | - 93 |
| Tabel 2.57 | Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi<br>Kabupaten/kota .....                                                                     | 2 | - 93 |
| Tabel 2.58 | Permasalahan Pengelolaan Persampahan<br>Provinsi .....                                                                                  | 2 | - 95 |
| Tabel 2.59 | Permasalahan Pengelolaan Air Limbah<br>Provinsi .....                                                                                   | 2 | - 98 |
| Tabel 3.1  | Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi (ALD) .....                                                                                          | 3 | - 3  |
| Tabel 3.2  | Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Sampah                                                                                         | 3 | - 8  |
| Tabel 3.3  | Sebaran Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo<br>Tahun 2025-2029<br>Berdasarkan data RPD Provinsi Gorontalo<br>Tahun 2025-2026 ..... | 3 | - 15 |
| Tabel 3.4  | Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo<br>Tahun 2025-2029 .....                                                                       | 3 | - 17 |
| Tabel 3.5  | Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029<br>Berdasarkan Capaian Eksisting .....                 | 3 | - 18 |
| Tabel 3.6  | Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah<br>Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029<br>Berdasarkan Capaian Eksisting .....                  | 3 | - 19 |

|           |                                                                                                                  |   |   |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| Tabel 4.1 | Penyusunan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan                                                               |   |   |    |
|           | Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                                                         | 4 | - | 1  |
| Tabel 4.2 | Penyusunan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                       |   |   |    |
|           | Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                                                         | 4 | - | 14 |
| Tabel 4.3 | Kebijakan Sistem Pengelolaan Persampahan Dalam Roadmap Sanitasi                                                  |   |   |    |
|           | Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                                                         | 4 | - | 18 |
| Tabel 4.4 | Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Roadmap Sanitasi                                          |   |   |    |
|           | Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 .....                                                                         | 4 | - | 26 |
| Tabel 5.1 | Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo                                  |   |   |    |
|           | Tahun 2025-2029 .....                                                                                            | 5 | - | 3  |
| Tabel 5.2 | Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Persampahan)                                               |   |   |    |
|           | Tahun 2025-2029 .....                                                                                            | 5 | - | 4  |
| Tabel 5.3 | Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)                                       |   |   |    |
|           | Tahun 2025-2029 .....                                                                                            | 5 | - | 13 |
| Tabel 5.4 | Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Persampahan)                                       |   |   |    |
|           | Tahun 2025-2029 .....                                                                                            | 5 | - | 20 |
| Tabel 5.5 | Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)                               |   |   |    |
|           | Tahun 2025-2029 .....                                                                                            | 5 | - | 45 |
| Tabel 6.1 | Kodifikasi dan Nomen Klatur .....                                                                                | 6 | - | 1  |
| Tabel 6.2 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ..... | 6 | - | 8  |



**DAFTAR  
GAMBAR**

|            |                                                                                      |   |   |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| Gambar 2.1 | Grafik Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023   | 2 | - | 4  |
| Gambar 2.2 | Peta Administrasi Provinsi Gorontalo .....                                           | 2 | - | 5  |
| Gambar 2.3 | Grafik Prosentase Penanganan Sampah Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....           | 2 | - | 31 |
| Gambar 2.4 | Grafik Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ..... | 2 | - | 32 |
| Gambar 2.5 | Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....          | 2 | - | 72 |
| Gambar 2.6 | Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....  | 2 | - | 74 |
| Gambar 2.7 | Wilayah Pelayanan Penanganan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .....    | 2 | - | 77 |
| Gambar 3.1 | Perumusan Awal Isu Strategis Pemenuhan Akses Sanitasi .....                          | 3 | - | 2  |
| Gambar 3.2 | Skenario Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo .....                              | 3 | - | 14 |
| Gambar 4.1 | Hirarki dalam Pengelolaan Sampah .....                                               | 4 | - | 25 |



# **bab-1**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program yang dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk mewujudkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan), merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *(tidak termasuk pasal yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)*).

Kewenangan Pemerintah Provinsi dimuat dalam lampiran undang-undang tersebut, yang terdiri dari:

- (1) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- (2) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

*(sumber : lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf C Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, angka 3 (halaman 10, sheet 323) : pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, angka 4 (halaman 11, sheet 324 : pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional).*



Pelaksanaan program PPSP telah memasuki tahun ke-14 (empat belas) sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, dan berhasil meningkatkan pelayanan

sanitasi secara signifikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, dimana ringkasan program PPSP diuraikan dibawah ini.

- (1) PPSP-I, Tahun 2010-2014, sebanyak 444 kabupaten/kota yang ikut dalam program dan memiliki dokumen perencanaan SSK (pencapaian target MDG's sebesar 62,4% di akhir Tahun 2015
- (2) PPSP-II, Tahun 2015-2019 difokuskan pada implementasi dokumen perencanaan sanitasi yang telah disusun oleh kabupaten/kota serta mempercepat penyusunan dokumen pemutakhiran SSK dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan mendukung pemenuhan target *universal access* sanitasi yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019 dengan target 100% akses sanitasi (85% akses layak dan 15% akses dasar).
- (3) PPSP-III, Tahun 2020-2024, dilaksanakan dengan pendekatan percepatan peningkatan akses sanitasi dan kualitasnya, serta penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat melalui fasilitasi berjenjang dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komitmen Kepala Daerah dan mendukung pemenuhan target *universal access* sanitasi yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dengan target 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) untuk air limbah domestik dan 100% sampah perkotaan (20% pengurangan sampah dan 80% penanganan sampah).

Perlu peningkatan layanan sanitasi dalam rangka mencapai target sanitasi layak dan aman 100% pada tahun 2030 sebagaimana termaktub dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk hal tersebut dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal:

- (1) meningkatkan peran fasilitasi dalam Pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di kabupaten/kota;
- (2) memaksimalkan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya dalam pembangunan sanitasi;
- (3) memprioritaskan alokasi pembiayaan pembangunan sanitasi melalui APBD provinsi.

Untuk memperoleh dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua, diperlukan komitmen Pemerintah Provinsi agar melengkapi peraturan/kebijakan di bidang sanitasi sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kebutuhan dukungan kebijakan tersebut adalah penyusunan dokumen perencanaan strategis sanitasi provinsi dalam bentuk Roadmap Sanitasi Provinsi.

Dalam dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebesar 70,00% (halaman 299), 75% pada Tahun 2025 dan 74% pada Tahun 2026.

Dengan target 100% akses sanitasi layak pada Tahun 2030 (draft RPJMN Tahun 2025–2029), terdapat GAP sebesar 30% (dihitung dari target 2030 dan eksisting Provinsi Gorontalo sebesar 70%), maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi perlu melakukan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo yang telah disusun tahun 2014

## **1.2 Tujuan, Manfaat dan Sasaran**

Penyusunan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan dan implementasi sanitasi di provinsi Gorontalo, dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan Pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan rencana pengembangan sanitasi 5 (lima) tahun kedepan
- 2) Menetapkan arah kebijakan prioritas dalam menyelenggarakan pengelolaan Pembangunan sanitasi secara komphrehensif dan terintegrasi guna percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dimanfaatkan untuk :

- 1) Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan para pihak yang terlibat dalam pembangunan sanitasi di Provinsi.
- 2) Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan strategi kebijakan dan koordinasi pembangunan sanitasi guna melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengaturan bagi pencapaian target layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi.
- 3) Menentukan prioritas dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi di wilayahnya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun konsolidasi sumber pendanaan APBN, Hibah donor, CSR, Ziswaf / Dana Keagamaan, dan pendanaan alternatif lainnya.
- 4) Menjadi bahan dalam melakukan input terhadap penyempurnaan rencana daerah atau integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan formal Provinsi.
- 5) Rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

Sedangkan sasaran pengguna Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi, yang meliputi :

- 1) Pemerintah Provinsi Gorontalo
- 2) Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
- 3) Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo
- 4) Pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat.

### **1.3 Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan**

Dasar pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, sebagaimana tertuang dalam pasal 1, 2, 4, 9 dan 12.

Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, di antaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), yang dirubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (pasal-pasal yang dirubah : pasal 1, 6, 8-11, 14, 17-18, 20, 22-23, 25-26, 35, 37, 48, 60, 61-62, 65, 69-71, 73-74 tambahan pasal 14A, 34 A *pasal 24, 27, 49-54, 72 (dihapus)*,

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang dirubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (pasal-pasal yang dirubah : pasal 1, 24, 26-28,32, 34-35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71-73, 76,77, 82, 88, 109, 112-113, *pasal 29-31, 36, 38, 40, 79, 102, 93, 110 (dihapus)*,
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

## **ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal-pasal yang diubah adalah Pasal 26, 29, 33, 35-36, 40, 42, 53, 55, 107, 109, 114, 134, 150, 151, 153 dan penambahan BAB IX A, Pasal 117 A, Pasal 117 B)

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

- 11) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041).
- 12) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219).
- 13) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik

## **ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
- 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456)
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024
- 24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

## **ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 26) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dicabut dengan [Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2023](#) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
- 28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK. 07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah Di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 231)
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 31) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018
- 32) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

## 1.4 Ruang Lingkup

Lingkup Dokumen Pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo sesuai dengan Permendagri 87 Tahun 2022 dibatasi hanya 2 (dua) bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Pasal 4, angka (1) dan Pasal 6 angka (1).

Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

- 1) **Aspek Regulasi**, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.
- 2) **Aspek Kelembagaan**, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
- 3) **Aspek Infrastruktur**, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
- 4) **Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat**, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
- 5) **Aspek Pendanaan**, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

Pengkajian kelima aspek yang melingkupi pengelolaan pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) menggunakan sumber data yang termutakhirkan guna menghasilkan dokumen roadmap sanitasi provinsi yang berlaku selama lima (5) tahun.

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri 87 Tahun 2022, dokumen Roadmap Sanitasi paling sedikit memuat :

- 1) Profil Pembangunan Sanitasi Provinsi,
- 2) Target, tujuan dan sasaran Pembangunan Sanitasi provinsi
- 3) Strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Provinsi
- 4) Program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi provinsi
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

## **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Laporan Akhir *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu :

### **Bab-1 Pendahuluan**

Bab-1 dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo akan terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, manfaat dan sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup dan sistematika Laporan Antara

### **Bab-2 Profil Sanitasi Provinsi**

Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo yang diuraikan pada bab 2 akan menjelaskan tentang Gambaran umum (gambaran wilayah provinsi, akses sanitasi layak dan aman provinsi), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota (umum, pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah provinsi

(pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik), permasalahan pengelolaan sanitasi (pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pengelolaan sanitasi oleh pemerintah provinsi) dan bagian terakhir menguraikan tentang Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi.

### **Bab-3 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran**

Bab-3 dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menuraikan isu strategis pengelolaan sanitasi, tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi

### **Bab-4 Kebijakan dan Strategi**

Kebijakan dan Strategi dalam bab 4 Road Map Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menguraikan strategi pengelolaan persampahan, strategi pengelolaan air limbah domestik, kebijakan pengelolaan persampahan dan kebijakan pengelolaan air limbah Domestik

### **Bab-5 Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi**

Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, bab 5 rencana aksi pengelolaan sanitasi akan menguraikan tentang skenario pengelolaan, rencana aksi dan alokasi rencana aksi pengelolaan sanitasi

### **Bab-6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan**

Bab 6 dalam pekerjaan ini akan menguraikan tentang penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, serta penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan

### **Bab-7 Penutup**

Kesimpulan dan rekomendasi akan menjadi bagian akhir dari pekerjaan *road map* sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Dinas LHK Provinsi Gorontalo  
Aksi gerebek sampah, wilayah pesisir pantai wisata Tamendao,  
Leato Utara, Dumbo Raya Kota Gorontalo  
Sumber foto :  
Info Publik,  
Oleh MC PROV GORONTALO,  
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:58 WIB –  
Redaktur: Kusnadi





## **bab-2**

# **PROFIL SANITASI PROVINSI**

## 2.1 Gambaran Umum

### 2.1.1 Gambaran Wilayah Provinsi

#### Geografis dan Administratif

Provinsi Gorontalo terletak antara 0°19' - 0°57' Lintang Utara dan 121°23'

- 125°14' Bujur

Timur, dimana lokasi ini berbatasan langsung dengan 2 (dua) provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan



Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur, sementara di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu

- a) Kabupaten Boalemo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)
- b) Kabupaten Gorontalo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)
- c) Kabupaten Pohuwato (Undang-undang No. 6 Tahun 2003)
- d) Kabupaten Bone Bolango (Undang-undang No. 6 Tahun 2003)
- e) Kabupaten Gorontalo Utara (Undang-undang No. 11 Tahun 2007)
- f) Kota Gorontalo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)

Terkait perbedaan luas wilayah Provinsi Gorontalo masing-masing Kabupaten/kota dalam laporan ini diuraikan beberapa peraturan dan informasi yang akurat terkait luas wilayah, diantaranya :

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km<sup>2</sup> atau sebesar 0,64% dari luas wilayah Indonesia.
- b) Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, tabel 1.1.1 halaman 12 , *sheet 64*, menjelaskan bahwa luas Provinsi Gorontalo adalah 12.025,147 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari :

| KABUPATEN/<br>KOTA        | LUAS (km <sup>2</sup> ) |
|---------------------------|-------------------------|
| Kabupaten Boalemo         | 1.830,865               |
| Kabupaten Bone Bolango    | 1.888,998               |
| Kabupaten Gorontalo       | 2.160,364               |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 1.703,628               |
| Kabupaten Pohuwato        | 4.370,359               |
| Kota Gorontalo            | 70,393                  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>12.025,147</b>       |

- c) Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 : luas wilayah Kabupaten Gorontalo tidak disebutkan.

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo sebesar **2.125,47 km<sup>2</sup>** teruraikan dalam Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023, halaman 8.

- d) Perda Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2032 (pasal 2, angka 1 halaman 7), menjelaskan bahwa luas Kabupaten Bone Bolango adalah 188.766,70 hektar atau **1.887,67 km<sup>2</sup>**.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031, penjelasan RTRW halaman 79, menguraikan bahwa luas Kabupaten Boalemo adalah **2.362,58 km<sup>2</sup>**.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 tidak menjelaskan tentang luas wilayah.

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Luas Kabupaten Pohuwato berdasarkan Perda 3/2012 RTRW Kabupaten Boalemo adalah  $6.606,89 \text{ km}^2 - 2.362,58 \text{ km}^2 = \mathbf{4.244,31 \text{ km}^2}$  (hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato

- g) Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (pasal 5, angka 2 halaman 9), menjelaskan bahwa luas wilayah Kota Gorontalo adalah 7.959,00 hektar atau **79,59 km<sup>2</sup>**.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, tidak menjelaskan tentang luas wilayah Kabupaten.  
Luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar **1.777,02 km<sup>2</sup>** teruraikan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, halaman 10.

Berdasarkan data di atas maka luas masing-masing kabupaten kota ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-1  
Ibukota, Luas dan Prosentase Luas  
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| KABUPATEN/<br>KOTA        | IBUKOTA   | LUAS (km <sup>2</sup> ) | %           |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| Kabupaten Boalemo         | Tilamuta  | 2.362,58                | 18,94%      |
| Kabupaten Bone Bolango    | Suwawa    | 1.887,67                | 15,13%      |
| Kabupaten Gorontalo       | Limboto   | 2.125,47                | 17,04%      |
| Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang  | 1.777,02                | 14,24%      |
| Kabupaten Pohuwato        | Marisa    | 4.244,31                | 34,02%      |
| Kota Gorontalo            | Gorontalo | 79,59                   | 0,64%       |
| TOTAL                     |           | <b>12.476,64</b>        | <b>100%</b> |

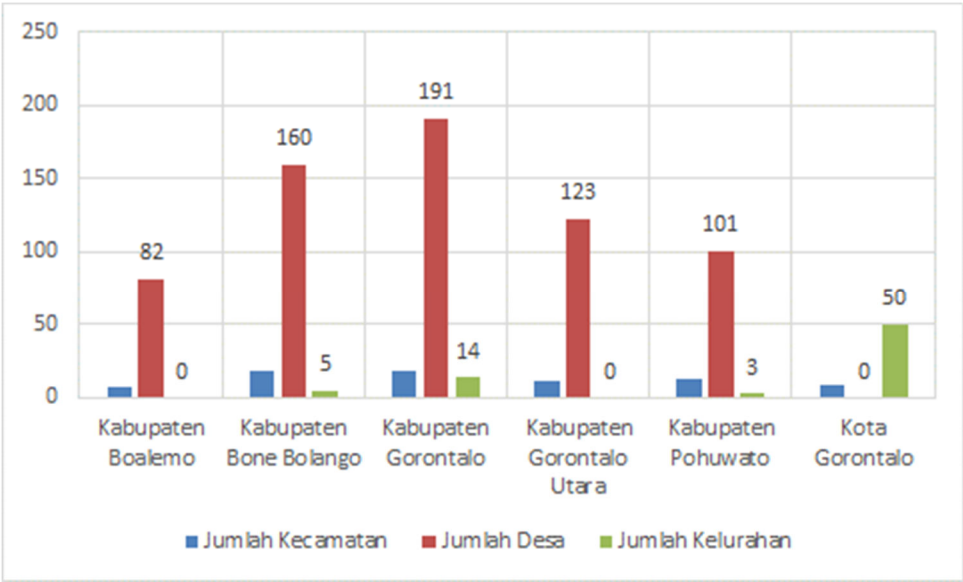
Sumber : RTRW Kabupaten/kota,  
Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, tentang pembentukan Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki 77 kecamatan, 657 desa dan 72 kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

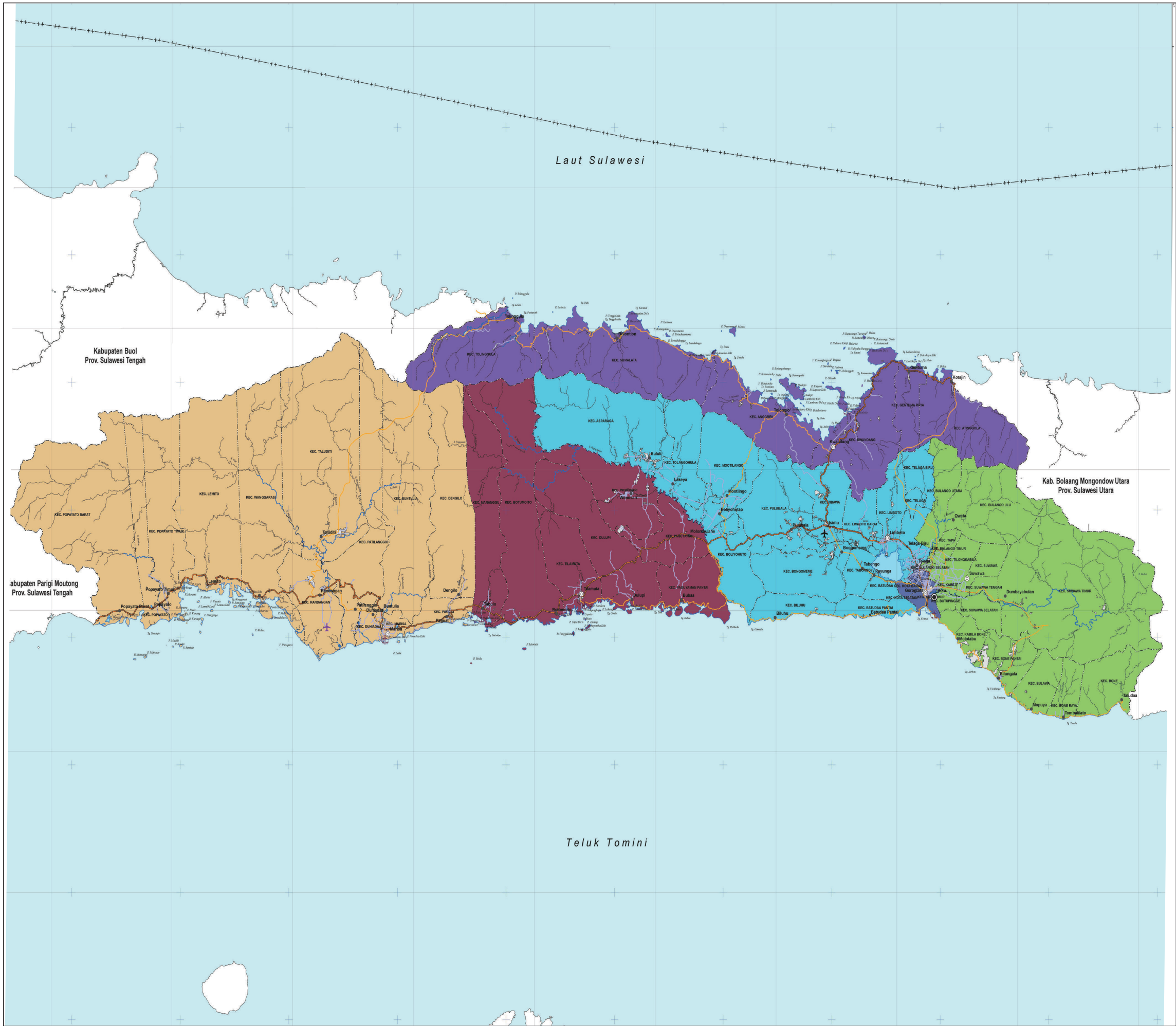
Tabel 2-2  
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| Kabupaten/Kota            | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Kabupaten Boalemo         | 7                | 82          | 0                |
| Kabupaten Bone Bolango    | 18               | 160         | 5                |
| Kabupaten Gorontalo       | 19               | 191         | 14               |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 11               | 123         | 0                |
| Kabupaten Pohuwato        | 13               | 101         | 3                |
| Kota Gorontalo            | 9                | 0           | 50               |
| Jumlah                    | 77               | 657         | 72               |

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024



Gambar 2.1  
Grafik Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (sumber : Tabel 2.2)



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPR-PKP)**  
Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo

## PEKERJAAN

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029

## JUDUL GAMBAR

## PETA ADMINISTRASI PROVINSI GORONTALO



SKALA 1:450,000



### SISTEM KOORDINAT REFERENSI:

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)  
Zona : Utara 51

### LEGENDA

|  |                      |  |                |
|--|----------------------|--|----------------|
|  | Kota Provinsi        |  | Jalan Kolektor |
|  | Kota Kabupaten       |  | Jalan Lokal    |
|  | Kota Kecamatan       |  | Jalan Lain     |
|  | Batas Negara         |  | Jalan Setapak  |
|  | Batas Provinsi       |  | Garis Pantai   |
|  | Batas Kota/Kabupaten |  | Sungai Induk   |
|  | Jalan TOL            |  | Anak Sungai    |
|  | Jalan Arteri         |  | DAM/Waduk      |

### KEDALAMAN LAUT



### KABUPATEN/KOTA

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | KOTA GORONTALO  |
|  | BOALEMO         |
|  | BONEBOLANGO     |
|  | GORONTALO       |
|  | GORONTALO UTARA |
|  | POHUWATO        |



### SUMBER DATA

- Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991
- ATLAS Provinsi Gorontalo, Bakosurtanal Tahun 2008
- Peta Infrastruktur Provinsi Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten dan Kota Provinsi Gorontalo, BAPPEDA, BPS, BPN dan BIG
- Peta Administrasi Provinsi Gorontalo, RTRW
- Digital Elevation Model - SRTM, USGS Tahun 2010
- Bathymetric Topography, GINA Tahun 2010

## **Data Dasar**

Terkait outline penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2024, data dasar wilayah Provinsi sebagaimana diuraikan dalam form-1, terdiri dari :

- 1) Data administratif yang meliputi jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan setiap kabupaten/kota
- 2) Data demografi yang meliputi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah rumah tangga, jumlah jiwa setiap keluarga, jumlah penduduk wilayah perkotaan, jumlah penduduk di wilayah perdesaan setiap kabupaten/kota
- 3) Data luas lahan, yang meliputi luas wilayah administratif dan luas lahan terbangun

Form-1 data dasar *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel 2.3

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-3  
Data Dasar *Roadmap* Sanitasi (RSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| No. | Kabupaten | Kecamatan      | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |        | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) |
|-----|-----------|----------------|------------------------|-------------|------|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|
|     |           |                |                        | Kota        | Desa | Kota                   | Desa   |                                     |                            |
| 1   | Gorontalo | Batudaa Pantai | 11.047                 |             |      |                        | 11.047 | 0,47%                               | 3.009                      |
|     |           | Biluhu         | 7.220                  |             |      |                        | 7.220  |                                     | 1.758                      |
|     |           | Batudaa        | 13.777                 |             |      |                        | 13.777 |                                     | 3.901                      |
|     |           | Bongomeme      | 19.192                 |             |      |                        | 19.192 |                                     | 5.671                      |
|     |           | Tabongo        | 17.929                 |             |      |                        | 17.929 |                                     | 5.258                      |
|     |           | Dungaliyo      | 16.492                 |             |      |                        | 16.492 |                                     | 4.789                      |
|     |           | Tibawa         | 41.863                 | √           |      | 41.863                 |        |                                     | 13.076                     |
|     |           | Pulubala       | 24.974                 |             |      |                        | 24.974 |                                     | 7.563                      |
|     |           | Boliyohuto     | 16.567                 |             |      |                        | 16.567 |                                     | 4.816                      |
|     |           | Mootilango     | 18.704                 |             |      |                        | 18.704 |                                     | 5.511                      |
|     |           | Tolangohula    | 22.693                 |             |      |                        | 22.693 |                                     | 6.815                      |
|     |           | Asparaga       | 12.492                 |             |      |                        | 12.492 |                                     | 3.481                      |
|     |           | Bilato         | 8.958                  |             |      |                        | 8.958  |                                     | 2.326                      |
|     |           | Limboto        | 51.684                 | √           |      | 51.684                 |        |                                     | 16.295                     |
|     |           | Limboto Barat  | 25.114                 | √           |      | 25.114                 |        |                                     | 7.606                      |
|     |           | Telaga         | 22.735                 | √           |      | 22.735                 |        |                                     | 6.829                      |
|     |           | Telaga Biru    | 31.553                 |             |      |                        | 31.553 |                                     | 9.710                      |
|     |           | Tilango        | 15.251                 |             |      |                        | 15.251 |                                     | 4.383                      |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Kabupaten | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) |
|-----|-----------|------------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
|     |           |                  |                        | Kota        | Desa | Kota                   | Desa           |                                     |                            |
|     |           | Telaga Jaya      | 12.018                 |             |      |                        | 12.018         |                                     | 3.326                      |
|     |           | <b>jumlah</b>    | <b>390.263</b>         |             |      | <b>141.396</b>         | <b>248.867</b> |                                     | <b>116.126</b>             |
| 2   | Boalemo   | Mananggu         | 13.360                 | √           |      | 13.360                 |                | 1,04%                               | 3.453                      |
|     |           | Tilamuta         | 31.371                 | √           |      | 31.371                 |                |                                     | 9.173                      |
|     |           | Dulupi           | 17.711                 | √           |      | 17.711                 |                |                                     | 4.837                      |
|     |           | Botuloito        | 15.876                 |             |      |                        | 15.876         |                                     | 4.254                      |
|     |           | Paguyaman        | 35.278                 | √           |      | 35.278                 |                |                                     | 10.413                     |
|     |           | Wonosari         | 29.207                 | √           |      | 29.207                 |                |                                     | 8.486                      |
|     |           | Paguyaman Pantai | 8.806                  |             |      |                        | 8.806          |                                     | 2.010                      |
|     |           | <b>jumlah</b>    | <b>151.609</b>         |             |      | <b>126.927</b>         | <b>24.682</b>  |                                     | <b>42.626</b>              |
| 3   | Pohuwato  | Popayato         | 11.464                 | √           |      | 11.464                 |                | 2,89%                               | 3.122                      |
|     |           | Popayato Barat   | 8.425                  |             |      |                        | 8.425          |                                     | 2.253                      |
|     |           | Popayato Timur   | 9.229                  |             |      |                        | 9.229          |                                     | 2.484                      |
|     |           | Lemito           | 12.196                 |             |      |                        | 12.196         |                                     | 3.332                      |
|     |           | Wanggarasi       | 6.004                  |             |      |                        | 6.004          |                                     | 1.562                      |
|     |           | Marisa           | 23.368                 | √           |      | 23.368                 |                |                                     | 6.524                      |
|     |           | Patilanggio      | 10.702                 |             |      |                        | 10.702         |                                     | 2.905                      |
|     |           | Buntulia         | 13.296                 |             |      |                        | 13.296         |                                     | 3.646                      |
|     |           | Duhiadaa         | 14.247                 |             |      |                        | 14.247         |                                     | 3.918                      |
|     |           | Randangan        | 19.175                 |             |      |                        | 19.175         |                                     | 5.326                      |
|     |           | Taluditi         | 9.396                  |             |      |                        | 9.396          |                                     | 2.532                      |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Kabupaten    | Kecamatan       | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) |
|-----|--------------|-----------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
|     |              |                 |                        | Kota        | Desa | Kota                   | Desa           |                                     |                            |
|     |              | Paguat          | 17.194                 | √           |      | 17.194                 |                |                                     | 4.760                      |
|     |              | Dengilo         | 6.754                  |             |      |                        | 6.754          |                                     | 1.777                      |
|     |              | <b>jumlah</b>   | <b>161.450</b>         |             |      | <b>52.026</b>          | <b>109.424</b> |                                     | <b>44.139</b>              |
| 4   | Bone Bolango | Tapa            | 8.006                  |             |      |                        | 8.006          | 1,19%                               | 2.813                      |
|     |              | Bulango Utara   | 8.551                  |             |      |                        | 8.551          |                                     | 2.888                      |
|     |              | Bulango Selatan | 11.817                 |             |      |                        | 11.817         |                                     | 3.935                      |
|     |              | Bulango Timur   | 6.026                  |             |      |                        | 6.026          |                                     | 2.078                      |
|     |              | Bulango Ulu     | 4.408                  |             |      |                        | 4.408          |                                     | 1.560                      |
|     |              | Kabila          | 24.374                 |             |      |                        | 24.374         |                                     | 7.959                      |
|     |              | Botupingge      | 7.170                  |             |      |                        | 7.170          |                                     | 2.445                      |
|     |              | Tilongkabila    | 20.113                 | √           |      | 20.113                 |                |                                     | 6.593                      |
|     |              | Suwawa          | 13.879                 | √           |      | 13.879                 |                |                                     | 4.595                      |
|     |              | Suwawa Selatan  | 6.057                  |             |      |                        | 6.057          |                                     | 2.088                      |
|     |              | Suwawa Timur    | 5.891                  |             |      |                        | 5.891          |                                     | 2.035                      |
|     |              | Suwawa Tengah   | 6.666                  |             |      |                        | 6.666          |                                     | 2.284                      |
|     |              | Pinogu          | 2.063                  |             |      |                        | 2.063          |                                     | 862                        |
|     |              | Bone Pantai     | 11.303                 |             |      |                        | 11.303         |                                     | 3.770                      |
|     |              | Kabila Bone     | 12.274                 |             |      |                        | 12.274         |                                     | 4.101                      |
|     |              | Bone Raya       | 7.339                  | √           |      | 7.339                  |                |                                     | 2.509                      |
|     |              | Bone            | 10.616                 |             |      |                        | 10.616         |                                     | 3.624                      |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Kabupaten       | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) |
|-----|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
|     |                 |                  |                        | Kota        | Desa | Kota                   | Desa           |                                     |                            |
|     |                 | Bulawa           | 5.748                  |             |      |                        | 5.748          |                                     | 2.039                      |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>172.301</b>         |             |      | <b>41.331</b>          | <b>130.970</b> |                                     | <b>58.179</b>              |
| 5   | Gorontalo Utara | Atinggola        | 12.551                 | √           |      | 12.551                 |                | 1,13%                               | 3.396                      |
|     |                 | Gentuma Raya     | 10.435                 |             |      |                        | 10.435         |                                     | 2.816                      |
|     |                 | Kwandang         | 29.816                 | √           |      | 29.816                 |                |                                     | 8.126                      |
|     |                 | Tomilito         | 10.285                 |             |      |                        | 10.285         |                                     | 2.776                      |
|     |                 | Penelo Kepulauan | 4.246                  |             |      |                        | 4.246          |                                     | 1.123                      |
|     |                 | Anggrek          | 17.812                 | √           |      | 17.812                 |                |                                     | 4.838                      |
|     |                 | Monano           | 7.772                  | √           |      | 7.772                  |                |                                     | 2.087                      |
|     |                 | Sumalata         | 12.043                 |             |      |                        | 12.043         |                                     | 3.257                      |
|     |                 | Sumalata Timur   | 8.137                  |             |      |                        | 8.137          |                                     | 2.187                      |
|     |                 | Tolinggula       | 11.326                 |             |      |                        | 11.326         |                                     | 3.061                      |
|     |                 | Biau             | 5.977                  |             |      |                        | 5.977          |                                     | 1.595                      |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>130.400</b>         |             |      | <b>67.951</b>          | <b>62.449</b>  |                                     | <b>35.262</b>              |
| 6   | Kota Gorontalo  | Kota Barat       | 17.733                 | √           |      | 17.733                 | 0              | 0,49%                               | 8.036                      |
|     |                 | Dungingi         | 19.419                 | √           |      | 19.419                 | 0              |                                     | 8.854                      |
|     |                 | Kota Selatan     | 13.291                 | √           |      | 13.291                 | 0              |                                     | 5.879                      |
|     |                 | Kota Timur       | 19.702                 | √           |      | 19.702                 | 0              |                                     | 8.992                      |
|     |                 | Hulonthalangi    | 9.664                  | √           |      | 9.664                  | 0              |                                     | 4.119                      |
|     |                 | Dumbo Raya       | 12.242                 | √           |      | 12.242                 | 0              |                                     | 5.370                      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Kabupaten | Kecamatan     | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) |
|-----|-----------|---------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
|     |           |               |                        | Kota        | Desa | Kota                   | Desa           |                                     |                            |
|     |           | Kota Utara    | 14.277                 | √           |      | 14.277                 | 0              |                                     | 6.357                      |
|     |           | Kota Tengah   | 20.190                 | √           |      | 20.190                 | 0              |                                     | 9.227                      |
|     |           | Sipatana      | 12.485                 | √           |      | 12.485                 | 0              |                                     | 5.488                      |
|     |           | <b>jumlah</b> | <b>139.003</b>         |             |      | <b>139.003</b>         | <b>0</b>       |                                     | <b>62.322</b>              |
|     |           |               | <b>1.145.026</b>       |             |      | <b>568.634</b>         | <b>576.392</b> |                                     | <b>358.653</b>             |

Sumber :

- 1) Kabupaten/kota Dalam Angka Tahun 2024
- 2) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Provinsi (PKE dan PKW promosi (PKWp)
- 3) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Kabupaten/kota (PPK dan PKL)
- 4) Masterfile Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (volume 6, 2024)

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-4  
Rekapitulasi Data Dasar *Roadmap* Sanitasi  
masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| Kode BPS     | Lokasi                    | Jumlah Kec | Jumlah     |           | Jumlah penduduk (jiwa) |                |                              |
|--------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------------|
|              |                           |            | Desa       | Kelurahan | L                      | P              | Total Jumlah Penduduk (Jiwa) |
| 7501         | Kabupaten Boalemo         | 7          | 82         | 0         | 77.238                 | 74.371         | 151.609                      |
| 7502         | Kabupaten Gorontalo       | 19         | 191        | 14        | 196.441                | 193.822        | 390.263                      |
| 7503         | Kabupaten Pohuwato        | 13         | 101        | 3         | 81.612                 | 79.838         | 161.450                      |
| 7504         | Kabupaten Bone Bolango    | 18         | 160        | 5         | 86.721                 | 85.580         | 172.301                      |
| 7505         | Kabupaten Gorontalo Utara | 11         | 123        | 0         | 66.420                 | 63.980         | 130.400                      |
| 7506         | Kota Gorontalo            | 9          | 0          | 50        | 69.968                 | 69.035         | 139.003                      |
| <b>Total</b> |                           | <b>77</b>  | <b>657</b> | <b>72</b> | <b>578.399</b>         | <b>566.627</b> | <b>1.145.026</b>             |

Lanjutan tabel 2-4

| Kode BPS     | Lokasi                    | Jumlah Rumah Tangga (KK) | Jumlah jiwa per KK | Wilayah perkotaan      |               | Wilayah perdesaan      |               |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|              |                           |                          |                    | Jumlah penduduk (jiwa) | % thd total   | Jumlah penduduk (jiwa) | % thd total   |
| 7501         | Kabupaten Boalemo         | 42.626                   | 3,56               | 126.927                | 83,72%        | 24.682                 | 16,28%        |
| 7502         | Kabupaten Gorontalo       | 116.126                  | 3,36               | 147.288                | 37,74%        | 242.975                | 62,26%        |
| 7503         | Kabupaten Pohuwato        | 44.139                   | 3,66               | 51.734                 | 32,04%        | 109.716                | 67,96%        |
| 7504         | Kabupaten Bone Bolango    | 58.179                   | 2,96               | 41.331                 | 23,99%        | 130.970                | 76,01%        |
| 7505         | Kabupaten Gorontalo Utara | 35.262                   | 3,70               | 67.951                 | 52,11%        | 62.449                 | 47,89%        |
| 7506         | Kota Gorontalo            | 99.245                   | 2,06               | 204.444                | 100,00%       | 0                      | 0,00%         |
| <b>Total</b> |                           | <b>358.653</b>           | <b>3,19</b>        | <b>574.234</b>         | <b>50,15%</b> | <b>570.792</b>         | <b>49,85%</b> |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2-4

| Kode BPS     | Lokasi                    | Luas administratif (ha) | Luas lahan terbangun (ha) | Kepadatan penduduk gross (jiwa/ha) | Kepadatan penduduk nett (jiwa/ha) |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 7501         | Kabupaten Boalemo         | 236.258,00              | 12.543                    | 0,64                               | 12,09                             |
| 7502         | Kabupaten Gorontalo       | 212.547,00              | 21.339                    | 1,84                               | 18,29                             |
| 7503         | Kabupaten Pohuwato        | 424.431,00              | 83.065                    | 0,38                               | 1,94                              |
| 7504         | Kabupaten Bone Bolango    | 188.767,00              | 99.583                    | 0,91                               | 1,73                              |
| 7505         | Kabupaten Gorontalo Utara | 177.702,20              | 88.517                    | 0,73                               | 1,47                              |
| 7506         | Kota Gorontalo            | 7.959,00                | 2.825                     | 17,46                              | 49,20                             |
| <b>Total</b> |                           | <b>1.247.664</b>        | <b>307.872</b>            | <b>0,92</b>                        | <b>3,72</b>                       |

Sumber :

- 1) Kabupaten/kota Dalam Angka Tahun 2024
- 2) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Provinsi (PKE dan PKW promosi (PKWp)
- 3) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Kabupaten/kota (PPK dan PKL)
- 4) Masterfile Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (volume 6, 2024)

Untuk menghitung form-1 Data Dasar RSP Provinsi Gorontalo, maka digunakan nilai-nilai standar sebagai berikut.

Tabel 2-5

Nilai-nilai standar yang digunakan untuk proses perhitungan awal RSP Gorontalo Tahun 2024

| No | Uraian                        | Volume | Satuan      | Sumber                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Timbulan sampah               | 0,7    | Kg/org/hari | Mengacu pada Standar timbulan sampah berdasarkan SNI 19.3983-1995 spesifikasi Timbulan sampah untuk kota sedang dan kota kecil, halaman 1 dan 3) standar = 0,70 - 0,80 kg/orang/hari |
| 2. | Konsumsi air bersih perkotaan |        |             |                                                                                                                                                                                      |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Uraian                           | Volume  | Satuan     | Sumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Kabupaten Boalemo</i>         | 114,583 | L/org/hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data rill pengelola air (SPAM perkotaan) setiap kabupaten/kota yang menghitung konsumsi air berdasarkan data jumlah air yang terjual dibagi dengan jumlah pelanggan (konversi dari m<sup>3</sup>/bulan) yang terdapat dalam laporan BPKP terkait Evaluasi Kinerja BUMD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo</i>       | 106,069 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <i>Kabupaten Pohuwato</i>        | 163,285 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <i>Kabupaten Bone Bolango</i>    | 61,560  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo Utara</i> | 121,187 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <i>Kota Gorontalo</i>            | 114,491 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Konsumsi air bersih perdesaan    | 60      | L/org/hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>SK SNI 19-6728.1-2002 (pedesaan 60 L)</li> <li>Pasal 1, angka 10, halaman 3 Permendagri no. 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum</li> <li>Halaman 12 huruf e), sheet 53 Permen PUPR 27 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Tabel 6 kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum , halaman 46, sheet 3, Lampiran I permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR</li> </ul> |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Uraian                                      | Volume  | Satuan           | Sumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Prosentase air limbah dari air bersih       | 80%     | %                | Metcalf and Eddy, 2002) = 60% - 80% dari konsumsi air bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Produksi air limbah total                   |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Kabupaten Boalemo</i>                    | 91,667  | L/orang/<br>hari | Prosentase air limbah dari air bersih x konsumsi air bersih perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo</i>                  | 84,855  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Kabupaten Pohuwato</i>                   | 130,628 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Kabupaten Bone Bolango</i>               | 49,248  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo Utara</i>            | 96,950  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <i>Kota Gorontalo</i>                       | 91,593  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Prosentase <i>greywater</i> dari air limbah | 75%     | %                | <ul style="list-style-type: none"> <li>60% - 75% dari total produksi air limbah (Gulyas, et.al, 2004),</li> <li>Fair dan Geyer (75% greywater dan 25% black water)</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 7. | Tinggi desain timbunan di TPA               | 10      | m                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan buku panduan Penutupan Akhir TPA Sampah, (gambar 13 halaman 33, sheet 41), rata-rata berkisar antara 10 - 15 m.</li> <li>Lampiran 3, Permen PU nomor 03 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pesampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul> |
| 8. | Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo     | 1,17%   | % per thn        | Rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi (Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, halaman 1 sheet 53)                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Uraian                           | Volume | Satuan    | Sumber                                                                               |
|----|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Kabupaten Boalemo</i>         | 1,04%  | % per thn | Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 52 (sheet 88)          |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo</i>       | 0,47%  | % per thn | Kabupaten Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 81 (sheet 121)       |
|    | <i>Kabupaten Pohuwato</i>        | 2,89%  | % per thn | Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 51 (sheet 87)         |
|    | <i>Kabupaten Bone Bolango</i>    | 1,19%  | % per thn | Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 61 (sheet 103)    |
|    | <i>Kabupaten Gorontalo Utara</i> | 1,13%  | % per thn | Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 59 (sheet 103) |
|    | <i>Kota Gorontalo</i>            | 0,49%  | % per thn | Kota Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 50 (sheet 90)             |
| 8. | Tahun penulisan Roadmap          | 2024   |           | Tahun disusunnya Roadmap Sanitasi Provinsi                                           |
| 9. | Periode perencanaan              | 5      | tahun     | Periode perencanaan dari dokumen Roadmap Provinsi                                    |

Sumber : Peraturan dan Literatur terkait sanitasi

Hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria pada tabel data dasar  
*Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel 2.6

Tabel 2-6  
Hasil Perhitungan Awal sebagai Data Dasar  
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Lokasi    | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) | Proyeksi penduduk (5 tahun) | Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari | Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari | Kebutuhan air (m³/hari) | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan | Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) |
|-----|-----------|------------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |           |                  |                        | KOTA        | DESA | KOTA                   | DESA           |                                     |                            |                             |                                    |                                    |                         |                                           |                                           |                                       |
| 1   | Gorontalo | Batudaa Pantai   | 11.047                 |             |      |                        | 11.047         | 0,47%                               | 3.009                      | 11.309                      | 0,00                               | 662,82                             | 662,82                  |                                           | 678,54                                    | 678,54                                |
|     |           | Biluhu           | 7.220                  |             |      |                        | 7.220          |                                     | 1.758                      | 7.391                       | 0,00                               | 433,20                             | 433,20                  |                                           | 443,48                                    | 443,48                                |
|     |           | Batudaa          | 13.777                 |             |      |                        | 13.777         |                                     | 3.901                      | 14.104                      | 0,00                               | 826,62                             | 826,62                  |                                           | 846,23                                    | 846,23                                |
|     |           | Bongomeme        | 19.192                 |             |      |                        | 19.192         |                                     | 5.671                      | 19.647                      | 0,00                               | 1.151,52                           | 1.151,52                |                                           | 1.178,84                                  | 1.178,84                              |
|     |           | Tabongo          | 17.929                 |             |      |                        | 17.929         |                                     | 5.258                      | 18.354                      | 0,00                               | 1.075,74                           | 1.075,74                |                                           | 1.101,26                                  | 1.101,26                              |
|     |           | Dungaliyo        | 16.492                 |             |      |                        | 16.492         |                                     | 4.789                      | 16.883                      | 0,00                               | 989,52                             | 989,52                  |                                           | 1.012,99                                  | 1.012,99                              |
|     |           | Tibawa           | 41.863                 | √           |      | 41.863                 |                |                                     | 13.076                     | 42.856                      | 4.440,38                           | 0,00                               | 4.440,38                | 4.545,71                                  |                                           | 4.545,71                              |
|     |           | Pulubala         | 24.974                 |             |      |                        | 24.974         |                                     | 7.563                      | 25.566                      | 0,00                               | 1.498,44                           | 1.498,44                |                                           | 1.533,99                                  | 1.533,99                              |
|     |           | Boliyohuto       | 16.567                 |             |      |                        | 16.567         |                                     | 4.816                      | 16.960                      | 0,00                               | 994,02                             | 994,02                  |                                           | 1.017,60                                  | 1.017,60                              |
|     |           | Mootilango       | 18.704                 |             |      |                        | 18.704         |                                     | 5.511                      | 19.148                      | 0,00                               | 1.122,24                           | 1.122,24                |                                           | 1.148,86                                  | 1.148,86                              |
|     |           | Tolangohula      | 22.693                 |             |      |                        | 22.693         |                                     | 6.815                      | 23.231                      | 0,00                               | 1.361,58                           | 1.361,58                |                                           | 1.393,88                                  | 1.393,88                              |
|     |           | Asparaga         | 12.492                 |             |      |                        | 12.492         |                                     | 3.481                      | 12.788                      | 0,00                               | 749,52                             | 749,52                  |                                           | 767,30                                    | 767,30                                |
|     |           | Bilato           | 8.958                  |             |      |                        | 8.958          |                                     | 2.326                      | 9.171                       | 0,00                               | 537,48                             | 537,48                  |                                           | 550,23                                    | 550,23                                |
|     |           | Limboto          | 51.684                 | √           |      | 51.684                 |                |                                     | 16.295                     | 52.910                      | 5.482,08                           | 0,00                               | 5.482,08                | 5.612,13                                  |                                           | 5.612,13                              |
|     |           | Limboto Barat    | 25.114                 | √           |      | 25.114                 |                |                                     | 7.606                      | 25.710                      | 2.663,82                           | 0,00                               | 2.663,82                | 2.727,02                                  |                                           | 2.727,02                              |
|     |           | Telaga           | 22.735                 | √           |      | 22.735                 |                |                                     | 6.829                      | 23.274                      | 2.411,49                           | 0,00                               | 2.411,49                | 2.468,69                                  |                                           | 2.468,69                              |
|     |           | Telaga Biru      | 31.553                 |             |      |                        | 31.553         |                                     | 9.710                      | 32.301                      | 0,00                               | 1.893,18                           | 1.893,18                |                                           | 1.938,09                                  | 1.938,09                              |
|     |           | Tilango          | 15.251                 |             |      |                        | 15.251         |                                     | 4.383                      | 15.613                      | 0,00                               | 915,06                             | 915,06                  |                                           | 936,77                                    | 936,77                                |
|     |           | Telaga Jaya      | 12.018                 |             |      |                        | 12.018         |                                     | 3.326                      | 12.303                      | 0,00                               | 721,08                             | 721,08                  |                                           | 738,19                                    | 738,19                                |
|     |           | <b>jumlah</b>    | <b>390.263</b>         |             |      | <b>141.396</b>         | <b>248.867</b> |                                     | <b>116.126</b>             | <b>399.521</b>              | <b>14.997,77</b>                   | <b>14.932,02</b>                   | <b>29.929,79</b>        | <b>44.861,81</b>                          | <b>74.791,61</b>                          | <b>119.653,42</b>                     |
| 2   | Boalemo   | Mananggu         | 13.360                 | √           |      | 13.360                 |                | 1,04%                               | 3.453                      | 14.069                      | 1.530,83                           | 0,00                               | 1.530,83                | 1.492,32                                  |                                           | 1.492,32                              |
|     |           | Tilamuta         | 31.371                 | √           |      | 31.371                 |                |                                     | 9.173                      | 33.037                      | 3.594,59                           | 0,00                               | 3.594,59                | 3.504,17                                  |                                           | 3.504,17                              |
|     |           | Dulupi           | 17.711                 | √           |      | 17.711                 |                |                                     | 4.837                      | 18.651                      | 2.029,38                           | 0,00                               | 2.029,38                | 1.978,33                                  |                                           | 1.978,33                              |
|     |           | Botuloito        | 15.876                 |             |      |                        | 15.876         |                                     | 4.254                      | 16.719                      | 0,00                               | 952,56                             | 952,56                  |                                           | 1.003,13                                  | 1.003,13                              |
|     |           | Paguyaman        | 35.278                 | √           |      | 35.278                 |                |                                     | 10.413                     | 37.151                      | 4.042,26                           | 0,00                               | 4.042,26                | 3.940,58                                  |                                           | 3.940,58                              |
|     |           | Wonosari         | 29.207                 | √           |      | 29.207                 |                |                                     | 8.486                      | 30.758                      | 3.346,63                           | 0,00                               | 3.346,63                | 3.262,45                                  |                                           | 3.262,45                              |
|     |           | Paguyaman Pantai | 8.806                  |             |      |                        | 8.806          |                                     | 2.010                      | 9.274                       | 0,00                               | 528,36                             | 528,36                  | 983,64                                    |                                           | 983,64                                |
|     |           | <b>jumlah</b>    | <b>151.609</b>         |             |      | <b>126.927</b>         | <b>24.682</b>  |                                     | <b>42.626</b>              | <b>159.658</b>              | <b>14.544</b>                      | <b>1.481</b>                       | <b>16.024,61</b>        | <b>17.505,53</b>                          | <b>33.530,15</b>                          | <b>51.035,68</b>                      |
| 3   | Pohuwato  | Popayato         | 11.464                 | √           |      | 11.464                 |                | 2,89%                               | 3.122                      | 13.219                      | 1.871,90                           | 0,00                               | 1.871,90                | 1.402,14                                  |                                           | 1.402,14                              |
|     |           | Popayato Barat   | 8.425                  |             |      |                        | 8.425          |                                     | 2.253                      | 9.715                       | 0,00                               | 505,50                             | 505,50                  |                                           | 582,89                                    | 582,89                                |
|     |           | Popayato Timur   | 9.229                  |             |      |                        | 9.229          |                                     | 2.484                      | 10.642                      | 0,00                               | 553,74                             | 553,74                  |                                           | 638,52                                    | 638,52                                |
|     |           | Lemito           | 12.196                 |             |      |                        | 12.196         |                                     | 3.332                      | 14.063                      | 0,00                               | 731,76                             | 731,76                  |                                           | 843,79                                    | 843,79                                |
|     |           | Wanggarasi       | 6.004                  |             |      |                        | 6.004          |                                     | 1.562                      | 6.923                       | 0,00                               | 360,24                             | 360,24                  |                                           | 415,39                                    | 415,39                                |
|     |           | Marisa           | 23.368                 | √           |      | 23.368                 |                |                                     | 6.524                      | 26.946                      | 3.815,65                           | 0,00                               | 3.815,65                | 2.858,10                                  |                                           | 2.858,10                              |
|     |           | Patilanggio      | 10.702                 |             |      |                        | 10.702         |                                     | 2.905                      | 12.340                      | 0,00                               | 642,12                             | 642,12                  |                                           | 740,43                                    | 740,43                                |

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Lokasi          | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |                | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) | Proyeksi penduduk (5 tahun) | Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari | Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari | Kebutuhan air (m³/hari) | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan | Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) |
|-----|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                 |                  |                        | KOTA        | DESA | KOTA                   | DESA           |                                     |                            |                             |                                    |                                    |                         |                                           |                                           |                                       |
|     |                 |                  |                        |             |      |                        |                |                                     |                            |                             |                                    |                                    |                         |                                           |                                           |                                       |
|     |                 | Buntulia         | 13.296                 |             |      |                        | 13.296         |                                     | 3.646                      | 15.332                      | 0,00                               | 797,76                             | 797,76                  |                                           | 919,89                                    | 919,89                                |
|     |                 | Duhiadaa         | 14.247                 |             |      |                        | 14.247         |                                     | 3.918                      | 16.428                      | 0,00                               | 854,82                             | 854,82                  |                                           | 985,69                                    | 985,69                                |
|     |                 | Randangan        | 19.175                 |             |      |                        | 19.175         |                                     | 5.326                      | 22.111                      | 0,00                               | 1.150,50                           | 1.150,50                |                                           | 1.326,64                                  | 1.326,64                              |
|     |                 | Taluditi         | 9.396                  |             |      |                        | 9.396          |                                     | 2.532                      | 10.834                      | 0,00                               | 563,76                             | 563,76                  |                                           | 650,07                                    | 650,07                                |
|     |                 | Paguat           | 17.194                 | √           |      | 17.194                 |                |                                     | 4.760                      | 19.826                      | 2.807,53                           | 0,00                               | 2.807,53                | 2.102,97                                  |                                           | 2.102,97                              |
|     |                 | Dengilo          | 6.754                  |             |      |                        | 6.754          |                                     | 1.777                      | 7.788                       | 0,00                               | 405,24                             | 405,24                  |                                           | 467,28                                    | 467,28                                |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>161.450</b>         |             |      | <b>52.026</b>          | <b>109.424</b> |                                     | <b>44.139</b>              | <b>186.168</b>              | <b>8.495</b>                       | <b>6.565</b>                       | <b>15.060,53</b>        | <b>21.625,97</b>                          | <b>36.686,50</b>                          | <b>58.312,47</b>                      |
| 4   | Bone Bolango    | Tapa             | 8.006                  |             |      |                        | 8.006          | 1,19%                               | 2.813                      | 8.494                       | 0,00                               | 480,36                             | 480,36                  |                                           | 509,63                                    | 509,63                                |
|     |                 | Bulango Utara    | 8.551                  |             |      |                        | 8.551          |                                     | 2.888                      | 9.072                       | 0,00                               | 513,06                             | 513,06                  |                                           | 544,32                                    | 544,32                                |
|     |                 | Bulango Selatan  | 11.817                 |             |      |                        | 11.817         |                                     | 3.935                      | 12.537                      | 0,00                               | 709,02                             | 709,02                  |                                           | 752,22                                    | 752,22                                |
|     |                 | Bulango Timur    | 6.026                  |             |      |                        | 6.026          |                                     | 2.078                      | 6.393                       | 0,00                               | 361,56                             | 361,56                  |                                           | 383,59                                    | 383,59                                |
|     |                 | Bulango Ulu      | 4.408                  |             |      |                        | 4.408          |                                     | 1.560                      | 4.677                       | 0,00                               | 264,48                             | 264,48                  |                                           | 280,60                                    | 280,60                                |
|     |                 | Kabila           | 24.374                 |             |      |                        | 24.374         |                                     | 7.959                      | 25.859                      | 0,00                               | 1.462,44                           | 1.462,44                |                                           | 1.551,55                                  | 1.551,55                              |
|     |                 | Botupingge       | 7.170                  |             |      |                        | 7.170          |                                     | 2.445                      | 7.607                       | 0,00                               | 430,20                             | 430,20                  |                                           | 456,41                                    | 456,41                                |
|     |                 | Tilongkabila     | 20.113                 | √           |      | 20.113                 |                |                                     | 6.593                      | 21.339                      | 3.284,16                           | 0,00                               | 3.284,16                | 2.263,36                                  |                                           | 2.263,36                              |
|     |                 | Suwawa           | 13.879                 | √           |      | 13.879                 |                |                                     | 4.595                      | 14.725                      | 2.266,24                           | 0,00                               | 2.266,24                | 1.561,84                                  |                                           | 1.561,84                              |
|     |                 | Suwawa Selatan   | 6.057                  |             |      |                        | 6.057          |                                     | 2.088                      | 6.426                       | 0,00                               | 363,42                             | 363,42                  |                                           | 385,56                                    | 385,56                                |
|     |                 | Suwawa Timur     | 5.891                  |             |      |                        | 5.891          |                                     | 2.035                      | 6.250                       | 0,00                               | 353,46                             | 353,46                  |                                           | 375,00                                    | 375,00                                |
|     |                 | Suwawa Tengah    | 6.666                  |             |      |                        | 6.666          |                                     | 2.284                      | 7.072                       | 0,00                               | 399,96                             | 399,96                  |                                           | 424,33                                    | 424,33                                |
|     |                 | Pinogu           | 2.063                  |             |      |                        | 2.063          |                                     | 862                        | 2.189                       | 0,00                               | 123,78                             | 123,78                  |                                           | 131,32                                    | 131,32                                |
|     |                 | Bone Pantai      | 11.303                 |             |      |                        | 11.303         |                                     | 3.770                      | 11.992                      | 0,00                               | 678,18                             | 678,18                  |                                           | 719,50                                    | 719,50                                |
|     |                 | Kabila Bone      | 12.274                 |             |      |                        | 12.274         |                                     | 4.101                      | 13.022                      | 0,00                               | 736,44                             | 736,44                  |                                           | 781,31                                    | 781,31                                |
|     |                 | Bone Raya        | 7.339                  | √           |      | 7.339                  |                |                                     | 2.509                      | 7.786                       | 1.198,35                           | 0,00                               | 1.198,35                | 825,88                                    |                                           | 825,88                                |
|     |                 | Bone             | 10.616                 |             |      |                        | 10.616         |                                     | 3.624                      | 11.263                      | 0,00                               | 636,96                             | 636,96                  |                                           | 675,77                                    | 675,77                                |
|     |                 | Bulawa           | 5.748                  |             |      |                        | 5.748          |                                     | 2.039                      | 6.098                       | 0,00                               | 344,88                             | 344,88                  |                                           | 365,89                                    | 365,89                                |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>172.301</b>         |             |      | <b>41.331</b>          | <b>130.970</b> |                                     | <b>58.179</b>              | <b>182.800</b>              | <b>6.749</b>                       | <b>7.858</b>                       | <b>14.606,95</b>        | <b>22.465,15</b>                          | <b>37.072,10</b>                          | <b>59.537,26</b>                      |
| 5   | Gorontalo Utara | Atinggola        | 12.551                 | √           |      | 12.551                 |                | 1,13%                               | 3.396                      | 13.276                      | 1.521,02                           | 0,00                               | 1.521,02                | 1.408,21                                  |                                           | 1.408,21                              |
|     |                 | Gentuma Raya     | 10.435                 |             |      |                        | 10.435         |                                     | 2.816                      | 11.038                      | 0,00                               | 626,10                             | 626,10                  |                                           | 662,28                                    | 662,28                                |
|     |                 | Kwandang         | 29.816                 | √           |      | 29.816                 |                |                                     | 8.126                      | 31.539                      | 3.613,32                           | 0,00                               | 3.613,32                | 3.345,33                                  |                                           | 3.345,33                              |
|     |                 | Tomilito         | 10.285                 |             |      |                        | 10.285         |                                     | 2.776                      | 10.879                      | 0,00                               | 617,10                             | 617,10                  |                                           | 652,76                                    | 652,76                                |
|     |                 | Penelo Kepulauan | 4.246                  |             |      |                        | 4.246          |                                     | 1.123                      | 4.491                       | 0,00                               | 254,76                             | 254,76                  |                                           | 269,48                                    | 269,48                                |
|     |                 | Anggrek          | 17.812                 | √           |      | 17.812                 |                |                                     | 4.838                      | 18.841                      | 2.158,59                           | 0,00                               | 2.158,59                | 1.998,49                                  |                                           | 1.998,49                              |
|     |                 | Monano           | 7.772                  | √           |      | 7.772                  |                |                                     | 2.087                      | 8.221                       | 941,87                             | 0,00                               | 941,87                  | 872,01                                    |                                           | 872,01                                |
|     |                 | Sumalata         | 12.043                 |             |      |                        | 12.043         |                                     | 3.257                      | 12.739                      | 0,00                               | 722,58                             | 722,58                  |                                           | 764,34                                    | 764,34                                |
|     |                 | Sumalata Timur   | 8.137                  |             |      |                        | 8.137          |                                     | 2.187                      | 8.607                       | 0,00                               | 488,22                             | 488,22                  |                                           | 516,43                                    | 516,43                                |
|     |                 | Tolinggula       | 11.326                 |             |      |                        | 11.326         |                                     | 3.061                      | 11.981                      | 0,00                               | 679,56                             | 679,56                  |                                           | 718,83                                    | 718,83                                |
|     |                 | Biau             | 5.977                  |             |      |                        | 5.977          |                                     | 1.595                      | 6.322                       | 0,00                               | 358,62                             | 358,62                  |                                           | 379,35                                    | 379,35                                |

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Lokasi         | Kecamatan     | Jumlah Penduduk (jiwa) | Klasifikasi |      | Jumlah Penduduk (jiwa) |         | Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun) | Jumlah Rumah Tangga (unit) | Proyeksi penduduk (5 tahun) | Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari | Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari | Kebutuhan air (m³/hari) | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan | Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan | Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) |
|-----|----------------|---------------|------------------------|-------------|------|------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                |               |                        | KOTA        | DESA | KOTA                   | DESA    |                                     |                            |                             |                                    |                                    |                         |                                           |                                           |                                       |
|     |                | jumlah        | 130.400                |             |      | 67.951                 | 62.449  |                                     | 35.262                     | 137.936                     | 8.235                              | 3.747                              | 11.981,75               | 15.728,69                                 | 27.710,44                                 | 43.439,12                             |
| 6   | Kota Gorontalo | Kota Barat    | 17.733                 | √           |      | 17.733                 | 0       | 0,49%                               | 8.036                      | 18.172                      | 2.030,26                           | 0,00                               | 2.030,26                | 1.927,46                                  |                                           | 1.927,46                              |
|     |                | Dungingi      | 19.419                 | √           |      | 19.419                 | 0       |                                     | 8.854                      | 19.899                      | 2.223,30                           | 0,00                               | 2.223,30                | 2.110,72                                  |                                           | 2.110,72                              |
|     |                | Kota Selatan  | 13.291                 | √           |      | 13.291                 | 0       |                                     | 5.879                      | 13.620                      | 1.521,70                           | 0,00                               | 1.521,70                | 1.444,65                                  |                                           | 1.444,65                              |
|     |                | Kota Timur    | 19.702                 | √           |      | 19.702                 | 0       |                                     | 8.992                      | 20.189                      | 2.255,70                           | 0,00                               | 2.255,70                | 2.141,48                                  |                                           | 2.141,48                              |
|     |                | Hulonthalangi | 9.664                  | √           |      | 9.664                  | 0       |                                     | 4.119                      | 9.903                       | 1.106,44                           | 0,00                               | 1.106,44                | 1.050,41                                  |                                           | 1.050,41                              |
|     |                | Dumbo Raya    | 12.242                 | √           |      | 12.242                 | 0       |                                     | 5.370                      | 12.545                      | 1.401,60                           | 0,00                               | 1.401,60                | 1.330,63                                  |                                           | 1.330,63                              |
|     |                | Kota Utara    | 14.277                 | √           |      | 14.277                 | 0       |                                     | 6.357                      | 14.630                      | 1.634,58                           | 0,00                               | 1.634,58                | 1.551,82                                  |                                           | 1.551,82                              |
|     |                | Kota Tengah   | 20.190                 | √           |      | 20.190                 | 0       |                                     | 9.227                      | 20.690                      | 2.311,57                           | 0,00                               | 2.311,57                | 2.194,52                                  |                                           | 2.194,52                              |
|     |                | Sipatana      | 12.485                 | √           |      | 12.485                 | 0       |                                     | 5.488                      | 12.794                      | 1.429,42                           | 0,00                               | 1.429,42                | 1.357,04                                  |                                           | 1.357,04                              |
|     |                | jumlah        | 139.003                |             |      | 139.003                | 0       |                                     | 62.322                     | 142.442                     | 15.915                             | 0                                  | 15.914,55               | 15.914,55                                 | 31.829,11                                 | 47.743,66                             |
|     |                |               | 1.145.026              |             |      | 568.634                | 576.392 |                                     | 358.653                    | 1.208.525                   | 68.935                             | 34.584                             | 103.518,19              | 138.101,71                                | 241.619,90                                | 379.721,61                            |

Lanjutan tabel 2.6

| No. | Lokasi    | Kecamatan      | Timbulan sampah (Ton/hari) | Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari) | Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari) | Produksi air limbah saat ini (m³/hari) | Produksi air limbah (m³/hari) |                    | Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m³/hari) | Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m³/hari) | Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m³/hari) |
|-----|-----------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |           |                |                            |                                      |                                             |                                        | <i>grey water</i>             | <i>black water</i> |                                                |                                                       |                                                                |
| 1   | Gorontalo | Batudaa Pantai | 7,73                       | 0,00                                 | 7,92                                        | 530,26                                 | 397,69                        | 132,56             | 542,83                                         | 407,13                                                | 135,71                                                         |
|     |           | Biluhu         | 5,05                       | 0,00                                 | 5,17                                        | 346,56                                 | 259,92                        | 86,64              | 354,78                                         | 266,09                                                | 88,70                                                          |
|     |           | Batudaa        | 9,64                       | 0,00                                 | 9,87                                        | 661,30                                 | 495,97                        | 165,32             | 676,98                                         | 507,74                                                | 169,25                                                         |
|     |           | Bongomeme      | 13,43                      | 0,00                                 | 13,75                                       | 921,22                                 | 690,91                        | 230,30             | 943,07                                         | 707,30                                                | 235,77                                                         |
|     |           | Tabongo        | 12,55                      | 0,00                                 | 12,85                                       | 860,59                                 | 645,44                        | 215,15             | 881,01                                         | 660,76                                                | 220,25                                                         |
|     |           | Dungaliyo      | 11,54                      | 0,00                                 | 11,82                                       | 791,62                                 | 593,71                        | 197,90             | 810,39                                         | 607,80                                                | 202,60                                                         |
|     |           | Tibawa         | 29,30                      | 29,30                                | 30,00                                       | 3.552,30                               | 2.664,23                      | 888,08             | 3.636,57                                       | 2.727,43                                              | 909,14                                                         |
|     |           | Pulubala       | 17,48                      | 0,00                                 | 17,90                                       | 1.198,75                               | 899,06                        | 299,69             | 1.227,19                                       | 920,39                                                | 306,80                                                         |
|     |           | Boliyohuto     | 11,60                      | 0,00                                 | 11,87                                       | 795,22                                 | 596,41                        | 198,80             | 814,08                                         | 610,56                                                | 203,52                                                         |
|     |           | Mootilango     | 13,09                      | 0,00                                 | 13,40                                       | 897,79                                 | 673,34                        | 224,45             | 919,09                                         | 689,32                                                | 229,77                                                         |
|     |           | Tolangohula    | 15,89                      | 0,00                                 | 16,26                                       | 1.089,26                               | 816,95                        | 272,32             | 1.115,10                                       | 836,33                                                | 278,78                                                         |
|     |           | Asparaga       | 8,74                       | 0,00                                 | 8,95                                        | 599,62                                 | 449,71                        | 149,90             | 613,84                                         | 460,38                                                | 153,46                                                         |
|     |           | Bilato         | 6,27                       | 0,00                                 | 6,42                                        | 429,98                                 | 322,49                        | 107,50             | 440,18                                         | 330,14                                                | 110,05                                                         |
|     |           | Limboto        | 36,18                      | 36,18                                | 37,04                                       | 4.385,67                               | 3.289,25                      | 1.096,42           | 4.489,70                                       | 3.367,28                                              | 1.122,43                                                       |
|     |           | Limboto Barat  | 17,58                      | 17,58                                | 18,00                                       | 2.131,06                               | 1.598,29                      | 532,76             | 2.181,61                                       | 1.636,21                                              | 545,40                                                         |
|     |           | Telaga         | 15,91                      | 15,91                                | 16,29                                       | 1.929,19                               | 1.446,89                      | 482,30             | 1.974,95                                       | 1.481,21                                              | 493,74                                                         |
|     |           | Telaga Biru    | 22,09                      | 0,00                                 | 22,61                                       | 1.514,54                               | 1.135,91                      | 378,64             | 1.550,47                                       | 1.162,85                                              | 387,62                                                         |
|     |           | Tilango        | 10,68                      | 0,00                                 | 10,93                                       | 732,05                                 | 549,04                        | 183,01             | 749,41                                         | 562,06                                                | 187,35                                                         |
|     |           | Telaga Jaya    | 8,41                       | 0,00                                 | 8,61                                        | 576,86                                 | 432,65                        | 144,22             | 590,55                                         | 442,91                                                | 147,64                                                         |
|     |           | jumlah         | 273,18                     | 98,98                                | 279,66                                      | 23.943,83                              | 17.957,88                     | 5.985,96           | 24.511,83                                      | 18.383,87                                             | 6.127,96                                                       |
| 2   | Boalemo   | Mananggu       | 9,35                       | 9,35                                 | 9,85                                        | 1.224,66                               | 918,50                        | 306,17             | 1.193,86                                       | 895,39                                                | 298,46                                                         |
|     |           | Tilamuta       | 21,96                      | 21,96                                | 23,13                                       | 2.875,67                               | 2.156,75                      | 718,92             | 2.803,33                                       | 2.102,50                                              | 700,83                                                         |
|     |           | Dulupi         | 12,40                      | 12,40                                | 13,06                                       | 1.623,51                               | 1.217,63                      | 405,88             | 1.582,67                                       | 1.187,00                                              | 395,67                                                         |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Lokasi          | Kecamatan        | Timbulan sampah (Ton/hari) | Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari) | Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari) | Produksi air limbah saat ini (m³/hari) | Produksi air limbah (m³/hari) |                    | Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m³/hari) | Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m³/hari) | Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m³/hari) |
|-----|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                 |                  |                            |                                      |                                             |                                        | <i>grey water</i>             | <i>black water</i> |                                                |                                                       |                                                                |
|     |                 | Botuloito        | 11,11                      | 0,00                                 | 11,70                                       | 762,05                                 | 571,54                        | 190,51             | 802,51                                         | 601,88                                                | 200,63                                                         |
|     |                 | Paguyaman        | 24,69                      | 24,69                                | 26,01                                       | 3.233,81                               | 2.425,36                      | 808,45             | 3.152,47                                       | 2.364,35                                              | 788,12                                                         |
|     |                 | Wonosari         | 20,44                      | 20,44                                | 21,53                                       | 2.677,30                               | 2.007,98                      | 669,33             | 2.609,96                                       | 1.957,47                                              | 652,49                                                         |
|     |                 | Paguyaman Pantai | 6,16                       | 0,00                                 | 6,49                                        | 422,69                                 | 317,02                        | 105,67             | 786,91                                         | 590,18                                                | 196,73                                                         |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>106,13</b>              | <b>88,85</b>                         | <b>111,76</b>                               | <b>12.819,69</b>                       | <b>9.614,77</b>               | <b>3.204,92</b>    | <b>12.932</b>                                  | <b>9.699</b>                                          | <b>3.233</b>                                                   |
| 3   | Pohuwato        | Popayato         | 8,02                       | 8,02                                 | 9,25                                        | 1.497,52                               | 1.123,14                      | 374,38             | 1.121,71                                       | 841,28                                                | 280,43                                                         |
|     |                 | Popayato Barat   | 5,90                       | 0,00                                 | 6,80                                        | 404,40                                 | 303,30                        | 101,10             | 466,31                                         | 349,73                                                | 116,58                                                         |
|     |                 | Popayato Timur   | 6,46                       | 0,00                                 | 7,45                                        | 442,99                                 | 332,24                        | 110,75             | 510,81                                         | 383,11                                                | 127,70                                                         |
|     |                 | Lemito           | 8,54                       | 0,00                                 | 9,84                                        | 585,41                                 | 439,06                        | 146,35             | 675,03                                         | 506,27                                                | 168,76                                                         |
|     |                 | Wanggarasi       | 4,20                       | 0,00                                 | 4,85                                        | 288,19                                 | 216,14                        | 72,05              | 332,31                                         | 249,23                                                | 83,08                                                          |
|     |                 | Marisa           | 16,36                      | 16,36                                | 18,86                                       | 3.052,52                               | 2.289,39                      | 763,13             | 2.286,48                                       | 1.714,86                                              | 571,62                                                         |
|     |                 | Patilanggio      | 7,49                       | 0,00                                 | 8,64                                        | 513,70                                 | 385,27                        | 128,42             | 592,34                                         | 444,26                                                | 148,09                                                         |
|     |                 | Buntulia         | 9,31                       | 0,00                                 | 10,73                                       | 638,21                                 | 478,66                        | 159,55             | 735,92                                         | 551,94                                                | 183,98                                                         |
|     |                 | Duhiadaa         | 9,97                       | 0,00                                 | 11,50                                       | 683,86                                 | 512,89                        | 170,96             | 788,55                                         | 591,41                                                | 197,14                                                         |
|     |                 | Randangan        | 13,42                      | 0,00                                 | 15,48                                       | 920,40                                 | 690,30                        | 230,10             | 1.061,31                                       | 795,98                                                | 265,33                                                         |
|     |                 | Taluditi         | 6,58                       | 0,00                                 | 7,58                                        | 451,01                                 | 338,26                        | 112,75             | 520,06                                         | 390,04                                                | 130,01                                                         |
|     |                 | Paguat           | 12,04                      | 12,04                                | 13,88                                       | 2.246,02                               | 1.684,52                      | 561,51             | 1.682,37                                       | 1.261,78                                              | 420,59                                                         |
|     |                 | Dengilo          | 4,73                       | 0,00                                 | 5,45                                        | 324,19                                 | 243,14                        | 81,05              | 373,82                                         | 280,37                                                | 93,46                                                          |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>113,02</b>              | <b>36,42</b>                         | <b>130,32</b>                               | <b>12.048,42</b>                       | <b>9.036,32</b>               | <b>3.012,11</b>    | <b>11.147</b>                                  | <b>8.360</b>                                          | <b>2.787</b>                                                   |
| 4   | Bone Bolango    | Tapa             | 5,60                       | 0,00                                 | 5,95                                        | 384,29                                 | 288,22                        | 96,07              | 407,70                                         | 305,78                                                | 101,93                                                         |
|     |                 | Bulango Utara    | 5,99                       | 0,00                                 | 6,35                                        | 410,45                                 | 307,84                        | 102,61             | 435,46                                         | 326,59                                                | 108,86                                                         |
|     |                 | Bulango Selatan  | 8,27                       | 0,00                                 | 8,78                                        | 567,22                                 | 425,41                        | 141,80             | 601,78                                         | 451,33                                                | 150,44                                                         |
|     |                 | Bulango Timur    | 4,22                       | 0,00                                 | 4,48                                        | 289,25                                 | 216,94                        | 72,31              | 306,87                                         | 230,15                                                | 76,72                                                          |
|     |                 | Bulango Ulu      | 3,09                       | 0,00                                 | 3,27                                        | 211,58                                 | 158,69                        | 52,90              | 224,48                                         | 168,36                                                | 56,12                                                          |
|     |                 | Kabila           | 17,06                      | 0,00                                 | 18,10                                       | 1.169,95                               | 877,46                        | 292,49             | 1.241,24                                       | 930,93                                                | 310,31                                                         |
|     |                 | Botupingge       | 5,02                       | 0,00                                 | 5,32                                        | 344,16                                 | 258,12                        | 86,04              | 365,13                                         | 273,85                                                | 91,28                                                          |
|     |                 | Tilongkabila     | 14,08                      | 14,08                                | 14,94                                       | 2.627,33                               | 1.970,50                      | 656,83             | 1.810,69                                       | 1.358,02                                              | 452,67                                                         |
|     |                 | Suwawa           | 9,72                       | 9,72                                 | 10,31                                       | 1.812,99                               | 1.359,74                      | 453,25             | 1.249,47                                       | 937,10                                                | 312,37                                                         |
|     |                 | Suwawa Selatan   | 4,24                       | 0,00                                 | 4,50                                        | 290,74                                 | 218,05                        | 72,68              | 308,45                                         | 231,34                                                | 77,11                                                          |
|     |                 | Suwawa Timur     | 4,12                       | 0,00                                 | 4,37                                        | 282,77                                 | 212,08                        | 70,69              | 300,00                                         | 225,00                                                | 75,00                                                          |
|     |                 | Suwawa Tengah    | 4,67                       | 0,00                                 | 4,95                                        | 319,97                                 | 239,98                        | 79,99              | 339,46                                         | 254,60                                                | 84,87                                                          |
|     |                 | Pinogu           | 1,44                       | 0,00                                 | 1,53                                        | 99,02                                  | 74,27                         | 24,76              | 105,06                                         | 78,79                                                 | 26,26                                                          |
|     |                 | Bone Pantai      | 7,91                       | 0,00                                 | 8,39                                        | 542,54                                 | 406,91                        | 135,64             | 575,60                                         | 431,70                                                | 143,90                                                         |
|     |                 | Kabila Bone      | 8,59                       | 0,00                                 | 9,12                                        | 589,15                                 | 441,86                        | 147,29             | 625,05                                         | 468,79                                                | 156,26                                                         |
|     |                 | Bone Raya        | 5,14                       | 5,14                                 | 5,45                                        | 958,68                                 | 719,01                        | 239,67             | 660,70                                         | 495,53                                                | 165,18                                                         |
|     |                 | Bone             | 7,43                       | 0,00                                 | 7,88                                        | 509,57                                 | 382,18                        | 127,39             | 540,62                                         | 405,46                                                | 135,15                                                         |
|     |                 | Bulawa           | 4,02                       | 0,00                                 | 4,27                                        | 275,90                                 | 206,93                        | 68,98              | 292,72                                         | 219,54                                                | 73,18                                                          |
|     |                 | <b>jumlah</b>    | <b>120,61</b>              | <b>28,93</b>                         | <b>127,96</b>                               | <b>11.685,56</b>                       | <b>8.764,17</b>               | <b>2.921,39</b>    | <b>10.390</b>                                  | <b>7.793</b>                                          | <b>2.598</b>                                                   |
| 5   | Gorontalo Utara | Atinggola        | 8,79                       | 8,79                                 | 9,29                                        | 1.216,82                               | 912,61                        | 304,20             | 1.126,57                                       | 844,93                                                | 281,64                                                         |
|     |                 | Gentuma Raya     | 7,30                       | 0,00                                 | 7,73                                        | 500,88                                 | 375,66                        | 125,22             | 529,83                                         | 397,37                                                | 132,46                                                         |
|     |                 | Kwandang         | 20,87                      | 20,87                                | 22,08                                       | 2.890,66                               | 2.167,99                      | 722,66             | 2.676,26                                       | 2.007,20                                              | 669,07                                                         |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Lokasi         | Kecamatan        | Timbulan sampah (Ton/hari) | Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari) | Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari) | Produksi air limbah saat ini (m <sup>3</sup> /hari) | Produksi air limbah (m <sup>3</sup> /hari) |                    | Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) | Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) | Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) |
|-----|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                  |                            |                                      |                                             |                                                     | <i>grey water</i>                          | <i>black water</i> |                                                             |                                                                    |                                                                             |
|     |                | Tomilito         | 7,20                       | 0,00                                 | 7,62                                        | 493,68                                              | 370,26                                     | 123,42             | 522,21                                                      | 391,66                                                             | 130,55                                                                      |
|     |                | Penelo Kepulauan | 2,97                       | 0,00                                 | 3,14                                        | 203,81                                              | 152,86                                     | 50,95              | 215,59                                                      | 161,69                                                             | 53,90                                                                       |
|     |                | Anggrek          | 12,47                      | 12,47                                | 13,19                                       | 1.726,87                                            | 1.295,15                                   | 431,72             | 1.598,79                                                    | 1.199,10                                                           | 399,70                                                                      |
|     |                | Monano           | 5,44                       | 5,44                                 | 5,75                                        | 753,50                                              | 565,12                                     | 188,37             | 697,61                                                      | 523,21                                                             | 174,40                                                                      |
|     |                | Sumalata         | 8,43                       | 0,00                                 | 8,92                                        | 578,06                                              | 433,55                                     | 144,52             | 611,47                                                      | 458,60                                                             | 152,87                                                                      |
|     |                | Sumalata Timur   | 5,70                       | 0,00                                 | 6,03                                        | 390,58                                              | 292,93                                     | 97,64              | 413,15                                                      | 309,86                                                             | 103,29                                                                      |
|     |                | Tolinggula       | 7,93                       | 0,00                                 | 8,39                                        | 543,65                                              | 407,74                                     | 135,91             | 575,07                                                      | 431,30                                                             | 143,77                                                                      |
|     |                | Biau             | 4,18                       | 0,00                                 | 4,43                                        | 286,90                                              | 215,17                                     | 71,72              | 303,48                                                      | 227,61                                                             | 75,87                                                                       |
|     |                | <b>jumlah</b>    | <b>91,28</b>               | <b>47,57</b>                         | <b>96,56</b>                                | <b>9.585,40</b>                                     | <b>7.189,05</b>                            | <b>2.396,35</b>    | <b>9.270</b>                                                | <b>6.953</b>                                                       | <b>2.318</b>                                                                |
| 6   | Kota Gorontalo | Kota Barat       | 12,41                      | 12,41                                | 12,72                                       | 1.624,21                                            | 1.218,16                                   | 406,05             | 1.541,97                                                    | 1.156,48                                                           | 385,49                                                                      |
|     |                | Dungingi         | 13,59                      | 13,59                                | 13,93                                       | 1.778,64                                            | 1.333,98                                   | 444,66             | 1.688,58                                                    | 1.266,43                                                           | 422,14                                                                      |
|     |                | Kota Selatan     | 9,30                       | 9,30                                 | 9,53                                        | 1.217,36                                            | 913,02                                     | 304,34             | 1.155,72                                                    | 866,79                                                             | 288,93                                                                      |
|     |                | Kota Timur       | 13,79                      | 13,79                                | 14,13                                       | 1.804,56                                            | 1.353,42                                   | 451,14             | 1.713,18                                                    | 1.284,89                                                           | 428,30                                                                      |
|     |                | Hulonthalangi    | 6,76                       | 6,76                                 | 6,93                                        | 885,15                                              | 663,86                                     | 221,29             | 840,33                                                      | 630,25                                                             | 210,08                                                                      |
|     |                | Dumbo Raya       | 8,57                       | 8,57                                 | 8,78                                        | 1.121,28                                            | 840,96                                     | 280,32             | 1.064,50                                                    | 798,38                                                             | 266,13                                                                      |
|     |                | Kota Utara       | 9,99                       | 9,99                                 | 10,24                                       | 1.307,67                                            | 980,75                                     | 326,92             | 1.241,45                                                    | 931,09                                                             | 310,36                                                                      |
|     |                | Kota Tengah      | 14,13                      | 14,13                                | 14,48                                       | 1.849,25                                            | 1.386,94                                   | 462,31             | 1.755,62                                                    | 1.316,71                                                           | 438,90                                                                      |
|     |                | Sipatana         | 8,74                       | 8,74                                 | 8,96                                        | 1.143,53                                            | 857,65                                     | 285,88             | 1.085,63                                                    | 814,22                                                             | 271,41                                                                      |
|     |                | <b>jumlah</b>    | <b>97,30</b>               | <b>97,30</b>                         | <b>99,71</b>                                | <b>12.731,64</b>                                    | <b>9.548,73</b>                            | <b>3.182,91</b>    | <b>12.086,99</b>                                            | <b>9.065,24</b>                                                    | <b>3.021,75</b>                                                             |
|     |                |                  | <b>801,52</b>              | <b>398,04</b>                        | <b>845,97</b>                               | <b>82.814,55</b>                                    | <b>62.110,91</b>                           | <b>20.703,64</b>   | <b>80.338,05</b>                                            | <b>60.253,54</b>                                                   | <b>20.084,51</b>                                                            |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan data awal pada tabel 2.5

Tabel 2-7  
Rekapitulasi Perhitungan Awal berdasarkan Nilai-nilai standar yang digunakan  
Dalam *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2029

| No. | Lokasi                    | Timbulan sampah (Ton/hari) | Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari) | Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari) | Produksi air limbah saat ini (m <sup>3</sup> /hari) | Produksi air limbah (m <sup>3</sup> /hari) |                    | Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) | Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) | Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m <sup>3</sup> /hari) |
|-----|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                            |                                      |                                             |                                                     | <i>grey water</i>                          | <i>black water</i> |                                                             |                                                                    |                                                                             |
| 1   | Kabupaten Gorontalo       | 106,1                      | 88,8                                 | 111,8                                       | 13.897,5                                            | 10.423,1                                   | 3.474,4            | 14.635,3                                                    | 10.976,5                                                           | 3.658,8                                                                     |
| 2   | Kabupaten Boalemo         | 273,2                      | 103,1                                | 279,7                                       | 33.115,9                                            | 24.837,0                                   | 8.279,0            | 33.901,5                                                    | 25.426,1                                                           | 8.475,4                                                                     |
| 3   | Kabupaten Pohuwato        | 113,0                      | 36,2                                 | 130,3                                       | 21.090,0                                            | 15.817,5                                   | 5.272,5            | 24.318,8                                                    | 18.239,1                                                           | 6.079,7                                                                     |
| 4   | Kabupaten Bone Bolango    | 120,6                      | 28,9                                 | 128,0                                       | 8.485,5                                             | 6.364,1                                    | 2.121,4            | 9.002,6                                                     | 6.751,9                                                            | 2.250,6                                                                     |
| 5   | Kabupaten Gorontalo Utara | 91,3                       | 47,6                                 | 96,6                                        | 12.642,3                                            | 9.481,7                                    | 3.160,6            | 13.372,9                                                    | 10.029,7                                                           | 3.343,2                                                                     |
| 6   | Kota Gorontalo            | 97,3                       | 97,3                                 | 99,7                                        | 12.731,6                                            | 9.548,7                                    | 3.182,9            | 13.046,6                                                    | 9.785,0                                                            | 3.261,7                                                                     |
|     | <b>Provinsi Gorontalo</b> | <b>801,52</b>              | <b>401,96</b>                        | <b>845,97</b>                               | <b>101.962,78</b>                                   | <b>76.472,09</b>                           | <b>25.490,70</b>   | <b>108.277,68</b>                                           | <b>81.208,26</b>                                                   | <b>27.069,42</b>                                                            |

Sumber : Rekapitulasi berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6

## 2.1.2 Akses Sanitasi Layak dan Aman Provinsi

Target capaian akses sanitasi layak dan aman provinsi ditetapkan berdasarkan distribusi target dari pemerintah pusat, sebagaimana dituangkan pada tabel 2.8, dibawah ini.

Tabel 2-8  
Target Akses Sanitasi Berdasarkan Draft RPJMN Tahun 2025-2029  
Tahun 2024-2025

| No. | Komponen                                              | Target                    | Keterangan                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)           |                           | rencana teknokratik peta jalan sanitasi aman, target sanitasi aman pada Tahun 2030                                     |
|     | • Layak                                               | 100%                      |                                                                                                                        |
|     | • Aman                                                | 30% (didalam akses layak) | Tahun 2025-2030 : 14%, 17%, 20%, 23%, 26% dan 30%                                                                      |
|     | • Buang Air Besar Sembarangan (BABs)                  | 0%                        |                                                                                                                        |
|     | • Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)              | 100%                      |                                                                                                                        |
|     | Proporsi akses aman                                   |                           |                                                                                                                        |
|     | • SPALD-S                                             | 25%                       |                                                                                                                        |
|     | • SPALD-T                                             | 5%                        |                                                                                                                        |
|     | ➤ SPALD-T perkotaan dan permukiman berbasis institusi | 4%                        |                                                                                                                        |
|     | ➤ SPALD-T permukiman berbasis masyarakat              | 1%                        |                                                                                                                        |
| B.  | Target Akses Pengelolaan Persampahan                  |                           | Platform Sistem Pengelolaan Persampahan Bappenas, 2021 dan Target Persampahan dalam RPJPN-RPKMN Bappenas, 13 Juni 2024 |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                                  | Target | Keterangan            |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1.  | Rumah tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah | 100%   | RPJPN 2025-2045       |
|     | • Sampah Residu tersisa di LUR                            | 10%    |                       |
|     | • Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah           | 90%    |                       |
|     | ➢ Sampah terdaur ulang di fasilitas pengolahan sampah     | 35%    |                       |
| 2.  | Rumah tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah | 85%    | Draft RPJMN 2025-2029 |
|     | • Sampah Residu tersisa di LUR                            | 47%    |                       |
|     | • Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah           | 38%    |                       |
|     | ➢ Sampah terdaur ulang di fasilitas pengolahan sampah     | 20%    |                       |

Sumber : draft RPJMN 2025-2029

Berdasarkan beberapa acuan di atas, pada tabel dibawah ini diuraikan target-target akses sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

Tabel 2-9  
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

| No. | Komponen                                    | Tahun |         |         |         |         |         |          | Acuan                                                                            |
|-----|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | 2024  | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030     |                                                                                  |
| 1.  | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) |       |         |         |         |         |         |          |                                                                                  |
|     | • Layak                                     | 90 %  | 91,67 % | 93,33 % | 95,00 % | 96,67 % | 98,33 % | 100,00 % | Salinan UU RPJPN Tahun 2025-2029 No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                                            | Tahun   |         |         |         |         |         |         | Acuan                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                          |
|     | • Aman                                                              | 10,16 % | 12,50 % | 16,00 % | 19,50 % | 23,00 % | 26,50 % | 30,00 % | Rencana teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman                                                                                             |
|     | • SPALD Setempat                                                    | 8%      | 10%     | 13%     | 16%     | 19%     | 22%     | 25%     | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
|     | • SPALD Terpusat                                                    | 1%      | 2%      | 2%      | 3%      | 3%      | 4%      | 5%      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
|     | • <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> | 1%      | 1%      | 2%      | 2%      | 3%      | 3%      | 4%      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
|     | • <i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>              | 0%      | 0%      | 0%      | 1%      | 1%      | 1%      | 1%      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
|     | • BABs                                                              | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
|     | • Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)                            | 100 %   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                                         |
| 2   | Target Akses Penanganan Persampahan                                 | 28%     | 30%     | 32%     | 34%     | 36%     | 38%     | 40%     | Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
| 3   | Target Akses                                                        | 71%     | 70%     | 68%     | 66%     | 64%     | 62%     | 60%     | Perpres No.                                                                                                                              |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                                        | Tahun |            |            |            |            |      |      | Acuan                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | 2024  | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 | 2030 |                                                                                                                              |
|     | Pengurangan Persampahan                                         |       |            |            |            |            |      |      | 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
| 4   | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT) |       | 25%        | 38,2<br>5% | 51,5<br>0% | 64,7<br>5% | 78%  |      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                             |
| 5   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)                |       |            |            |            |            | 47%  |      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                             |
| 6   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                   |       | 26,6<br>7% | 29,5<br>0% | 32,3<br>4% | 35,1<br>7% | 38%  |      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                             |
|     | sampah terdaur ulang                                            |       | 16%        | 17%        | 18%        | 19%        | 20%  |      | Konsep rancangan RPJMN 2025-2029                                                                                             |

Sumber : Konsep rancangan RPJMN 2025-2029

### Air Limbah Domestik

Persentase akses masing-masing kabupaten/kota, untuk air limbah domestik, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-10  
Akses Sanitasi (air limbah Domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Lokasi            | Jumlah Desa/Kel | Jumlah KK | JSP (KK) | % Akses JSP | JSSP (KK) | % Akses JSSP |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 1   | Kabupaten Boalemo | 82              | 42.626    | 23.830   | 55,90%      | 149       | 0,35%        |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.                | Lokasi                    | Jumlah Desa/Kel | Jumlah KK      | JSP (KK)       | % Akses JSP   | JSSP (KK)  | % Akses JSSP  |
|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 2                  | Kabupaten Gorontalo       | 205             | 116.126        | 88.417         | 76,14%        | 224        | 0,19%         |
| 3                  | Kabupaten Pohuwato        | 104             | 44.139         | 26.263         | 59,50%        | 210        | 0,48%         |
| 4                  | Kabupaten Bone Bolango    | 165             | 58.179         | 37.894         | 65,13%        | 0          | 0,00%         |
| 5                  | Kabupaten Gorontalo Utara | 123             | 35.262         | 27.585         | 78,23%        | 0          | 0,00%         |
| 6                  | Kota Gorontalo            | 50              | 62.321         | 57.781         | 92,72%        | 12         | 0,02%         |
| Provinsi Gorontalo |                           | 729             | <b>358.653</b> | <b>261.770</b> | <b>72,99%</b> | <b>595</b> | <b>0,17 %</b> |

Lanjutan tabel 2.10

| No.                | Lokasi                    | Sharing (KK)  | % Akses Sharing | BABS (KK)     | % Akses BABS | % Akses Progres layak |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1                  | Kabupaten Boalemo         | 16.499        | 38,71%          | 2.148         | 5,04%        | 94,96%                |
| 2                  | Kabupaten Gorontalo       | 10.847        | 9,34%           | 16.638        | 14,33%       | 85,67%                |
| 3                  | Kabupaten Pohuwato        | 12.201        | 27,64%          | 5.465         | 12,38%       | 87,62%                |
| 4                  | Kabupaten Bone Bolango    | 14.398        | 24,75%          | 5.887         | 10,12%       | 89,88%                |
| 5                  | Kabupaten Gorontalo Utara | 5.879         | 16,67%          | 1.798         | 5,10%        | 94,90%                |
| 6                  | Kota Gorontalo            | 2.811         | 4,51%           | 1.717         | 2,76%        | 97,24%                |
| Provinsi Gorontalo |                           | <b>62.635</b> | <b>17,46%</b>   | <b>33.653</b> | <b>9,38%</b> | <b>90,62%</b>         |

Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 2-11

Rekapitulasi Akses Sanitasi (air limbah domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No | Lokasi            | Air Limbah Domestik                                                                           |                                                                                              |                                                                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) <b>Layak</b> | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) <b>Aman</b> | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikan buang air besar sembarangan <b>(BABs)</b> |
| 1  | Kabupaten Boalemo | 94,96%                                                                                        | 1,79%                                                                                        | 5,04%                                                                                     |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No                        | Lokasi                    | Air Limbah Domestik                                                                           |                                                                                              |                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                           | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) <b>Layak</b> | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) <b>Aman</b> | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan <b>(BABs)</b> |
| 2                         | Kabupaten Gorontalo       | 85,67%                                                                                        | 0,43%                                                                                        | 14,33%                                                                                     |
| 3                         | Kabupaten Pohuwato        | 87,62%                                                                                        | 1,11%                                                                                        | 12,38%                                                                                     |
| 4                         | Kabupaten Bone Bolango    | 89,88%                                                                                        | 0,84%                                                                                        | 10,12%                                                                                     |
| 5                         | Kabupaten Gorontalo Utara | 94,90%                                                                                        | 2,17%                                                                                        | 5,10%                                                                                      |
| 6                         | Kota Gorontalo            | 97,24%                                                                                        | 1,62%                                                                                        | 2,76%                                                                                      |
| <b>Provinsi Gorontalo</b> |                           | <b>90,62%</b>                                                                                 | <b>1,10%</b>                                                                                 | <b>9,38%</b>                                                                               |

Sumber :

Layak, Babs : Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aman : BPPW Gorontalo, Data Keberfungsian Infrastruktur Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 (data SPALDT skala permukiman), berdasarkan SE 13/SE/DC/2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Dirjen Cipta Karya, Tahun 2022

Tabel 2-12

Perbandingan Capaian dan Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Komponen                                    | Perbandingan Target |                       | Eksisting (Oktober 2024) | Keterangan                                                                             |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | RPJMN 2020-2024     | DRAFT RPJMN 2025-2029 |                          |                                                                                        |
| 1.  | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) |                     |                       |                          |                                                                                        |
|     | • Layak                                     | 90%                 | 100%                  | <b>90,62%</b>            | • Akses sanitasi layak (air limbah domestik) diatas TARGET RPJMN 2024L (lebih 0,617 %) |
|     | • Aman                                      | 10%                 | 30%                   | <b>1,102%</b>            | • Akses sanitasi aman (air limbah domestik) MASIH DIBAWAH                              |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                               | Perbandingan Target    |                             | Eksisting<br>(Oktober 2024) | Keterangan                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        | RPJMN<br>2020-<br>2024 | DRAFT<br>RPJMN<br>2025-2029 |                             |                                                                                                                                                                             |
|     |                                                        |                        |                             |                             | TARGET NASIONAL<br>(kurang 8,898 %)                                                                                                                                         |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>BABs</li> </ul> | 0%                     | 0                           | <b>9,38%</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABs) DIATAS TARGET NASIONAL, sebesar 9,38%</li> </ul> |

Sumber : tabel 2.11 dan tabel 2.12

Tabel 2-13

Sebaran Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) Provinsi Gorontalo  
Berdasarkan Draft RPJMN 2025-2029

| Komponen                                                            | Baseline<br>RPJMN | Tahun  |        |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                                     | 2024              | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| Target Akses Sanitasi<br>(air limbah domestik)                      |                   |        |        |        |        |         |
| Layak                                                               | 90,00%            | 92,00% | 94,00% | 96,00% | 98,00% | 100,00% |
| Aman                                                                | 10,00%            | 12,50% | 16,50% | 20,50% | 24,50% | 30,00%  |
| - SPALD Setempat                                                    | 8,33%             | 10,42% | 13,75% | 17,08% | 20,42% | 25,00%  |
| - SPALD Terpusat                                                    | 1,39%             | 2,08%  | 2,75%  | 3,42%  | 4,08%  | 5,00%   |
| SPALD Terpusat<br>perkotaan dan<br>permukiman berbasis<br>institusi | 1,11%             | 1,67%  | 2,20%  | 2,73%  | 3,27%  | 4,00%   |
| SPALD Terpusat<br>permukiman berbasis<br>masyarakat                 | 0,28%             | 0,42%  | 0,55%  | 0,68%  | 0,82%  | 1,00%   |
| BABs                                                                | 0%                | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%      |
| Stop Buang Air Besar<br>Sembarangan (SBS)                           | 100%              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    |

Sumber : daft RPJMN 2025-2029

**Pengelolaan Persampahan**

Untuk mengetahui gap akses sanitasi (persampahan) di Provinsi Gorontalo, dibawah ini diuraikan data sementara terkait volume sampah yang tertangani masing-masing kabupaten/kota berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen SSK dan data UPTD TPA Regional Talumelito, sebagai berikut.

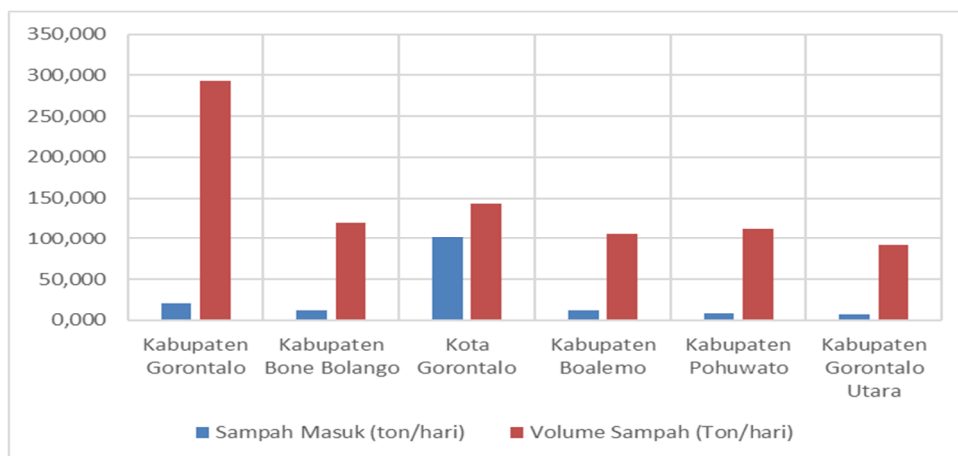
Tabel 2-14  
Volume Sampah Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No               | Lokasi                    | Volume sampah tertangani (ton/hari) | Perhitungan Volume Sampah Total (ton/hari) | % Penanganan  |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1                | Kabupaten Boalemo         | 12,660                              | 106,126                                    | 11,93%        |
| 2                | Kabupaten Gorontalo       | 15,241                              | 273,184                                    | 5,58%         |
| 3                | Kabupaten Pohuwato        | 8,620                               | 113,0                                      | 7,63%         |
| 4                | Kabupaten Bone Bolango    | 7,004                               | 120,611                                    | 5,81%         |
| 5                | Kabupaten Gorontalo Utara | 7,468                               | 91,280                                     | 8,18%         |
| 6                | Kota Gorontalo            | 75,654                              | 97,302                                     | 77,75%        |
| <b>T O T A L</b> |                           | <b>136,111</b>                      | <b>801,518</b>                             | <b>19,48%</b> |

Sumber : Dokumen SSK Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara  
UPTD TPA Regional Talumelito (Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo)  
Hasil Perhitungan pada Tabel 2-7

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029



Gambar 2.3

Grafik Prosentase Penanganan Sampah  
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 (sumber : Tabel 2.14)

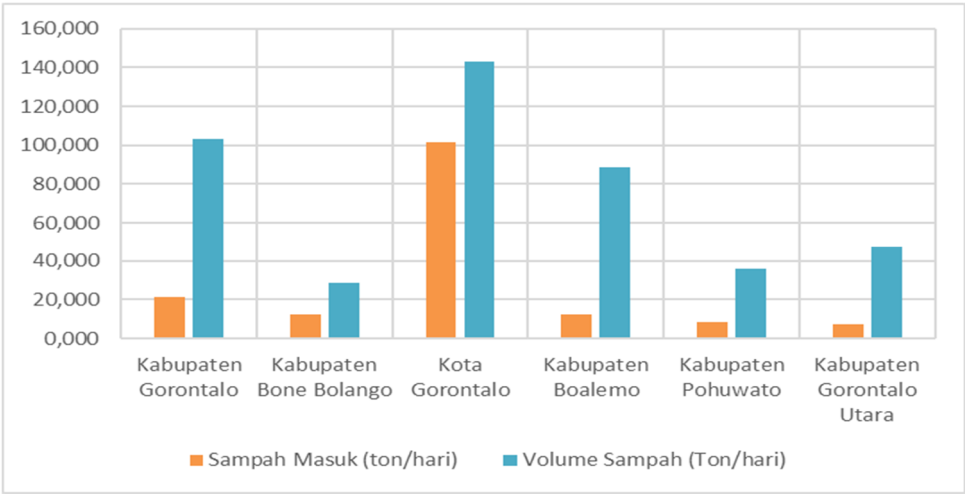
Tabel 2-15

Volume Sampah Perkotaan Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No        | Nama Wilayah              | Volume sampah tertangani (ton/hari) | Perhitungan Volume Sampah perkotaan (ton/hari) | % Penanganan |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1         | Kabupaten Boalemo         | 12,660                              | 88,849                                         | 14,25%       |
| 2         | Kabupaten Gorontalo       | 21,221                              | 103,1                                          | 15,40%       |
| 3         | Kabupaten Pohuwato        | 8,620                               | 36,20                                          | 23,67%       |
| 4         | Kabupaten Bone Bolango    | 12,228                              | 28,932                                         | 24,21%       |
| 5         | Kabupaten Gorontalo Utara | 7,468                               | 47,566                                         | 15,70%       |
| 6         | Kota Gorontalo            | 73,915                              | 97,302                                         | 77,75%       |
| T O T A L |                           | 136,111                             | 401,96                                         | 28,50%       |

Sumber : UPTD TPA Regional Talumelito (Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo)  
Hasil Perhitungan pada Tabel 2-7

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029



Gambar 2.4  
Grafik Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan  
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 (sumber : Tabel 2.15)

Berdasarkan volume sampah yang tertangani di TPA, dibandingkan dengan volume sampah perkotaan yang dihasilkan, maka pencapaian akses sanitasi (penanganan persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-16  
Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan)  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Komponen                               | Perbandingan Target |                       | Eksisting (Oktober 2024) | Keterangan  |
|-----|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
|     |                                        | RPJMN 2020-2024     | Draft RPJMN 2025-2029 |                          |             |
| 1   | Target Akses Penanganan Persampahan    | 80%                 |                       |                          |             |
| 2   | Target Akses Pengurangan Persampahan   | 20%                 |                       |                          |             |
|     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh |                     | 85,00%                | 28,541%                  | Defisit 56% |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                         | Perbandingan Target |                       | Eksisting (Oktober 2024) | Keterangan     |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|     |                                                  | RPJMN 2020-2024     | Draft RPJMN 2025-2029 |                          |                |
|     | pengumpulan sampah                               |                     |                       |                          |                |
|     | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu) |                     | 47%                   | <b>15,801%</b>           | Defisit 31,20% |
|     | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah    |                     | 38,0%                 | <b>12,740%</b>           | Defisit 25,26% |
|     | sampah terdaur ulang                             |                     | 20,0%                 | 4,410%                   | Defisit 16%    |
|     |                                                  |                     |                       |                          |                |

Sumber : Tabel 2.10, 2.15

### **Pengurangan Persampahan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud pengurangan sampah adalah kegiatan mengurangi timbunan sampah dengan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah (pasal 20, angka 1).

Proses pengurangan sampah di Provinsi Gorontalo, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-17  
Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pengurangan Sampah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Lokasi                          | Nama Fasilitas | Sampah masuk (ton/thn) | Sampah terkelola (ton/thn) | Pengelola |
|-----|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| A.  | <b><u>Bank Sampah Induk</u></b> |                |                        |                            |           |
| 1   | Kota Gorontalo                  | Bank Sampah    | 620,50                 | 620,50                     | LSM       |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.       | Lokasi                  | Nama Fasilitas           | Sampah masuk (ton/thn) | Sampah terkelola (ton/thn) | Pengelola  |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
|           |                         | Induk Iloheluma          |                        |                            |            |
| 2         | Kab. Gorontalo          | Ud. Haniyah              | 5.475,00               | 0,00                       | LSM        |
| 3         | Kab. Gorontalo          | Gemilang                 | 2.138,90               | 0,00                       | Pemda      |
| 4         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Himalaya     | 532,90                 | 532,83                     | Pemda      |
|           | <b>Jumlah</b>           |                          | <b>8.949,80</b>        | <b>1.335,83</b>            |            |
| <b>B.</b> | <b>Bank Sampah Unit</b> |                          |                        |                            |            |
| 1         | Kota Gorontalo          | Bank Sampah Unit Mutiara | 360,00                 | 360,00                     | LSM        |
| 2         | Kota Gorontalo          | Bank Sampah Unit Maps    | 0,19                   | 0,19                       | LSM        |
| 3         | Kota Gorontalo          | Bank Sampah Archipelago  | 9,00                   | 9,00                       | LSM        |
| 4         | Kab. Gorontalo          | Budi Lestari             | 12.600,00              | 0,00                       | Masyarakat |
| 5         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Mopio        | 92,50                  | 92,50                      | Pemda      |
| 6         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Pelangi      | 90,35                  | 90,35                      | Pemda      |
| 7         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Maleo        | 137,09                 | 137,09                     | Pemda      |
| 8         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Marisa Indah | 18,52                  | 18,52                      | Pemda      |
| 9         | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Panua        | 15,23                  | 15,23                      | Pemda      |
| 10        | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Madani       | 35,65                  | 33,00                      | Pemda      |
| 11        | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Molamahu     | 69,31                  | 69,31                      | Pemda      |
| 12        | Kab. Pohuwato           | Bank Sampah Pasar Marisa | 58,09                  | 58,09                      | Pemda      |
|           | <b>Jumlah</b>           |                          | <b>13.485,94</b>       | <b>883,29</b>              |            |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Lokasi              | Nama Fasilitas            | Sampah masuk (ton/thn) | Sampah terkelola (ton/thn) | Pengelola  |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| C.  | <b>Rumah Kompos</b> |                           |                        |                            |            |
| 1   | Kab. Bone Bolango   | Rumah Kompos Ulantha      | 152,94                 | 152,94                     | Pemda      |
| 2   | Kota Gorontalo      | Pasar Liluwo              | 76,65                  | 76,65                      | Masyarakat |
| 3   | Kab. Pohuwato       | Rumah Kompos Taluduyunu   | 12,78                  | 12,78                      | Masyarakat |
| 5   | Kab. Pohuwato       | rumah kompos griya indah  | 7,30                   | 7,30                       | Masyarakat |
| 6   | Kab. Pohuwato       | Rumah Kompos Teratai      | 16,79                  | 16,79                      | Masyarakat |
| 7   | Kota Gorontalo      | Rumah Kompos pasar liluwo | 182,50                 | 182,50                     | Masyarakat |
|     | <b>Jumlah</b>       |                           | <b>448,96</b>          | <b>448,96</b>              |            |
| D.  | <b>TPS 3R</b>       |                           |                        |                            |            |
| 1   | Kab. Bone Bolango   | Ksm Tps 3r Sejahtera      | 228,13                 | 228,13                     | LSM        |
| 2   | Kab. Bone Bolango   | Tps 3r Cemerlang          | 102,20                 | 102,20                     | LSM        |
| 3   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Alibotu            | 182,50                 | 182,50                     | LSM        |
| 4   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Moodu              | 401,50                 | 401,50                     | LSM        |
| 5   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Leato Saelatan     | 36,50                  | 36,50                      | LSM        |
| 6   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Otanaha Smart      | 200,75                 | 200,75                     | LSM        |
| 7   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Setiatama          | 602,25                 | 602,25                     | LSM        |
| 8   | Kota Gorontalo      | Tps 3r Smart City         | 292,00                 | 290,38                     | LSM        |
| 9   | Kota Gorontalo      | Ksm Dembulo               | 36,50                  | 36,50                      | LSM        |
| 10  | Kota Gorontalo      | Tps 3r Ramadhani          | 182,50                 | 177,03                     | LSM        |
| 11  | Kota Gorontalo      | Tps 3r Maju Bersama       | 730,00                 | 719,05                     | LSM        |
| 12  | Kota Gorontalo      | Tps 3r Selayar            | 365,00                 | 365,00                     | LSM        |
|     | <b>Jumlah</b>       |                           | <b>3359,83</b>         | <b>3341,79</b>             |            |
| E.  | <b>PUSAT DAUR</b>   |                           |                        |                            |            |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.       | Lokasi                                      | Nama Fasilitas                      | Sampah masuk (ton/thn) | Sampah terkelola (ton/thn) | Pengelola         |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|           | <b>ULANG (PDU)</b>                          |                                     |                        |                            |                   |
| 1         | Kab. Pohuwato                               | Pdu Madani Teratai Kecamatan Marisa | 285,50                 | 245,35                     | Pemda             |
| 2         | Kab. Pohuwato                               | Pdu Barakati Kecamatan Duhiadaa     | 96,73                  | 85,78                      | Pemda             |
|           | <b>Jumlah</b>                               |                                     | <b>382,23</b>          | <b>331,13</b>              |                   |
| <b>F.</b> | <b>SEKTOR INFORMAL (LAPAK DAN PENGEPUL)</b> |                                     |                        |                            |                   |
| 1         | Kab. Bone Bolango                           | Lapak Talili                        | 13,87                  | 13,87                      | Kab. Bone Bolango |
| 2         | Kota Gorontalo                              | Ud. Maju Jaya                       | 1.113,25               | 1.113,25                   | Kota Gorontalo    |
| 3         | Kota Gorontalo                              | Ud. Raihan Putra Mandiri            | 803,00                 | 803,00                     | Kota Gorontalo    |
| 4         | Kota Gorontalo                              | Loak Jaya                           | 2.190,00               | 2.175,40                   | Kota Gorontalo    |
| 5         | Kota Gorontalo                              | Ud. Umi Latifa                      | 730,00                 | 730,00                     | Kota Gorontalo    |
| 6         | Kota Gorontalo                              | Ud. Barokah                         | 1.828,65               | 1.825,00                   | Kota Gorontalo    |
| 7         | Kab. Pohuwato                               | Ud. Dua Putra Marisa                | 4.580,75               | 4.577,46                   | Kab. Pohuwato     |
| 8         | Kab. Pohuwato                               | Pengepul                            | 173,38                 | 171,55                     | Kab. Pohuwato     |
|           | <b>Jumlah</b>                               |                                     | <b>11.432,90</b>       | <b>11.409,53</b>           |                   |

Sumber : KLHK, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Tabel 2-18  
Rekapitulasi Sampah yang Dikelola (Proses Pengurangan Sampah)  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Jenis Sarana Pengurangan Sampah | Sampah Masuk |            | Sampah Dikelola |            |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|
|                                 | (ton/tahun)  | (ton/hari) | (ton/tahun)     | (ton/hari) |
| Bank Sampah Induk               | 8.949,80     | 24,86      | 1.335,83        | 3,71       |
| Bank Sampah Unit                | 13.485,94    | 37,46      | 883,29          | 2,45       |
| Komposting Skala RT RW          | 255,50       | 0,71       | 255,50          | 0,71       |
| Rumah Kompos                    | 448,96       | 1,25       | 448,96          | 1,25       |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

|                                         |                  |               |                  |              |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| TPS 3R                                  | 3.359,83         | 9,33          | 3.341,79         | 9,28         |
| Pusat Daur Ulang                        | 382,23           | 1,06          | 331,13           | 0,92         |
| Sektor Informal<br>(Lapak dan Pengepul) | 11.432,90        | 31,76         | 11.409,53        | 31,69        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>38.315,16</b> | <b>106,43</b> | <b>18.006,03</b> | <b>50,02</b> |

Sumber : Tabel 2.17

Jika timbulan sampah yang dihasilkan penduduk di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 adalah 801,52 ton/hari atau 401,96 ton/hari untuk timbulan sampah perkotaan, maka pengurangan sampah administrasi adalah  $(50,02/801,52) \times 100\% = 6,24\%$  dan pengurangan sampah perkotaan adalah  $(50,02/401,96) \times 100\% = 12,44\%$ .

Perbandingan capaian akses pengurangan sampah dengan target pemerintah pusat dan provinsi, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-19

Capaian Target Akses Sanitasi (Pengurangan Persampahan)  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| No. | Komponen                             | Perbandingan Target |          | Eksisting (Oktober 2024)         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | Pusat               | Provinsi |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | Target Akses Pengurangan Persampahan | 20%                 | 32%      | Adm = 6,24%%<br>Perkotaan 12,44% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses sanitasi layak (penanganan persampahan) DIBAWAH dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dengan gap sebesar 13,76% dan 7,60% (perkotaan)</li> <li>Akses sanitasi layak (penanganan persampahan) DIBAWAH dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, dengan gap sebesar 25,76% dan 19,60% (perkotaan)</li> </ul> |

Sumber : Tabel 2.17 dan Tabel 2.18

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Melihat gap yang terlalu besar antara kondisi eksisting dengan target draft RPJMN Tahun 2025-2029, maka berdasarkan target realistis sesuai kemampuan aspek peraturan, kelembagaan, teknis operasional dan pendanaan, maka akses sanitasi akan dihitung berdasarkan data eksisting sanitasi Tahun 2024 dan target sanitasi pada Tahun 2025.

Kenaikan target selama 1 (satu) tahun akan dipergunakan sebagai tambahan akses pada tahun-tahun selanjutnya.

Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-20  
Target dan Sebaran Akses Sanitasi  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                                          | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|       |                                                                   | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| A.    | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)                       |                       |        |        |        |         |
| 1.    | Layak                                                             | 92,50%                | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2     | Aman                                                              | 4,88%                 | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 2.a   | SPALD Setempat                                                    | 4,03%                 | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |
| 2.b   | SPALD Terpusat                                                    | 0,83%                 | 1,41%  | 1,91%  | 2,41%  | 3,04%   |
| 2.b.1 | <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> | 0,66%                 | 1,13%  | 1,53%  | 1,93%  | 2,43%   |
| 2.b.2 | <i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>              | 0,13%                 | 0,23%  | 0,31%  | 0,39%  | 0,49%   |
| 3     | BABs                                                              | 7,23%                 | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  | 1,90%   |
| B.    | Target Akses Sanitasi persampahan)                                |                       |        |        |        |         |
| 5     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah         | 50,05%                | 56,62% | 63,19% | 69,75% | 85,00%  |
| 5.a   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan                               | 30,03%                | 32,77% | 35,50% | 38,23% | 49,18%  |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                      | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                               | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|       | Urug Residu)                                  |                       |        |        |        |        |
| 5.b   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 20,02%                | 23,85% | 27,69% | 31,53% | 35,82% |
| 5.b.1 | sampah terdaur ulang                          | 6,12%                 | 7,58%  | 9,04%  | 10,51% | 12,09% |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

Tabel 2-21

Target dan Sebaran Akses Sanitasi Kabupaten/kota

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                                    | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|     |                                             | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| A.  | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) |                       |        |        |        |         |
| 1.  | Layak                                       |                       |        |        |        |         |
|     | • Kabupaten Boalemo                         | 95,97%                | 96,98% | 97,98% | 98,99% | 100,00% |
|     | • Kabupaten Gorontalo                       | 88,54%                | 91,40% | 94,27% | 97,13% | 100,00% |
|     | • Kabupaten Bone Bolango                    | 88,54%                | 91,40% | 94,27% | 97,13% | 100,00% |
|     | • Kabupaten Pohuwato                        | 90,09%                | 92,57% | 95,05% | 97,52% | 100,00% |
|     | • Kabupaten Gorontalo Utara                 | 95,92%                | 96,94% | 97,96% | 98,98% | 100,00% |
|     | • Kota Gorontalo                            | 95,97%                | 96,98% | 97,98% | 98,99% | 100,00% |
| 2   | Aman                                        |                       |        |        |        |         |
|     | • Kabupaten Boalemo                         | 2,00%                 | 3,83%  | 5,66%  | 7,49%  | 9,32%   |
|     | • Kabupaten Gorontalo                       | 2,30%                 | 6,00%  | 7,00%  | 8,00%  | 10,00%  |
|     | • Kabupaten Bone Bolango                    | 1,00%                 | 2,00%  | 3,00%  | 4,00%  | 5,00%   |
|     | • Kabupaten Pohuwato                        | 5,00%                 | 8,89%  | 12,78% | 16,67% | 20,56%  |
|     | • Kabupaten Gorontalo Utara                 | 4,00%                 | 7,29%  | 10,58% | 13,87% | 17,16%  |
|     | • Kota                                      | 15,00%                | 21,64% | 28,28% | 34,92% | 41,56%  |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                                          | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                                                   | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|       | Gorontalo                                                         |                       |        |        |        |        |
| 2.a   | SPALD Setempat                                                    |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                               | 1,66%                 | 3,18%  | 4,70%  | 6,22%  | 7,74%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                             | 1,91%                 | 4,98%  | 5,81%  | 6,64%  | 8,30%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                          | 0,83%                 | 1,66%  | 2,49%  | 3,32%  | 4,15%  |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                              | 4,00%                 | 7,38%  | 10,61% | 13,84% | 17,06% |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                                       | 3,32%                 | 6,05%  | 8,78%  | 11,51% | 14,24% |
|       | • Kota Gorontalo                                                  | 12,45%                | 17,96% | 23,47% | 28,98% | 34,49% |
| 2.b   | SPALD Terpusat                                                    |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                               | 0,34%                 | 0,65%  | 0,96%  | 1,27%  | 1,58%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                             | 0,39%                 | 1,02%  | 1,19%  | 1,36%  | 1,70%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                          | 0,17%                 | 0,34%  | 0,51%  | 0,68%  | 0,85%  |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                              | 0,85%                 | 1,51%  | 2,17%  | 2,83%  | 4,11%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                                       | 0,68%                 | 1,24%  | 1,80%  | 2,36%  | 2,92%  |
|       | • Kota Gorontalo                                                  | 2,55%                 | 3,68%  | 4,81%  | 5,94%  | 7,07%  |
| 2.b.1 | <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                               | 0,27%                 | 0,52%  | 0,77%  | 1,02%  | 1,27%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                             | 0,31%                 | 0,82%  | 0,95%  | 1,09%  | 1,36%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                          | 0,14%                 | 0,27%  | 0,41%  | 0,54%  | 0,68%  |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                              | 0,68%                 | 1,21%  | 1,74%  | 2,27%  | 3,29%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                                       | 0,54%                 | 0,99%  | 1,44%  | 1,89%  | 2,33%  |
|       | • Kota Gorontalo                                                  | 2,04%                 | 2,94%  | 3,85%  | 4,75%  | 5,65%  |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                                  | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                                           | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 2.b.2 | SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat             |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                       | 0,05%                 | 0,10%  | 0,15%  | 0,20%  | 0,25%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                     | 0,06%                 | 0,16%  | 0,19%  | 0,22%  | 0,27%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                  | 0,03%                 | 0,05%  | 0,08%  | 0,11%  | 0,14%  |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                      | 0,14%                 | 0,24%  | 0,35%  | 0,45%  | 0,66%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                               | 0,11%                 | 0,20%  | 0,29%  | 0,38%  | 0,47%  |
|       | • Kota Gorontalo                                          | 0,41%                 | 0,59%  | 0,77%  | 0,95%  | 1,13%  |
| 3     | BABs                                                      |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                       | 3,00%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                     | 15,00%                | 11,80% | 8,60%  | 5,40%  | 2,20%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                  | 9,00%                 | 8,90%  | 8,80%  | 8,70%  | 8,60%  |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                      | 10,38%                | 7,90%  | 5,43%  | 2,95%  | 0,48%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                               | 6,00%                 | 4,53%  | 3,06%  | 1,59%  | 0,12%  |
|       | • Kota Gorontalo                                          | 0,00%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| B.    | Target Akses Sanitasi (persampahan)                       |                       |        |        |        |        |
| 5     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                                       | 28,40%                | 42,55% | 56,70% | 70,85% | 85,00% |
|       | • Kabupaten Gorontalo                                     | 46,75%                | 56,31% | 65,87% | 75,44% | 85,00% |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                                  | 45,89%                | 55,66% | 65,44% | 75,22% | 85,00% |
|       | • Kabupaten Pohuwato                                      | 32,93%                | 32,93% | 32,93% | 32,93% | 85,00% |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                         | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                                  | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                      | 50,76%                | 59,32% | 67,88% | 76,44% | 85,00% |
|       | • Kota Gorontalo                                 | 95,58%                | 92,93% | 90,29% | 87,64% | 85,00% |
| 5.a   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu) |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                              | 23,40%                | 32,55% | 41,70% | 50,85% | 60,00% |
|       | • Kabupaten Gorontalo                            | 20,75%                | 26,31% | 31,87% | 37,44% | 43,00% |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                         | 25,79%                | 27,69% | 29,60% | 31,51% | 33,42% |
|       | • Kabupaten Pohuwato                             | 20,93%                | 20,93% | 20,93% | 20,93% | 70,26% |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                      | 23,76%                | 31,82% | 39,88% | 47,94% | 56,00% |
|       | • Kota Gorontalo                                 | 65,58%                | 57,28% | 48,99% | 40,69% | 32,40% |
| 5.b   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah    |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                              | 5,00%                 | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% |
|       | • Kabupaten Gorontalo                            | 26,00%                | 30,00% | 34,00% | 38,00% | 42,00% |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                         | 20,10%                | 27,97% | 35,84% | 43,71% | 51,58% |
|       | • Kabupaten Pohuwato                             | 12,00%                | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 14,74% |
|       | • Kabupaten Gorontalo Utara                      | 27,00%                | 27,50% | 28,00% | 28,50% | 29,00% |
|       | • Kota Gorontalo                                 | 30,00%                | 35,65% | 41,30% | 46,95% | 52,60% |
| 5.b.1 | sampah terdaur ulang                             |                       |        |        |        |        |
|       | • Kabupaten Boalemo                              | 1,00%                 | 2,00%  | 3,00%  | 4,00%  | 5,00%  |
|       | • Kabupaten Gorontalo                            | 1,00%                 | 2,00%  | 3,00%  | 4,00%  | 5,00%  |
|       | • Kabupaten Bone Bolango                         | 4,12%                 | 5,73%  | 7,34%  | 8,95%  | 10,57% |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Komponen                    | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                             | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | • Kabupaten Pohuwato        | 3,25%                 | 3,25%  | 3,25%  | 3,25%  | 3,99%  |
|     | • Kabupaten Gorontalo Utara | 0,00%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
|     | • Kota Gorontalo            | 27,37%                | 32,53% | 37,68% | 42,84% | 47,99% |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

## 2.2 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

### 2.2.1 Umum

Berdasarkan petunjuk teknis penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota, memuat kondisi eksisting sanitasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi, dimana profil sanitasi tersebut meliputi :

- Aspek peraturan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek infrastruktur eksisting pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek perilaku masyarakat pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek pendanaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

**Bagian-1 : Aspek Peraturan Pengelolaan Persampahan dan air limbah domestik**

Tabel 2-22

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Pengaturan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

| Lokasi             | Aspek Peraturan Terkait | Pelayanan Persampahan                                                                                                                     | Aspek Peraturan Terkait | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Boalemo  | Pengelolaan             | PERBUP Boalemo No 59 th 2018 ttg Juklak Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                            | Pengelolaan             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Lmbah Domestik</li> <li>Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2021 tentang UPTD Pengelolaan Air Lmbah Domestik</li> </ul> |
|                    | Retribusi               | Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Pengurangan             | Belum Ada                                                                                                                                 | Retribusi               | Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah                                                                                                                                                            |
|                    | Penanganan              | Belum Ada                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Perencanaan Teknis      | Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo dalam Pengelolaan Sampah | SPALD-T                 | Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabupaten Puhuwato | Pengelolaan             | Peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Puhuwato                                   | SPALD-S                 | Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Retribusi               | Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Retribusi Sampah                                                                                | Perencanaan Teknis      | Strategi Sanitasi Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2027                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Pengurangan             | Belum Ada                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Penanganan              | Belum Ada                                                                                                                                 | Pengelolaan             | Peraturan Bupati Puhuwato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                     |
|                    | Perencanaan Teknis      | Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puhuwato Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kabupaten Puhuwato | Pengelolaan             | Peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Puhuwato                                   | Retribusi               | Peraturan Daerah Kabupaten Puhuwato No. 4 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum                                                                                                                                                                         |
|                    | Retribusi               | Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Retribusi Sampah                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | Pengurangan             | Belum Ada                                                                                                                                 | SPALD-T                 | Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Penanganan              | Belum Ada                                                                                                                                 | SPALD-S                 | Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Perencanaan Teknis      | Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puhuwato Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah                  | Perencanaan Teknis      | Strategi Sanitasi Kabupaten Puhuwato Tahun 2019-2024                                                                                                                                                                                                     |

Sumber : Dinas, Badan dan Lembaga di kabupaten/kota Tahun 2024 BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.22

| Lokasi              | Aspek Peraturan Terkait | Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                    | Aspek Peraturan Terkait | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                            |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Gorontalo | Pengelolaan             | Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo                                                                                         | Pengelolaan             | Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2017 tentang UPTD Pengelolaan Air Lmbah Domestik |
|                     | Retribusi               | Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (instruksi bupati, Surat Edaran)                                                         |                         |                                                                                            |
|                     | Pengurangan             | Belum Ada                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                            |
|                     | Penanganan              | Belum Ada                                                                                                                                                                                | Retribusi               | Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum                  |
|                     | Perencanaan Teknis      | Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | SPALD-T                 | Belum Ada                                                                                  |
|                     |                         |                                                                                                                                                                                          | SPALD-S                 | Belum Ada                                                                                  |
|                     |                         |                                                                                                                                                                                          | Perencanaan Teknis      | Strategi Sanitasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2023-2027                                      |

| Lokasi                 | Aspek Peraturan Terkait | Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                            | Aspek Peraturan Terkait | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Bone Bolango | Pengelolaan             | Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango                                                                                           | Pengelolaan             | Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021 tetang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
|                        | Retribusi               | Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelimpahan wewenang pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone Bolango |                         |                                                                                                                                                                      |
|                        | Pengurangan             | Belum Ada                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                      |
|                        | Penanganan              | Belum Ada                                                                                                                                                                                        | Retribusi               | Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum                                                                               |
|                        | Perencanaan Teknis      | Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo dalam Pengelolaan Sampah                                                        | SPALD-T                 | Belum Ada                                                                                                                                                            |
|                        |                         |                                                                                                                                                                                                  | SPALD-S                 | Belum Ada                                                                                                                                                            |
|                        |                         |                                                                                                                                                                                                  | Perencanaan Teknis      | Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027                                                                                                             |

Sumber : Dinas, Badan dan Lembaga di kabupaten/kota Tahun 2024 BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-23  
 Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan  
 Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Nama<br>Kabupaten<br>/Kota | PERATURAN   |           |         |                                             |                                            |                                                                                  |         | NILAI<br>PERATURAN |
|----------------------------|-------------|-----------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                            | Perda       |           |         | Perkada                                     |                                            |                                                                                  |         |                    |
|                            | Pengelolaan | Retribusi | Scoring | Perkada<br>tentang<br>Pengurangan<br>Sampah | Perkada<br>tentang<br>Penanganan<br>Sampah | Perkada tentang<br>Dokumen Perencanaan<br>Teknis (Jakstrada/<br>Masterplan /SSK) | Scoring |                    |
| 2                          | 3           | 4         | 5       | 6                                           | 7                                          | 8                                                                                | 9       | 10                 |
| Boalemo                    | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Gorontalo                  | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Pohuwato                   | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Bone<br>Bolango            | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Gorontalo<br>Utara         | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Kota<br>Gorontalo          | 1           | 1         | 100%    | 0                                           | 0                                          | 1                                                                                | 33%     | 67%                |
| Total                      |             |           | 100%    |                                             |                                            |                                                                                  | 33%     | 67%                |

sumber : Dinas, Badan Lembaga pengelola persampahan di Kabupaten/kota

Skoring dan nilai peraturan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen program RSP Kementerian PUPR, 2024

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-24  
Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Nama<br>Kabupaten<br>/Kota | PERATURAN   |           |         |                               |                               |                                                                               |         | NILAI<br>PERATURAN |
|----------------------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                            | Perda       |           |         | Perkada                       |                               |                                                                               |         |                    |
|                            | Pengelolaan | Retribusi | Scoring | Perkada<br>tentang<br>SPALD-T | Perkada<br>tentang<br>SPALD-S | Perkada tentang<br>Dokumen Perencanaan<br>Teknis (Jakstrada/<br>RISPALD /SSK) | Scoring |                    |
| 2                          | 3           | 4         | 5       | 6                             | 7                             | 8                                                                             | 9       | 10                 |
| Boalemo                    | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Gorontalo                  | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Pohuwato                   | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Bone<br>Bolango            | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Gorontalo<br>Utara         | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Kota<br>Gorontalo          | 1           | 1         | 100%    | 0                             | 0                             | 1                                                                             | 33%     | 67%                |
| Total                      | 6           | 6         | 100%    | 0                             | 0                             | 6                                                                             | 33%     | 67%                |

sumber : Dinas, Badan Lembaga pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten/kota

Scoring dan nilai peraturan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen program RSP Kementerian PUPR, 2024

### **Bagian-2 : Aspek kelembagaan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik**

Data aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Kelembagaan pemerintah pengelola persampahan dan air limbah domestik (seksi/bidang/dinas, UPTD, BLUD dan BUMD)
- Kelembagaan masyarakat (operator bank sampah dan operator TPS 3R) untuk pengelolaan persampahan
- Kelembagaan masyarakat (operator SPALD-T Perkotaan, IPAL Permukiman > 10 SR, IPAL Kawasan Tertentu dan operator SPALD-S Komunal, MCK, IPAL Komunal 2-10 SR), untuk pengelolaan air limbah domestik

Instrumen profil sanitasi untuk aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-25  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

| Lokasi            | Aspek Kelembagaan      | Jenis                   | Jumlah | Jumlah yang aktif | Scoring | Scoring total kelembagaan masyarakat | Nilai Kelembagaan |
|-------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Kabupaten Boalemo | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 50%                                  | 25%               |
|                   | Kelembagaan Masyarakat | Bank sampah induk/ unit | 1      | 1                 | 50%     |                                      |                   |
|                   |                        | TPS 3 R                 | 2      | 0                 | 0%      |                                      |                   |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Lokasi                    | Aspek Kelembagaan      | Jenis                   | Jumlah | Jumlah yang aktif | Scoring | Scoring total kelembagaan masyarakat | Nilai Kelembagaan |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Kabupaten Gorontalo       | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 25%                                  | 12,5%             |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | Bank sampah induk/ unit | 4      | 2                 | 50%     |                                      |                   |
|                           |                        | TPS 3 R                 | 1      | 0                 | 0%      |                                      |                   |
| Kabupaten Pohuwato        | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 40%                                  | 20%               |
|                           |                        | Bank sampah induk/ unit | 0      | 0                 | 0%      |                                      |                   |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | TPS 3 R                 | 10     | 8                 | 80%     |                                      |                   |
| Kabupaten Bone Bolango    | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 62,50%                               | 31,25%            |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | Bank sampah induk/ unit | 8      | 8                 | 100%    |                                      |                   |
|                           |                        | TPS 3 R                 | 4      | 1                 | 25%     |                                      |                   |
| Kabupaten Gorontalo Utara | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 50%                                  | 25%               |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | Bank sampah induk/ unit | 1      | 1                 | 100%    |                                      |                   |
|                           |                        | TPS 3 R                 | 3      | 0                 | 0%      |                                      |                   |
| Kota Gorontalo            | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas     | -      | -                 | 0%      | 66,67%                               | 33,33%            |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | Bank sampah induk/ unit | 7      | 7                 | 100%    |                                      |                   |
|                           |                        | TPS 3 R                 | 9      | 3                 | 33%     |                                      |                   |

Sumber : hasil perhitungan nilai kelembagaan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen RSP Kementerian PUPR, 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
- 5) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
- 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato

Tabel 2-26  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Domestik

| Lokasi                    | Aspek Kelembagaan      | Jenis               | Jumlah | Jumlah yang aktif | Scoring | Scoring total kelembagaan masyarakat | Nilai Kelembagaan |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Kabupaten Boalemo         | Kelembagaan pemerintah | UPTD                | 1      | 1                 | 33%     | 90%                                  | 0%                |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-T             | 10     | 8                 | 80%     |                                      |                   |
|                           |                        | SPALD-S             | 935    | 935               | 100%    |                                      |                   |
| Kabupaten Gorontalo       | Kelembagaan pemerintah | UPTD                | 1      | 1                 | 33%     | 90%                                  | 25%               |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-T             | 5      | 4                 | 80%     |                                      |                   |
|                           |                        | SPALD-S             | 325    | 325               | 100%    |                                      |                   |
| Kabupaten Pohuwato        | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas | -      | -                 | 0%      | 79%                                  | 25%               |
|                           |                        | SPALD-T             | 7      | 4                 | 57%     |                                      |                   |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-S             | 348    | 348               | 100%    |                                      |                   |
| Kabupaten Bone Bolango    | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas | -      | -                 | 0%      | 93%                                  | 25%               |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-T             | 7      | 6                 | 86%     |                                      |                   |
|                           |                        | SPALD-S             | 490    | 490               | 100%    |                                      |                   |
| Kabupaten Gorontalo Utara | Kelembagaan pemerintah | UPTD                | 1      | 1                 | 33%     | 90%                                  | 0%                |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-T             | 10     | 8                 | 80%     |                                      |                   |
|                           |                        | SPALD-S             | 211    | 211               | 100%    |                                      |                   |
| Kota Gorontalo            | Kelembagaan pemerintah | Seksi/ bidang Dinas | -      | -                 | 0%      | 95%                                  | 50%               |
|                           | Kelembagaan Masyarakat | SPALD-T             | 10     | 9                 | 90%     |                                      |                   |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Lokasi    | Aspek Kelembagaan | Jenis   | Jumlah | Jumlah yang aktif | Scoring | Scoring total kelembagaan masyarakat | Nilai Kelembagaan |
|-----------|-------------------|---------|--------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
|           |                   | SPALD-S | 739    | 739               | 100%    |                                      |                   |
| Rata-rata |                   |         |        |                   |         | <b>89%</b>                           | <b>53%</b>        |

Sumber : hasil perhitungan nilai kelembagaan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen RSP Kementerian PUPR, 2024

- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boalemo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara

### **Bagian-3 : Aspek infrastruktur eksisting Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik**

Data aspek infrastruktur pengelolaan persampahan dan air limbah domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

#### Persampahan

- Pengelolaan TPA
- TPST/Pusat Daur Ulang (PDU)
- Bank sampah induk/unit
- TPS 3R
- Sektor informal yang telah bekerjasama
- Pengangkutan sampah ke TPA

#### Air Limbah Domestik

- SPAL Domestik Terpusat (SPALD-T), yang terdiri dari *Sewerage* dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman
- SPAL Domestik Setempat (SPALD-S), yang terdiri dari Pengolahan Setempat, BABs, IPLT dan Pengangkutan/pengaliran

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Instrumen profil sanitasi untuk aspek infrastruktur pengelolaan persampahan, dan air limbah domestik, ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2-27  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengelolaan TPA)

| Aspek Infrastruktur                                              | Kabupaten Boalemo   | Kabupaten Gorontalo     | Kabupaten Pohuwato  | Kabupaten Bone Bolango  | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kepemilikan TPA                                                  | TPA Pohungo Dulupi  | TPA Regional Talumelito | TPA Delo Indah      | TPA Regional Talumelito | TPA Molantadu             | TPA Regional Talumelito |
| Jumlah TPA yang dipergunakan/ beroperasi (unit)                  | 1                   | 1                       | 1                   | 1                       | 1                         | 1                       |
| Luas lahan efektif tersedia di TPA (hektar)                      | 7                   | 2,1                     | 2                   | 3                       | 10                        | 2,1                     |
| Luas lahan efektif terpakai di TPA (hektar)                      | 2                   | 2                       | 1                   | 2                       | 5                         | 2                       |
| Berat sampah yang masuk ke TPA (ton/hari)                        | 12,660              | 15,032                  | 8,620               | 6,908                   | 7,468                     | 71,878                  |
| Berat sampah yang masuk ke TPA dari wilayah perkotaan (ton/hari) | 12,660              | 15,032                  | 8,620               | 6,908                   | 7,468                     | 71,878                  |
| Sisa Lahan TPA (hektar)                                          | 5                   | 0,1                     | 1                   | 1                       | 5                         | 0,1                     |
| Kebutuhan pembangunan TPA baru                                   | Tidak               | Ya                      | Tidak               | Ya                      | Tidak                     | Ya                      |
| % sampah tertangani TPA (total)                                  | 11,93%              | 5,5%                    | 7,63%               | 5,73%                   | 8,18%                     | 73,87%                  |
| % sampah tertangani TPA (perkotaan)                              | 14,25%              | 15,19%                  | 23,56%              | 23,88%                  | 15,70%                    | 73,87%                  |
| Sistem TPA kabupaten/kota                                        | <i>Open dumping</i> | TPA regional            | <i>Open dumping</i> | TPA regional            | <i>Open dumping</i>       | TPA regional            |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Aspek Infrastruktur                           | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo        | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango     | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo             |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| yang beroperasi                               |                   |                            |                    |                            |                           |                            |
| Sistem operasi TPA regional yang dipergunakan | -                 | <i>Controlled landfill</i> | -                  | <i>Controlled landfill</i> | -                         | <i>Controlled landfill</i> |
| Skore penanganan sampah                       | 1                 | 1                          | 1                  | 1                          | 1                         | 1                          |
| Skore penanganan sampah perkotaan             | 1                 | 1                          | 1                  | 1                          | 1                         | 1                          |
| Sistem operasional TPA                        | 2                 | 2                          | 2                  | 2                          | 2                         | 2                          |
| Nilai Pengelolaan TPA                         | 13,33%            | 13,33%                     | 13,33%             | 13,33%                     | 13,33%                    | 13,33%                     |
| Nilai Pengelolaan TPA Perkotaan               | 13,33%            | 13,33%                     | 13,33%             | 13,33%                     | 13,33%                    | 13,33%                     |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-28

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aspek Infrastruktur Eksisting (TPST/Pusat Daur Ulang (PDU))

| Aspek Infrastruktur                                                                       | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)                                     | 5                 | 2                   | 15                 | 5                      | 5                         | 10             |
| Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                      | 0,00              | 0,00                | 0,92               | 0,34                   | 0,00                      | 21,62          |
| Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari) | 0,00              | 0,00                | 0,92               | 0,34                   | 0,00                      | 21,62          |
| Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00           |
| EFISIENSI (%)                                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 100,00%            | 0,00%                  | 0,00%                     | 0,00%          |
| % layanan TPST/PDU                                                                        | 0,00%             | 0,00%               | 0,81%              | 0,00%                  | 0,00%                     | 0,00%          |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Aspek Infrastruktur            | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| % layanan TPST/PDU (perkotaan) | 0,00%             | 0,00%               | 2,51%              | 3,17%                  | 0,00%                     | 22,22%         |
| Nilai TPST/PDU                 | 0,00%             | 0,00%               | 33,33%             | 0,00%                  | 0,00%                     | 33,33%         |
| Nilai TPST/PDU (Perkotaan)     | 0,00%             | 0,00%               | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                     | 33,33%         |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-29

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Eksisting (Bank Sampah Induk/unit)

| Aspek Infrastruktur                                                                       | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)                                     | 1                 | 4                   | 0                  | 8                      | 1                         | 7              |
| Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                      | 0,0               | 0,0                 | 1,46               | 0,00                   | 0,00                      | 6,40           |
| Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari) | 0,0               | 0,0                 | 1,46               | 0,00                   | 0,00                      | 6,40           |
| Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                                   | 0,0               | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                       | 0,0            |
| EFISIENSI (%)                                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 100,00%            | 0,00%                  | 0,00%                     | 100,00%        |
| % layanan Bank Sampah                                                                     | 0,00%             | 0,00%               | 1,29%              | 0,00%                  | 0,00%                     | 6,58%          |
| % layanan Bank Sampah (perkotaan)                                                         | 0,00%             | 0,00%               | 4,03%              | 0,00%                  | 0,00%                     | 6,58%          |
| Nilai Bank Sampah                                                                         | 0,00%             | 0,00%               | 33,33%             | 0,00%                  | 0,00%                     | 33,33%         |
| Nilai Bank Sampah (Perkotaan)                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 33,33%             | 0,00%                  | 0,00%                     | 33,33%         |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-30  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Eksisting (TPS-3R)

| Aspek Infrastruktur                                                                       | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)                                     | 0                 | 0                   | 8                  | 1                      | 0                         | 3              |
| Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                      | 0,00              | 0,00                | 7,64               | 2,02                   | 0,00                      | 21,62          |
| Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari) | 0,00              | 0,00                | 7,64               | 2,02                   | 0,00                      | 21,62          |
| Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00           |
| EFISIENSI (%)                                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 0,00%              | 100%                   | 0,00%                     | 100%           |
| % layanan TPS 3R                                                                          | 0,00%             | 0,00%               | 6,76%              | 1,68%                  | 0,00%                     | 22,22%         |
| % layanan TPS 3 R (perkotaan)                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 6,76%              | 1,68%                  | 0,00%                     | 22,22%         |
| Nilai TPS 3R                                                                              | 0,00%             | 0,00%               | 0,00%              | 33,3%                  | 0,00%                     | 33,3%          |
| Nilai TPS 3R (Perkotaan)                                                                  | 0,00%             | 0,00%               | 0,00%              | 33,3%                  | 0,00%                     | 33,3%          |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-31  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Eksisting (Sektor Informal yang Telah Bekerjasama)

| Aspek Infrastruktur   | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Jumlah fasilitas yang | 0                 | 0                   | 2                  | 1                      | 0                         | 5              |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Aspek Infrastruktur                                                                       | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| dipergunakan/<br>beroperasi (unit)                                                        |                   |                     |                    |                        |                           |                |
| Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                      | 0,00              | 0,00                | 0,04               | 0,00                   | 0,00                      | 0,05           |
| Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari) | 0,00              | 0,00                | 0,04               | 0,00                   | 0,00                      | 0,05           |
| Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00           |
| EFISIENSI (%)                                                                             | 0,00%             | 0,00%               | 100%               | 0,00%                  | 0,00%                     | 100%           |
| % layanan sektor informal                                                                 | 0,00%             | 0,00%               | 0,03%              | 0,00%                  | 0,00%                     | 0,05%          |
| % layanan sektor informal (perkotaan)                                                     | 0,00%             | 0,00%               | 0,10%              | 0,13%                  | 0,00%                     | 0,05%          |
| Nilai sektor informal                                                                     | 0,00%             | 0,00%               | 33,33%             | 33,33%                 | 0,00%                     | 33,33%         |
| Nilai sektor informal (Perkotaan)                                                         | 0,00%             | 0,00%               | 33,33%             | 33,33%                 | 0,00%                     | 33,33%         |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-32

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengangkutan Sampah)

| Aspek Infrastruktur   | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Pick up (unit)        | 0                 | 0                   | 2                  | 1                      | 0                         | 0              |
| Dump truk (unit)      | 1                 | 7                   | 4                  | 5                      | 3                         | 17             |
| Arm roll truk (unit)  | 0                 | 2                   | 1                  | 0                      | 1                         | 5              |
| Compactor truk (unit) | 0                 | 0                   | 0                  | 0                      | 0                         | 0              |
| Jumlah ritasi/hari    | 2                 | 2                   | 2                  | 1                      | 2                         | 2              |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Aspek Infrastruktur               | Kabupaten Boalemo | Kabupaten Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Kabupaten Bone Bolango | Kabupaten Gorontalo Utara | Kota Gorontalo |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Kapasitas pengangkutan (ton/hari) | 3                 | 27                  | 19                 | 8,5                    | 12                        | 66             |
| % layanan pengangkutan            | 2,83%             | 9,88%               | 16,81%             | 7,05%                  | 13,15%                    | 67,83%         |
| % layanan pengangkutan perkotaan  | 2,83%             | 9,88%               | 16,81%             | 7,05%                  | 13,15%                    | 67,83%         |
| Nilai Angkutan                    | 2,80%             | 9,90%               | 16,80%             | 7,0%                   | 13,10%                    | 67,80%         |
| Nilai Angkutan Perkotaan          | 2,80%             | 9,90%               | 16,80%             | 7,0%                   | 13,10%                    | 67,80%         |

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-33  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik - SPALDT

| Kode<br>BPS | Nama<br>Kabupaten/Kota | INFRASTRUKTUR                                                 |                          |                                     |                                    |                                         |                                       |                                                               |                                        |                                       |                                             | NILAI<br>SPALD-T |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|             |                        | SPALD-T                                                       |                          |                                     |                                    |                                         |                                       |                                                               |                                        |                                       |                                             |                  |
|             |                        | Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman |                          |                                     |                                    |                                         |                                       |                                                               |                                        |                                       |                                             |                  |
|             |                        | Ketersediaan<br>SPALD-T                                       | Jumlah<br>IPAL<br>(Unit) | Kapasitas<br>Terpasang<br>(m³/hari) | Kapasitas<br>Terpakai<br>(m³/hari) | Jumlah Sambungan<br>Rumah Terpakai (SR) | Jumlah<br>Jiwa<br>Terlayani<br>(jiwa) | Volume Air Limbah<br>yang dikelola melalui<br>Sewer (m³/hari) | % Air Limbah<br>yang Dikelola<br>Sewer | Prosentase<br>Utilisasi<br>Sistem (%) | Prosentase<br>Cakupan<br>Layanan<br>SPALD-T |                  |
| 7501        | Boalemo                | Ada                                                           | 10                       | 350,00                              | 280,00                             | 700,00                                  | 3.500,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 80,0%                                 | 1,64%                                       | 67%              |
| 7502        | Gorontalo              | Ada                                                           | 5                        | 175,00                              | 140,00                             | 350,00                                  | 1.750,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 80,0%                                 | 0,30%                                       | 67%              |
| 7503        | Pohuwato               | Ada                                                           | 7                        | 245,00                              | 140,00                             | 490,00                                  | 2.450,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 57,1%                                 | 1,11%                                       | 67%              |
| 7504        | Bone Bolango           | Ada                                                           | 7                        | 245,00                              | 210,00                             | 490,00                                  | 2.450,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 85,7%                                 | 0,84%                                       | 67%              |
| 7505        | Gorontalo Utara        | Ada                                                           | 10                       | 350,00                              | 280,00                             | 700,00                                  | 3.500,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 80,0%                                 | 1,99%                                       | 67%              |
| 7506        | Kota Gorontalo         | Ada                                                           | 10                       | 350,00                              | 315,00                             | 700,00                                  | 3.500,00                              | 0                                                             | 0,00%                                  | 90,0%                                 | 1,12%                                       | 67%              |
| Jumlah      |                        |                                                               | 49                       | 1.715                               | 1.365                              | 3.430                                   | 17.150,00                             | 0,00                                                          | 0,00%                                  | 79,6%                                 | 0,96%                                       | 66,7%            |

Sumber :

- BPPW Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boalemo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 2-34  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDS (pengolahan Setempat)

| Kode<br>BPS | Nama<br>Kabupaten/Kota | INFRASTRUKTUR                                      |                                             |                                                          |                               |                                                |                                          |                                                          |                                                                   |                                                          |                                                     |                                 |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|             |                        | SPALD-S                                            |                                             |                                                          |                               |                                                |                                          |                                                          |                                                                   |                                                          |                                                     |                                 |
|             |                        | Pengolahan Setempat                                |                                             |                                                          |                               |                                                |                                          |                                                          |                                                                   |                                                          |                                                     |                                 |
|             |                        | Akses Layak Individual                             |                                             |                                                          | Akses Layak Individu(JSSP)    |                                                |                                          | Akses Layak Bersama (MCK)                                |                                                                   |                                                          | Prosentase<br>Cakupan<br>Layanan<br>Sistem<br>Layak | NILAI<br>PENGOLAHAN<br>SETEMPAT |
|             |                        | Jumlah KK<br>dengan<br>Jamban<br>Sehat<br>Permanen | Jumlah Penduduk<br>yang Terlayani<br>(jiwa) | Prosentase<br>Cakupan<br>Layanan<br>Sistem<br>Individual | Jumlah KK<br>Pengguna<br>JSSP | Jumlah<br>Penduduk<br>Terlayani JSSP<br>(jiwa) | Prosentase<br>Cakupan<br>Layanan<br>JSSP | Jumlah KK<br>yang<br>Menggunakan<br>Fasilitas<br>Bersama | Jumlah<br>Penduduk<br>Terlayani<br>Fasilitas<br>Bersama<br>(jiwa) | Prosentase<br>Cakupan<br>Layanan<br>Fasilitas<br>Bersama |                                                     |                                 |
| 7501        | Boalemo                | 23.830                                             | 84.757                                      | 55,90%                                                   | 149                           | 530                                            | 0,35%                                    | 16.499                                                   | 58.682                                                            | 38,71%                                                   | 94,96%                                              | 31,65%                          |
| 7502        | Gorontalo              | 88.417                                             | 297.142                                     | 76,14%                                                   | 224                           | 753                                            | 0,19%                                    | 10.847                                                   | 36.453                                                            | 9,34%                                                    | 85,67%                                              | 28,56%                          |
| 7503        | Pohuwato               | 26.263                                             | 96.064                                      | 59,50%                                                   | 210                           | 768                                            | 0,48%                                    | 12.201                                                   | 44.628                                                            | 27,64%                                                   | 87,62%                                              | 29,21%                          |
| 7504        | Bone Bolango           | 37.894                                             | 112.226                                     | 65,13%                                                   | 0                             | 0                                              | 0,00%                                    | 14.398                                                   | 42.641                                                            | 24,75%                                                   | 89,88%                                              | 29,96%                          |
| 7505        | Gorontalo Utara        | 27.585                                             | 102.010                                     | 78,23%                                                   | 0                             | 0                                              | 0,00%                                    | 5.879                                                    | 21.741                                                            | 16,67%                                                   | 94,90%                                              | 31,63%                          |
| 7506        | Kota Gorontalo         | 57.781                                             | 128.877                                     | 92,72%                                                   | 12                            | 27                                             | 0,02%                                    | 2.811                                                    | 6.270                                                             | 4,51%                                                    | 97,24%                                              | 32,41%                          |
| JUMLAH      |                        | 261.770                                            | 821.075                                     | 72,99%                                                   | 595                           | 2.078                                          | 0,17%                                    | 62.635                                                   | 199.967                                                           | 17,46%                                                   | 90,62%                                              | 30,21%                          |

Sumber :

- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-35  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDS (BABs dan IPLT)

| Kode<br>BPS | Nama<br>Kabupaten/Kota | INFRASTRUKTUR             |                                              |                                                     |                                          |                                     |                                    |           |                                                                 | NILAI<br>IPLT |
|-------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|             |                        | BABS                      |                                              |                                                     | Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |                                     |                                    |           |                                                                 |               |
|             |                        | Jumlah<br>KK yang<br>BABS | Jumlah<br>Penduduk<br>yang<br>BABS<br>(jiwa) | Prosentase<br>Penduduk<br>yang<br>Melakukan<br>BABS | Jumlah (unit)                            | Kapasitas<br>terpasang<br>(m3/hari) | Kapasitas<br>Terpakai<br>(m3/hari) | Efisiensi | % Kapasitas<br>Terhadap Jumlah<br>Produksi Black<br>Water Total |               |
| 7501        | Boalemo                | 2.148                     | 7.640                                        | 5,04%                                               | 1                                        | 5,00                                | 3,20                               | 64,00%    | 0,14%                                                           | 51,73%        |
| 7502        | Gorontalo              | 16.638                    | 55.915                                       | 14,33%                                              | 1                                        | 10,50                               | 3,60                               | 34,29%    | 0,13%                                                           | 33,90%        |
| 7503        | Pohuwato               | 5.465                     | 19.990                                       | 12,38%                                              | 0                                        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00%     | 0,00%                                                           | 0,00%         |
| 7504        | Bone Bolango           | 5.887                     | 17.435                                       | 10,12%                                              | 0                                        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00%     | 0,00%                                                           | 0,00%         |
| 7505        | Gorontalo Utara        | 1.798                     | 6.649                                        | 5,10%                                               | 1                                        | 6,00                                | 6,00                               | 100,00%   | 0,19%                                                           | 73,33%        |
| 7506        | Kota Gorontalo         | 1.717                     | 3.830                                        | 2,76%                                               | 1                                        | 15,70                               | 10,00                              | 63,69%    | 0,49%                                                           | 38,22%        |
|             | JUMLAH                 | 33.653                    | 111.458                                      | 9,38%                                               | 4                                        | 37,20                               | 22,80                              | 61,29%    | 0,15%                                                           | 43,44%        |

Sumber :

- BABs = Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- IPLT = Pengelola IPLT Kabupaten Kota Tahun 2024

Tabel 2-36  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDT

| Kode BPS | Nama Kabupaten/Kota | Pengangkutan/Pengaliran                         |                                                             |                                                                             |                                                                                        |                                | NILAI PENGANGKUTAN |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|          |                     | Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (unit) | Volume Rata-Rata 1 unit Tangki Truk Tinja (m <sup>3</sup> ) | Volume tinja terangkut oleh armada dalam satu kali ritase (m <sup>3</sup> ) | Prosentase Lumpur Tinja yang Terangkut dari Total Potensi Lumpur Tinja yang Diproduksi | Lokasi Pembuangan Lumpur Tinja |                    |
| 7501     | Boalemo             | 2                                               | 4                                                           | 8                                                                           | 0,14%                                                                                  | IPLT                           | 67%                |
| 7502     | Gorontalo           | 2                                               | 3,6                                                         | 7,2                                                                         | 0,05%                                                                                  | IPLT                           | 67%                |
| 7503     | Pohuwato            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                                           | 0,00%                                                                                  | Tidak ada                      | 0%                 |
| 7504     | Bone Bolango        | 0                                               | 0                                                           | 0                                                                           | 0,00%                                                                                  | Tidak ada                      | 0%                 |
| 7505     | Gorontalo Utara     | 3                                               | 4                                                           | 12                                                                          | 0,24%                                                                                  | IPLT                           | 67%                |
| 7506     | Kota Gorontalo      | 2                                               | 5                                                           | 10                                                                          | 0,18%                                                                                  | IPLT                           | 67%                |
|          | <b>JUMLAH</b>       | <b>9</b>                                        | <b>3</b>                                                    | <b>37</b>                                                                   | <b>0,09%</b>                                                                           |                                | <b>44%</b>         |

Sumber : Pengelola Air Limbah Kabupaten Kota Tahun 2024

**Bagian-4 : Aspek Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik**

Data aspek perilaku masyarakat terkait pengelolaan persampahan dan Air Limbah Domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

- Perubahan perilaku masyarakat terkait kampanye dan edukasi terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan
- Perubahan perilaku masyarakat terkait monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan
- Perubahan perilaku masyarakat terkait pelatihan teknis terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan

Instrumen profil sanitasi untuk aspek perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan air limbah domestik ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-37  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Perilaku Masyarakat (pengelolaan persampahan dan air limbah domestik)

| Lokasi              | Aspek Perilaku Masyarakat                                                   | Keterangan | Skoring | Nilai |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| Kabupaten Boalemo   | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                     | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi         | Ada        | 1       |       |
|                     | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |
| Kabupaten Gorontalo | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                     | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya                                 | Ada        | 1       |       |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Lokasi                    | Aspek Perilaku Masyarakat                                                   | Keterangan | Skoring | Nilai |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
|                           | monitoring dan evaluasi                                                     |            |         |       |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |
| Kabupaten Pohuwato        | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi         | Ada        | 1       |       |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |
| Kabupaten Bone Bolango    | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi         | Ada        | 1       |       |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |
| Kabupaten Gorontalo Utara | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi         | Ada        | 1       |       |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |
| Kota Gorontalo            | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat | Ada        | 1       | 100%  |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi         | Ada        | 1       |       |
|                           | Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis                | Ada        | 1       |       |

Sumber : Survey primer sesuai dengan metode wawancara terkait program

**Bagian-5 : Aspek Pendanaan Dalam Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik**

Data aspek Pendanaan terkait pengelolaan persampahan dan Air Limbah Domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

- Pendanaan Pemerintah yang terdiri dari : APBD Kabupaten/kota untuk persampahan, APBN, APBD Provinsi, Total APBD Kabupaten/kota,
- Pendanaan Non Pemerintah yang terdiri dari : Ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, wakaf), CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta dan hibah non pemerintah
- Retribusi yang terdiri dari rencana retribusi dan realisasi retribusi

Instrumen profil sanitasi untuk aspek pendanaan dalam pengelolaan persampahan dan air limbah domestik, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-38  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Pendanaan Persampahan (pendanaan pemerintah)

| Kode BPS | Nama Kabupaten /Kota | PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah) |                          |                 |                                 |                                   |                                                                                               |               |                                 |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|          |                      | Pendanaan Pemerintah                      |                          |                 |                                 |                                   |                                                                                               |               |                                 |
|          |                      | APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)     | APBN (Rp.)               | APBD Prov (Rp.) | Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.) | Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.) | Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%) | Kategori      | Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota |
| 7501     | Boalemo              | 700.000.000                               | 0                        | 0               | 812.340.000.000                 | 700.000.000,00                    | 0,086%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
| 7502     | Gorontalo            | 2.572.956.624                             | 16.405.552.916           | 0               | 1.489.280.000.000               | 18.978.509.540,00                 | 0,173%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
| 7503     | Pohuwato             | 3.897.249.000                             | 600.000.000              | 0               | 974.960.000.000                 | 4.497.249.000,00                  | 0,400%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
| 7504     | Bone Bolango         | 1.805.000.000                             | 0                        | 0               | 986.190.000.000                 | 1.805.000.000,00                  | 0,183%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
| 7505     | Gorontalo Utara      | 150.000.000                               | 0                        | 0               | 743.750.000.000                 | 150.000.000,00                    | 0,020%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
| 7506     | Kota Gorontalo       | 10.469.466.788                            | 5.100.000.000            | 0               | 1.124.800.000.000               | 15.569.466.788,00                 | 0,931%                                                                                        | kurang        | 33,00%                          |
|          | <b>Total</b>         | <b>19.594.672.412,00</b>                  | <b>22.105.552.916,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.131.320.000.000,00</b>     | <b>41.700.225.328,00</b>          | <b>0,320%</b>                                                                                 | <b>kurang</b> | <b>33,00%</b>                   |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.38

| Kode BPS | Nama Kabupaten/Kota | PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah) |                      |              |                         |                      |                                 |             |
|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
|          |                     | Pendanaan Non Pemerintah                  |                      |              |                         |                      |                                 |             |
|          |                     | Ziswaf                                    | CSR                  | Mikro Kredit | Kerjasama dengan Swasta | Hibah Non Pemerintah | Jumlah Pendanaan Non Pemerintah | Scoring     |
| 7501     | Boalemo             | 0                                         | 0                    | 0            | 0                       | 0                    | 0,00                            | 0,00        |
| 7502     | Gorontalo           | 0                                         | 75.000.000           | 0            | 0                       | 0                    | 75.000.000,00                   | 0,20        |
| 7503     | Pohuwato            | 0                                         | 0                    | 0            | 0                       | 0                    | 0,00                            | 0,00        |
| 7504     | Bone Bolango        | 0                                         | 0                    | 0            | 0                       | 0                    | 0,00                            | 0,00        |
| 7505     | Gorontalo Utara     | 0                                         | 0                    | 0            | 0                       | 0                    | 0,00                            | 0,00        |
| 7506     | Kota Gorontalo      | 0                                         | 0                    | 0            | 0                       | 0                    | 0,00                            | 0,00        |
|          | <b>Total</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>75.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>75.000.000,00</b>            | <b>0,20</b> |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.38

| Kode BPS | Nama Kabupaten/Kota | Retribusi               |                         |            |               |            | Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/ Kota | Nilai Pendanaan |
|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |                     | Rencana Retribusi       | Realisasi Retribusi     | Efisiensi  | Kategori      | Scoring    |                                                                         |                 |
| 7501     | Boalemo             | 0,00                    | 0,00                    | 0%         | kurang        | 33%        | 700.000.000,00                                                          | 22%             |
| 7502     | Gorontalo           | 393.393.600,00          | 299.777.725,01          | 76%        | Cukup         | 67%        | 19.353.287.265,01                                                       | 40%             |
| 7503     | Pohuwato            | 0,00                    | 0,00                    | 0%         | kurang        | 33%        | 4.497.249.000,00                                                        | 22%             |
| 7504     | Bone Bolango        | 327.828.000,00          | 137.767.094,38          | 42%        | kurang        | 33%        | 1.942.767.094,38                                                        | 22%             |
| 7505     | Gorontalo Utara     | 0,00                    | 0,00                    | 0%         | kurang        | 33%        | 150.000.000,00                                                          | 22%             |
| 7506     | Kota Gorontalo      | 2.622.624.000,00        | 1.488.090.626,38        | 57%        | kurang        | 33%        | 17.057.557.414,38                                                       | 22%             |
|          | <b>Total</b>        | <b>3.343.845.600,00</b> | <b>1.925.635.445,76</b> | <b>58%</b> | <b>kurang</b> | <b>33%</b> | <b>7.283.476.796</b>                                                    | <b>29%</b>      |

Sumber :

- Kementerian Keuangan, Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024
- Perda Provinsi Gorontalo 6 Tahun 2022, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
- Portal data SIKD DJPK Kementerian Keuangan

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-39  
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024  
Aspek Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (pendanaan pemerintah)

| Kode BPS | Nama Kabupaten /Kota | PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah) |                          |                 |                                 |                                   |                                                                                               |               |                                 |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|          |                      | Pendanaan Pemerintah                      |                          |                 |                                 |                                   |                                                                                               |               |                                 |
|          |                      | APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)     | APBN (Rp.)               | APBD Prov (Rp.) | Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.) | Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.) | Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%) | Kategori      | Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota |
| 7501     | Boalemo              | 9.044.600,00                              | 15.500.000.000,00        | 0               | 812.340.000.000                 | 827.849.044.601,00                | 0,0011%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
| 7502     | Gorontalo            | 4.829.200.000,00                          | 22.357.000.000,00        | 0               | 1.489.280.000.000               | 1.516.466.200.001,00              | 0,3185%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
| 7503     | Pohuwato             | 130.000.000,00                            | 6.700.000.000,00         | 0               | 974.960.000.000                 | 981.790.000.001,00                | 0,0132%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
| 7504     | Bone Bolango         | 0,00                                      | 11.088.000.000,00        | 0               | 986.190.000.000                 | 997.278.000.001,00                | 0,0000%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
| 7505     | Gorontalo Utara      | 95.840.600,00                             | 5.100.000.000,00         | 0               | 743.750.000.000                 | 748.945.840.601,00                | 0,0128%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
| 7506     | Kota Gorontalo       | 21.210.994.484,00                         | 14.850.000.000,00        | 0               | 1.124.800.000.000               | 1.160.860.994.485,00              | 1,8272%                                                                                       | kurang        | 33,00%                          |
|          | <b>Total</b>         | <b>26.275.079.684,00</b>                  | <b>75.595.000.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.131.320.000.000,00</b>     | <b>6.233.190.079.690,00</b>       | <b>2,1728%</b>                                                                                | <b>kurang</b> | <b>33,00%</b>                   |

Lanjutan tabel 2.39

| Kode<br>BPS | Nama<br>Kabupaten/Kota | PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah) |             |                 |                               |                         |                                       |             |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                        | Pendanaan Non Pemerintah                  |             |                 |                               |                         |                                       |             |
|             |                        | Ziswaf                                    | CSR         | Mikro<br>Kredit | Kerjasama<br>dengan<br>Swasta | Hibah Non<br>Pemerintah | Jumlah<br>Pendanaan Non<br>Pemerintah | Scoring     |
| 7501        | Boalemo                | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
| 7502        | Gorontalo              | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
| 7503        | Pohuwato               | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
| 7504        | Bone Bolango           | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
| 7505        | Gorontalo Utara        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
| 7506        | Kota Gorontalo         | 0,00                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00%       |
|             | <b>Total</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.39

| Kode BPS | Nama Kabupaten/Kota | Retribusi           |                     |             |          | Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/ Kota | Nilai Pendanaan |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |                     | Rencana Retribusi   | Realisasi Retribusi | Efisiensi   | Kategori |                                                                         |                 |
| 7501     | Boalemo             | 0,00                | 0,00                | 0%          | kurang   | 827.849.044.601,00                                                      | 21,33%          |
| 7502     | Gorontalo           | 0,00                | 0,00                | 0%          | kurang   | 1.516.466.200.001,00                                                    | 11,43%          |
| 7503     | Pohuwato            | 0,00                | 0,00                | 0%          | kurang   | 981.790.000.001,00                                                      | 0,00%           |
| 7504     | Bone Bolango        | 0,00                | 0,00                | 0%          | kurang   | 997.278.000.001,00                                                      | 0,00%           |
| 7505     | Gorontalo Utara     | 2.500.000,00        | 4.000.000,00        | 160%        | baik     | 748.949.840.601,00                                                      | 86,67%          |
| 7506     | Kota Gorontalo      | 0,00                | 0,00                | 0%          | kurang   | 1.160.860.994.485,00                                                    | 21,23%          |
|          | <b>Total</b>        | <b>2.500.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>160%</b> |          | <b>6.233.194.079.690,00</b>                                             | <b>73,76%</b>   |

Sumber :

- Kementerian Keuangan, Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024
- Perda Provinsi Gorontalo 6 Tahun 2022, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
- Portal data SIKD DJPK Kementerian Keuangan

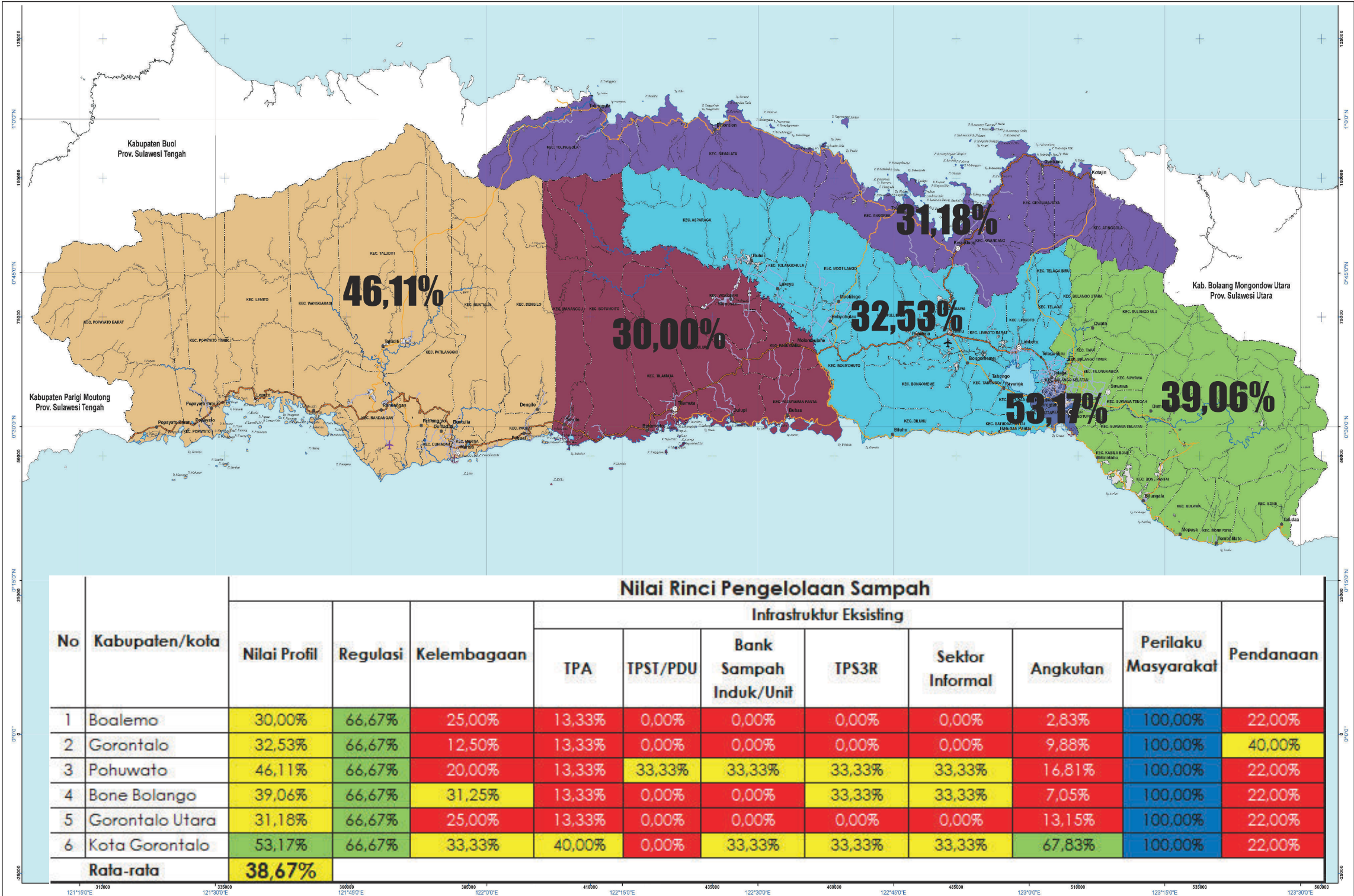
# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-40  
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Lokasi                    | NILAI PERATURAN | NILAI KELEMBAGAAN | NILAI INFRASTRUKTUR |                |                   |               |                |                | NILAI PERILAKU MASYARAKAT | NILAI PENDANAAN | NILAI PROFIL PERNGELOLAN PERSAMPAHAN |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                           |                 |                   | NILAI TPA           | NILAI TPST/PDU | NILAI BANK SAMPAH | NILAI TPS 3R  | NILAI INFORMAL | NILAI ANGKUTAN |                           |                 |                                      |
| Kabupaten Boalemo         | 66,67%          | 25,00%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 2,83%          | 10,00%                    | 4,40%           | 30,00%                               |
| Kabupaten Gorontalo       | 66,67%          | 12,50%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 9,88%          | 10,00%                    | 8,00%           | 32,53%                               |
| Kabupaten Pohuwato        | 66,67%          | 20,00%            | 13,33%              | 33,33%         | 33,33%            | 33,33%        | 33,33%         | 16,81%         | 10,00%                    | 4,40%           | 46,11%                               |
| Kabupaten Bone Bolango    | 66,67%          | 31,25%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 33,33%        | 33,33%         | 7,05%          | 10,00%                    | 4,40%           | 39,06%                               |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 100%            | 25,00%            | 13,33%              | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%         | 0,00%          | 13,15%         | 10,00%                    | 4,40%           | 31,18%                               |
| Kota Gorontalo            | 66,67%          | 33,33%            | 40,00%              | 0,00%          | 33,33%            | 33,33%        | 33,33%         | 67,83%         | 10,00%                    | 4,40%           | 53,17%                               |
| <b>Total</b>              | <b>66,67%</b>   | <b>24,51%</b>     | <b>17,78%</b>       | <b>5,56%</b>   | <b>11,11%</b>     | <b>16,67%</b> | <b>16,67%</b>  | <b>19,59%</b>  | <b>10,00%</b>             | <b>5,00%</b>    | <b>38,67%</b>                        |

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan



| No        | Kabupaten/kota  | Nilai Rinci Pengelolaan Sampah |          |             |                         |          |                        |        |                 |          |                     |           |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------|------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|-----------|
|           |                 | Nilai Profil                   | Regulasi | Kelembagaan | Infrastruktur Eksisting |          |                        |        |                 |          | Perilaku Masyarakat | Pendanaan |
|           |                 |                                |          |             | TPA                     | TPST/PDU | Bank Sampah Induk/Unit | TPS3R  | Sektor Informal | Angkutan |                     |           |
| 1         | Boalemo         | 30,00%                         | 66,67%   | 25,00%      | 13,33%                  | 0,00%    | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%           | 2,83%    | 100,00%             | 22,00%    |
| 2         | Gorontalo       | 32,53%                         | 66,67%   | 12,50%      | 13,33%                  | 0,00%    | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%           | 9,88%    | 100,00%             | 40,00%    |
| 3         | Pohuwato        | 46,11%                         | 66,67%   | 20,00%      | 13,33%                  | 33,33%   | 33,33%                 | 33,33% | 33,33%          | 16,81%   | 100,00%             | 22,00%    |
| 4         | Bone Bolango    | 39,06%                         | 66,67%   | 31,25%      | 13,33%                  | 0,00%    | 0,00%                  | 33,33% | 33,33%          | 7,05%    | 100,00%             | 22,00%    |
| 5         | Gorontalo Utara | 31,18%                         | 66,67%   | 25,00%      | 13,33%                  | 0,00%    | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%           | 13,15%   | 100,00%             | 22,00%    |
| 6         | Kota Gorontalo  | 53,17%                         | 66,67%   | 33,33%      | 40,00%                  | 0,00%    | 33,33%                 | 33,33% | 33,33%          | 67,83%   | 100,00%             | 22,00%    |
| Rata-rata |                 | 38,67%                         |          |             |                         |          |                        |        |                 |          |                     |           |

Kriteria profil sanitasi

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
|  | > 75%     | BAIK          |
|  | 51% - 75% | SEDANG        |
|  | 26% - 50% | RENDAH        |
|  | 00% - 25% | SANGAT RENDAH |



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPR-PKP)**  
Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo

**PEKERJAAN**

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
**GORONTALO TAHUN 2024**

**JUDUL GAMBAR**

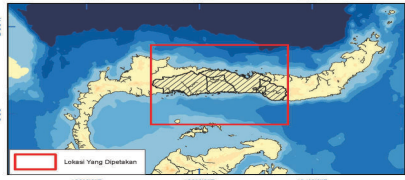
**PROFIL SANITASI PENGELOLAAN SAMPAH**  
**PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

U  
SKALA 1:250,000

0 3.75 7.5 15 22.5 30 Km

Proyeksi Sistem Grid Datum Horizontal Transverse Mercator Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator WGS84 - Zone 51N

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**IBUKOTA ADMINISTRASI**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Kota Lainnya

**BATAS ADMINISTRASI**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- ++ ++ Batas Teritorial

**PERAIRAN**

- ~ Laut
- ~ Danau
- ~ Sungai

**Perhubungan**

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- ✈ Bandar Udara Pengumpul Sekunder
- ✈ Bandar Udara Pengumpul
- ⦿ Pelabuhan Nasional
- ⦿ Pelabuhan Lokal

**Kabupaten/Kota**

- Kabupaten Boalemo
- Kabupaten Bone Bolango
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Pohuwato
- Kota Gorontalo

**SUMBER DATA:**

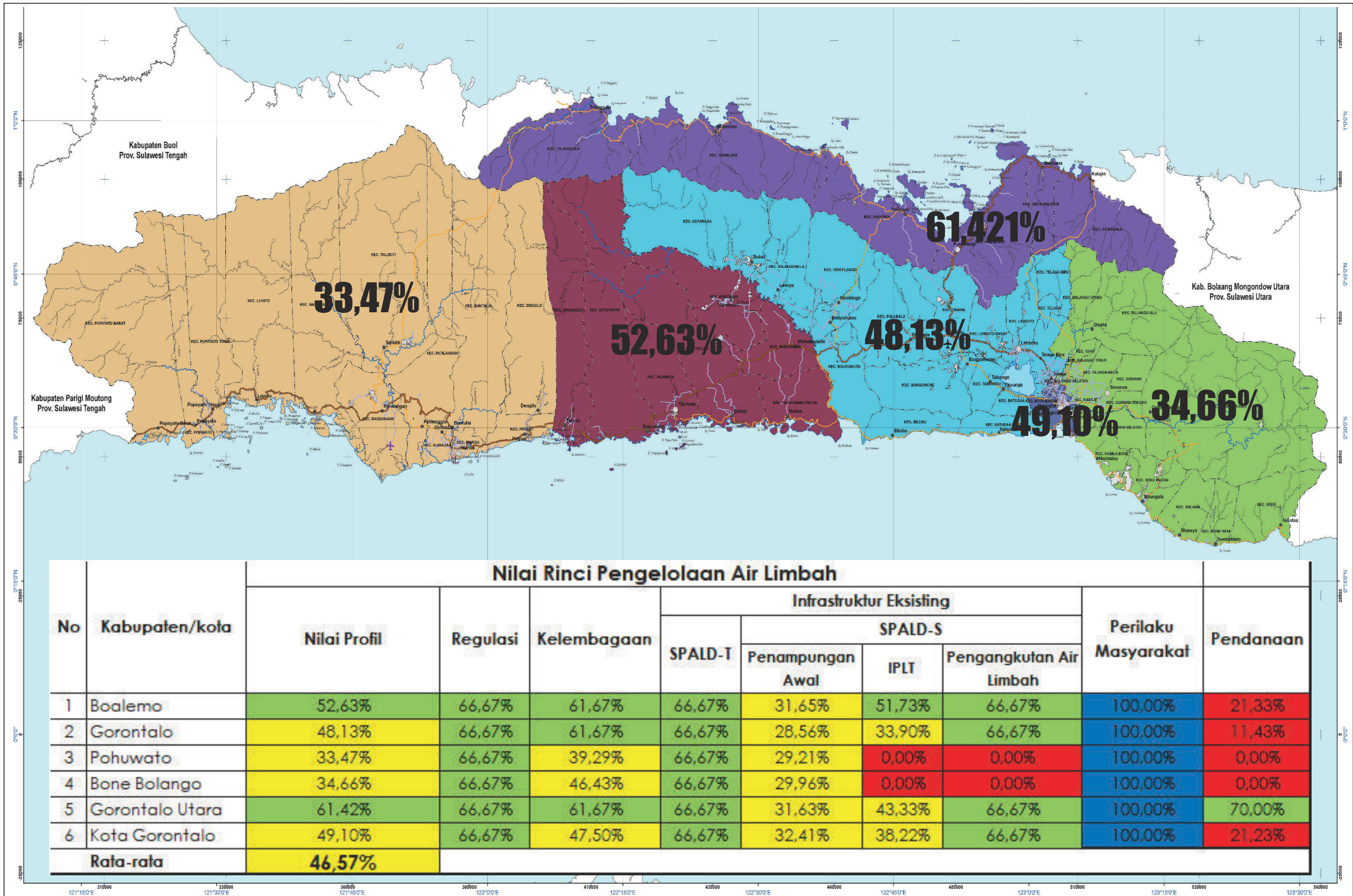
- Hasil kajian Tim Teknik Review RTW Provinsi Gorontalo
- Berbagai Peta Dasar adalah Peta Peta Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Edisi I - Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Peta Administrasi Provinsi Gorontalo (BPS Prov. Gorontalo) Skala 1 : 250.000 Tahun 2009
- Tema "PETA ADMINISTRASI" Provinsi Gorontalo disiapkan oleh Tim Teknik Review RTRWP dengan mendapat masukan dan berbagai stakeholder

Tabel 2-41  
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

| Lokasi             | score<br>peraturan | score<br>Kelembagaan | Nilai Infrastruktur Eksisting |                  |                   | Score<br>infrastruktur<br>eksisting | Score<br>Perilaku<br>Masyarakat | Score<br>Pendanaan | Score Total<br>Air Limbah |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                      | score SPALD-T                 | Score<br>SPALD-S | score<br>angkutan |                                     |                                 |                    |                           |
| Boalemo            | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 11,11%           | 5,33%             | 19,11%                              | 10,00%                          | 4,27%              | 52,63%                    |
| Gorontalo          | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 8,59%            | 5,33%             | 16,59%                              | 10,00%                          | 2,29%              | 48,13%                    |
| Pohuwato           | 10,00%             | 5,89%                | 2,67%                         | 4,91%            | 0,00%             | 7,57%                               | 10,00%                          | 0,00%              | 33,47%                    |
| Bone<br>Bolango    | 10,00%             | 6,96%                | 2,67%                         | 5,03%            | 0,00%             | 7,70%                               | 10,00%                          | 0,00%              | 34,66%                    |
| Gorontalo<br>Utara | 10,00%             | 9,25%                | 2,67%                         | 13,53%           | 5,33%             | 18,17%                              | 10,00%                          | 14,00%             | 61,42%                    |
| Kota<br>Gorontalo  | 10,00%             | 7,13%                | 2,67%                         | 9,73%            | 5,33%             | 17,73%                              | 10,00%                          | 4,25%              | 49,10%                    |
| <b>Rata-rata</b>   | <b>10,00%</b>      | <b>7,96%</b>         | <b>2,67%</b>                  | <b>8,82%</b>     | <b>3,56%</b>      | <b>14,48%</b>                       | <b>10,00%</b>                   | <b>4,13%</b>       | <b>46,57%</b>             |

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Note : Pendanaan retribusi terinput dalam sistem, sehingga nilainya >



| No        | Kabupaten/kota  | Nilai Rinci Pengelolaan Air Limbah |          |             |                         |                  |        |                         | Perilaku Masyarakat | Pendanaan |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------|
|           |                 | Nilai Profil                       | Regulasi | Kelembagaan | Infrastruktur Eksisting |                  |        |                         |                     |           |
|           |                 |                                    |          |             | SPALD-T                 | SPALD-S          |        |                         |                     |           |
|           |                 |                                    |          |             |                         | Penampungan Awal | IPLT   | Pengangkutan Air Limbah |                     |           |
| 1         | Boalemo         | 52,63%                             | 66,67%   | 61,67%      | 66,67%                  | 31,65%           | 51,73% | 66,67%                  | 100,00%             | 21,33%    |
| 2         | Gorontalo       | 48,13%                             | 66,67%   | 61,67%      | 66,67%                  | 28,56%           | 33,90% | 66,67%                  | 100,00%             | 11,43%    |
| 3         | Pohuwato        | 33,47%                             | 66,67%   | 39,29%      | 66,67%                  | 29,21%           | 0,00%  | 0,00%                   | 100,00%             | 0,00%     |
| 4         | Bone Bolango    | 34,66%                             | 66,67%   | 46,43%      | 66,67%                  | 29,96%           | 0,00%  | 0,00%                   | 100,00%             | 0,00%     |
| 5         | Gorontalo Utara | 61,42%                             | 66,67%   | 61,67%      | 66,67%                  | 31,63%           | 43,33% | 66,67%                  | 100,00%             | 70,00%    |
| 6         | Kota Gorontalo  | 49,10%                             | 66,67%   | 47,50%      | 66,67%                  | 32,41%           | 38,22% | 66,67%                  | 100,00%             | 21,23%    |
| Rata-rata |                 | 46,57%                             |          |             |                         |                  |        |                         |                     |           |

Kriteria profil sanitasi

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
|  | > 75%     | BAIK          |
|  | 51% - 75% | SEDANG        |
|  | 26% - 50% | RENDAH        |
|  | 00% - 25% | SANGAT RENDAH |



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPR-PKP)**  
Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo

**PEKERJAAN**

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
**GORONTALO TAHUN 2024**

**JUDUL GAMBAR**

**PROFIL SANITASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**  
**PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

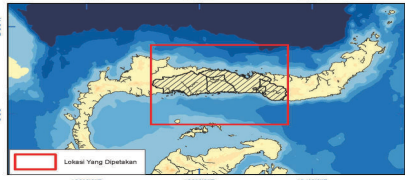
U

**SKALA 1:250,000**

0 3.75 7.5 15 22.5 30 Km

Proyeksi: Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal: WGS84 - Zone 51N

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

**IBUKOTA ADMINISTRASI**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Kota Lainnya

**BATAS ADMINISTRASI**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- ++ ++ Batas Teritorial

**PERAIRAN**

- ~ Laut
- ~ Danau
- ~ Sungai

**Perhubungan**

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- ✈ Bandar Udara Pengumpul Sekunder
- ✈ Bandar Udara Pengumpul
- ✈ Pelabuhan Nasional
- ✈ Pelabuhan Lokal

**Kabupaten/Kota**

- Kabupaten Boalemo
- Kabupaten Bone Bolango
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Pohuwato
- Kota Gorontalo

**SUMBER DATA:**

- Hasil kajian Tim Teknik Review RTWP Provinsi Gorontalo
- Berbagai Peta Dasar sebagai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Edisi I - Tahun 1991 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Peta Administrasi Provinsi Gorontalo (BPS Prov. Gorontalo) Skala 1 : 250.000 Tahun 2009
- Tema "PETA ADMINISTRASI" Provinsi Gorontalo disiapkan oleh Tim Teknis Review RTRWP dengan mendapat masukan dan berbagai stakeholder

## 2.3 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pasal 13 angka (3), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah :

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi

Dalam Lampiran Undang-undang tersebut terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, dimana pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2-42

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No. | Sub Urusan  | Daerah Provinsi                                                                    | Daerah Kabupaten/kota                                                               |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Persampahan | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional                           | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten/kota         |
| 2   | Air Limbah  | Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik regional                   | Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/kota |
| 3   | Permukiman  | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/kota              |

Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 2014 (halaman 9 sheet 322)

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043, menjelaskan terkait kewenangan Provinsi yang selaras dengan Undang-undang No, 32 Tahun 2014, yaitu :

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-43  
Kewenangan Provinsi Berdasarkan Tata Ruang

| No. | Uraian                                                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pusat Kegiatan Nasional (PKN)                           | Kota Gorontalo (lampiran-II PP No. 26 Tahun 2008, RTRWN), Pasal 8, angka (1), huruf a Perda No. 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)                | PKSN Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Persampahan                                             | Pengelolaan limbah B3 Kawasan Talumelio Kabupaten Gorontalo (RTRW pasal 36 angka 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | Persampahan                                             | TPA Talumelito di Kabupaten Gorontalo (RTRW Pasal 36, angka 5 huruf a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Persampahan                                             | TPA Lonuo di Kabupaten Bonebolango (RTRW pasal 36 angka 5 huruf b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | KSN pertumbuhan ekonomi                                 | KSN Kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (RTRW, pasal 58 angka 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | KSN kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | KSN Danau Limboto (RTRW, pasal 58 angka 3 huruf a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   |                                                         | KSNT Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi (RTRW, pasal 58 angka 3 huruf b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9   | KSP kepentingan pertumbuhan ekonomi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo (pasal 60, angka 1, huruf a)</li> <li>KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara (pasal 60, angka 1, huruf b)</li> <li>KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo (pasal 60, angka 1, huruf c)</li> <li>KSP Pertanian Terpadu Randangan dan Sekitarnya di Kabupaten Pohuwato (pasal 60, angka 1, huruf d)</li> <li>KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara (pasal 60, angka 1, huruf e)</li> <li>KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo (pasal 60, angka 1, huruf f)</li> </ul> |
| 10  | KSP kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo (pasal 61, angka 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber : Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043



## PROFIL SANITASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

**WILAYAH PELAYANAN PENANGANAN ROADMAP SANITASI  
PROVINSI GORONTALO**

**IBUKOTA PEMERINTAHAN :**

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Ibukota Kecamatan

**PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI**

-  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
-  Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
-  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| ----- | Batas Propinsi                           |
| ----- | Batas Kabupaten/Kota                     |
| ----- | Batas Kecamatan                          |
| ----- | Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan |
| ----- | Batas Zona Tambahan                      |
| ----- | Garis Pangkal                            |
| •     | Titik Dasar                              |

Jaringan Jalan Nasional :

-  Jalan Anteri Primer
-  Jalan Anteri Primer (Rencana)
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
-  Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) (Rencana)
-  Rel Kereta Api (Rencana)

Jaringan Jalan Provinsi :

-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
-  Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) (Rencana)
-  Jalan Lokal Satu

01. PKN Kota Gorontalo
02. KSN Danau Limboto
03. KSN Kawasan Gorontalo-  
Paguyaman-Kwandang
04. KSP Geopark Gorontalo
05. KSP Pariwisata Botumoiito
06. KSP Pariwisata Minanga
07. KSP Pertanian Terpadu  
Paguyaman-Wonosari
08. KSP Pertanian Terpadu Randangan
09. KSP terintegrasi Pelabuhan Anggrek
10. KSP industri terpadu Tibawa-Pulubala
11. KSN perbatasan Negara

**PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2043**

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi pengelolaan sanitasi lintas kabupaten/kota, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP), terdiri atas kondisi kelembagaan, ketersediaan peraturan, infrastruktur, kerjasama dan pendanaan untuk kurun waktu 5 tahun, diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-44  
Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi Kewenangan Provinsi

| No. | Uraian                 | Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ketersediaan Peraturan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah</li> <li>Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah (pasal 53, angka 1 huruf b)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo (proses legalisasi)</li> <li>Peraturan Gubernur Gorontalo No. 66 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022</li> <li>Peraturan Gubernur Gorontalo No. 39 Tahun 2015 tentang road map sanitasi Tahun 2015-2019</li> </ul> |
| 2   | Kondisi Kelembagaan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operator : UPTD TPA Regional Talumelito</li> <li>Regulator : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operator : Belum Ada operator IPAL regional di Provinsi Gorontalo</li> <li>Regulator : Belum ada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Kondisi Infrastruktur  | <u>Yang sudah beroperasi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Yang sudah beroperasi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Uraian    | Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango</li> <li>Lokasi TPA : Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo</li> <li>Operator Layanan : UPTD TPA Regional Talumelito</li> <li>Sistem Operasi : <i>controlled landfill</i></li> <li>Kapasitas : 21,05 hektar, 19.430 m<sup>3</sup>.</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten/Kota : belum ada</li> <li>Lokasi IPAL : belum ada</li> <li>Operator Layanan : belum ada</li> <li>Sistem Operasi : belum ada</li> <li>Kapasitas : belum ada</li> </ul>                                                                                                                                   |
|     |           | <u>Yang Direncanakan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Yang Direncanakan</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi : TPA Talumelito</li> <li>FS : disusun tahun 2023</li> <li>DED : Tahun 2022 (Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito)</li> <li>AMDAL : belum disusun</li> <li>LARAP : belum disusun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi : belum ada</li> <li>FSi IPAL : belum ada</li> <li>DED : belum ada</li> <li>AMDAL : belum ada</li> <li>LARAP : belum ada</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 4   | Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis di Provinsi Gorontalo dengan insinerator kapasitas 200 kg/jam, hibah 1 unit truk hino dengan box pendingin.</li> <li>Kerjasama JICA dengan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir danau Limboto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama city to city dengan Prefektur Ehime Jepang terkait manajemen lingkungan dan pengolahan limbah pabrik kelapa</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Mondylia Amerta untuk mengembangkan sistem pemantauan air secara kontinu, otomatis dan online (<i>data real time</i>) di Danau Limbot</li> </ul> |
| 5   | Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000 pada tahun 2022 untuk penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendanaan APBD Provinsi untuk air limbah domestik sebesar Rp. 3.507.683.992 dari Tahun 2019-2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP, Tahun 2024

### 2.3.1 Pengelolaan Persampahan

Kondisi eksisting pengelolaan persampahan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan hasil input data eksisting pada form 2, sheet-1 tentang pengelolaan persampahan provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-45  
Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan

| PERDA       |           | PERKADA   |                  |               |                  |        |
|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------------|--------|
| Pengelolaan | Retribusi | Jakstrada | Rencana Induk    | RSP           | STBM             | Germas |
| ada         | ada       | ada       | <i>Belum ada</i> | <i>proses</i> | <i>Belum ada</i> | ada    |

Sumber : survey instansional konsultan RSP, 2024

Tabel 2-46  
Kelembagaan Persampahan Provinsi

| Regulator | Operator |
|-----------|----------|
| ada       | ada      |

Sumber :DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-47  
Infrastruktur Persampahan Provinsi

| TPA REGIONAL                                                 |                                                                 |                   |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Yang Sudah Beroperasi                                        |                                                                 |                   |                     |                       |
| Kabupaten/ Kota                                              | Lokasi TPA                                                      | Operator Layanan  | Sistem Operasi      | Kapasitas             |
| Kota Gorontalo,<br>Kabupaten Gorontalo,<br>Kabupaten Boalemo | Desa Talumelito<br>Kecamatan Telaga Biru<br>Kabupaten Gorontalo | UPTD TPA Regional | Controlled landfill | 19.430 m <sup>3</sup> |

Sumber :UPTD TPA Regional Talumelito, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.47

| TPA REGIONAL                                                 |                  |                 |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| Yang Direncanakan                                            |                  |                 |            |           |           |
| Kabupaten/ Kota                                              | Nota Kesepakatan | Study Kelayakan | DED        | AMDAL     | LARAP     |
| Kota Gorontalo,<br>Kabupaten Gorontalo,<br>Kabupaten Boalemo | Belum ada        | Tahun 2023      | Tahun 2022 | Belum ada | Belum ada |

Sumber :UPTD TPA Regional Talumelito, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Lanjutan tabel 2.47

| PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL |           |                               |                   |                   |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Yang Sudah Beroperasi                              |           |                               |                   | Yang direncanakan |           |           |           |           |
| Kabupaten/ Kota                                    | Lokasi    | Jenis Infrastruktur Terbangun | Lembaga Pengelola | Lokasi            | FS        | DED       | AMDAL     | LARAP     |
| Boalemo                                            | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Gorontalo                                          | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Pohuwato                                           | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Bone Bolango                                       | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Gorontalo Utara                                    | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Kota Gorontalo                                     | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Lanjutan tabel 2.47

| PENGELOLAAN SAMPAH PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI |           |                               |                   |                   |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Yang Sudah Beroperasi                                     |           |                               |                   | Yang direncanakan |           |           |           |           |
| Kabupaten/ Kota                                           | Lokasi    | Jenis Infrastruktur Terbangun | Lembaga Pengelola | Lokasi            | FS        | DED       | AMDAL     | LARAP     |
| Boalemo                                                   | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Gorontalo                                                 | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Pohuwato                                                  | Belum ada | Belum ada                     | Belum ada         | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| PENGELOLAAN SAMPAH PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI |           |           |           |                   |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Yang Sudah Beroperasi                                     |           |           |           | Yang direncanakan |           |           |           |           |
| Bone Bolango                                              | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Gorontalo Utara                                           | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |
| Kota Gorontalo                                            | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada         | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada |

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-48  
Pendanaan Persampahan Provinsi (Rp. X 10<sup>6</sup>)

| Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya | TAHUN |        |      |      |      | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|------|--------|
|                                                                      | 2023  | 2022   | 2021 | 2020 | 2019 |        |
| Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito                   | 0,00  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| JUMLAH/TOTAL                                                         | 0,00  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

tahun n adalah tahun pada saat penyusunan RSP

| Total APBD Provinsi | Total APBN (DAK dan Hibah) | TOTAL PENDANAAN NON PEMERINTAH |      |              |                         |                      | TOTAL |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------|--------------|-------------------------|----------------------|-------|
|                     |                            | ZISWAF                         | CSR  | Mikro Kredit | Kerjasama dengan Swasta | Hibah non Pemerintah |       |
| 0,00                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |

Sumber : RKA Bidang cipta karya jasa konstruksi, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

### 2.3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah Provinsi berdasarkan hasil input data eksisting pada form 2, sheet-1 tentang pengelolaan air limbah provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-49

Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

| PERDA       |           | PERKADA       |               |           |        |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|
| Pengelolaan | Retribusi | RISPALD       | RSP           | Stop BABS | Germas |
| ada         | Belum ada | <i>proses</i> | <i>proses</i> | Belum ada | ada    |

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-50

Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi

| KELEMBAGAAN |           |
|-------------|-----------|
| Regulator   | Operator  |
| Belum ada   | Belum ada |

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-51

Infrastruktur Air Limbah Domestik Provinsi

| IPAL REGIONAL         |               |                     |                   |           |                    |                     |                    |              |              |              |
|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Yang Sudah Beroperasi |               |                     |                   |           | Yang Direncanakan  |                     |                    |              |              |              |
| Kabupaten/<br>Kota    | Lokasi<br>TPA | Operator<br>Layanan | Sistem<br>Operasi | Kapasitas | Kabupaten/<br>Kota | Nota<br>Kesepakatan | Study<br>Kelayakan | DED          | AMDAL        | LARAP        |
| Boalemo               | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Gorontalo             | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | <b>ada</b>   | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Pohuwato              | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Bone<br>Bolango       | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Gorontalo<br>Utara    | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Kota<br>Gorontalo     | Belum<br>ada  | Belum ada           | Belum<br>ada      | Belum ada | Belum ada          | Belum ada           | Belum ada          | <b>ada</b>   | Belum<br>ada | Belum<br>ada |

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan Tabel 2.51

| PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI |              |                                     |                      |                   |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yang Sudah Beroperasi                                                  |              |                                     |                      | Yang direncanakan |              |              |              |              |
| Kabupaten/<br>Kota                                                     | Lokasi       | Jenis<br>Infrastruktur<br>Terbangun | Lembaga<br>Pengelola | Lokasi            | FS           | DED          | AMDAL        | LARAP        |
| Boalemo                                                                | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Gorontalo                                                              | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Pohuwato                                                               | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Bone<br>Bolango                                                        | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Gorontalo<br>Utara                                                     | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |
| Kota<br>Gorontalo                                                      | Belum<br>ada | Belum ada                           | Belum ada            | Belum<br>ada      | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada | Belum<br>ada |

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-52  
Pendanaan Air Limbah Domestik Provinsi

| Pendanaan APBD untuk Air Limbah Domestik pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya                | TAHUN (Rp)     |                |      |                |                  | TOTAL (Rp)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                             | 2023           | 2022           | 2021 | 2020           | 2019             |                  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah |                |                |      | 7.313.000,00   | 155.000.000,00   | 162.313.000,00   |
| Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi                            |                |                |      | 775.552.812,00 | 1.724.674.000,00 | 2.500.226.812,00 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                            |                | 156.594.730,00 |      |                |                  | 156.594.730,00   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                            |                | 581.454.500,00 |      |                |                  | 581.454.500,00   |
| Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                   | 5.001.500,00   |                |      |                |                  | 5.001.500,00     |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                            | 02.093.450,00  |                |      |                |                  | 102.093.450,00   |
| JUMLAH/TOTAL                                                                                | 107.094.950,00 | 738.049.230,00 | 0    | 782.865.812,00 | 1.879.674.000,00 | 3.507.683.992,00 |

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.52

| Total APBD Provinsi | Total APBN (DAK dan Hibah) | TOTAL PENDANAANNON PEMERINTAH |      |              |                         |                      | TOTAL |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------|--------------|-------------------------|----------------------|-------|
|                     |                            | ZISWAF                        | CSR  | Mikro Kredit | Kerjasama dengan Swasta | Hibah non Pemerintah |       |
| 0,00                | 0,00                       | 0,00                          | 0,00 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  |

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

**2.4 Permasalahan Pengelolaan Sanitasi****2.4.1 Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota**

Identifikasi permasalahan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota mengacu hasil score pada **Form.1, sheet 7 dan sheet 8**, yaitu bagi kabupaten/kota yang memiliki **Score Rendah, Sangat Rendah atau Sedang**.

Hasil perhitungan pada form tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini.

| No.             | Lokasi          | NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI |               |                                     |               |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                 |                 | Nilai Profil Pengelolaan Persampahan  | Keterangan    | Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah | Keterangan    |
| 7501            | Boalemo         | 30,00%                                | rendah        | 52,63%                              | sedang        |
| 7502            | Gorontalo       | 32,53%                                | rendah        | 48,13%                              | rendah        |
| 7503            | Pohuwato        | 46,11%                                | rendah        | 33,47%                              | rendah        |
| 7504            | Bone Bolango    | 39,06%                                | rendah        | 34,66%                              | rendah        |
| 7505            | Gorontalo Utara | 31,18%                                | rendah        | 54,92%                              | sedang        |
| 7506            | Kota Gorontalo  | 53,17%                                | sedang        | 53,10%                              | sedang        |
| <b>Provinsi</b> |                 | <b>38,67%</b>                         | <b>rendah</b> | <b>46,15%</b>                       | <b>rendah</b> |

Sumber : Perhitungan konsultan RSP Tahun 2024 berdasarkan hasil survey

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-53  
Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                              |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 3. | Pohuwato       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sudah berumur 8 tahun sehingga harus disusun Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan dengan rencana program jangka menengah nasional Tahun 2025-2029</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air</li> </ul>        |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                              |
|    |                 | sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | limbah                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya peraturan daerah yang secara pokok mengatur institusi, ketentuan umum kebersihan serta retribusi sampah</li> <li>• Belum ada peraturan daerah terkait pelaksanaan sangsi terhadap pelanggar-pelanggar dalam pengelolaan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |
| 6. | Kota Gorontalo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah</li> <li>• Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat</li> <li>• Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-54

Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                                                                      |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPTD</li> <li>• Peningkatan SDM UPTD</li> </ul> |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPTD</li> <li>• Peningkatan SDM UPTD</li> </ul> |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                       |
|    |                 | pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Pohuwato        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk dinas yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan anggaran operasi dan pemeliharaan</li> <li>Kurang dapat mengembangkan SDM dalam pengelola berbentuk dinas karena terbentuk aturan kepegawaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>UPTD</li> <li>Peningkatan SDM UPTD</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 6. | Kota Gorontalo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-55  
Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Polohungo kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Boalemo</li> <li>• Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal</li> <li>• Instalasi Pengolahan Lindi rusak dan tidak terawat</li> <li>• Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i></li> <li>• Dari 2 unit TPS 3 R, 2 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> <li>• Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Desa Polohungo Kecamatan Dulupi</li> <li>• Belum ada penjaga di lokasi IPLT</li> <li>• Sudah mulai ditumbuhi rumput liar</li> <li>• <i>Screen chamber</i> tidak terpasang</li> <li>• 5 m3 dengan 2 truk tinja</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul>             |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 1 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai komposting skala RT RW dan rumah kompos</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> <li>• Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, mempunyai permasalahan seperti areal IPLT ditanami jagung, pipa outlet <i>settling thickening</i> terputus, sehingga kapasitas IPLT sebesar 12 m<sup>3</sup>/hari tidak dapat dipergunakan</li> <li>• Truk Tinja 2 buah dengan kapasitas 8 m<sup>3</sup>,</li> </ul> |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Pohuwato        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Delo Indah kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Pohuwato</li> <li>• Jalan operasional berupa jalan tanah</li> <li>• Kolam lindi tidak berfungsi dan rusak</li> <li>• Geomembran robek</li> <li>• Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i></li> <li>• Dari 8 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai komposting skala RT RW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPA Lonuo belum berfungsi karena belum adanya alat berat</li> <li>• Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tampung TPA Molantadu Kecamatan Tomilito kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Gorontalo Utara</li> <li>• Alat berat tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya</li> <li>• Saluran dan unit pengolahan lindi tidak berfungsi baik</li> <li>• Beberapa titik geomembran robek</li> <li>• Sel landfill terisi tanaman air</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil tinja bantuan DAK Tahun 2019 tidak berfungsi optimal</li> <li>• IPLT Mootinelo Kecamatan Kwandang belum berfungsi maksimal</li> <li>• Scrren chamber tidak terpasang</li> <li>• Jalan akses belum ada pengerasan</li> <li>• Belum ada petugas di IPLT</li> <li>• Kapasitas 8 m<sup>3</sup> dengan 3 truk</li> </ul> |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPA belum dilengkapi jembatan timbang, pagar keliling, sarana listrik dan air bersih</li> <li>• Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal</li> <li>• TPST Bukit Ru'ya belum berfungsi optimal terkait dengan pemilahan dan daur ulang sampah</li> <li>• Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal</li> <li>• Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> <li>• Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)</li> </ul> | <p>tinja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Kota Gorontalo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari 10 unit TPS 3 R, 6 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah berkurang</li> <li>• Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPLT Kecamatan Kota Utara</li> <li>• Masih ada kegiatan lain di sekitar lokasi IPLT</li> <li>• Pembuangan langsung ke bak pengering lumpur</li> <li>• Kapasitas 10 m<sup>3</sup> dengan 2 truk kapasitas 5000 L</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-56  
Permasalahan Perilaku Masyarakat Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                   |                                                                                                            |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                                                                                        |
| 1. | Boalemo         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi program 3 R sangat rendah</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 2. | Gorontalo       |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 3. | Pohuwato        |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 4. | Bone Bolango    |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat belum seluruhnya menerapkan pola pengolahan 3 R di sumber sampah rumah tangga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |
| 6. | Kota Gorontalo  |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-57  
Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Air Limbah Domestik                           |
| 1. | Boalemo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,086% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan</li> </ul> | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |
| 2. | Gorontalo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,173% sehingga kurang</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota  | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                 | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Air Limbah Domestik                           |
|    |                 | <p>mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>• Realisasi Retribusi baru mencapai 76% dari target yang ditetapkan</li> </ul>                                                                                                                            |                                               |
| 3. | Pohuwato        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,4% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>• Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>• Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan</li> </ul>    |                                               |
| 4. | Bone Bolango    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,183% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>• Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>• Realisasi Retribusi baru mencapai 42% dari target yang ditetapkan</li> </ul> |                                               |
| 5. | Gorontalo Utara | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,02% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>• Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>• Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan</li> </ul>   | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Kabupaten/kota | Permasalahan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                | Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Air Limbah Domestik                           |
| 6. | Kota Gorontalo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 57% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah</li> <li>Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah</li> <li>Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan</li> </ul> | Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

**2.4.2 Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Provinsi**

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Provinsi pada wilayah lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi dan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-58  
Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi

| No | Aspek     | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan terkait pengelolaan sampah yang disusun pada Tahun 2013 sudah selayaknya diperbaharui dengan peraturan sejenis di tahun 2025.</li> <li>Belum disusunnya peraturan kepala daerah terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah pada wilayah kewenangan provinsi</li> <li>Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Provinsi Gorontalo</li> <li>Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>Pemerintah provinsi belum menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat diakses masyarakat</li> </ul> |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara kontinu</li><li>• Belum disusunnya peraturan terkait penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Kelembagaan   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah khususnya karyawan dan petugas pada UPTD TPA Regional Talumelito</li><li>• Belum terjalinya penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait lembaga pengelola TPA regional Talumelito</li><li>• Belum kontinunya peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</li><li>• Belum ada sistem informasi terintegrasi antara UPTD dengan Provinsi dan Pusat</li><li>• Belum terdapat sinergi antara OPD pengelola sampah dengan kelurahan dan kecamatan serta masyarakat, serta belum dijalankannya insentif dan disinsentif secara terprogram dan konsisten</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| 3. | Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum terdapat kepastian dalam pengembangan landfill TPA Regional Talumelito terkait penuhnya sampah pada lahan penimbunan eksisting</li><li>• Belum terdapat upaya pembatasan timbulan sampah dari kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanan TPA Sampah Regional Talumelito</li><li>• Belum menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya</li><li>• Belum adanya produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin</li><li>• Belum meratanya sarana pendauran ulang sampah</li><li>• Belum seluruh masyarakat melakukan pemanfaatan kembali sampah</li><li>• Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah</li><li>• Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan</li></ul> |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya fasilitas bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</li><li>• Belum adanya penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li><li>• Belum adanya penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna</li><li>• Belum seluruh desa/kelurahan memiliki unit pengelola sampah (bank sampah) dan terdapat unit pengelola sampah (bank sampah) yang tidak aktif melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce reuse, recycle)</li><li>• Belum semua unit pengelola sampah mempunyai bentuk pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Perilaku Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan.</li><li>• Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pertama dalam hal pengurangan dan penanganan sampah belum diatur secara jelas, sifatnya hanya himbauan. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk kepengurusan bank sampah juga tidak dengan jelas diatur tugas dan fungsinya</li><li>• Kurangnya pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal, provinsi dan nasional maupun sektor swasta</li><li>• Kurangnya penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi</li><li>• Belum terdapat partisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya.</li><li>• Minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pembentukan bank sampah di setiap desa/kelurahan</li><li>• Belum tersosialisasinya kegiatan pemilahan menjadi tanggungjawab dari setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,</li></ul> |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek     | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Pendanaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih berkisar antara 0,1%-2% dari APBD Provinsi, sehingga menyulitkan operasional pengelolaan sampah</li> <li>• Kurangnya langkah-langkah penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Belum adanya penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan</li> </ul> |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-59

Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

| No | Aspek         | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peraturan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada peraturan daerah terkait air limbah domestik, yang ada tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Pengelola IPAL Regional belum ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi naskah akademik terkait pengelolaan SPAL di Provinsi Gorontalo dapat dipersiapkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Kelembagaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah yang menjadi garda terdepan pengelolaan air limbah (sanitasi) masih belum dilengkapi dengan kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada.</li> <li>• Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya IPAL Regional yang melayani wilayah perkotaan di Provinsi Gorontalo, hal ini dapat difahami dengan kondisi kepadatan penduduk yang &lt; 15.000 jiwa/km<sup>2</sup>.</li> <li>• Data-data yang reliable dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan</li> <li>• Perhatian yang terbatas kepada air limbah juga ditandai dengan keterbatasan pilihan teknologi alternatif sehingga aplikasinya pada masalah dan lingkungan yang beragam, misalnya untuk jenis buangan padat dan cair, dari kawasan industri maupun rumah tangga, menjadi jauh dari optimal</li> </ul> |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Perilaku Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"><li>• akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi, sayangnya tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban itu sendiri.</li><li>• Sanitasi juga masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah perdesaan, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan masyarakat. Sayangnya LSM yang bergerak di bidang sanitasi masih sangat sedikit.</li><li>• Keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah, para wakil rakyat, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembuk dan bertindak sesuai kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah</li></ul> |
| 5. | Pendanaan           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya kepedulian pemerintah dan wakil rakyat akan persoalan sanitasi tercermin dari alokasi anggaran yang sangat sedikit untuk pembangunan fasilitas sanitasi dasar. Padahal, bahaya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas air baku karena kurangnya perhatian pada masalah sanitasi dapat menyebabkan upaya perbaikan yang 10 kali lebih mahal daripada biaya pencegahannya</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

## 2.5 Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030 untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik, sebagaimana tertuang pada tujuan 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation- Ensure access to water and sanitation for all*), dalam rangka menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Upaya taktis pemerintah dalam upaya mencapai target tersebut di atas melalui kelembagaan program pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat sebagai aset bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam RPJMN 2020 – 2024 telah dituangkan melalui pilar ke-4 yaitu Kesejahteraan yang terus meningkat. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, yang salah satu agendanya adalah Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan tujuan pembangunan Milenium (SDGs) dan target pencapaian RPJMN dapat dilihat dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 yaitu "Gorontalo Maju dan Mandiri".

Selaras dengan visi Provinsi Gorontalo, penyusunan visi dan misi pembangunan sanitasi provinsi dapat dikembangkan dari dokumen perencanaan daerah dan nasional (RPJMD Provinsi, Jakstranas persampahan dan air limbah domestik atau RPJMN), sebagai berikut:

a) Visi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Visi

***"Terwujudnya Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo "***

b) Misi Sanitasi Provinsi Gorontalo

**Pengelolaan Sampah**

- 1). Mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dengan gerakan BASNOL (gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol), dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi aman yang merupakan bagian dari sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*)
- 3). Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman
- 4). Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 5). Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 6). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *good corporate governance*
- 7). Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman

**Pengelolaan Air Limbah**

- 1). Meningkatkan perubahan perilaku terutama persepsi dan tanggungjawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- 2). Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dengan mengedepankan tanggungjawab individu.

- 3). Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
- 4). Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta
- 5). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*, yang berupa:
  - a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
  - b) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
  - c) Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan
  - d) Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien dan profesional
  - e) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan
  - f) Peningkatan jumlah sampah pada Bank Sampah induk dan Bank Sampah Unit
  - g) Mewujudkan pengelolaan sampah organik langsung dari sumbernya
- 6). Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan:
  - a) Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan
  - b) Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan, baik melalui anggaran kabupaten/kota, provinsi, pusat dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- c) Pengembangan dan perkuatan bagi kota-kota yang belum mampu menyediakan pelayanan minimal
  - d) Membentuk wadah promosi dan publikasi produk daur ulang melalui galeri produk daur ulang sampah
  - e) Merencanakan rumah pintar belajar sampah (*trash Play House*), yaitu gerakan produktif pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan strategis destinasi wisata
  - f) Mengembangkan solusi dan peningkatan nilai tambah pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace) secara produktif dan inovatif serta berdampak ekonomis bagi masyarakat;
  - g) Diversifikasi bisnis TPS3R untuk menghasilkan pendapatan serta nilai tambah dalam pengelolaan sampah bagi Komunitas, Masyarakat dan Desa;
- 7). Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan:
- a) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan stakeholder terkait
  - b) Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

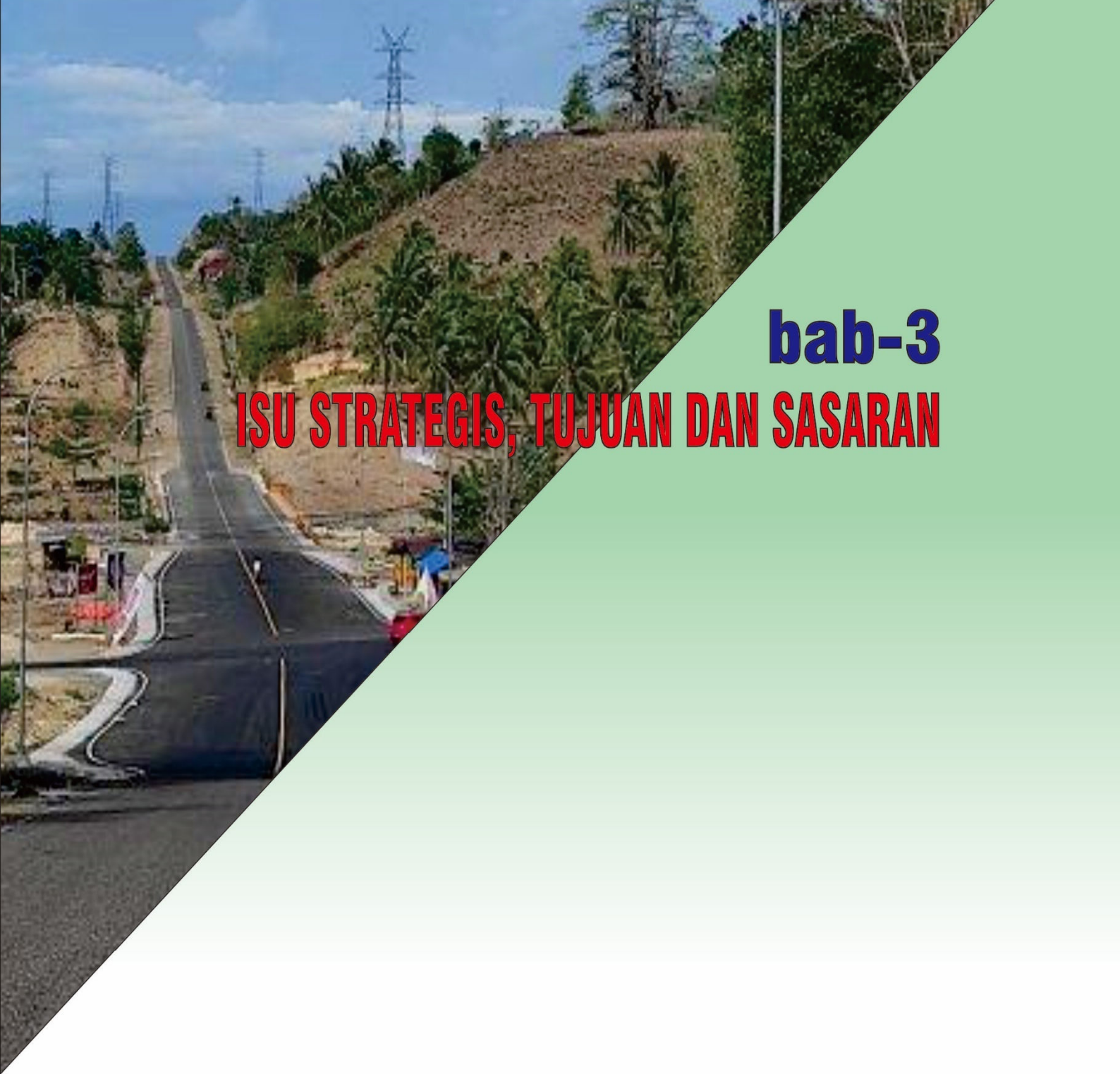
IPLT Kabupaten Gorontalo Utara



**GPS Map Camera**



**Kecamatan Kwandang, Gorontalo, Indonesia**  
QVVJ+7XQ, Mootinelo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,  
Gorontalo 96252, Indonesia  
Lat 0.793086°  
Long 122.882513°



## **bab-3**

# **ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan-6 SDGs, juga dalam Sasaran-6.2, yang mengamanatkan kepastian tersedianya layanan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua penduduk pada tahun 2030 mengisyaratkan perlunya pemerintah memiliki sebuah peta jalan yang jelas. Meskipun target akses aman telah dicantumkan dalam RPJMN 2019-2024, pemerintah memandang masih perlu memiliki sebuah peta jalan sanitasi aman 2030 yang memiliki target realistis dan menunjukkan adanya upaya percepatan.

Peta jalan Sanitasi Aman 2030 merupakan bagian dari upaya pemenuhan agenda SDGs tersebut. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi rujukan para pengambil keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah strategis mencapai Sasaran 6.2

Dalam satu dekade terakhir, akses masyarakat terhadap layanan sanitasi, khususnya layanan yang layak dan aman, secara nasional meningkat pesat, dari 55,5% di tahun 2010 menjadi 80,92% di tahun 2022 — sebuah kemajuan besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2017, pemerintah menerapkan perubahan perhitungan dan tambahan indikator akses sanitasi dengan mengadopsi SDGs yang diluncurkan di tahun 2015, yakni akses aman.

Kini ada enam indikator untuk menggambarkan akses sanitasi, yaitu: *akses aman*, *akses layak sendiri*, *akses layak bersama*, *akses belum layak*, *BABS tertutup*, dan *BABS di tempat terbuka*. Sebelum 2017, data akses aman tidak tersedia karena indikatornya belum ditetapkan.

Berdasarkan hasil survey, dapat diidentifikasi isu, tujuan dan sasaran sanitasi di Provinsi Gorontalo sebagai berikut.



Gambar 3.1 .  
Perumusan Awal Isu Strategis Pemenuhan Akses Sanitasi

## 3.1 Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

Keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah adalah Isu Strtegis, dimana isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Isu strategis sanitasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

| <b>Komponen Sanitasi</b>        | <b>Aspek</b>                           | <b>Isu Strategis</b>                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Air limbah Domestik | Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan) | 1 Inisiatif pembentukan Perda Air Limbah Domestik di 6 (enam) kabupaten/kota                                                                                                                      |
|                                 |                                        | 2 Inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 6 Kab/kota sesuai amanat Perda                                         |
|                                 |                                        | 3 Komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini                                                                            |
|                                 |                                        | 4 Kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik |
|                                 |                                        | 5 Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman                                                                                 |
|                                 |                                        | 6 masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah                                                                               |
|                                 |                                        | 7 belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah                                                                               |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| <b>Komponen Sanitasi</b> | <b>Aspek</b>                      | <b>Isu Strategis</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                   | 8 pengawasan dan penerapan aturan terhadap oknum yang melakukan pencemaran lingkungan                                                                                   |
|                          | Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola | 1 lemahnya fungsi kelembagaan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman                                                                            |
|                          |                                   | 2 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman                                                                               |
|                          |                                   | 3 kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih belum terampil                                                                |
|                          |                                   | 4 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman                                                     |
|                          |                                   | 5 Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekologi, sosial dan lingkungan hidup                                                                 |
|                          |                                   | 6 Tuntutan penerapan <i>good governance</i> melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan                                           |
|                          |                                   | 8 Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim                                                                                                       |
|                          | Aspek Infrastruktur dan Teknologi | 1 Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan dan pedesaan                                                                                          |
|                          |                                   | 2 Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat ( <i>on site</i> ) yang aman dan melalui sistem terpusat ( <i>off site</i> ) |
|                          |                                   | 3 Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan                                                           |
|                          |                                   | 4 Masih adanya masyarakat buang air besar sembarangan                                                                                                                   |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| <b>Komponen Sanitasi</b> | <b>Aspek</b> | <b>Isu Strategis</b>                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              | 5 Sub sistem pengolahan setempat yang belum memenuhi kriteria teknis                                                                                                                            |
|                          |              | 6 Sub sistem pengangkutan belum memadai dibandingkan dengan volume air limbah dan lumpur tinja                                                                                                  |
|                          |              | 7 Kapasitas dan teknologi dalam Sub sistem pengolahan lumpur tinja kurang sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan                                                                |
|                          |              | 8 Terbatasnya lahan untuk sub sistem pengolahan setempat skala komunal (2-10 rumah tinggal)                                                                                                     |
|                          |              | 9 Belum adanya peraturan penyedotan lumpur tinja swasta                                                                                                                                         |
|                          |              | 10 terdapat infrastruktur sanitasi yang sudah terbangun, tetapi terkendala operasionalisasinya                                                                                                  |
|                          |              | 11 Tidak adanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), karena sementara masih mempergunakan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)                                                         |
|                          |              | 12 Kualitas air limbah yang dianalisis masih diatas baku mutu untuk parameter total coliform, COD dan BOD (untuk IPLT Dulomo Kota Gorontalo) serta untuk IPAL Komunal di Komplek Gah 42         |
|                          |              | 13 Tidak ada pengukuran kualitas efluen                                                                                                                                                         |
|                          |              | 14 Kurangnya media untuk upaya komunikasi tentang air limbah kepada masyarakat                                                                                                                  |
|                          |              | 15 Pengelolaan air limbah domestik menggunakan SPALD Terpusat belum sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penduduk terkait topografi wilayah dan retribusi IPAL Komunal berbasis masyarakat |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

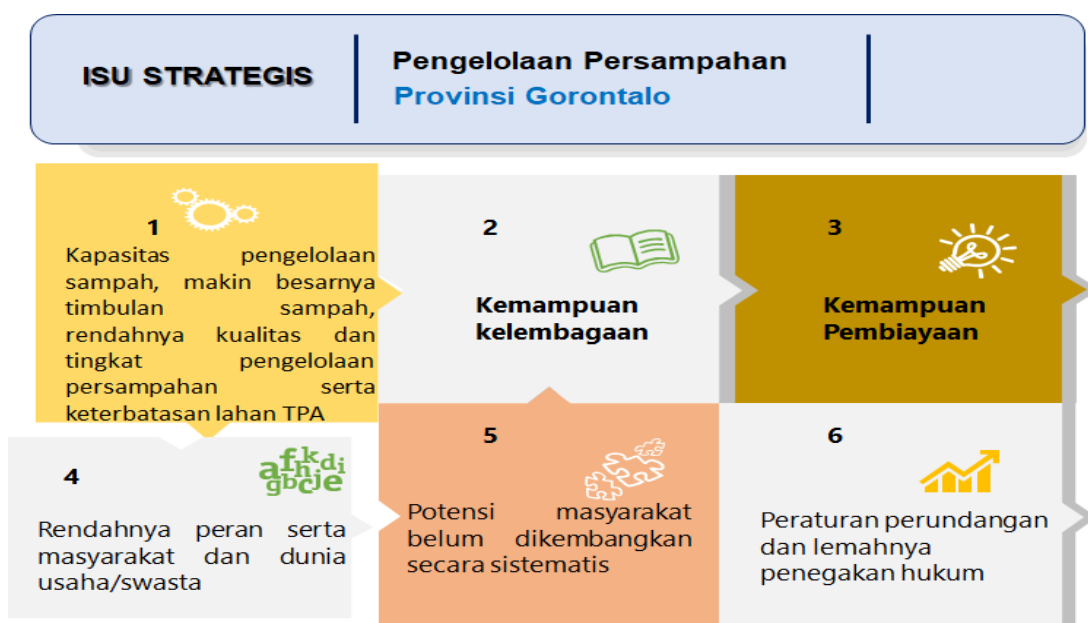
| <b>Komponen Sanitasi</b> | <b>Aspek</b>                 | <b>Isu Strategis</b>                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Aspek Partisipasi Masyarakat | 1 Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman                                                                                                   |
|                          |                              | 2 terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat                                                                         |
|                          |                              | 3 potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah                                                                                    |
|                          |                              | 4 Belum adanya komunitas sosial untuk menggerakkan masyarakat agar peduli lingkungan                                                                                                 |
|                          |                              | 5 Praktek pengurusan lumpur tinja sangat rendah setiap tahun                                                                                                                         |
|                          | Aspek Pendanaan              | 1 rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah                         |
|                          |                              | 2 terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat                 |
|                          |                              | 3 kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya pengalihan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi |
|                          |                              | 4 rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman                                                                               |
|                          |                              | 5 rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah                                                              |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Komponen Sanitasi | Aspek | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | 6 Belum optimalnya penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya operasi pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "win-win solution" |
|                   |       | 7 pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas                                                                                                                                    |
|                   |       | 8 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (% APBD murni untuk sanitasi sebesar < 1%)                                                                             |
|                   |       | 9 Rendahnya skala prioritas penanganan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah                                                                                                                                                                                 |

Sumber : Analisis Konsultan, 2024



**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.2  
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Persampahan

| Komponen Sanitasi       | Aspek                                  | Isu Strategis                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Persampahan | Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan) | 1 Masih lemahnya penegakan hukum sebagai upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup                                                                                                           |
|                         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian TPA dengan <i>sanitary Landfil</i> belum berjalan</li> </ul>                                                                                      |
|                         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah (pasal 45 Undang-undang 18 Tahun 2008)</li> </ul>                                   |
|                         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan pengelolaan sampah kepada Kementerian/Lembaga (pasal 41 Permendagri No. 33 Tahun 2010)</li> </ul>                                                     |
|                         |                                        | 2 Penerapan sangsi hukum bagi pelanggar belum menjadi prioritas                                                                                                                                        |
|                         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terakut belum terinformasikan secara sistematis</li> </ul>                                                        |
|                         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum disusunnya peraturan terkait sangsi hukum pelanggar sampah</li> </ul>                                                                                     |
|                         |                                        | 3 Belum ada peraturan terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah                                                                                                                                 |
|                         |                                        | 4 Meningkatnya komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi pengangkutan sampah berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini                                                            |
|                         |                                        | 5 Meningkatnya kesiapan Kabupaten/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi persampahan |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Komponen Sanitasi | Aspek                             | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                   | 6 Peraturan yang secara khusus mengatur tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah                                                                                            |
|                   |                                   | 7 Belum ada peraturan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah                                                                                                                                          |
|                   |                                   | 8 Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan daerah                                                                                                                                             |
|                   |                                   | 9 Peraturan terkait industri dan pelaku daur ulang sampah                                                                                                                                                                            |
|                   | Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola | 1 Sarana prasarana TPA belum lengkap, sehingga kelembagaan daerah tidak bersedia menerima infrastruktur yang dibangun                                                                                                                |
|                   |                                   | 2 Peranan lembaga/institusi pengelola sampah sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, masih menyatu antara peran operator dan regulator yaitu SKPD Dinas.                                 |
|                   |                                   | 3 Keterpaduan antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah belum diterapkan sesuai amanat Undang-undang (dalam masalah sampah dan produk kemasan, dalam masalah penutupan dan/atau rehabilitasi TPA) |
|                   | Aspek Infrastruktur dan Teknologi | 1 Belum diterapkannya pengurangan sampah dari sumber (produsen) yaitu dengan menerapkan EPR ( <i>extended producer responsibility</i> )/kewajiban produsen                                                                           |
|                   |                                   | Upaya masyarakat dalam daur ulang sampah masih terhambat dalam pemasaran hasil produk                                                                                                                                                |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampah belum dipilah sesuai jenis sampah</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pewadahan masih tercampur</li> </ul>                                                                                                                                                   |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Komponen Sanitasi | Aspek | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan kualitas wadah sampah terbatas</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                   |       | 2 Pengumpulan                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan sampah organik belum dilakukan setiap hari</li> </ul>                                                                                                                             |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan sampah dengan sarana prasarana pengumpul yang belum tersekat dan terpilah</li> </ul>                                                                                              |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih sulitnya pengadaan lokasi lahan untuk TPS 3R</li> </ul>                                                                                                                                 |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat cenderung resisten terhadap pembangunan TPS3R</li> </ul>                                                                                                                           |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat pengumpul sampah masih menggunakan gerobak dorong</li> </ul>                                                                                                                             |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas dan kualitas TPS3R masih rendah</li> </ul>                                                                                                                                          |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ditetapkan lokasi, jumlah dan luasan TPS dalam Rencana Detail Tata Ruang</li> </ul>                                                                                                     |
|                   |       | 3 Pengangkutan                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan sampah organik belum dilakukan setiap hari</li> </ul>                                                                                                                            |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadual pengangkutan sampah yang belum berkoordinasi dengan jadual pengumpulan oleh gerobak/gerobak motor sehingga menyebabkan antrian gerobak/gerobak motor di titik angkut sampah</li> </ul> |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas dan kualitas kendaraan pengangkut sampah belum mampu mengangkut volume sampah yang dihasilkan</li> </ul>                                                                            |
|                   |       | 4 Pengolahan                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan lahan untuk TPST dan/atau <i>intermediate treatment facility (ITF)</i></li> </ul>                                                                                                |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Komponen Sanitasi | Aspek | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada implementasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi di Provinsi Gorontalo sebagai <i>best practice</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       | <p>5 kapasitas pengelolaan sampah sangat terbatas, mengingat TPA sampah regional Talumelito sudah hampir habis kapasitasnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |       | <p>6. Pemrosesan Akhir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum dilakukan penutupan TPA dengan <i>cover soil</i> secara rutin setiap hari sesuai amanat Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan UKL/UPL di TPA yang kurang disiplin menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun resistensi masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sulit menyediakan lahan TPS sesuai kebutuhan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jenis dan jumlah alat berat di TPA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan air lindi di TPA masih belum memenuhi syarat teknis untuk dibuang ke badan air</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan gas di TPA belum optimal yang menyebabkan terlepasnya gas metana ke udara bebas, yang berpotensi menjadi penyumbang terbesar efek gas rumah kaca (GRK) yang tidak sejalan dengan <i>clean development mechanism</i> (CDM). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat peraturan menteri No. 01 Tahun 2014 yang menyebutkan sistem pengoperasian TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.</li> </ul> |
|                   |       | <p>7 cakupan layanan pengelolaan sampah UPTD TPA Regional Talumelito hanya sampai kepada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Komponen Sanitasi | Aspek                        | Isu Strategis                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                              | TPS/TPS3R/TST dan kawasan permukiman belum melakukan pengelolaan sampah sendiri                                                                                            |
|                   |                              | 8 Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah                                                                                              |
|                   |                              | 9 Sarana prasarana pendukung Tempat Pemrosesan Sampah kurang memadai                                                                                                       |
|                   |                              | 10 Tidak adanya alat berat di TPA Kabupaten Bone Bolango                                                                                                                   |
|                   | Aspek Partisipasi Masyarakat | 1 Perilaku yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang benar                                                                                                          |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebiasaan belum memilah sampah dan/atau belum mewedahi sesuai jenis sampah (pasal 12 ayat 1 Undang-undang 18 Tahun 2008)</li> </ul> |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kedisiplinan masyarakat atau warga membuang sampah sesuai aturan yang berlaku</li> </ul>                                            |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebiasaan lain yang ada di masyarakat tetapi tidak sejalan dengan Undang-undang seperti 'membakar sampah"</li> </ul>                |
|                   |                              | 2 Kedisiplinan dalam pengelolaan sampah (keberlanjutan program pengelolaan sampah)                                                                                         |
|                   |                              | 3 Pengetahuan masyarakat tentang sampah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang benar                                                                        |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku membuang sampah belum terpilah maupun membakar sampah</li> </ul>                                                           |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan membakar sampah dipandang masyarakat sebagai hal yang biasa dan aman</li> </ul>                                            |
|                   |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan warga tentang 3 R</li> </ul>                                                                                            |
|                   |                              | 4 Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah masih rendah                                                                                            |
|                   | Aspek Pendanaan              | Belum ditetapkannya standar biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan,                                                                                           |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| <b>Komponen Sanitasi</b> | <b>Aspek</b> | <b>Isu Strategis</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              | pengolahan dan pengolahan akhir dalam Rp.ton                                                                                                                                           |
|                          |              | Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota                                                                                     |
|                          |              | Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah                                                                                    |
|                          |              | Belum dimanfaatkannya dana desa yang diamanatkan oleh Perpres No. 60 Tahun 2014                                                                                                        |
|                          |              | 1 Perbandingan jumlah pendapatan biaya jasa pelayanan terhadap anggaran biaya operasional pengelolaan sampah relatif kecil                                                             |
|                          |              | 2 Penggunaan anggaran Dinas masih belum optimal, mengingat pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum memenuhi standar operasional sistem <i>sanitary landfill</i> |
|                          |              | 3 Tarif retribusi belum memperhitungkan biaya mulai dari sumber sampah sampai ke TPA                                                                                                   |
|                          |              | 4 Kerjasama Badan Usaha dalam pengelolaan sampah masih kurang                                                                                                                          |
|                          |              | 5 Belum terkelolanya sumber-sumber pendanaan lain dari Badan Usaha seperti csr                                                                                                         |

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

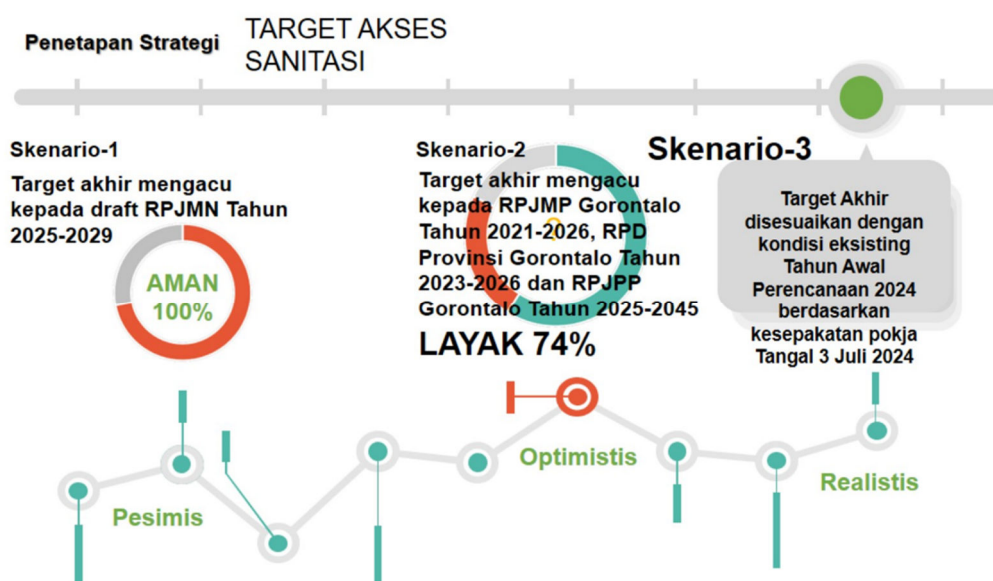
### 3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi

Target akses aman Sanitasi Tahun 2030 diharapkan dapat dicapai melalui beberapa tujuan dan sasaran, yaitu:

#### **HIGHLIGHT INTERVENSI UMUM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

##### **Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi**

- Pemenuhan akses sanitasi yang aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti sanitasi aman dan pengelolaan persampahan



Gambar 3.2 .  
Skenario Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo, skenario-2 tidak akan diperhitungkan. Hal ini karena dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, hanya dicantumkan prosentase cakupan sanitasi layak untuk pengelolaan air limbah sebesar 70% pada Tahun 2024, 72% pada Tahun 2025 dan 74% pada Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel 6.3 program pembangunan daerah yang disertai pendanaan (halaman 299), akses aman dan lainnya tidak dicantumkan.

Untuk akses pengelolaan persampahan, diuraikan tentang volume sampah yang dikelola TPA Regional Talumelito pada Tahun 2024 – Tahun 2026 (25.000 ton/tahun), tidak ada prosentase rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah.

Jika sampah yang dihasilkan penduduk di Provinsi Gorontalo adalah 801,52 ton/hari, maka 25.000 ton/tahun setara dengan 68,49315 ton/hari atau 8,545% Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 3.3  
Sebaran Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029  
Berdasarkan Data RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2026

| No. | Target                                                     | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| A.  | Akses Sanitasi (air limbah domestik)                       |        |        |        |        |        |
| 1.  | Layak                                                      | 72,00% | 74,00% | 83,01% | 85,01% | 87,01% |
| 2.  | Aman                                                       | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 3.  | SPAL Setempat D                                            | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 4.  | SPALD Terpusat                                             | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 5.  | SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.       | Target                                                    | Tahun  |        |        |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |                                                           | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 6.        | SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat             | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 7.        | BABs                                                      | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| <b>B.</b> | <b>Akses Sanitasi (Pengelolaan Persampahan)</b>           |        |        |        |        |        |
| 1         | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah | 8,545% | 8,545% | 8,545% | 8,545% | 8,545% |
| 2         | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)          | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 3         | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah             | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |
| 4         | sampah terdaur ulang                                      | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    | n/a    |

Sumber : RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2026

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akses sanitasi Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan baseline awal perhitungan Tahun 2024 yang didasarkan kepada hasil rapat koordinasi terkait target cakupan layanan persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, persentase KK Babs di tempat terbuka dan prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman Tahun 2025-2029 pada Tanggal 3 Juli 2024, dengan target akses sanitasi akhir roadmap dihitung berdasarkan kenaikan persentase akses Tahun 2024-2025 yang disepakati masing-masing Kabupaten/kota, sebagai berikut.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.4  
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo  
Tahun 2025-2029

| No.       | Komponen                                                          | Baseline | Target Akses-Tahun |        |        |        |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
|           |                                                                   | 2024     | 2025               | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| <b>A.</b> | <b>Pengelolaan air limbah domestik</b>                            |          |                    |        |        |        |         |
| 1.        | Layak                                                             | 90,63%   | 92,50%             | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2         | Aman                                                              | 2,05%    | 4,88%              | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 2.a       | SPALD Setempat                                                    | 1,41%    | 4,03%              | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |
| 2.b       | SPALD Terpusat                                                    | 0,35%    | 0,83%              | 1,41%  | 1,91%  | 2,41%  | 3,04%   |
| 2.b.1     | <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> | 0,28%    | 0,66%              | 1,13%  | 1,53%  | 1,93%  | 2,43%   |
| 2.b.2     | <i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>              | 0,06%    | 0,13%              | 0,23%  | 0,31%  | 0,39%  | 0,49%   |
| 3         | % KK BABs                                                         | 9,32%    | 7,23%              | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  | 1,90%   |
| 3.a       | % Desa Stop BABs (SBS)                                            | 43,00%   | 45,00%             | 47,00% | 49,00% | 51,00% | 53,00%  |
| 3.b       | % Desa STBM                                                       | 1,23%    | 3,23%              | 5,23%  | 7,23%  | 9,23%  | 11,23%  |
| <b>B.</b> | <b>Pengelolaan persampahan</b>                                    |          |                    |        |        |        |         |
| 5         | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah         | 35,15%   | 41,24%             | 46,67% | 52,11% | 57,54% | 62,98%  |
| 5.a       | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)                  | 21,09%   | 23,83%             | 26,57% | 29,31% | 32,05% | 34,79%  |
| 5.b       | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                     | 14,06%   | 18,08%             | 21,44% | 24,80% | 28,16% | 31,52%  |
| 5.b.1     | sampah terdaur ulang                                              | 4,54%    | 6,30%              | 7,92%  | 9,54%  | 11,17% | 12,79%  |

Sumber : Berita Acara Kesepakatan Target PKP, Air Minum dan Sanitasi Aman, 3 Juli 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Pengelolaan sanitasi Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut.

**LAPORAN PENDAHULUAN**

Pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo  
Tahun 2024

Tabel 3.5  
Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 (Berdasarkan Capaian Eksisting)

| No. | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                   | Indikator Kinerja                                                    | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                    |                                                                           |                                                                      |        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 1   | Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah | Tercapainya target rumah tangga yang mendapat pelayanan penuh persampahan | Persentase Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah | %      | 41,24% | 46,67% | 52,11% | 57,54% | 62,98% |
| 2   | Meningkatkan residu tersisa dalam Lahan Urug Residu                                | Tercapainya sisa sampah yang dibuang ke TPA                               | Persentase Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)          | %      | 23,83% | 26,57% | 29,31% | 32,05% | 34,79% |
| 3   | Meningkatkan volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah             | Tercapainya target penanganan sampah oleh masyarakat                      | Persentase Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah             | %      | 18,08% | 21,44% | 24,80% | 28,16% | 31,52% |
| 4   | Meningkatkan sampah yang terdaur ulang pada fasilitas daur ulang                   | Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat                     | Persentase sampah terdaur ulang                                      | %      | 6,30%  | 7,92%  | 9,54%  | 11,17% | 12,79% |

Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Eksisting Pengelolaan

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.6  
Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 (Berdasarkan Capaian Eksisting)

| No. | Tujuan                                                                                                     | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                                              | Tahun  |        |        |        |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| 1.  | Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di Provinsi sesuai kewenangan                        | Tercapainya akses sanitasi layak                                                                       | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi Layak    | 92,50% | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2.  | Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di Provinsi sesuai kewenangan                        | Tercapainya akses sanitasi aman                                                                        | Persentase Rumah Tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman | 4,88%  | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 3.  | Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Setempat | Tercapainya 25% sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber | Persentase rumah tangga yang menggunakan SPAL D Setempat                       | 4,03%  | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Tujuan                                                                                                                                                           | Sasaran                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                   | Tahun |       |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 4.  | Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat                                                       | Tercapainya sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif ke sub-sistem pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. | Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat                                             | 0,35% | 0,83% | 1,41% | 1,91% | 2,41% |
| 5.  | Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat di wilayah-wilayah kewenangan provinsi (200-5.000 SR) | Tercapainya 4% rumah tangga yang menggunakan SPAL D Terpusat berbasis institusi                                                                                                          | Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi | 0,28% | 0,66% | 1,13% | 1,53% | 1,93% |
| 6.  | Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat di wilayah-wilayah                                    | Tercapainya 1% rumah tangga yang menggunakan SPAL D Terpusat berbasis masyarakat                                                                                                         | Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat                                             | 0,06% | 0,13% | 0,23% | 0,31% | 0,39% |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                               | Indikator Kinerja              | Tahun  |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                       |                                       |                                | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | kewenangan provinsi (50-200 SR)                                                                                                       |                                       | permukiman berbasis masyarakat |        |        |        |        |        |
| 7.  | Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS                                                                                 | Tercapainya target 0% BABS            | BABs                           | 9,32%  | 7,23%  | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  |
| 8.  | Meningkatkan kondisi individu dalam komunitas tidak Buang Air Besar Sembarang                                                         | Tercapainya target 50% Desa Stop BABS | % Desa Stop BABs (SBS)         | 45,00% | 47,00% | 49,00% | 51,00% | 53,00% |
| 9.  | Meningkatkan stop BABS, CTPT, pengolahan air minum yang aman, pengolahan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga | Tercapainya target 10% Desa STBM      | % Desa STBM                    | 3,23%  | 5,23%  | 7,23%  | 9,23%  | 11,23% |

Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Eksisting Pengelolaan



# **BAB-4**

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

## 4.1 Strategi Pengelolaan Sanitasi

### 4.1.1 Strategi Pengelolaan Persampahan

Menjelang RPJMN Tahun 2025-2029 disahkan, pada Tahun 2023 Bappenas mengeluarkan rencana teknokratik peta jalan sanitasi aman (menuju akses aman dan layanan berkelanjutan) dan target pengelolaan sampah yang tercantum dalam uraian target kinerja pengelolaan sampah draft RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu : 85 % rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, 47% sampah residu tersisa dalam Lahan Urug Saniter, 38% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan 20% sampah terdaur ulang atau sebagaimana Permendagri No. 87 Tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah Tahun 2024, yaitu : 80 % penanganan sampah dan 20% pengurangan sampah.

Strategi dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo untuk Pengelolaan Persampahan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1  
Penyusunan Strategi Sanitasi Sistem Pengelolaan Persampahan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                               | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                          | Strategi                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ASPEK<br>PERATURAN<br>DAN KEBIJAKAN | <u>Tujuan:</u><br>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan di Kabupaten/Kota<br><br><u>Sasaran:</u><br>Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota | <u>Strategi-1</u><br>Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                    | <u>Strategi-2</u><br><br>Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |                    | <u>Strategi-3</u><br><br>Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan |
|    |       |                    | <u>Strategi-4</u><br><br>melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |       |                    | <u>Strategi-5</u><br><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA | <p><u>Tujuan:</u></p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota</p> <p><u>Sasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota</li> </ul> | <p><u>Strategi-1</u></p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p>                        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Strategi-2</u></p> <p>Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan persampahan</p>                                                                    |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Strategi-3</u></p> <p>Penguatan peran dan kapasitas UPTD air limbah domestik regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik</p> |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Strategi-4</u></p> <p>Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi</p>      |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Strategi-5</u></p> <p>Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah</p>                        |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Strategi-6</u></p> <p>Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan persampahan</p>                                                              |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                                       | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | ASPEK<br>PENDANAAN<br>YANG<br>BERKELANJUTAN | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan | <u>Strategi-1</u><br><br>Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat<br><br><u>Strategi-2</u><br><br>Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan sanitasi<br><br><u>Strategi-3</u><br><br>Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan<br><br><u>Strategi-4</u><br><br>Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi<br><br><u>Strategi-5</u><br><br>Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar<br><br><u>Strategi-6</u><br><br>Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                        | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                    | Strategi                                                                                                           |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-7</u><br><br>Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>                                      |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-8</u><br><br>Melaksanakan CSR                                                                          |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-9</u><br><br>Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>                                                     |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-10</u><br><br>Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan                                                |
| 4  | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat | <u>Strategi-1</u><br><br>Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang                  |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-2</u><br><br>Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga                               |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-3</u><br><br>Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah                                        |
|    |                              |                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-4</u><br><br>Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |
| 5  | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN      | <u>Tujuan:</u><br><br>Menyediakan                                                                                                                                     | <u>Strategi-1</u><br><br>Bimbingan teknis pembangunan                                                              |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek     | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                   | Strategi                                                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TEKNOLOGI | infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak | infrastruktur sanitasi                                                                                                                          |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-2</u><br><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi                                                          |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-3</u><br><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                               |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-4</u><br><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-5</u><br><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                                    |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-6</u><br><br>Pembangunan infrastruktur Sanitasi                                                                                     |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-7</u><br><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                |
|    |           |                                                                                                                                                                                      | <u>Strategi-8</u><br><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi                                                           |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran | Strategi                                                                                                                                                               |
|----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                    | informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional                                          |
|    |       |                    | <u>Strategi-9</u><br><br>Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                          |
|    |       |                    | <u>Strategi-10</u><br><br>Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi                                                                                    |
|    |       |                    | <u>Strategi-11</u><br><br>melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |
|    |       |                    | <u>Strategi-12</u><br><br>Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir                               |
|    |       |                    | <u>Strategi-13</u><br><br>Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota                                                                                 |
|    |       |                    | <u>Strategi-14</u><br><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                                                                              |
|    |       |                    | <u>Strategi-15</u><br><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                                                                                              |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

#### **4.1.2 Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Dalam upaya memenuhi komitmen global SDGs Indonesia dihadapkan dengan banyak tantangan, tidak terkecuali sektor sanitasi. Banyak kemajuan yang telah tercatat tetapi pergerakannya masih dirasa lamban. Mencapai target akses aman 2030 tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan banyak faktor dan sumber daya yang ada dalam satu dekade terakhir, pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat telah meningkat secara signifikan.

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih harus meningkatkan kapasitas untuk membangun ekosistem yang mendukung (seperti kerangka regulasi, kelembagaan, pendanaan, aspek teknis, dan partisipasi masyarakat) agar penyediaan akses dan layanan sanitasi di daerah dapat dipercepat. Tidak meratanya kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkatan pemerintahan dan kabupaten/ kota menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, laju pembangunan juga terhambat oleh kesenjangan pendanaan, masih terbatasnya penerapan inovasi skala luas, dan faktor-faktor sosial-politik

Target akses aman sebesar 30% pada tahun 2030 merupakan tantangan besar karena ini berarti harus menutup kesenjangan infrastruktur, memastikan pemanfaatan dari infrastruktur terbangun, menyediakan layanan serta memenuhi kebutuhan pendanaan, termasuk membangun ekosistem pendukung yang dapat mengkonsolidasi sumber daya potensial. Tantangan tersebut tergambar dalam besarnya kesenjangan akses dan layanan, terutama di tingkat rumah tangga, kesenjangan kapasitas infrastruktur, dan kesenjangan pendanaan.

Untuk itu, kita perlu memperkirakan kebutuhan dana secara nasional hingga tahun 2030 berdasarkan agregasi kebutuhan kabupaten/ kota (tergambarkan dalam proporsi sistem sanitasi dan target akses aman di daerah).

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Perhitungan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk mencapai target 30% akses aman 2030 dapat dilakukan dengan data tentang proporsi penduduk yang menggunakan SPALD-T (Skala Perkotaan, Permukiman Berbasis Institusi, dan Permukiman Berbasis Masyarakat) dan SPALD-S, ketersediaan tangki septik di tingkat rumah tangga, dan biaya nonfisik.

**Secara keseluruhan, proporsi akses aman 2030 adalah: SPALD-S sebesar 25% dan SPALD-T sebesar 5% yang terdiri dari 4% SPALD-T Perkotaan dan Permukiman berbasis institusi, serta 1% SPALD-T Permukiman Berbasis Masyarakat.**

Strategi dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo untuk Pengelolaan Persampahan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2  
Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                               | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                                    | Strategi                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ASPEK<br>PERATURAN<br>DAN KEBIJAKAN | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik di Kabupaten/ Kota<br><u>Sasaran:</u><br><br>Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota | <u>Strategi-1</u><br><br>Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Strategi-2</u><br><br>Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air                        |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Strategi                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | limbah permukiman;                                                                                                                                                                                   |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-3</u><br><br>Menerapkan peraturan perundangan terkait air limbah domestik                                                                                                                |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-4</u><br><br>Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-5</u><br><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah                                                                                                          |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-6</u><br><br>Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi                                                                         |
| 2  | ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah                                    |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Strategi-2</u><br><br>Memfasilitasi pembentukan dan                                                                                                                                               |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                                       | Tujuan dan Sasaran                                                                                                                                                                                                  | Strategi                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;                                                                                                                        |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <u>Strategi-3</u><br><br>Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;                                                                                  |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <u>Strategi-4</u><br><br>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;                                                                                                                      |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <u>Strategi-5</u><br><br>Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <u>Strategi-6</u><br><br>Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan air limbah                                                                                                           |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                     | <u>Strategi-7</u><br><br>Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator                                                                                                               |
| 3. | ASPEK<br>PENDANAAN<br>YANG<br>BERKELANJUTAN | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik<br><br><u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah  |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                        | Tujuan dan Sasaran                                                          | Strategi                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | dalam pendanaan bidang air limbah domestik                                  |                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                                                             | <u>Strategi-2</u><br><br>Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah |
|    |                              |                                                                             | <u>Strategi-3</u><br><br>Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                                          |
|    |                              |                                                                             | <u>Strategi-4</u><br><br>Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.                     |
|    |                              |                                                                             | <u>Strategi-5</u><br><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                    |
|    |                              |                                                                             | <u>Strategi-6</u><br><br>Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai pihak                                                               |
| 4. | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Tujuan:</u><br><br>Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik                                                                                 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran                                | Strategi                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya target 0% BABS | dan peningkatan akses sanitasi aman                                                                                                                                                                               |
|    |       |                                                   | <u>Strategi-2</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                                |
|    |       |                                                   | <u>Strategi-3</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat    |
|    |       |                                                   | <u>Strategi-4</u><br><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                            |
|    |       |                                                   | <u>Strategi-5</u><br><br>Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota |
|    |       |                                                   | <u>Strategi-6</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui                                                                |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Tujuan dan Sasaran                                                                                                           | Strategi                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                              | sistem komunal;                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                   |                                                                                                                              | <u>Strategi-7</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Kawasan perkotaan                                                                                           |
|    |                                   |                                                                                                                              | <u>Strategi-8</u><br><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                         |
|    |                                   |                                                                                                                              | <u>Strategi-9</u><br><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                                                    |
|    |                                   |                                                                                                                              | <u>Strategi-10</u><br><br>Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman |
|    |                                   |                                                                                                                              | <u>Strategi-11</u><br><br>Penyiapan tim yang rutin melakukan pemantauan dan promosi kesehatan                                                                                                                                  |
| 5. | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | <u>Tujuan:</u><br><br>Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan | <u>Strategi-1</u><br><br>Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi                                                                                                                                                   |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran                                                          | Strategi                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <u>Sasaran:</u><br><br>Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik |                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-2</u><br><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi                                                                                                                              |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-3</u><br><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                                                                                                   |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-4</u><br><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah                                                                                                                     |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-5</u><br><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                                                                                                        |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-6</u><br><br>Pembangunan infrastruktur Sanitasi                                                                                                                                                         |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-7</u><br><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                                                                                    |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-8</u><br><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional |
|    |       |                                                                             | <u>Strategi-9</u>                                                                                                                                                                                                   |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Tujuan dan Sasaran | Strategi                                                                                                                       |
|----|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                    | Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi                                                |
|    |       |                    | <u>Strategi-10</u><br><br>melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah         |
|    |       |                    | <u>Strategi-11</u><br><br>Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan |
|    |       |                    | <u>Strategi-12</u><br><br>Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota                                         |
|    |       |                    | <u>Strategi-13</u><br><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                                      |
|    |       |                    | <u>Strategi-14</u><br><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                                                      |
|    |       |                    | <u>Strategi-15</u><br><br>Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi                 |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

### 4.2 Kebijakan

Pemerintah Provinsi perlu mengembangkan kebijakan dan strategi untuk percepatan pencapaian akses aman dan penyelenggaraan SPALD yang dapat menjadi pedoman pelaku pembangunan dan dapat diterapkan di setiap kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut harus mampu mendorong percepatan pencapaian target sanitasi aman tahun 2030 dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas sumber daya yang ada.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai program dan potensi sumber daya pembangunan sanitasi: pemerintah, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah perlu mengupayakan koordinasi yang kuat dan kerjasama antar lembaga, khususnya di antara Badan/dinas lembaga di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Persoalan yang dihadapi sektor ini kompleks dan kesenjangannya pun besar. Tantangan yang harus diselesaikan di kurun waktu 2025-2029 adalah penyusunan strategi yang dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya dalam proses pembangunan.

Strategi pun harus mampu (i) menjawab kebutuhan lingkungan pendukung, (ii) memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan SPALD yang baik, (iii) mengatasi tantangan, baik yang berada dalam kewenangan pemerintah (internal) maupun yang berada di luar pemerintah (eksternal), (iv) mempertimbangkan faktor kesenjangan yang telah dibahas sebelumnya.

Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya, dari pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan masyarakat (dunia usaha, rumah tangga, kelompok masyarakat, ini harus merepresentasikan kebutuhan seluruh pelaku pembangunan dan mencakup keseluruhan aspek:

- regulasi,
- kelembagaan,
- pendanaan,
- partisipasi masyarakat,
- aspek teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi.

#### 4.2.1 Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Kebijakan pengelolaan persampahan merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bab 4.1.1, dimana kebijakan pengelolaan persampahan harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan persampahan;

Kebijakan pengelolaan persampahan dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo akan disesuaikan dengan kondisi eksisting, sehingga uraian kebijakan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.3  
Kebijakan Sistem Pengelolaan Persampahan  
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                               | Strategi                                                                                                                                                                                                 | Kebijakan                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ASPEK<br>PERATURAN DAN<br>KEBIJAKAN | <u>Strategi-1</u><br>Penyusunan regulasi tingkat provinsi dan kabupaten mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                  | Peningkatan komitmen Kepala Daerah terhadap peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah                  |
|    |                                     | <u>Strategi-2</u><br>Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan | Peraturan terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan persampahan minimal 5% dari APBD Provinsi                  |
|    |                                     | <u>Strategi-3</u><br>Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi                                                                                                       | Perbaharuan jasa pelayanan kebersihan dan persampahan yang sesuai dengan penggolongan jenis dan fungsi bangunan |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kebijakan                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan |                                                                                                                                                    |
|    |                                   | <u>Strategi-4</u><br><br>melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait penanganan sampah dan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyusunan Peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                 |
|    |                                   | <u>Strategi-5</u><br><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penyusunan peraturan terkait sangsi/hukuman dan penghargaan/apresiasi/hadiah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga |
| 2  | ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA | <u>Strategi-1</u><br><br>Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola terkait pengelolaan persampahan                                                                  |
|    |                                   | <u>Strategi-2</u><br><br>Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revisi dan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terkait regulator                                                               |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                              | Strategi                                                                                                                                          | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | persampahan                                                                                                                                       | dan operator pengelolaan persampahan di tingkat provinsi                                                                                                                                                                                             |
|    |                                    | <u>Strategi-3</u><br><br>Penguatan peran dan kapasitas UPTD TPA Regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan persampahan                    | Training dan pelatihan untuk seluruh staf pengelola UPTD TPA Regional Talumelito                                                                                                                                                                     |
|    |                                    | <u>Strategi-4</u><br><br>Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi | Penyelarasan SOTK Dinas Provinsi terkait tugas dan wewenang dalam pengelolaan persampahan                                                                                                                                                            |
|    |                                    | <u>Strategi-5</u><br><br>Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah                   | Koordinasi tugas dan fungsi dinas/instansi sesuai kewenangan                                                                                                                                                                                         |
| 3  | ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN | <u>Strategi-1</u><br><br>Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat                                               | Pengembangan kerjasama dan pola pendanaan para pihak yang terkait dalam pengelolaan persampahan                                                                                                                                                      |
|    |                                    | <u>Strategi-2</u><br><br>Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif                                                            | Pembayaran secara umum seperti Pemerintah menetapkan biaya tertentu untuk sampah residu per rumah atau perluasan rumah. Sistem Fee/pembayaran diterapkan dengan maksud tujuan spesifik (contoh: biaya pembayaran integrasi untuk kulkas atau lampu). |
|    |                                    | <u>Strategi-3</u><br><br>Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan  | Penjajagan pilot proyek fasilitas pengolahan sampah yang modern dengan emisi asap yang minimal                                                                                                                                                       |
|    |                                    | <u>Strategi-4</u>                                                                                                                                 | Uji coba Teknologi pengolahan                                                                                                                                                                                                                        |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                                                                                                       | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi                                                                                                                 | sampah menjadi bahan bakar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       | <u>Strategi-5</u><br><br>Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar                                                                | Pembangunan bank sampah dan <i>upcycling</i> yang dapat mengubah sampah menjadi produk baru dengan nilai jual yang lebih tinggi                                                                                                                                                                                                |
|    |       | <u>Strategi-6</u><br><br>Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | Kolaborasi metode pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan produsen produk                                                                                                                                                                                                                |
|    |       | <u>Strategi-7</u><br><br>Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>                                                                                                  | Kebijakan untuk membuat produsen membantu memikul biaya untuk mengumpulkan, memindahkan, mendaur ulang, dan membuang produk di penghujung siklus hidup masa pakainya.                                                                                                                                                          |
|    |       | <u>Strategi-8</u><br><br>Melaksanakan CSR                                                                                                                                      | Kerjasama dengan Badan Usaha untuk inovasi skema pembiayaan pengelolaan sampah yang lebih adil, antara lain melalui Pembayaran berbasis volume (pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang). Hal ini lebih tepat dan adil karena membuat masyarakat berusaha mengurangi produksi sampah atau mengelola sampah sendiri |
|    |       | <u>Strategi-9</u><br><br>Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>                                                                                                                 | Penyusunan standarisasi pembiayaan seluruh kegiatan teknis pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pemrosesan akhir/pengolahan dengan teknologi) dan kegiatan                                                                                                                                         |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                        | Strategi                                                                                                    | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                             | non teknis pengelolaan sampah (SDM, kantor administrasi, operasional/maintenance, biaya penyusutan). Standarisasi pembiayaan pengelolaan berupa range data proposional yang disesuaikan dengan kriteria seluruh kota/kabupaten dan teknologi pengolahan yang digunakan.                                                                                                                                         |
|    |                              | <u>Strategi-10</u><br><br>Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan                                         | Sistem deposit diperuntukkan untuk jenis sampah tertentu khususnya sampah kemasan (contoh: botol kaca, botol plastik) dimana konsumen perlu membayar lebih untuk kemasan ini saat pembelian, kemudian mengambil depositnya kembali saat membawa kembali kemasan kosong ke tempat pembelian. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang dibuang sembarangan dan mempromosikan <i>reusable packaging/refillable</i> . |
| 4  | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Strategi-1</u><br><br>Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang           | Peningkatan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait penanganan dan pengurangan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                              | <u>Strategi-2</u><br><br>Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga                        | Model bauran pembiayaan dirancang untuk meningkatkan sistem persampahan dengan membuka jalan bagi modal komersial untuk berkontribusi dalam sistem ini.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                              | <u>Strategi-3</u><br><br>Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah | Model berbasis utilitas ini mengandalkan tanggung jawab pemerintah Provinsi untuk menerapkan retribusi layanan pengumpulan sampah rumah                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Strategi                                                                                                                                 | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | rumah tangga                                                                                                                             | tangga dan bisnis secara profesional (idealnya didukung dengan kebijakan nasional) sebagai sumber pendapatan untuk membayar biaya layanan.                                                                               |
|    |                                   | <u>Strategi-4</u><br><br>Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga                              | Fasilitasi sarana dan prasarana kampanye tingkat kabupaten/kota dalam program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                                                                     |
| 5  | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | <u>Strategi-1</u><br><br>Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi                                                             | Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan                                                                                                                             |
|    |                                   | <u>Strategi-2</u><br><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi                                                   | Pemetaan lokasi-lokasi rencana TPS 3R, TPST, pusat daur ulang dan Bank Sampah dalam produk tata ruang                                                                                                                    |
|    |                                   | <u>Strategi-3</u><br><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                        | Implementasi pengurangan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material serta peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sisa produksi dan konsumsi ( <i>creation, maintaining and recover</i> ) |
|    |                                   | <u>Strategi-4</u><br><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | Implementasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di wilayah kewenangan Provinsi                                                             |
|    |                                   | <u>Strategi-5</u><br><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                             | Kerjasama dalam Fasilitas Pemulihan Material/ <i>Material Recovery Facility</i> (MRF) dan Fasilitas Pengolahan Perantara/ <i>Intermediate treatment Facility</i> (ITF)                                                   |
|    |                                   | <u>Strategi-6</u><br><br>Pembangunan infrastruktur                                                                                       | Monitoring dan evaluasi infrastruktur sanitasi di wilayah kewenangan provinsi                                                                                                                                            |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                                                                                        | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | Sanitasi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       | <u>Strategi-7</u><br><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                                | Meningkatkan praktik efisiensi sumber daya, menerapkan model bisnis berkelanjutan, mengurangi dan mengelola sampah produksi, mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan, dan memperluas praktik daur ulang dalam rantai pasok bisnis |
|    |       | <u>Strategi-8</u><br><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan sampah                                        | Melakukan riset dan pengembangan teknologi baru dengan sistem informasi dalam pengelolaan sampah                                                                                                                                        |
|    |       | <u>Strategi-9</u><br><br>Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga                                          | Menyediakan pendanaan dan/atau pembiayaan yang memperhatikan aspek <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG).                                                                                                                  |
|    |       | <u>Strategi-10</u><br><br>Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi                                                                             | Kampanye dan publikasi informasi serta sebagai sarana untuk mengumpulkan <i>feedback</i> dari pemangku kepentingan lainnya.                                                                                                             |
|    |       | <u>Strategi-11</u><br><br>melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | Advokasi kebijakan, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong regulasi yang mendukung praktik ekonomi sirkular                                                                |
|    |       | <u>Strategi-12</u><br><br>Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir                        | Meningkatkan praktik efisiensi sumber daya, menerapkan model bisnis berkelanjutan, mengurangi dan mengelola sampah produksi, mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan, dan memperluas praktik daur ulang                           |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                  | Kebijakan                                                                                                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                                                                                           | dalam rantai pasok bisnis.                                                                                                |
|    |       | <u>Strategi-13</u><br><br>Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota    | Inventarisasi sarana dan prasarana yang telah terbangun di wilayah kewenangan provinsi serta masing-masing kabupaten/kota |
|    |       | <u>Strategi-14</u><br><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan | Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah skala rumah tangga                                                    |
|    |       | <u>Strategi-15</u><br><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                 | Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah skala perkotaan                                                       |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, Tahun 2024



Gambar 4.1  
Hirarki dalam pengelolaan sampah (KLHK Republik Indonesia)

#### 4.2.2 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bab 4.1.1, dimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan air limbah domestik;

Kebijakan pengelolaan air limbah dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo akan disesuaikan dengan kondisi eksisting, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.4  
Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                               | Strategi                                                                                                                            | Kebijakan                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ASPEK<br>PERATURAN<br>DAN KEBIJAKAN | <u>Strategi-1</u><br><br>Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; | Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman |
|    |                                     | <u>Strategi-2</u><br><br>Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;     | Penyusunan sistem informasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik                                                          |
|    |                                     | <u>Strategi-3</u><br><br>Menerapkan peraturan perundangan.                                                                          | Menyusun aturan air limbah domestik (SPALDT dan SPALDS), skala kabupaten maupun Provinsi                                             |
|    |                                     | <u>Strategi-4</u><br><br>Memperkuat substansi dan penerapan peraturan                                                               | Menyusun Masterplan atau dokumen perencanaan lain terkait dengan air limbah baik sakala kabupaten/kota maupun                        |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Strategi                                                                                                                                                      | Kebijakan                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi                                | lintas wilayah kabupaten/kota                                                                                                                                     |
|    |                                   | <u>Strategi-5</u><br>Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah                                                                       | Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.                             |
|    |                                   | <u>Strategi-6</u><br>Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi                                      | Arah kebijakan ini adalah untuk penyusunan perangkat peraturan perundangan terkait kompensasi pengembang perumahan dalam pengelolaan air limbah domestik          |
|    | ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA | <u>Strategi-1</u><br>Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah | Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator di Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman                  |
|    |                                   | <u>Strategi-2</u><br>Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;                                | Menyiapkan lembaga yang mengelola air limbah dan melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang air limbah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. |
|    |                                   | <u>Strategi-3</u><br>Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;                                                 | Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator di provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman                        |
|    |                                   | <u>Strategi-4</u><br>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;                                                                                     | Kesesuaian dan keselarasan SOTK dinas/badan/lembaga tingkat Provinsi terkait pengelolaan air limbah domestik                                                      |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                              | Strategi                                                                                                                                                                                                    | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <u>Strategi-5</u><br><br>Mendorong peningkatan kemauan politik ( <i>political will</i> ) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. | Koordinasi, kooperasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bidang pengelolaan air limbah domestik                                                                                                                                                             |
|    |                                    | <u>Strategi-6</u><br><br>Peningkatan komitmen Kepala Dinas terkait dalam pengelolaan air limbah domestik                                                                                                    | Mewujudkan prinsip kemitraan yang setara dalam rangka pengelolaan air limbah domestik                                                                                                                                                                                 |
|    |                                    | <u>Strategi-7</u><br><br>Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator                                                                                                                        | Peningkatan sumber daya manusia dengan program pelatihan yang berkesinambungan                                                                                                                                                                                        |
|    | ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah           | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan <i>off site</i> . |
|    |                                    | <u>Strategi-2</u><br><br>Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah              | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan <i>off site</i> . |
|    |                                    | <u>Strategi-3</u><br><br>Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk                                                                                                                              | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman                                                                                                                                                      |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                        | Strategi                                                                                                                                                                   | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                                                                                                     | melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan off site.                                                                                                                                                                |
|    |                              | <u>Strategi-4</u><br><br>Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. | Pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat |
|    |                              | <u>Strategi-5</u><br><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                | Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman                                                                                                                                                                                      |
|    |                              | <u>Strategi-6</u><br><br>Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai fihak                                           | Alokasi penganggaran dalam APBD Provinsi yang berfokus kepada lingkungan yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT | <u>Strategi-1</u><br><br>Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik dan peningkatan akses sanitasi aman                         | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan SPAL Domestik                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                              | <u>Strategi-2</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat                                                                                                                     | Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan prasarana                                                                                                                                                                                                                            |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                                                                                                                                          | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                                                                                       | dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman                                                                                                                                                                                 |
|    |       | <u>Strategi-3</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat    | Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat dan terpusat secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah. |
|    |       | <u>Strategi-4</u><br><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                            | Mendorong pihak pengembang perumahan dalam rangka prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman                                                                                                                     |
|    |       | <u>Strategi-5</u><br><br>Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman                                                                      |
|    |       | <u>Strategi-6</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;                                                | Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat dan terpusat secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah. |
|    |       | <u>Strategi-7</u><br><br>Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di                                                                                                | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem                                                                                                                                    |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                       | Kebijakan                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | Kawasan perkotaan                                                                                                                                                                                                              | pengelolaan air limbah permukiman terpusat                                                                                                                            |
|    |                                   | <u>Strategi-8</u><br><br>Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                         | Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memiliki, menggunakan dan memelihara tangki septik bagi penyehatan lingkungan permukiman                   |
|    |                                   | <u>Strategi-9</u><br><br>Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                                                    | Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman |
|    |                                   | <u>Strategi-10</u><br><br>Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman | Kolaborasi program pengelolaan air limbah dengan pihak swasta                                                                                                         |
|    |                                   | <u>Strategi-11</u><br><br>Penyiapan tim yang rutin melakukan pemicuan dan promosi kesehatan                                                                                                                                    | Program pemicuan dan promosi yang berkisinambungan                                                                                                                    |
|    | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | <u>Strategi-1</u><br><br>Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi                                                                                                                                                   | Pelibatan pelaksana pembangunan infrastruktur dalam program perencanaan pembangunan infrastruktur sanitasi                                                            |
|    |                                   | <u>Strategi-2</u><br><br>Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan                                                                                                                                                  | Plotting lokasi sanitasi dalam perencanaan tata ruang                                                                                                                 |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                                                                                                                                            | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | sanitasi                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       | <u>Strategi-3</u><br><br>Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>                                                                                                                   | Penelitian untuk mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan air limbah untuk pemulihan energi dari udara dan lumpur                                                                                                             |
|    |       | <u>Strategi-4</u><br><br>Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah                                                                                                                     | Implementasi Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan air limbah                                                                                                                 |
|    |       | <u>Strategi-5</u><br><br>Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas                                                                                                        | Pola kerjasama peningkatan kemampuan SDM di bidang pengelolaan air limbah domestik dengan kolaborasi akademisi                                                                                                                   |
|    |       | <u>Strategi-6</u><br><br>Pembangunan infrastruktur Sanitasi                                                                                                                                                         | Pendataan keberfungsian infrastruktur                                                                                                                                                                                            |
|    |       | <u>Strategi-7</u><br><br>Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>                                                                                                    | Model pengembangan pengelolaan air limbah dengan sistem pada <i>software development</i> berdasarkan <i>requirement software</i> yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap |
|    |       | <u>Strategi-8</u><br><br>Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional | Supporting program dengan teknologi yang mudah diaplikasikan dengan pola <i>open source</i>                                                                                                                                      |
|    |       | <u>Strategi-9</u><br><br>Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                            | Tertatanya sistem pengelolaan air limbah pada kawasan strategis Provinsi                                                                                                                                                         |
|    |       | <u>Strategi-10</u>                                                                                                                                                                                                  | Program dan sistem informasi                                                                                                                                                                                                     |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No | Aspek | Strategi                                                                                                                       | Kebijakan                                                                                                                                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah                                   | yang dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat.                                                                                                    |
|    |       | <u>Strategi-11</u><br><br>Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan | Kerjasama dinas dengan instansi swasta ataupun BUMN yang kompeten dalam pengelolaan air limbah dari hulu ke hilir                                    |
|    |       | <u>Strategi-12</u><br><br>Optimalisasi prasarana dan sarana air limbah domestik kabupaten/kota                                 | Meningkatkan layanan pengolahan air dengan sistem on-site, komunal dan off-site                                                                      |
|    |       | <u>Strategi-13</u><br><br>meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                                      | Peningkatan sarana prasarana pengelolaan limbah untuk masyarakat dengan teknologi sederhana dan menjangkau semua lapisan masyarakat                  |
|    |       | <u>Strategi-14</u><br><br>Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                                                      | Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana SPAL Domestik baik SPALDT dan SPALDs, sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan |
|    |       | <u>Strategi-15</u><br><br>Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi                 | Penyusunan Rencana Induk SPAL non Domestik di wilayah kewenangan provinsi                                                                            |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, Tahun 2024



# **bab-5**

## **RENCANA AKSI**

## **PENGELOLAAN SANITASI**

## **5.1 Skenario Pengelolaan**

Rencana aksi percepatan pembangunan sanitasi permukiman ditujukan untuk mendukung strategi dan kebijakan penyelenggaraan sanitasi yang dirumuskan guna memenuhi standar pelayanan minimal, target akses layak dan aman pada tahun 2029.

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan layanan sanitasi bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah Provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sanitasi merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan layanan bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dan menetapkan rencana aksi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan skenario pengelolaan sanitasi sesuai dengan tujuan dan pengelolaan sanitasi
- b. Mengelompokkan rencana aksi sesuai hasil rumusan kebijakan yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek pengelolaan sanitasi, yaitu:
  - (1) aspek kelembagaan;
  - (2) aspek regulasi;
  - (3) aspek infrastruktur;
  - (4) aspek peran serta masyarakat; dan
  - (5) aspek kerjasama dan pola pendanaan.
- c. Membagi kelompok rencana aksi tersebut sesuai Rencana Aksi dan lokasi, Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan non OPD, Hasil yang diharapkan (Volume/penerima manfaat), Kebutuhan biaya (Juta rupiah) dan waktu pelaksanaan

Skenario pengelolaan sanitasi merupakan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses layak dan aman untuk setiap tahun selama 5 tahun.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Penentuan skenario pengelolaan disesuaikan dengan distribusi target capaian yang sudah ditetapkan dan dihitung pada bab sebelumnya, sehingga skenario pengelolaan sanitasi di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-1  
Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah  
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.   | Komponen                                                          | Akses Sanitasi -Tahun |        |        |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
|       |                                                                   | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029    |
| A.    | Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)                       |                       |        |        |        |         |
| 1.    | Layak                                                             | 92,50%                | 94,38% | 96,25% | 98,13% | 100,00% |
| 2     | Aman                                                              | 4,88%                 | 8,27%  | 11,22% | 14,16% | 17,27%  |
| 2.a   | SPALD Setempat                                                    | 4,03%                 | 6,87%  | 9,31%  | 11,75% | 14,33%  |
| 2.b   | SPALD Terpusat                                                    | 0,83%                 | 1,41%  | 1,91%  | 2,41%  | 3,04%   |
| 2.b.1 | <i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i> | 0,66%                 | 1,13%  | 1,53%  | 1,93%  | 2,43%   |
| 2.b.2 | <i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>              | 0,13%                 | 0,23%  | 0,31%  | 0,39%  | 0,49%   |
| 3     | BABs                                                              | 7,23%                 | 5,52%  | 4,31%  | 3,11%  | 1,90%   |
| B.    | Target Akses Sanitasi persampahan)                                |                       |        |        |        |         |
| 5     | Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah         | 50,05%                | 56,62% | 63,19% | 69,75% | 85,00%  |
| 5.a   | Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)                  | 30,03%                | 32,77% | 35,50% | 38,23% | 49,18%  |
| 5.b   | Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                     | 20,02%                | 23,85% | 27,69% | 31,53% | 35,82%  |
| 5.b.1 | sampah terdaur ulang                                              | 6,12%                 | 7,58%  | 9,04%  | 10,51% | 12,09%  |

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

## 5.2 Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;

### 5.3.1 Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-2  
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Sampah)  
Tahun 2025-2029

**TUJUAN :** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah di sumber, menurunkan timbulan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah, meningkatkan sampah yang terolah menjadi bahan baku, meningkatkan sampah yang termanfaatkan menjadi energi

**SASARAN :** Rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 62,98% pada Tahun 2029, sampah residu tersisa di LUR sebesar 34,79%, sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah = 31,52% dan sampah terdaur ulang = 12,79 % pada Tahun 2029

**STRATEGI :** Pemenuhan Akses aman dan layanan berkelanjutan

| Kebijakan |                                                                                                                 |             | Rencana Aksi                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | ASPEK                                                                                                           | STANDAR DAN |                                                                                                                                   |
|           | REGULASI                                                                                                        |             |                                                                                                                                   |
| a.        | melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan | 1           | Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah                                                                                           | pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota                                                                             |
|                                                                                                                                            | 2 Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah                                                              |
|                                                                                                                                            | 3 Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi                                                             |
| Penyusunan sistem informasi b. pengelolaan persampahan Provinsi Gorontalo                                                                  | 1 Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah                                                       |
|                                                                                                                                            | 2 Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah      |
|                                                                                                                                            | 3 Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan sampah                      |
|                                                                                                                                            | 4 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan EPR ( <i>extended producer Responsibility</i> ) atau kewajiban produsen pengelolaan sampah |
|                                                                                                                                            | 5 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan CSR ( <i>corporate social responsibility</i> ) untuk pengelolaan sampah                    |
| Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif c. dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1 Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah                                          |
|                                                                                                                                            | 2 Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran                                                                      |
|                                                                                                                                            | 3 Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah                                          |
| d. Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan                                                                                 | 1 Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait                                                                            |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                                                 |   | Rencana Aksi                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sampah                                                                                                                                    |   | pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu                                                                         |
| e. Penguatan penegakan hukum                                                                                                              | 2 | Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten                                         |
| f. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1 | menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah                                               |
|                                                                                                                                           | 2 | Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah                                                              |
|                                                                                                                                           | 3 | pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah                                                  |
|                                                                                                                                           | 4 | pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah                                                                        |
|                                                                                                                                           | 5 | pengembangan SOP dalam pengurangan sampah                                                                                                          |
| <b>2 ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA</b>                                                                                                |   |                                                                                                                                                    |
| a. Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi               | 1 | Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah                                            |
|                                                                                                                                           | 2 | Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah provinsi                                                                                           |
| b. Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah                                 | 1 | Penyusunan nomen klatu pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota |
| c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah                                                    | 1 | Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah                                                                                   |
| d. Peningkatan status dan kapasitas                                                                                                       | 1 | Pembentukan kelembagaan                                                                                                                            |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                       |                                                        | Rencana Aksi                                                        |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| institusi pengelola persampahan |                                                        | pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku |                                                                                                                                                                   |
| e.                              | Meningkatkan kordinasi dan kerjasama antar stakeholder | 1                                                                   | Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah                                                                                                          |
| f.                              | Memisahkan fungsi /unit regulator dan operator         | 1                                                                   | meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah                                                                             |
| g.                              | Peningkatan komitmen Kepala Daerah                     | 1                                                                   | Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                 |
|                                 |                                                        | 2                                                                   | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                                                                                               |
|                                 |                                                        | 3                                                                   | Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                   |
|                                 |                                                        | 4                                                                   | Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi                                                                                                           |
|                                 |                                                        | 5                                                                   | koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan |
|                                 |                                                        | 6                                                                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi                                               |
| h.                              | Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan           | 1                                                                   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                                                                           |
|                                 |                                                        | 2                                                                   | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                                                                                   |
|                                 |                                                        | 3                                                                   | Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                      |
|                                 |                                                        | 4                                                                   | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                  |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                                                                                                  | Rencana Aksi                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | 5 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                            | 6 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                            | 7 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                              |
| <b>3 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| a. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah                                                                                | 1 Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton         |
|                                                                                                                                                                                            | 2 mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota                                                                                        |
| b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan provinsi serta daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 1. Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota |
|                                                                                                                                                                                            | 2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            | 3. pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah                                                                                                                                        |
| c. Melaksanakan extended producer responsibility                                                                                                                                           | 1 pemanfaatan program Extended Producer Responsibility (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            | 2 Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                            | 3 Pengaturan standarisasi produk daur ulang                                                                                                                                              |
| d. Melaksanakan CSR                                                                                                                                                                        | 1 Pemanfaatan program corporate                                                                                                                                                          |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan |                                                                                                                                                            | Rencana Aksi |                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                            |              | social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 2            | memperkuat komitmen dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas                                |
|           |                                                                                                                                                            | 3            | memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah                                                |
| e.        | Pengkajian ulang terkait <i>Tipping Fee</i> pada TPA Regional                                                                                              | 1            | Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah                                                                      |
| f.        | Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan                                                                                                                  | 1            | Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 2            | Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                            | 3            | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                            | 4            | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |
|           |                                                                                                                                                            | 5            | Fasilitasi Kersa Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                            | 6            | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                            | 7            | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                        |
| <b>4</b>  | <b>ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT</b>                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |
| a.        | Perubahan paradigma pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                                                | 1            | Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah                                                           |
| b.        | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 2            | Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial                                                         |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan |                                                                                                                                                   | Rencana Aksi |                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c.        | Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)                                                                 | 3.           | Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah                                                                |
| d.        | Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | 4.           | Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah                                                                   |
|           |                                                                                                                                                   | 5            | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat                                                            |
|           |                                                                                                                                                   | 6            | Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh                                                           |
|           |                                                                                                                                                   | 7            | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                  |
|           |                                                                                                                                                   | 8            | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi |
| <b>5</b>  | <b>ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                                  |
| a         | Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah                                                                                                  | 1            | Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah                                                                               |
|           |                                                                                                                                                   | 2            | Penyusunan reviu rencana induk sistem pengelolaan sampah                                                                         |
|           |                                                                                                                                                   | 3            | membangun sistem informasi pengurangan sampah                                                                                    |
| b         | Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi                                                                                         | 1            | pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah                                                            |
|           |                                                                                                                                                   | 2            | pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah                                                          |
|           |                                                                                                                                                   | 3            | Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah                                                                                        |
| c.        | Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang                                                                                       | 1            | pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah                                                                                  |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                         | Rencana Aksi                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan        |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                   | 2 pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu                                                                |
|                                                                                                                   | 3 penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan                                                                   |
|                                                                                                                   | 4 melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di sumber                                                                          |
|                                                                                                                   | 5 menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah                                                          |
|                                                                                                                   | 6 memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah                                                                             |
| d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah                       | 1 penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah            |
|                                                                                                                   | 2 Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan                                                                                 |
| e. Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir | 1 penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir                              |
| f. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota                | 1 pelaksanaan pilot proyek sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango |
| g. meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan                                                | 1 Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah pusat             |
| h. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi                                                                | 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                |
|                                                                                                                   | 2 Supervisi Pembangunan/                                                                                                                  |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| <b>Kebijakan</b>                                                                                                                 | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | Rehabilitasi/TPA/TPST/SPA Peningkatan Kewenangan Provinsi                                                          |
|                                                                                                                                  | 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                     |
|                                                                                                                                  | 4 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                    |
|                                                                                                                                  | 5 Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                                                     |
|                                                                                                                                  | 6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan                                                                      |
|                                                                                                                                  | 7 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                                                            |
| i. Meningkatkan TPA Regional Talumelito                                                                                          | 1 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/ TPST Regional                                                                |
|                                                                                                                                  | 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                   |
| j. Mengembangkan TPA ke arah <i>sanitary landfill/controlled landfill</i>                                                        | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional              |
|                                                                                                                                  | 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional                                          |
|                                                                                                                                  | 3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                               |
| k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk aplikasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna dan berwawasan lingkungan | 1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |
|                                                                                                                                  | 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                       |
|                                                                                                                                  | 3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi         |

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

### 5.3.2 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-3  
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)  
Tahun 2025-2029

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN   | : | Pencapaian akses aman Tahun 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SASARAN  | : | Rumah tangga dengan akses layak sebesar 100,00%, akses aman sebesar 17,27%, SPALD Setempat sebesar 14,33%, SPALD Terpusat sebesar 3,04%, SPALD Terpusat berbasis institusi sebesar 2,43% dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat sebesar 0,49%, BABs sebesar 1,90%, desa stop BABs sebesar 53% dan desa STBM sebesar 11,23% pada Tahun 2029 |
| STRATEGI | : | Peningkatan sarana prasarana SPALD-T dan SPALD-S, perkuatan fungsi regulator dan operator, melengkapi perangkat peraturan, peningkatan alokasi dana pembangunan air limbah, akses dan peningkatan peran masyarakat dan swasta                                                                                                              |

| Kebijakan |                                                                                                                                           | Rencana Aksi |                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT</b>                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                     |
| a.        | Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal; | 1            | Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat; |
| b.        | Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal; | 1            | Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);                                              |
| c.        | Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air                                                                           | 1            | Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS ( <i>Community Lead Total Sanitation</i> ) di                                                     |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| <b>Kebijakan</b>                                                                                                               | <b>Rencana Aksi</b>                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat          | kawasan perdesaan;                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                | 2 Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang;                                                                                  |
|                                                                                                                                | 3 Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;                                                                                                               |
|                                                                                                                                | 4 Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap. |
| d. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;               | 1 Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                    |
| e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.          | 1 Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;                                                            |
|                                                                                                                                | 2 Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;                                                                                  |
|                                                                                                                                | 3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;                                              |
|                                                                                                                                | 4 Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman;                                                                                    |
| f. Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan | 1 Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..                    |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                     | Rencana Aksi                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| 2 <b>ASPEK STANDAR DAN REGULASI</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;    | 1 Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                      |
|                                                                                                               | 2 Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi |
|                                                                                                               | 3 Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah                                            |
|                                                                                                               | 4 Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                                                                             |
| b. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; | 1 Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                          |
| c. Menerapkan peraturan perundangan.                                                                          | 1 Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                       |
|                                                                                                               | 2 Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                  |
|                                                                                                               | 3 Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;               |
|                                                                                                               | 4 Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari                                                                       |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan |                                                                                                                                                                             | Rencana Aksi               |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                             | provinsi ke kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                             | 5                          | Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah                                                                                                                                           |
| d.        | Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi | 1                          | Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                             | 2                          | Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                             | 3                          | Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;                                                       |
|           |                                                                                                                                                                             | 4                          | Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dikawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.                                               |
| 3         | <b>ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA</b>                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                    |
| a.        | Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;                                                                   | 1                          | Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;                                                                                   |
| b.        | Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;                                                                                    | 1                          | Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;                                                                  |
| c.        | Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;                                                                                                                        | 1                          | Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas; |
| d.        | Mendorong peningkatan kemauan politik (political will)                                                                                                                      | 1                          | Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan                                                                                                                                      |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                                                                     | Rencana Aksi                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.                                            | air limbah permukiman;                                                                                                                                       |
| e. Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah                   | 1 Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                           |
|                                                                                                                                                               | 2 Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;                                            |
|                                                                                                                                                               | 3 Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;                               |
|                                                                                                                                                               | 4 Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses ( <i>best practices</i> ) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman                            |
| 4 <b>ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| a. Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan sanitasi | 1 Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;                       |
| b. Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan             | 2 Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;                          |
| c. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;                                                               | 1 Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan                                                                                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.                      | 1 Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | 2 Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 3 Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman                                                                                                                             |
| e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.                                                     | 1 Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan                                             |
|                                                                                                                                                                           | 2 Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD                                                                                                                                                               |
| 5 <b>ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| a. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan | 1. Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi dan masyarakat, serta sarana pendukungnya di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                |
|                                                                                                                                                                           | 2. Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | 3. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | 4. Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan padat penduduk di perkotaan) ataupun septik |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kebijakan | Rencana Aksi                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | tank yang sesuai standar                                                                              |
|           | 5. Pemanfaatan IoT ( <i>internet of things</i> ) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi |

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

### 5.3 Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Berdasarkan outline penyusunan Laporan Roadmap Sanitasi Provinsi, Rencana Aksi yang telah disusun pada tabel 5.2 dan tabel 5.3, dialokasikan berdasarkan lokasi, penanggungjawab pelaksanaan, hasil yang diharapkan, kebutuhan biaya dan waktu pelaksanaan.

Alokasi rencana aksi roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 5-4  
Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD                   | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                         | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                             |                    |                  |                                                |                                                                         |                      | 2025              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1   | Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        | Pelaku usaha pengelolaan sampah non pemerintah | Tersusunnya peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah            | 0,00                 |                   | 0,00  |      |      |      |
| 2   | Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah                                                                                                                      | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                                                | Tersusunnya Surat Edaran Gubernur terkait percepatan pengelolaan sampah | 0,00                 |                   | 0,00  |      |      |      |
| 3   | Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi                                                                                                                     | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                                                | Workshop dan Rapat Teknis terkait Kesepakatan                           | 50,00                |                   | 50,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| N<br>o. | Rencana Aksi                                                                                                                   | Lokasi             | Perangk<br>at<br>Daerah | Pemangk<br>u<br>Kepentin<br>gan Non<br>OPD | Hasil yang<br>diharapkan<br>(volume/pene<br>rima manfaat)                                   | Kebutu<br>han<br>Biaya<br>(Rp) | Waktu Pelaksanaan |      |        |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|--------|------|------|
|         |                                                                                                                                |                    |                         |                                            |                                                                                             |                                | 2025              | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |
|         |                                                                                                                                |                    |                         |                                            | implikasi pengelolaan sampah antar OPD                                                      |                                |                   |      |        |      |      |
| 4       | Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah                                                  | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP               |                                            | Tersusunnya Surat Edaran Gubernur terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah | 0,00                           |                   |      | 0,00   |      |      |
| 5       | Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP               |                                            | Tersusunnya peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah                                | 0,00                           |                   | 0,00 |        |      |      |
| 6       | Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan sampah                 | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP               |                                            | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang anggaran                                               | 100,00                         |                   |      | 100,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                        | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)             | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                     |                    |                  |                              |                                                             |                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     |                                                                                                                                     |                    |                  |                              | pengelolaan sampah                                          |                      |                   |      |      |      |      |
| 7   | Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan EPR ( <i>extended producer Responsibility</i> ) atau kewajiban produsen pengelolaan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya peraturan tentang EPR                           | 0,00                 |                   |      | 0,00 |      |      |
| 8   | Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan CSR ( <i>corporate social responsibility</i> ) untuk pengelolaan sampah                    | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya peraturan tentang CSR                           | 0,00                 |                   |      | 0,00 |      |      |
| 9   | Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah                                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya peraturan tentang kompensasi pengelolaan sampah | 0,00                 |                   |      | 0,00 |      |      |
| 10  | Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran                                                                      | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya peraturan tentang IDU                           | 0,00                 |                   |      | 0,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                        | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                 | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                     |                    |                  |                              |                                                                                   |                      | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|     |                                                                                                                                     | alo                |                  |                              | dan pemasaran hasil daur ulang sampah                                             |                      |                   |       |       |       |       |
| 11  | Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah                                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya petunjuk teknis perhitungan SPM dan NSPK pengelolaan sampah           | 90,00                |                   |       | 90,00 |       |       |
| 12  | Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersosialisasinya produk hukum                                                    | 50,00                |                   | 50,00 |       |       |       |
| 13  | Penerapan sangsi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten                        | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya penerapan sangsi hukum dengan penyusunan peraturan dan implementasi | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                         | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                           | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                      |                    |                  |                              |                                                                           |                      | 2025              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|     |                                                                                                      |                    |                  |                              | ya                                                                        |                      |                   |       |      |      |      |
| 14  | menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya NSPK dalam pengurangan sampah                                 | 50,00                |                   | 50,00 |      |      |      |
| 15  | Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | terwujudnya pola insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah        | 0,00                 |                   |       | 0,00 |      |      |
| 16  | pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah    | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | terwujudnya pola yang teknologi ramah lingkungan dalam pengurangan sampah | 0,00                 |                   |       | 0,00 |      |      |
| 17  | pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam                                             | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya SOP sarana dan prasarana                                      | 50,00                |                   | 50,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                            | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                    | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                         |                    |                  |                              |                                                                                    |                      | 2025              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | pengurangan sampah                                                                                      | alo                |                  |                              | pengurangan sampah                                                                 |                      |                   |       |      |      |      |
| 18  | pengembangan SOP dalam penanganan sampah                                                                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya SOP penanganan sampah                                                  | 50,00                |                   | 50,00 |      |      |      |
| 19  | Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbentuknya badan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah | 0,00                 |                   |       | 0,00 |      |      |
| 20  | Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah kabupaten/kota                                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbentuknya badan koordinasi pengelolaan sampah Kabupaten/kota                    | 0,00                 |                   |       | 0,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                        | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                         | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                     |                    |                  |                              |                                                                         |                      | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 21  | Penyusunan nomen klatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya nomen klatur pengelolaan sampah sesuai beban kabupaten/kota | 0,00                 |                   | 0,00  |       |       |       |
| 22  | Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah                                                                                    | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terpisahnya peran pengelola persampahan                                 | 0,00                 |                   | 0,00  |       |       |       |
| 23  | Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                         | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbentuknya 72 kelembagaan pengelola tingkat kelurahan                 | 144,00               |                   | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 24  | Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah                                                                                            | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlatihnya SDM Pengelolaan sampah dengan program pelatihan dan         | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                      | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                                          | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
|     |                                                                                                                   |                    |                  |                              |                                                                                                            |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028  | 2029  |
|     |                                                                                                                   |                    |                  |                              | bimbingan teknis                                                                                           |                      |                   |        |        |       |       |
| 25  | meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah                             | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Meningkatnya kapasitas 100 orang SDM pengurangan sampah                                                    | 100,00               |                   | 25,00  | 25,00  | 25,00 | 25,00 |
| 26  | Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya dokumen Rencana Strategis dan Teknis Pengelolaan Persampahan Dalam Wilayah Kewenangan Provinsi | 600,00               |                   | 600,00 |        |       |       |
| 27  | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya dokumen Rencana Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Persampahan Regional                          | 800,00               |                   |        | 800,00 |       |       |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                      | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |                                                                |                      | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 28  | Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terevaluasinya kinerja dalam PPLH                              | 250,00               |                   | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 29  | Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi                                                                                                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tertampungnya pengaduan terkait PPLH                           | 0,00                 |                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 30  | koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terselesaikannya kasus terkait PPLH                            | 0,00                 |                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 31  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi                                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terjalinya koordinasi dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                    | Lokasi             | Perangkat Daerah            | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                 | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |        |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
|     |                                                                                                 |                    |                             |                              |                                                                                 |                      | 2025              | 2026  | 2027   | 2028  | 2029  |
|     |                                                                                                 |                    |                             |                              | persampahan                                                                     |                      |                   |       |        |       |       |
| 32  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa/Kelurahan                                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Terfasilitasinya 729 produk hukum desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah     | 72,90                |                   | 18,23 | 18,23  | 18,23 | 18,23 |
| 33  | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                 | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Terfasilitasinya petunjuk pelaksanaan pembangunan desa dalam pengelolaan sampah | 364,50               |                   | 91,13 | 91,13  | 91,13 | 91,13 |
| 34  | Perancangan dan Pengembangan Sistem Pengolaan Persampahan pada kawasan Wisata Unggulan Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata |                              | Tersusunnya dokumen perencanaan ODTW Unggulan Provinsi                          | 600,00               |                   |       | 600,00 |       |       |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                                   | Lokasi             | Perangkat Daerah            | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                     | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                |                    |                             |                              |                                                                                     |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 35  | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Strategis Kawasan Pariwisata Provinsi                                                                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata |                              | Tersusunnya peraturan terkait destinawi wisata yang berkelanjutan                   | 0,00                 |                   | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 36  | Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Tersusunnya peraturan terkait biaya investasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir | 100,00               |                   |        | 100,00 |        |        |
| 37  | mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota                                                                                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Teralokasikan 2% pengelolaan sampah dari APBD Provinsi                              | 100,00               |                   | 25,00  | 25,00  | 25,00  | 25,00  |
| 38  | Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem                                                                                                   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Terimplementasinya pilot proyek pengelolaan sampah                                  | 500,00               |                   | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                  | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat) | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |      |        |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|--------|------|------|
|     |                                                                                                               |                    |                  |                              |                                                   |                      | 2025              | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |
|     | pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota      |                    |                  |                              |                                                   |                      |                   |      |        |      |      |
| 39  | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah                                    | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Termonitornya pelaksanaan penggunaan anggaran     | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 40  | pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah                                                                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Termonitornya dana desa dalam pengelolaan sampah  | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 41  | pemanfaatan program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Teraplikasikannya peraturan tentang EPR           | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 42  | Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya peta jalan produsen dalam pengurangan | 300,00               |                   |      | 300,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                    | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                    | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                 |                    |                  |                              |                                                                    |                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     |                                                                                                                 |                    |                  |                              | sampah                                                             |                      |                   |      |      |      |      |
| 43  | Pengaturan standarisasi produk daur ulang                                                                       | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Teraplikasikannya peraturan tentang Produk Daur Ulang Sampah       | 0,00                 |                   | 0,00 |      |      |      |
| 44  | Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah                            | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Teraplikasikannya peraturan tentang CSR                            | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45  | memperkuat komitmen dunia usaha dalam penanganan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya komitmen dengan dunia usaha terkait penanganan sampah  | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46  | memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya komitmen dengan dunia usaha terkait pengurangan sampah | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                               | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                                                   | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                            |                    |                  |                              |                                                                                                                     |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 47  | Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya nota kesepakatan tipping fee pengelolaan sampah                                                         | 0,00                 |                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 48  | Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota                     | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terfasilitasinya kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota                                                        | 0,00                 |                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 49  | Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dalam lingkungan permukiman pada wilayah kewenangan provinsi | 1.000,00             |                   | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 50  | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST                                    | Provinsi           | DPUPR-PKP        |                              | Tertanganinya sampah di TPA                                                                                         | 0,00                 |                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                    | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                 | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                 |                    |                  |                              |                                                                 |                      | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | Regional                                                                                                                                        | Gorontalo          |                  |                              | Regional melalui kerjasama dengan Badan Usaha                   |                      |                   |      |      |      |      |
| 51  | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya koordinasi terkait infrastruktur pengelolaan sampah | 0,00                 |                   | 0,00 |      |      |      |
| 52  | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya fasilitasi kerjasama                                | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53  | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga                                                                                            | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya fasilitasi kerjasama                                | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54  | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                        | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya fasilitasi kerjasama                                | 0,00                 |                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                            | Lokasi             | Perangkat Daerah                                   | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)               | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                         |                    |                                                    |                              |                                                               |                      | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 55  | Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                                          |                              | Peningkatan pola pikir penyelenggara dalam pengelolaan sampah | 50,00                |                   | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 56  | Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                                          |                              | Peningkatan pola pikir dalam pengelolaan sampah               | 50,00                |                   | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 57  | Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah                       | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |                              | Terwujudnya lomba inovasi pengelolaan sampah                  | 300,00               |                   | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 58  | Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                                          | Pelaku daur ulang sampah     | Terwujudnya kerjasama pengelolaan sampah                      | 0,00                 |                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                     | Lokasi             | Perangkat Daerah           | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |        |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                  |                    |                            |                              |                                                                                |                      | 2025              | 2026  | 2027   | 2028  | 2029  |
| 59  | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat                                                            | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Terlaksananya promosi kesehatan dan PHBS                                       | 150,00               |                   | 37,50 | 37,50  | 37,50 | 37,50 |
| 60  | Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh                                                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas PPPA      |                              | Terlaksananya penyadaran publik melalui kegiatan seminar, diskusi dan workshop | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00  | 25,00 | 25,00 |
| 61  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                  | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas PPPA      |                              | Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan                    | 50,00                |                   |       | 50,00  |       |       |
| 62  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas PPPA      |                              | Teradvokasinya kebijakan dan pendampingan pengelolaan sampah                   | 50,00                |                   | 12,50 | 12,50  | 12,50 | 12,50 |
| 63  | Penyusunan rencana induk                                                                                                         | Provinsi           | DPUPR-                     |                              | Terlaksananya                                                                  | 400,00               |                   |       | 400,00 |       |       |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                            | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|     |                                                                         |                    |                  |                              |                                                                |                      | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   |
|     | sistem pengelolaan sampah                                               | Provinsi Gorontalo | PKP              |                              | penyusunan RISPS                                               |                      |                   |       |       |       |        |
| 64  | Penyusunan reviu rencana induk sistem pengelolaan sampah                | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya reviu penyusunan RISPS                           | 100,00               |                   |       |       |       | 100,00 |
| 65  | membangun sistem informasi pengurangan sampah                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunnya sistem informasi pengurangan dan penanganan sampah | 250,00               |                   | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50  |
| 66  | pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya bimbingan teknis pengurangan sampah              | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00  |
| 67  | pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya bimbingan teknis pengurangan sampah              | 100,00               |                   | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00  |
| 68  | Pengembangan SOP dalam                                                  | Provinsi           | DPUPR-           |                              | Tersusunnya                                                    | 0,00                 |                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                             | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                               | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                          |                    |                  |                              |                                                                               |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | pengurangan sampah                                                       | Provinsi Gorontalo | PKP              |                              | SOP pengurangan sampah                                                        |                      |                   |        |        |        |        |
| 69  | pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah                          | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pembangunan 100 unit PDU di wilayah kewenangan Provinsi         | 150,00               |                   | 37,50  | 37,50  | 37,50  | 37,50  |
| 70  | pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana individual                       | 2.000,00             |                   | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 71  | penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan    | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana skala kawasan strategis provinsi | 3.000,00             |                   | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 72  | melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di                  | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya evaluasi dan monitoring pengelolaan                             | 200,00               |                   | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                          | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                                                     | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                       |                    |                  |                              |                                                                                                                       |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | sumber                                                                                                                |                    |                  |                              | sampah di sumber                                                                                                      |                      |                   |        |        |        |        |
| 73  | menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah                                        | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya teknologi tepat guna dalam pengurangan sampah                                                           | 50,00                |                   | 12,50  | 12,50  | 12,50  | 12,50  |
| 74  | memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah                                                           | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dengan program pengurangan sampah skala kewilayahan (RW) | 2.000,00             |                   | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 75  | penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunya dokumen sistem perencanaan dan e-monev                                                                     | 200,00               |                   | 200,00 |        |        |        |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                            | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                  | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |          |          |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                         |                    |                  |                              |                                                                  |                      | 2025              | 2026   | 2027     | 2028     | 2029   |
|     | sampah                                                                                                                                  |                    |                  |                              | pelaksanaan pengelolaan sampah                                   |                      |                   |        |          |          |        |
| 76  | Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan                                                                                 | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Rehabilitasi IPL TPA Regional Talumelito                         | 3.500,00             |                   |        | 1.750,00 | 1.750,00 |        |
| 77  | penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir                              | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusnya dokumen pengelolaan sampah hulu hilir                  | 150,00               |                   |        | 150,00   |          |        |
| 78  | pelaksanaan pilot projec sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya program pilot proyek pengelolaan sampah hulu hilir | 1.500,00             |                   |        |          | 1.500,00 |        |
| 79  | Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah                   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pembangunan ITF                                    | 500,00               |                   | 125,00 | 125,00   | 125,00   | 125,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                     | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                                   | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                  |                    |                  |                              |                                                                                                     |                      | 2025              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|     | pusat                                                                            |                    |                  |                              |                                                                                                     |                      |                   |           |           |           |           |
| 80  | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                         | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pembangunan TPS 3 R untuk mendukung 38% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 94.197,86            |                   | 21.441,90 | 25.084,97 | 28.807,64 | 32.611,24 |
| 81  | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya supervisi pembangunan TPST/TPS 3R di wilayah kewenangan Provinsi                      | 6.593,85             |                   | 1.500,93  | 1.755,95  | 2.016,53  | 2.282,79  |
| 82  | Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                     | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbangunnya TPST di wilayah kewenangan Provinsi                                                    | 5.000,00             |                   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                  | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                             | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                               |                    |                  |                              |                                                                             |                      | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| 83  | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya rehabilitasi TPA Kewenangan Provinsi                          | 1.000,00             |                   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   |
| 84  | Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi  | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya peningkatan TPST dan TPS 3R dalam wilayah kewenangan provinsi | 1.500,00             |                   | 375,00   | 375,00   | 375,00   | 375,00   |
| 85  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya penambahan sarana pengangkutan sampah setiap kabupaten/kotora   | 2.500,00             |                   | 625,00   | 625,00   | 625,00   | 625,00   |
| 86  | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional         | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya penambahan luas lahan landfill TPA Regional Talumelito          | 15.000,00            |                   | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                        | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |            |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                     |                    |                  |                              |                                                                                |                      | 2025              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 87  | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/ TPST Regional                                                   | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Teranggarkannya pembiayaan operasi dan pemeliharaan TPA Regional               | 0,00                 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 88  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                      | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya koordinasi terkait penanganan sampah                               | 0,00                 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 89  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya proses koordinasi dan sinkronisasi sarana prasarana TPS Regional | 0,00                 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 90  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional                             | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersedianya angkutan sampah untuk pelayanan regional dan kabupaten/kot a       | 793.050,56           |                   | 164.262,73 | 190.754,79 | 217.824,61 | 245.481,84 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                     | Lokasi             | Perangkat Daerah            | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)                                                        | Kebutuhan Biaya (Rp) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                  |                    |                             |                              |                                                                                                          |                      | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 91  | Pengembangan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah) di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi     | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata | Pelaku usaha pariwisata      | Tersedianya dokumen penanganan dan pengurangan sampah di KSP Provinsi Gorontalo                          | 400,00               |                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 92  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Terlaksananya proses pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah                                    | 500,00               |                   | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 93  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi         | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP                   |                              | Terlaksananya proses pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada destinasi wisata Provinsi | 500,00               |                   | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 5-5  
Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                        | Lokasi                                                                       | Perangkat Daerah           | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                    | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                     |                                                                              |                            |                              |                                                                                                    |                                            | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| 1   | Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat; | Kawasan Kumuh Kota Gorontalo sesuai Perwali Kota Gorontalo No. 23 Tahun 2022 | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Terbangunnya SPAL Domestik terpusat skala permukiman berbasis masyarakat dengan pelayanan 500 KK . | 4.500,00                                   |                   | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                       | Lokasi                                                                                       | Perangkat Daerah                               | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                                     | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |          |          |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                |                              |                                                                                                                     |                                            | 2025              | 2026     | 2027     | 2028   | 2029   |
| 2   | Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);             | IPLT Kwandang, IPLT Limboto Barat, IPLT Dulupi, IPLT Kota Utara                              | DPUPR-PKP, UPTD Air Limbah, DLH Kota Gorontalo | BPPW Gorontalo               | Optimalnya keberfungsian IPLT di 4 lokasi                                                                           | 4.000,00                                   |                   | 2.000,00 | 2.000,00 |        |        |
| 3   | Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS ( <i>Community Lead Total Sanitation</i> ) di kawasan perdesaan; | Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan                     |                              | Menurunnya kejadian diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan pelaku dengan | 3.500,00                                   |                   | 875,00   | 875,00   | 875,00 | 875,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                   | Lokasi                                                       | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                    | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |          |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|--------|
|     |                                                                                                |                                                              |                  |                              |                                                                    |                                            | 2025              | 2026   | 2027     | 2028   | 2029   |
|     |                                                                                                |                                                              |                  |                              | pembangunan wc dan septik tank yang memenuhi standar untuk 1000 KK |                                            |                   |        |          |        |        |
| 4   | Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang; | Lamu, MolingkapotoPalopo, Marisa Selatan dan Hulawa          | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Berfungsinya SPALD Terpusat di 5 lokasi                            | 1.750,00                                   |                   | 350,00 | 1.400,00 |        |        |
| 5   | Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;                              | KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Marisa dan | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terbangunnya IPAL Paket dan Pendukungnya dalam lingkungan KSP      | 1.050,00                                   |                   |        | 350,00   | 350,00 | 350,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                         | Lokasi                                         | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                    | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |      |          |          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|----------|----------|------|
|     |                                                                                                                                                      |                                                |                  |                              |                                                                                                    |                                            | 2025              | 2026 | 2027     | 2028     | 2029 |
|     |                                                                                                                                                      | Kawasan Randangan Kabupaten Pohuwato           |                  |                              | sebanyak 1500 KK                                                                                   |                                            |                   |      |          |          |      |
| 6   | Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang | PKW Kecamatan Tibawa dan PKL Kecamatan Limboto | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terbangunnya SPAL Domestik terpusat skala permukiman berbasis masyarakat dengan pelayanan 500 KK . | 4.500,00                                   |                   |      | 2.250,00 | 2.250,00 |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                      | Lokasi         | Perangkat Daerah           | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                       | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                   |                |                            |                              |                                                                                                       |                                            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | telah ada secara bertahap.                                                                        |                |                            |                              |                                                                                                       |                                            |                   |        |        |        |        |
| 7   | Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;      | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Tersampainya tujuan pengelolaan air limbah kepada OPD Kabupaten/kota                                  | 300,00                                     | 60,00             | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| 8   | Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Tersosialisasinya peraturan dan petunjuk teknis penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman | 729,00                                     | 145,80            | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                   | Lokasi                                                                                                 | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                | Kebutuhan Biaya<br>(Rp $\times 10^6$ ) | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|
|     |                                                                                                |                                                                                                        |                  |                              |                                                                                |                                        | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029 |
|     | limbah permukiman;                                                                             |                                                                                                        |                  |                              | n di 657 desa dan 72 Kelurahan di Provinsi Gorontalo                           |                                        |                   |          |          |          |      |
| 9   | Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; | 3 (tiga) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara, | DPUPR-PKP        |                              | Perwujudan Kawasan dengan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat | 3.000,00                               |                   | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |      |
| 10  | Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta                                     | Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-                                           | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Tersosialisasinya potensi investasi bidang pengelolaan air                     | 100,00                                 |                   | 100,00   |          |          |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No.    | Rencana Aksi                                                                                 | Lokasi                                                 | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                      | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|
|        |                                                                                              |                                                        |                  |                              |                                                                                      |                                            | 2025              | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 |
|        | mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;                      | Limboto                                                |                  |                              | limbah                                                                               |                                            |                   |        |      |      |      |
| 1<br>1 | Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman; | Kabupaten/kota                                         | DPUPR-PKP        |                              | Terealisasi lainnya kerjasama terkait pola investasi dengan pendanaan non pemerintah | 0,00                                       |                   |        |      |      |      |
| 1<br>2 | Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi                     | Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dalam                                 | 100,00                                     |                   | 100,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                 | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                        | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |      |       |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|-------|------|------|
|     |                                                                                              |                    |                  |                              |                                                                        |                                            | 2025              | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 |
|     | di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..          | Kota-Limboto       |                  |                              | acara workshop pemangku kepentingan air limbah domestik                |                                            |                   |      |       |      |      |
| 13  | Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman; | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Penyusunan peraturan terkait SPAL DT berbasis institusi dan masyarakat | 90,00                                      |                   |      | 90,00 |      |      |
| 14  | Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggara                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terwujudnya penguatan substansi perundang-undangan                     | 0,00                                       |                   |      |       |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                         | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)              | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                      |                    |                  |                              |                                                              |                                            | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | aan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi |                    |                  |                              | terkait pengelolaan air limbah domestik                      |                                            |                   |      |      |      |      |
| 15  | Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala                             | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Tersusunya peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik | 0,00                                       |                   |      |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                 | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                      | Kebutuhan Biaya<br>(Rp $\times 10^6$ ) | Waktu Pelaksanaan |      |        |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|--------|------|------|
|     |                                                                                              |                    |                  |                              |                                                                      |                                        | 2025              | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |
|     | Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah                                                |                    |                  |                              |                                                                      |                                        |                   |      |        |      |      |
| 16  | Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo        | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pengembangan SNPK                                      | 0,00                                   |                   |      |        |      |      |
| 17  | Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Tersusunnya studi review NSPK bidang pengelolaan air limbah domestik | 300,00                                 |                   |      | 300,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                     | Lokasi         | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                            | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |       |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                                  |                |                  |                              |                                                                            |                                            | 2025              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | permukiman;                                                                                                      |                |                  |                              |                                                                            |                                            |                   |       |      |      |      |
| 18  | Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terlaksananya Bantek untuk kabupaten/kota                                  | 50,00                                      |                   | 50,00 |      |      |      |
| 19  | Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana        | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya bantek penyusunan Rencana Induk SPAL Domestik Kabupaten/kota | 50,00                                      |                   | 50,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                           | Lokasi         | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat) | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |       |       |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                        |                |                  |                              |                                                 |                                            | 2025              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|     | dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;                                                                              |                |                  |                              |                                                 |                                            |                   |       |       |       |       |
| 20  | Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        |                              | Terlaksananya pendampingan di 6 lokasi          | 90,00                                      |                   | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| 21  | Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi                                                                                         | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        |                              | Terdatanya SPM sanitasi di 6 lokasi             | 60,00                                      |                   | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                       | Lokasi         | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                              | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |       |        |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|--------|------|------|
|     |                                                                                                    |                |                  |                              |                                                                                                              |                                            | 2025              | 2026  | 2027   | 2028 | 2029 |
|     | di daerah                                                                                          |                |                  |                              |                                                                                                              |                                            |                   |       |        |      |      |
| 22  | Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dalam acara workshop pemangku kepentingan air limbah domestik | 50,00                                      |                   | 50,00 |        |      |      |
| 23  | Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;          | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Tersusunnya sistem informasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik                                 | 300,00                                     |                   |       | 300,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                 | Lokasi                     | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                                | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |       |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                              |                            |                  |                              |                                                                                                                |                                            | 2025              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 24  | Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman; | Kabupaten/kota             | DPUPR-PKP        |                              | tersusunnya peraturan terkait pola insentif dan insentif pengelolaan air limbah domestik di provinsi Gorontalo | 0,00                                       |                   |       |      |      |      |
| 25  | Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman                                                     | Kawasan strategis provinsi | DPUPR-PKP        |                              | tersusunnya peraturan terkait pembangunan SPALD terpusat di kawasan permukiman baru                            | 25,00                                      |                   | 25,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                     | Lokasi         | Perangkat Daerah           | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat) | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                  |                |                            |                              |                                                 |                                            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.                                                     |                |                            |                              |                                                 |                                            |                   |        |        |        |        |
| 26  | Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal; | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Terbentuknya KSM di 50 desa                     | 50,00                                      |                   | 25,00  | 25,00  |        |        |
| 27  | Memberikan pelatihan penyelenggaraan                                                                             | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan | BPPW Gorontalo               | Penyelenggara SPAL domestik terlatih di         | 729,00                                     |                   | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                         | Lokasi                                                        | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)        | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                                               |                  |                              |                                                        |                                            | 2025              | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;                                                                         |                                                               | an               |                              | 657 desa dan 72 Kelurahan di Provinsi Gorontalo        |                                            |                   |        |      |      |      |
| 28  | Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, | Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango | DPUPR-PKP        |                              | Terselenggaranya Sosialisasi UPTD pengelola air limbah | 150,00                                     |                   | 150,00 |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                     | Lokasi                                                            | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)         | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |        |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|------|
|     |                                                                                                  |                                                                   |                  |                              |                                                         |                                            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 |
|     | Badan Layanan Umum dan Dinas;                                                                    |                                                                   |                  |                              |                                                         |                                            |                   |        |        |      |      |
| 29  | Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;             | Kabupaten/kota                                                    | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terselenggara Bantek kelembagaan 5 kabupaten dan 1 kota | 250,00                                     |                   | 125,00 | 125,00 |      |      |
| 30  | Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman; | Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terselenggara pelatihan UPTD Air Limbah                 | 75,00                                      |                   | 75,00  |        |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                 | Lokasi         | Perangkat Daerah           | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                   | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                              |                |                            |                              |                                                                                   |                                            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 31  | Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;              | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP                  |                              | Terwujudnya Kesepakatan bersama dalam pengelolaan air limbah                      | 20,00                                      |                   |        | 20,00  |        |        |
| 32  | Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman; | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan |                              | Trealisasikannya sosialisasi pemangku kepentingan pengelolaan air limbah domestik | 600,00                                     |                   | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                    | Lokasi         | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                 | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                 |                |                  |                              |                                                                                                 |                                            | 2025              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| 33  | Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses ( <i>best practices</i> ) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Terselenggaranya seminar penyelenggaraan best practices                                         | 50,00                                      |                   | 50,00  |        |        |        |
| 34  | Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi                     | Kabupaten/kota | DPUPR-PKP        |                              | Teralokasikan dana stimulan untuk desa/kelurahan dengan pengelolaan air limbah domestik terbaik | 500,00                                     |                   | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                      | Lokasi                                                     | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                  | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                   |                                                            |                  |                              |                                                                                                  |                                            | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | dana swadaya masyarakat;                                                                                                          |                                                            |                  |                              |                                                                                                  |                                            |                   |      |      |      |      |
| 35  | Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah; | Kabupaten/kota                                             | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               | Tercapainya Nota kesepahaman dan kesepakatan kerjasama antar pemerintah provinsi dan badan usaha |                                            |                   |      |      |      |      |
| 36  | Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah                                              | Kawasan Strategis Propinsi dan wilayah kewenangan provinsi | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               |                                                                                                  |                                            |                   |      |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                              | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat) | Kebutuhan Biaya<br>(Rp $\times 10^6$ ) | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                           |                    |                  |                              |                                                 |                                        | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|     | terpusat dan pengembangan lainnya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.                                                |                    |                  |                              |                                                 |                                        |                   |      |      |      |      |
| 37  | Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan | Kabupaten/kota     | DPUPR-PKP        |                              |                                                 |                                        |                   |      |      |      |      |
| 38  | Penguatan forum konsolidasi                                                                                               | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              |                                                 |                                        |                   |      |      |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                    | Lokasi             | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                        | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |       |       |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|-------|------|------|
|     |                                                                                                                 |                    |                  |                              |                                                                                        |                                            | 2025              | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 |
|     | pendanaan sanitasi di tingkat provinsi                                                                          |                    |                  |                              |                                                                                        |                                            |                   |       |       |      |      |
| 39  | Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        | BPPW Gorontalo               |                                                                                        |                                            |                   |       |       |      |      |
| 40  | Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat                              | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terselesaikannya aturan dan kelengkapan usulan pembangunan limbah domestik di 6 lokasi | 50,00                                      |                   | 25,00 | 25,00 |      |      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                 | Lokasi                          | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                           | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                              |                                 |                  |                              |                                                                           |                                            | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|     | dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan |                                 |                  |                              |                                                                           |                                            |                   |          |          |          |          |
| 41  | Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD                                | Provinsi Gorontalo              | DPUPR-PKP        |                              | Terselesaikannya RC usulan pembangunan pengelolaan air limbah di 6 lokasi | 300,00                                     |                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |          |
| 42  | Percepatan pembangunan sarana/prasar                                                                         | wilayah kewenangan provinsi dan | DPUPR-PKP        |                              | Terbangunnya 2,43% SPAL D Terpusat                                        | 30.503,44                                  |                   | 7.625,86 | 7.625,86 | 7.625,86 | 7.625,86 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                          | Lokasi                                                               | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                         | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |          |          |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                       |                                                                      |                  |                              |                                                                                                         |                                            | 2025              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|     | ana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi serta sarana pendukungnya                                       | kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                 |                  |                              | dari 358.653 KK berbasis institusi di kabupaten/kota pada tahun 2029                                    |                                            |                   |          |          |          |          |
| 43  | Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis masyarakat, serta sarana pendukungnya | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbangunnya 0,49% SPALD Terpusat berbasis masyarakat dari 358.653 KK di kabupaten/kota pada tahun 2029 | 6.150,90                                   |                   | 1.537,72 | 1.537,72 | 1.537,72 | 1.537,72 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                             | Lokasi                                                               | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                       | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |           |           |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                          |                                                                      |                  |                              |                                                                                       |                                            | 2025              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|     | a                                                                                        |                                                                      |                  |                              |                                                                                       |                                            |                   |           |           |           |           |
| 44  | Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga        | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbangunnya IPAL Skala permukiman pada 61.939 KK (17,27% akses aman) pada Tahun 2029 | 92.908,50                                  |                   | 23.227,13 | 23.227,13 | 23.227,13 | 23.227,13 |
| 45  | Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Peningkatan Desa Stop BABS (SBS) sebesar 53% pada Tahun 2029                          | 7.290,00                                   |                   | 1.822,50  | 1.822,50  | 1.822,50  | 1.822,50  |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                   | Lokasi                                                               | Perangkat Daerah | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                          | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |           |           |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |                              |                                                                                                          |                                            | 2025              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|     | Gorontalo                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                  |                              |                                                                                                          |                                            |                   |           |           |           |           |
| 46  | Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP        |                              | Terbebasnya provinsi Gorontalo dari BABs dengan pembangunan septik tank individual pada 3.157 KK (9,38%) | 100.959,00                                 |                   | 25.239,75 | 25.239,75 | 25.239,75 | 25.239,75 |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**  
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| No. | Rencana Aksi                                                                                       | Lokasi             | Perangkat Daerah      | Pemangku Kepentingan Non OPD | Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)                                                         | Kebutuhan Biaya<br>(Rp x 10 <sup>6</sup> ) | Waktu Pelaksanaan |      |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                    |                    |                       |                              |                                                                                                         |                                            | 2025              | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   |
|     | padat penduduk di perkotaan) ataupun septik tank yang sesuai standar                               |                    |                       |                              |                                                                                                         |                                            |                   |      |        |        |        |
| 47  | Pemanfaatan IoT ( <i>internet of things</i> ) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi | Provinsi Gorontalo | DPUPR-PKP, Diskominfo |                              | Terbangunnya sistem informasi infrastruktur sanitasi yang terintegrasi dengan sistem informasi provinsi | 800,00                                     |                   |      | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024



## **bab-6**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN**

## 6.1 Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain pengaturan tentang kewenangan, nomenklatur, dll;

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan dilakukan dengan cara menginput rencana aksi yang telah disusun sebelumnya ke dalam tabel sesuai kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemurakhiran kualifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 6.1  
Kodifikasi dan Nomen Klatur

| Kode                        |        |         |          |              | Program Dan Kegiatan                                             | Satuan |
|-----------------------------|--------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Urusan                      | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                  |        |
| NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI |        |         |          |              |                                                                  |        |
| 1                           | 03     |         |          |              | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang     |        |
| 1                           | 03     | 04      |          |              | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |        |
| 1                           | 03     | 04      | 1.01     |              | Pengembangan Sistem dan                                          |        |

# ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kode   |        |         |          |              | Program Dan Kegiatan                                                                      | Satuan         |
|--------|--------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                           |                |
|        |        |         |          |              | Pengelolaan Persampahan Regional                                                          |                |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0009         | Pembinaan Pengembangan TPA/ TPST / SPA / TPS 3R/TPS Kabupaten/kota                        | Kabupaten/kota |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0010         | Peningkatan TPA / TPST / SPA                                                              | TON/HARI       |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0011         | Optimalisasi TPA / TPST / SPA                                                             | unit           |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0012         | Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/kota | Kabupaten/kota |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0013         | Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                  | TON/HARI       |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0014         | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota | orang          |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0015         | Peningkatan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan persampahan                          | lembaga        |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0016         | Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan          | dokumen        |
| 1      | 03     | 04      | 1.01     | 0017         | Penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA                                                  | unit           |
| 1      | 03     | 05      |          |              | <b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>                             |                |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan                                                              |                |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kode   |        |         |          |              | Program Dan Kegiatan                                                                                    | Satuan         |
|--------|--------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                         |                |
|        |        |         |          |              | Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                     |                |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0010         | Pembinaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/kota                    | Kabupaten/kota |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0011         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                     | m3/hari        |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0012         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                    | unit           |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0013         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                     | m3/hari        |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0014         | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | orang          |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0015         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)       | dokumen        |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0016         | Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                     | Kabupaten/kota |
| 1      | 03     | 05      | 1.01     | 0017         | Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Pengelolaan                                                    | lembaga        |

## ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kode     |           |           |          |              | Program Dan Kegiatan                                                                                     | Satuan       |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Urusan   | Bidang    | Program   | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                          |              |
|          |           |           |          |              | Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                              |              |
| 1        | 03        | 05        | 1.01     | 0018         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                  | unit         |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>07</b> |          |              | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                   |              |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     |              | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                       |              |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0005         | Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | TON/HAR I    |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0006         | Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | TON/HAR I    |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0007         | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                        | TON/HAR I    |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0008         | Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | TON/HAR I    |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0009         | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                  | rumah tangga |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0010         | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                        | TON/HAR I    |
| 1        | 03        | 07        | 1.01     | 0011         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi | m3/hari      |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kode   |        |         |          |              | Program Dan Kegiatan                                                                                              | Satuan          |
|--------|--------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                                   |                 |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0012         | Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                                     | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0013         | Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi                                                                    | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0014         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi          | m3/hari         |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0015         | Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                                     | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0016         | Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi                                                                  | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0017         | Peningkatan TPS 3 R di Kawasan Strategis Provinsi                                                                 | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0018         | Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi                                                                    | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0019         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi | m3/hari         |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0020         | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                                         | unit            |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0021         | Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                                     | TON/HAR<br>I    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0022         | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                                             | rumah<br>tangga |

**ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| Kode   |        |         |          |              | Program Dan Kegiatan                                                                                      | Satuan  |
|--------|--------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Urusan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |                                                                                                           |         |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0023         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0025         | Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0028         | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3 R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                       | SR      |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0032         | Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0033         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di kawasan Strategis Provinsi  | m3/hari |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0034         | Optimalisasi TPS 3R di Kawasan Strategis Provinsi                                                         | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0035         | Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi                                                           | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0036         | Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                            | unit    |
| 1      | 03     | 07      | 1.01     | 0037         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis          | unit    |

Sumber : Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

## **6.2 Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan**

Hasil penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan nomenkatur tersebut, akan diperoleh pengelompokan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Berdasarkan pengelompokan tersebut kemudian tuangkan ke dalam Tabel 6.4 yang terdapat dalam lampiran 4 form-3 (file excel) seperti uraian berikut ini;

Tabel 6.2  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan  
Road Map Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                               | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |          |        |          |        |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |          |          |          |           | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |          |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                              |                                                                              | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |          |        |          |        |                     |                              |          |          |          |          |           | PROV                                      | APBN     | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                                              |                                                                              |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |          |        |          |        | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Jumlah    |                                           |          |     |                |            |                |             |
| 1         | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                            | 4                                           | 5                                    | 6                               | 7      | 8        | 9      | 10       | 11     | 12                  | 13                           | 14       | 15       | 16       | 17       | 18        | 19                                        | 20       | 21  | 22             | 23         | 24             | 25          |
| 1         | SISTEM<br>PENGELOLAA<br>N AIR LIMBAH<br>DOMESTIK                                                                                                             |                                                                              |                                             |                                      |                                 |        |          |        |          |        |                     |                              |          |          |          |          |           |                                           |          |     |                |            |                |             |
| A.        | ASPEK<br>STANDAR<br>DAN<br>REGULASI                                                                                                                          |                                                                              |                                             |                                      |                                 |        |          |        |          |        |                     |                              |          |          |          |          |           |                                           |          |     |                |            |                |             |
| 1         | Pembinaan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat; | Kawasan Kumuh Kota Gorontalo sesuai Perwali Kota Gorontalo No. 23 Tahun 2022 | 2.500                                       | 206,77 ha                            | KK                              |        | 500,00   | 500,00 | 500,00   | 500,00 | 2.000,00            |                              | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00                                 |          |     |                |            |                |             |
| 2         | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                                                                        | IPLT Kwandang, IPLT Limboto Barat, IPLT Dulupi, IPLT Kota Utara              |                                             |                                      | unit                            |        | 1,00     | 1,00   | 1,00     | 1,00   | 4,00                |                              | 2.000,00 | 2.000,00 |          |          | 4.000,00  |                                           | 4.000,00 |     |                |            |                |             |
| 3         | Pembinaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (Community                                                                                        | Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo,                | 3.000                                       |                                      | orang                           |        | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 3.000,00            |                              | 1.166,67 | 583,33   | 1.166,67 | 583,33   | 3.500,00  |                                           | 3.500,00 |     |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                                                                | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |            |        |            |            | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |            |              |              |              | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |              |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |            |        |            |            |                              |          |            |              |              |              | PROV                                      | APBN | DAK          | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |            |        |            |            | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         |                                           |      |              |                |            |                |             |
|           | Lead Sanitation) di<br>kawasan perdesaan;                                                                                                                                         | Gorontalo,<br>dan<br>Gorontalo<br>Utara                                                                       |                                             |                                      |                                 |        |            |        |            |            |                              |          |            |              |              |              |                                           |      |              |                |            |                |             |
| 4         | Optimalisasi IPAL dan<br>peningkatan operasional<br>sewerage terpasang;                                                                                                           | Lamu,<br>Molingkapot oPalopo,<br>Marisa Selatan dan<br>Hulawa                                                 |                                             |                                      | unit                            |        | 1,00       | 2,00   | 1,00       | 1,00       | 5,00                         |          | 350,0<br>0 | 700,00       | 350,00       | 350,00       | 1.750,0<br>0                              | 350  | 1.400,0<br>0 |                |            |                |             |
| 5         | Pembangunan IPAL paket                                                                                                                                                            | KSP dari sudut<br>kepentingan ekonomi,<br>yaitu Kawasan Marisa dan<br>Kawasan Randangan<br>Kabupaten Pohuwato | 4.500                                       |                                      | m3/h<br>ari                     |        | 500,<br>00 | 500,00 | 500,<br>00 |            | 1.500,<br>00                 |          |            | 1.500,0<br>0 | 1.500,0<br>0 | 1.500,0<br>0 | 4.500,0<br>0                              |      | 4.500,0<br>0 |                |            |                |             |
| 6         | Optimalisasi SPALD-S<br>menjadi SPALD-T secara<br>bertahap di perkotaan<br>dengan cara mengkombinasi<br>kan dan atau menambah<br>dengan sistem yang telah ada<br>secara bertahap. | PKW Kecamatan<br>Tibawa dan PKL Kecamatan<br>Limboto                                                          | 500                                         |                                      | unit                            |        | 100,<br>00 | 100,00 | 100,<br>00 | 200,<br>00 | 500,00                       |          | 350,0<br>0 | 350,00       | 350,00       | 700,00       | 1.750,0<br>0                              |      | 1.750,0<br>0 |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                        | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                                                         | Estimasi<br>Outcome                 |                               | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |        |        |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|---------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                                                   |                                                                                                        | Jumla<br>h<br>Penduduk<br>terlayani | Luas Wila<br>yah<br>terlayani |                                 |        |      |      |      |      |                     |                              |        |        |        |        |        | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                     |                               | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Jumlah |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
| 7         | Sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;                                   | Kabupaten/kota                                                                                         | 1.000                               |                               | kab/kota                        |        | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00                |                              | 100,00 | 50,00  | 100,00 | 50,00  | 300,00 | 300,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 8         | Pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;         | Kabupaten/kota                                                                                         | 2.000                               |                               | kab/kota                        |        | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00                |                              | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 9         | Pembinaan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;                           | 3 (tiga) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara, |                                     |                               | kawasan                         |        |      | 3,00 |      |      | 3,00                |                              |        | 300,00 |        |        | 300,00 | 300,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 10        | Sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman; | Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto                                    |                                     |                               | kawasan                         |        |      | 2,00 |      |      | 2,00                |                              |        | 200,00 |        |        | 200,00 | 200,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                      | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |         |       |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|----------|---------|-------|------|------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                               |                                                                     | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |         |       |      |      | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                               |                                                                     |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026    | 2027  | 2028 | 2029 |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 11        | Pembinaan pola investasi untuk penyelenggaraa n pengelolaan system air limbah permukiman;                                                                     | Kabupaten/k ota                                                     |                                            |                                      | kab/k ota                       |        | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00                         |          | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |        |     |                |            |                |             |        |
| 12        | Sosialisasi kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.. | Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto |                                            |                                      | kawas an                        |        | 2,00 |      |      |      | 2,00                         |          | 100,0 0 |       |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| B         | ASPEK KELEMBAGAA N DAN TATA KELOLA                                                                                                                            |                                                                     |                                            |                                      |                                 |        |      |      |      |      | 0,00                         |          |         |       |      |      |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 13        | Penyusunan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                    | Provinsi Gorontalo                                                  |                                            |                                      | doku men                        |        |      | 1,00 |      |      | 1,00                         |          |         | 90,00 |      |      | 90,00                                     | 90,00  |     |                |            |                |             |        |
| 14        | Penguatan substansi peraturan perundang- undangan penyelenggaraa n SPAL Domestik yang ada sebagai                                                             | Provinsi Gorontalo                                                  |                                            |                                      | doku men                        |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |          | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                             | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |        |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|----------|------|--------|------|------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                        |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |      |        |      |      | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                        |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
|           | payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi                                                      |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |      |        |      |      |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 15        | Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | doku<br>men                     |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |
| 16        | Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo                                                  | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | doku<br>men                     |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |
| 17        | Review dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah permukiman;                                 | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | doku<br>men                     |        |      | 1,00 |      |      | 1,00                         |          |      | 300,00 |      |      | 300,00                                    | 300,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                               | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |       |       |       |       | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                          |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |       |       |       |       | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                          |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 18        | Sosialisasi dan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;                     | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |
| 19        | Bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan; | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |
| 20        | Fasilitasi / pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |
| 21        | Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah                                                                                 | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                           | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |         |        |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |       |        |       |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|---------|--------|---------------------|------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                                                                                      |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |         |        |                     |                              |       |        |       |        |        | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                                                                                      |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |         |        | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026  | 2027   | 2028  | 2029   | Jumlah |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
| 22        | Sosialisasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;                                                        | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00 | 6,00    | 6,00   | 24,00               |                              | 60,00 | 60,00  | 60,00 | 60,00  | 240,00 | 240,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 23        | Penyusunan sistem informasi tentang penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;                                                              | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | doku men                        |        |      |      | 250, 00 | 250,00 |                     |                              |       | 250,00 |       | 250,00 | 250,00 |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
| 24        | Pembinaan terkait insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggara kan pengelolaan air limbah permukiman; | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | kelom pok                       |        | 1,00 | 1,00 | 1,00    | 1,00   | 4,00                |                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |  |
| 25        | Sosialisasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dikawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan                      | Kawasan strategis provinsi     |                                             |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00 | 6,00    | 6,00   | 24,00               |                              | 60,00 | 60,00  | 60,00 | 60,00  | 240,00 | 240,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                            | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |       |       |       |       | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                       |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |       |       |       |       | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                       |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
|           | permukiman baru.                                                                                                                                      |                                |                                            |                                      |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |       |       |       |       |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| C         | ASPEK<br>PENDANAAN<br>YANG<br>BERKELANJUT<br>AN                                                                                                       |                                |                                            |                                      |                                 |        |      |      |      |      | 0,00                         |          |       |       |       |       |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 26        | Sosialisasi/Pend<br>ampingan<br>pembentukan<br>kelompok<br>swadaya<br>masyarakat<br>dalam<br>pengelolaan air<br>limbah<br>permukiman<br>komunal;      | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |
| 27        | Pelatihan<br>penyelenggaraa<br>n<br>pembangunan<br>prasarana dan<br>sarana air<br>limbah serta<br>pengelolaan air<br>limbah<br>permukiman<br>komunal; | Kabupaten/k<br>ota             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                     | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |       |       |       |       | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |        |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|--|
|           |                                                                                                                                                                                         |                                                                    | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |       |       |       |       |                              |          |        |        |        |        | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |  |
|           |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |       |       |       |       | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |  |
| 28        | Pembentukan unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas; | Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango      |                                            |                                      | kab/kota                        |        | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 24,00                        |          | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 29        | Sosialisasi/bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;                                                                                                     | Kabupaten/kota                                                     |                                            |                                      | kab/kota                        |        | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 24,00                        |          | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 30        | Pelatihan personil pengelola dibidang penyelenggaraa n air limbah permukiman;                                                                                                           | Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara , Kabupaten Boalemo |                                            |                                      | orang                           |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00                                    | 400,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 31        | Sosialisasi dan koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraa n pengelolaan air limbah;                                                                      | Kabupaten/kota                                                     |                                            |                                      | kab/kota                        |        | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 6,00  | 24,00                        |          | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 240,00                                    | 240,00 |     |                |            |                |             |        |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |       |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |        |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|-------|------|------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                         |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |       |      |      |                              |          |        |        |        |        | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                         |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |       |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 32        | sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraa n air limbah permukiman;                        | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00  | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00                                    | 600,00 |     |                |            |                |             |        |
| 33        | Sosialisasi kisah sukses ( <i>best practices</i> ) tentang penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman                           | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | orang                           |        |      | 50,00 |      |      | 50,00                        |          |        | 75,00  |        |        | 75,00                                     | 75,00  |     |                |            |                |             |        |
| D         | ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT                                                                                                            |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |       |      |      | 0,00                         |          |        |        |        |        |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 34        | Optimalisasi dana stimulan dalam penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat; | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00  | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 500,00                                    | 500,00 |     |                |            |                |             |        |
| 35        | Fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraa n prasarana dan                                                   | Kabupaten/k ota                |                                             |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00  | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                             | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |        |      |      |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |      |           |      |      |           | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |       |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|--------|------|------|---------------------|------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                           |                                                            | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |        |      |      |                     |                              |      |           |      |      |           | PROV                                      | APBN  | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |        |      |      | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026 | 2027      | 2028 | 2029 | Jumlah    |                                           |       |     |                |            |                |             |
|           | sarana air<br>limbah;                                                                                                     |                                                            |                                            |                                      |                                 |        |      |        |      |      |                     |                              |      |           |      |      |           |                                           |       |     |                |            |                |             |
| 36        | Pembangunan awal system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.      | Kawasan Strategis Propinsi dan wilayah kewenangan provinsi |                                            |                                      | m3/h ari                        |        |      | 100,00 |      |      | 100,00              |                              |      | 15.000,00 |      |      | 15.000,00 | 4.500,00                                  | 10500 |     |                |            |                |             |
| 37        | Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target ynag ditetapkan | Kabupaten/k ota                                            |                                            |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00   | 6,00 | 6,00 | 24,00               |                              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                                      |       |     |                |            |                |             |
| 38        | Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi                                                        | Provinsi Gorontalo                                         |                                            |                                      | kab/k ota                       |        | 6,00 | 6,00   | 6,00 | 6,00 | 24,00               |                              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                                      |       |     |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |      |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                 |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |      |                              |          |      |      |      |      | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                           |      |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 39        | Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman                                                                                 | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 40        | Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 41        | Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD                                                                                                                   | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00                        |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| E         | ASPEK<br>INFRASTRUKT<br>UR DAN<br>TEKNOLOGI                                                                                                                                                     |                                |                                            |                                      |                                 |        |      |      |      |      | 0,00                         |          |      |      |      |      |                                           |      |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                               | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota)                                       | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |          |          |          |          |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |           |           |           |           |           | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |           |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                                          |                                                                      | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |          |          |          |          |                     |                              |           |           |           |           |           | PROV                                      | APBN      | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                                          |                                                                      |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |          |          |          |          | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Jumlah    |                                           |           |     |                |            |                |             |  |
| 42        | Terbangunnya 2,43% SPAL D Terpusat dari 358.653 KK berbasis institusi di kabupaten/kota pada tahun 2029  | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | 2223,6687                                   |                                      | unit                            |        | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00           |                              | 8.750,00  | 8.750,00  | 8.750,00  | 8.750,00  | 35.000,00 |                                           | 35.000,00 |     |                |            |                |             |  |
| 43        | Terbangunnya 0,49% SPAL D Terpusat berbasis masyarakat dari 358.653 KK di kabupaten/kota pada tahun 2029 | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo | 448,3941                                    |                                      | unit                            |        | 448,00   | 448,00   | 448,00   | 448,00   | 1.792,00            |                              | 1.568,00  | 1.568,00  | 1.568,00  | 1.568,00  | 6.272,00  |                                           | 6.272,00  |     |                |            |                |             |  |
| 44        | Terbangunnya IPAL Skala permukiman pada 61.939 KK (17,27% akses aman) pada Tahun 2029                    | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo |                                             |                                      | unit                            |        | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 200,00              |                              | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 6.000,00  |                                           | 6.000,00  |     |                |            |                |             |  |
| 45        | Peningkatan Desa Stop BABS (SBS) sebesar 53% pada Tahun 2029                                             | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo |                                             |                                      | desa                            |        | 20,00    | 20,00    | 18,00    | 18,00    | 76,00               |                              | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00                                 |           |     |                |            |                |             |  |
| 46        | Terbebasnya provinsi Gorontalo dari BABs dengan pembangunan septik tank individual pada                  | wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo |                                             |                                      | unit                            |        | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 157,00   | 3.157,00            |                              | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 549,50    | 11.049,50 | 11.049,50                                 |           |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |           |           |           |           | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |          |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|--|--|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                             |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |  |  |                              |          |           |           |           |           | PROV                                      | APBN     | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                           |          |     |                |            |                |             | Jumlah |
|           | 3.157 KK<br>(9,38%)                                                                                                                                                                         |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |      |  |  |                              |          |           |           |           |           |                                           |          |     |                |            |                |             |        |
| 47        | Pemanfaatan IoT ( <i>internet of things</i> ) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi                                                                                          | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | doku<br>men                     |        |      | 1,00 |  |  | 1,00                         |          |           | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 2.400,00                                  | 2.400,00 |     |                |            |                |             |        |
|           | Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah                                                                                                                                                    |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |      |  |  |                              | 0,00     | 45.119,67 | 62.901,33 | 45.569,67 | 41.985,83 | 195.576,50                                |          |     |                |            |                |             |        |
| 2         | PENGOLAHAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                      |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |      |  |  |                              |          |           |           |           |           |                                           |          |     |                |            |                |             |        |
| A.        | ASPEK STANDAR DAN REGULASI                                                                                                                                                                  |                                |                                             |                                      |                                 |        |      |      |  |  |                              |          |           |           |           |           |                                           |          |     |                |            |                |             |        |
| 1         | Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |      |  |  | 1,00                         |          | 100,00    |           |           |           | 100,00                                    | 100,00   |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |  |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |        |      |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|--|--|--|------------------------------|----------|--------|------|------|------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |  |  |  |                              |          |        |      |      |      | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |  |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 |                                           |      |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 2         | Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah                                                         | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |  |  |  | 1,00                         |          | 100,00 |      |      |      | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |        |
| 3         | Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi                                                        | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |  |  |  | 1,00                         |          | 100,00 |      |      |      | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |        |
| 4         | Revisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah                                                                   | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |  |  |  | 1,00                         |          | 100,00 |      |      |      | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |        |
| 5         | Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sangsi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |  |  |  | 1,00                         |          | 100,00 |      |      |      | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |        |
| 6         | Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk                                    | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | dok                             |        | 1,00 |  |  |  | 1,00                         |          | 100,00 |      |      |      | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                          | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |      |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |        |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|------|--|--|------------------------------|----------|------|--------|------|------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                     |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |      |  |  |                              |          |      |        |      |      | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |      |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
|           | pengelolaan<br>sampah                                                                                                                                               |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |      |  |  |                              |          |      |        |      |      |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 7         | Penyusunan<br>peraturan<br>tentang<br>pelaksanaan<br>EPR ( <i>extended<br/>producer<br/>Responsibility</i> )<br>atau kewajiban<br>produsen<br>pengelolaan<br>sampah | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | dok                             |        |  | 1,00 |  |  | 1,00                         |          |      | 100,00 |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 8         | Penyusunan<br>peraturan<br>tentang<br>pelaksanaan<br>CSR ( <i>corporate<br/>social<br/>responsibility</i> )<br>untuk<br>pengelolaan<br>sampah                       | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | dok                             |        |  | 1,00 |  |  | 1,00                         |          |      | 100,00 |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 9         | Penyusunan<br>peraturan<br>tentang<br>kompensasi,<br>insentif dan<br>disinsentif<br>untuk<br>pengelolaan<br>sampah                                                  | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | dok                             |        |  | 1,00 |  |  | 1,00                         |          |      | 100,00 |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                          | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |      |      |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |        |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|------|------|--|------------------------------|----------|------|--------|------|------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                     |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |      |      |  |                              |          |      |        |      |      | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                     |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |      |      |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 10        | Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran                                                                      | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |  | 1,00 |      |  | 1,00                         |          |      | 100,00 |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 11        | Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah                                          | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |  | 1,00 |      |  | 1,00                         |          |      | 100,00 |      |      | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 12        | Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |  |      | 1,00 |  | 1,00                         |          |      | 50,00  |      |      | 50,00                                     | 50,00  |     |                |            |                |             |        |
| 13        | Penerapan sangsi hukum terhadap pelangar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten                           | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |  |      | 1,00 |  | 1,00                         |          |      | 50,00  |      |      | 50,00                                     | 50,00  |     |                |            |                |             |        |
| 14        | Penyempurnaa n atau melengkapi norma, standar, prosedur dan                                                                         | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |  |      | 1,00 |  | 1,00                         |          |      | 50,00  |      |      | 50,00                                     | 50,00  |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                        | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                   |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |      |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |      |       |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |       |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|------|--|------------------------------|----------|------|------|-------|------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|--|
|           |                                                                                                   |                                | Jumla<br>h<br>Penduk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |      |  |                              |          |      |      |       |      | PROV                                      | APBN  | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |  |
|           |                                                                                                   |                                |                                       |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |      |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027 | 2028  | 2029 |                                           |       |     |                |            |                |             | Jumlah |  |
|           | kriteria (NSPK)<br>dalam<br>pengurangan<br>sampah                                                 |                                |                                       |                                      |                                 |        |  |  |      |  |                              |          |      |      |       |      |                                           |       |     |                |            |                |             |        |  |
| 15        | Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan sampah               | Provinsi Gorontalo             |                                       |                                      | dok                             |        |  |  | 1,00 |  | 1,00                         |          |      |      | 50,00 |      | 50,00                                     | 50,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 16        | pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah | Provinsi Gorontalo             |                                       |                                      | dok                             |        |  |  | 1,00 |  | 1,00                         |          |      |      | 50,00 |      | 50,00                                     | 50,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 17        | pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah                       | Provinsi Gorontalo             |                                       |                                      | dok                             |        |  |  | 1,00 |  | 1,00                         |          |      |      | 50,00 |      | 50,00                                     | 50,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 18        | pengembangan SOP dalam penanganan sampah                                                          | Provinsi Gorontalo             |                                       |                                      | dok                             |        |  |  | 1,00 |  | 1,00                         |          |      |      | 50,00 |      | 50,00                                     | 50,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| B         | ASPEK KELEMBAGAA<br>N DAN TATA KELOLA                                                             |                                |                                       |                                      |                                 |        |  |  |      |  |                              |          |      |      |       |      |                                           |       |     |                |            |                |             |        |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                           | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |      |      |      |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |       |       |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |       |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|--|------------------------------|----------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                      |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |      |      |      |  |                              |          |       |       |      |      | PROV                                      | APBN  | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                      |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |      |      |      |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 |                                           |       |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 19        | Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah                                              | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        | 1,00 |      |      |  | 1,00                         |          | 60,00 |       |      |      | 60,00                                     | 60,00 |     |                |            |                |             |        |
| 20        | Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah kabupaten/kota                                                                                       | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        |      | 1,00 |      |  | 1,00                         |          |       | 60,00 |      |      | 60,00                                     | 60,00 |     |                |            |                |             |        |
| 21        | Penyusunan nomen klatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupa ten/kota | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |      | 1,00 |      |  | 1,00                         |          |       | 90,00 |      |      | 90,00                                     | 90,00 |     |                |            |                |             |        |
| 22        | Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah                                                                                     | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | dok                             |        |      |      | 1,00 |  | 1,00                         |          |       | 90,00 |      |      | 90,00                                     | 90,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                        | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                   | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |           |       |           |           | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |            |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------------------------|----------|------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|--|
|           |                                                                                                                   |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |           |       |           |           |                              |          |            |        |        |        | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |  |
|           |                                                                                                                   |                                |                                             |                                   | SATU<br>AN                      | Volume |           |       |           |           | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026       | 2027   | 2028   | 2029   |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |  |
| 23        | Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku                       | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                   | unit                            |        |           | 1,00  |           |           | 1,00                         |          |            | 100,00 |        |        | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 24        | Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah                                                          | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                   | orang                           |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00                       |          | 100,0<br>0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00                                    | 400,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 25        | meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah                             | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                   | orang                           |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00                       |          | 100,0<br>0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00                                    | 400,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 26        | Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                   | doku<br>men                     |        | 1,00      |       |           |           | 1,00                         |          | 600,0<br>0 |        |        |        | 600,00                                    | 600,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 27        | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                                               | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                   | doku<br>men                     |        |           | 1,00  |           |           | 1,00                         |          |            | 800,00 |        |        | 800,00                                    | 800,00 |     |                |            |                |             |        |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                        | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |       |       |       |       | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|--|
|           |                                                                                                                                                                   |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |  |  |                              |          |       |       |       |       | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |  |
|           |                                                                                                                                                                   |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |  |
| 28        | Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                   | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 250,00                                    | 250,00 |     |                |            |                |             |        |  |
| 29        | Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi                                                                                                           | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |  |
| 30        | koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |     |                |            |                |             |        |  |
| 31        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air                                                                          | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |  |  |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |       |        |       |       |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|---------------------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                                                                           |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |  |  |                     |                              |       |        |       |       |        | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                                                                           |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |  |  | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026  | 2027   | 2028  | 2029  | Jumlah |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
|           | Minum, Limbah<br>dan Sanitasi                                                                                                             |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  |                     |                              |       |        |       |       |        |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
| 32        | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Produk Hukum<br>Desa/Kelurahan                                                                                | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                |                              | 18,23 | 18,23  | 18,23 | 18,23 | 72,90  | 72,90                                     |      |     |                |            |                |             |  |
| 33        | Fasilitasi<br>Penyusunan,<br>Perencanaan,<br>Pelaksanaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pembangunan<br>Desa                                      | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                |                              | 91,13 | 91,13  | 91,13 | 91,13 | 364,50 | 364,50                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 34        | Perancangan<br>dan<br>Perencanaan<br>Pengembangan<br>Sistem<br>Pengolaan<br>Persampahan<br>pada kawasan<br>Wisata<br>Unggulan<br>Provinsi | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                |                              |       | 600,00 |       |       | 600,00 | 600,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 35        | Penerapan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Berkelanjutan<br>dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata<br>Provinsi           | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                |                              | 0,00  | 0,00   |       |       | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                     | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |        |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |  |  |                              |          |        |        |        |        | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                                                                |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| C         | ASPEK<br>PENDANAAN<br>YANG<br>BERKELANJUT<br>AN                                                                                                                                |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          |        |        |        |        |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 36        | Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          |        | 100,00 |        |        | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 37        | mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabup aten/Kota                                                                               | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 25,00  | 25,00  | 25,00  | 25,00  | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 38        | Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pew adahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan                        | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 500,00                                    | 500,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |      |  |  |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |      |        |      |      |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|------|--|--|---------------------|------------------------------|------|--------|------|------|--------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                         |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |      |  |  |                     |                              |      |        |      |      |        | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                         |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |      |  |  | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026 | 2027   | 2028 | 2029 | Jumlah |                                           |      |     |                |            |                |             |
|           | akhir sampah di<br>Kabupaten/Kot<br>a                                                                                                   |                                |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |  |                     |                              |      |        |      |      |        |                                           |      |     |                |            |                |             |
| 39        | Monitoring dan<br>evaluasi<br>pelaksanaan<br>penggunaan<br>anggaran<br>pengelolaan<br>sampah                                            | Provinsi<br>Gorontalo          |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |  | 0,00                |                              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 40        | pemanfaatan<br>dana desa<br>untuk<br>pengelolaan<br>sampah                                                                              | Provinsi<br>Gorontalo          |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |  | 0,00                |                              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 41        | pemanfaatan<br>program<br><i>Extended<br/>Producer<br/>Responsibility</i><br>(EPR)/kewajiban<br>produsen dalam<br>pengelolaan<br>sampah | Provinsi<br>Gorontalo          |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |  | 0,00                |                              | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 42        | Penyusunan<br>dan penerapan<br>peta jalan<br>kewajiban<br>produsen dalam<br>pengurangan<br>sampah                                       | Provinsi<br>Gorontalo          |                                            |                                      |                                 |        |  | 1,00 |  |  | 1,00                |                              |      | 300,00 |      |      | 300,00 | 300,00                                    |      |     |                |            |                |             |
| 43        | Pengaturan<br>standarisasi<br>produk daur<br>ulang                                                                                      | Provinsi<br>Gorontalo          |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |  | 0,00                |                              | 0,00 |        |      |      | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                      | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |      |      |      |      | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                 |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |  |  |                              |          |      |      |      |      | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                 |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                           |      |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 44        | Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah                            | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 45        | memperkuat komitmen dunia usaha dalam penanganan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 46        | memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah                | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 47        | Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah                                      | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |
| 48        | Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota                                                          | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,00                         |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |           |       |           |           |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |            |        |        |        |              | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                               |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |           |       |           |           |                     |                              |            |        |        |        |              | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                                                               |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |           |       |           |           | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026       | 2027   | 2028   | 2029   | Jumlah       |                                           |      |     |                |            |                |             |
| 49        | Kerjasama<br>Penyediaan/<br>Pengelolaan<br>PSU<br>Permukiman                                                                                                                  | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | orang                           |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00              |                              | 250,0<br>0 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,0<br>0 | 500                                       |      | 500 |                |            |                |             |
| 50        | Kerjasama<br>Penanganan<br>Sampah di<br>TPA/TPST<br>Regional                                                                                                                  | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 51        | Koordinasi<br>Lintas Lembaga<br>dan Kerja Sama<br>dengan Sektor<br>Swasta untuk<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>serta Sarana<br>dan Prasarana<br>Lembaga<br>Pelatihan Kerja | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              | 0,00       |        |        |        | 0,00         | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 52        | Fasilitasi Kerja<br>Sama Antar<br>Desa Lintas<br>Kabupaten/Kot<br>a                                                                                                           | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 53        | Fasilitasi Kerja<br>Sama Antar<br>Desa Dengan<br>Pihak Ketiga                                                                                                                 | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| 54        | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan                                                                                                                             | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |
| D         | ASPEK PERAN<br>SERTA<br>MASYARAKAT                                                                                                                                            |                                |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           | 0,00                |                              |            |        |        |        |              |                                           |      |     |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                              | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |       |       |       |       |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |       |       |       |       |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                         |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |       |       |       |       |                     |                              |       |       |       |       |        | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                         |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |       |       |       |       | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | Jumlah |                                           |      |     |                |            |                |             |  |
| 55        | Perubahan pola fikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah   | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | orang                           |        | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00               |                              | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 50,00  | 50,00                                     |      |     |                |            |                |             |  |
| 56        | Melakukan perubahan pola fikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | orang                           |        | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00               |                              | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 50,00  | 50,00                                     |      |     |                |            |                |             |  |
| 57        | Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah                       | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | paket                           |        |       |       |       |       | 0,00                |                              | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 300,00 | 300,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 58        | Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah                          | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |       |       |       |       | 0,00                |                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |      |     |                |            |                |             |  |
| 59        | Penyelenggaraa n promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat                  | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |       |       |       |       | 0,00                |                              | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 150,00 | 150,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |
| 60        | Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh                  | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |       |       |       |       | 0,00                |                              | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00                                    |      |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                       | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |      |  |      | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |       |        |       |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |        |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|------|--|------|------------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                                                                                  |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |      |  |      |                              |          |       |        |       |        | PROV                                      | APBN   | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                                                                                  |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |      |  |      | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026  | 2027   | 2028  | 2029   |                                           |        |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 61        | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                  | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |      | 0,00                         |          |       | 50,00  |       |        | 50,00                                     | 50,00  |     |                |            |                |             |        |
| 62        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |      | 0,00                         |          | 12,50 | 12,50  | 12,50 | 12,50  | 50,00                                     | 50,00  |     |                |            |                |             |        |
| E         | ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI                                                                                                |                                |                                            |                                      |                                 |        |  |      |  |      | 0,00                         |          |       |        |       |        |                                           |        |     |                |            |                |             |        |
| 63        | Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah                                                                               | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | doku<br>men                     |        |  | 1,00 |  |      | 1,00                         |          |       | 400,00 |       |        | 400,00                                    | 400,00 |     |                |            |                |             |        |
| 64        | Penyusunan reuiu rencana induk sistem pengelolaan sampah                                                                         | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | doku<br>men                     |        |  |      |  | 1,00 | 1,00                         |          |       |        |       | 100,00 | 100,00                                    | 100,00 |     |                |            |                |             |        |
| 65        | membangun sistem informasi pengurangan sampah                                                                                    | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | doku<br>men                     |        |  | 1,00 |  |      | 1,00                         |          |       | 150,00 |       |        | 150,00                                    | 150,00 |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                               | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                        |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |       |       |       |       | Indikasi Biaya (juta rupiah) |          |        |        |        |        | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |          |     |                |            |                | Cata<br>tan |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|----------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--------|
|           |                                                                          |                                | Jumla<br>h<br>Pend<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |       |       |       |       |                              |          |        |        |        |        | PROV                                      | APBN     | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |        |
|           |                                                                          |                                |                                            |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |       |       |       |       | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                                           |          |     |                |            |                |             | Jumlah |
| 66        | pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah    | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | orang                           |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 25,00  | 25,00  | 25,00  | 25,00  | 100,00                                    | 100,00   |     |                |            |                |             |        |
| 67        | pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah  | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | doku<br>men                     |        |       | 1,00  |       |       | 1,00                         |          |        | 25,00  |        |        | 25,00                                     | 25,00    |     |                |            |                |             |        |
| 68        | Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah                                | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | doku<br>men                     |        | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 4,00                         |          | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00                                    | 200,00   |     |                |            |                |             |        |
| 69        | pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah                          | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 37,50  | 37,50  | 37,50  | 37,50  | 150,00                                    | 150,00   | -   | -              | -          | -              | -           |        |
| 70        | pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00                                  | 2.000,00 |     |                |            |                |             |        |
| 71        | penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan    | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.000,00                                  | 3.000,00 |     |                |            |                |             |        |
| 72        | melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan                            | Provinsi Gorontalo             |                                            |                                      | unit                            |        | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00                       |          | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 200,00                                    | 200,00   |     |                |            |                |             |        |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                 | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |           |       |           |           |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |            |        |              |        |              | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |      |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------------|------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                            |                                | Jumla<br>h<br>Pendud<br>uk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |           |       |           |           |                     |                              |            |        |              |        |              | PROV                                      | APBN | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                                            |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |           |       |           |           | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026       | 2027   | 2028         | 2029   | Jumlah       |                                           |      |     |                |            |                |             |
|           | sampah di<br>sumber                                                                                                                                        |                                |                                             |                                      |                                 |        |           |       |           |           |                     |                              |            |        |              |        |              |                                           |      |     |                |            |                |             |
| 73        | menerapkan<br>teknologi<br>ramah<br>lingkungan<br>yang tepat guna<br>dalam<br>pengurangan<br>sampah                                                        | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | unit                            |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00              |                              | 12,50      | 12,50  | 12,50        | 12,50  | 50,00        | 50,00                                     |      |     |                |            |                |             |
| 74        | memperkuat<br>keterlibatan<br>masyarakat<br>dalam<br>pengurangan<br>sampah                                                                                 | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | unit                            |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00              |                              | 500,0<br>0 | 500,00 | 500,00       | 500,00 | 2.000,0<br>0 | 2.000,0<br>0                              |      |     |                |            |                |             |
| 75        | penyusunan<br>sistem<br>perencanaan,<br>implementasi,<br>pengawasan,<br>monitoring,<br>evaluasi serta<br>pelaporan<br>pelaksanaan<br>pengelolaan<br>sampah | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | doku<br>men                     |        | 1,00      |       |           |           | 1,00                |                              | 200,0<br>0 |        |              |        | 200,00       | 200,00                                    |      |     |                |            |                |             |
| 76        | Melaksanakan<br>rehabilitasi TPA<br>yang<br>mencemari<br>lingkungan                                                                                        | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | unit                            |        |           |       | 1,00      |           | 1,00                |                              |            |        | 2.000,0<br>0 |        | 2.000,0<br>0 | 2.000,0<br>0                              |      |     |                |            |                |             |
| 77        | penyusunan<br>kajian pilot<br>proyek<br>pengelolaan<br>sampah dari<br>sub sistem                                                                           | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | doku<br>men                     |        |           | 1,00  |           |           | 1,00                |                              |            | 150,00 |              |        | 150,00       | 150,00                                    |      |     |                |            |                |             |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                               | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |            |      |      |            |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |               |               |               |               |                | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |               |     |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|------|------|------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |            |      |      |            |                     |                              |               |               |               |               |                | PROV                                      | APBN          | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                                                                                                                          |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |            |      |      |            | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | Jumlah         |                                           |               |     |                |            |                |             |
|           | pemilahan<br>sampai dengan<br>pemrosesan<br>akhir                                                                                                                        |                                |                                             |                                      |                                 |        |            |      |      |            |                     |                              |               |               |               |               |                |                                           |               |     |                |            |                |             |
| 78        | pelaksanaan<br>pilot projec sub<br>sistem<br>pewadahan<br>sampai<br>pemrosesan<br>akhir di Kota<br>Gorontalo,<br>Kabupaten<br>Gorontalo dan<br>Kabupaten<br>Bone Bolango | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00       | 6,00 | 6,00 | 6,00       | 24,00               |                              | 600,0<br>0    | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 2.400,0<br>0   |                                           | 2.400,0<br>0  |     |                |            |                |             |
| 79        | Penyusunan<br>studi<br>pengolahan<br>sampah dengan<br>ITF di kawasan<br>strategis<br>nasional (KSN)                                                                      | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | doku<br>men                     |        |            | 1,00 |      |            | 1,00                |                              |               | 500,00        |               |               | 500,00         |                                           |               |     |                |            |                |             |
| 80        | Pengembangan<br>Sistem dan<br>Pengelolaan<br>Persampahan<br>Regional                                                                                                     | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      |                                 |        |            |      |      |            | 0,00                |                              | 21.44<br>1,90 | 25.084,<br>97 | 28.807,<br>64 | 32.611,<br>24 | 107.94<br>5,75 | 32383,7<br>2571                           | 75.562,<br>03 |     |                |            |                |             |
| 81        | Supervisi<br>Pembangunan/<br>Rehabilitasi/<br>Peningkatan<br>TPA/TPST/SPA<br>Kewenangan<br>Provinsi                                                                      | Provinsi<br>Gorontalo          |                                             |                                      | ton/h<br>ari                    |        |            |      |      | 120,<br>00 | 120,00              |                              |               |               |               | 300,00        | 300,00         | 300,00                                    |               |     |                |            |                |             |
| 82        | Pembangunan<br>TPA                                                                                                                                                       | TPA<br>Talumelito              |                                             |                                      | m3/h<br>ari                     |        | 600,<br>00 |      |      |            | 600,00              |                              | 1.250,<br>00  | 1.250,0<br>0  | 1.250,0<br>0  | 1.250,0<br>0  | 5.000,0<br>0   |                                           | 5.000,0<br>0  |     |                |            |                |             |

| NO MOR | KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | DETAIL LOKASI (Kab/Kota) | Estimasi Outcome             |                          | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |       |            |       |       |               | Indikasi Biaya (juta rupiah) |           |           |           |           |           | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |           |     |             |         |             | Cata tan |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|-------|------------|-------|-------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----|-------------|---------|-------------|----------|
|        |                                                                                |                          | Jumla h Pendu duk terlay ani | Luas Wila yah terla yani |                                 |        |       |            |       |       |               |                              |           |           |           |           |           | PROV                                      | APBN      | DAK | SWAST A/CSR | ZIS WAF | MASYAR AKAT |          |
|        |                                                                                |                          |                              |                          | SATU AN                         | Volume |       |            |       |       | Total Volum e | 20 25                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | Jumlah    |                                           |           |     |             |         |             |          |
|        | Kewenangan Provinsi                                                            |                          |                              |                          |                                 |        |       |            |       |       |               |                              |           |           |           |           |           |                                           |           |     |             |         |             |          |
| 83     | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi                                  | TPA Talumelito           |                              |                          | unit                            |        | 1,00  |            |       |       | 1,00          |                              | 1.000,00  |           |           |           | 1.000,00  |                                           | 1.000,00  |     |             |         |             |          |
| 84     | Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (alat berat)                      | TPA Lanuo                |                              |                          | unit                            |        |       | 1,00       |       |       | 1,00          |                              |           | 1.000,00  |           |           | 1.000,00  |                                           |           |     |             |         |             |          |
| 85     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan (alat berat)                       | TPA Talumelito           |                              |                          | unit                            |        |       |            | 1,00  |       | 1,00          |                              |           |           | 3.000,00  |           | 3.000,00  |                                           | 3.000,00  |     |             |         |             |          |
| 86     | Optimalisasi Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                             | TPA Talumelito           |                              |                          | m3/hari                         |        |       | 175.200,00 |       |       | 175.200,00    |                              |           | 43.800,00 |           |           | 43.800,00 |                                           | 43.800,00 |     |             |         |             |          |
| 87     | Pembangunan TPS 3 R di kawasan strategis Provinsi kapasitas 20 ton/hari        | Provinsi Gorontalo       |                              |                          | ton/hari                        |        | 20,00 | 30,00      | 40,00 | 50,00 | 140,00        |                              | 12.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 84.000,00 |                                           | 84.000,00 |     |             |         |             |          |
| 88     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | Provinsi Gorontalo       |                              |                          | kab/kota                        |        | 6,00  | 6,00       | 6,00  | 6,00  | 24,00         |                              | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 1.200,00  | 1.200,00                                  |           |     |             |         |             |          |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                            | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |           |       |           |           |                     | Indikasi Biaya (juta rupiah) |               |              |              |              |              | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |              |     |                |            |                | Cata<br>tan |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----|----------------|------------|----------------|-------------|--|
|           |                                                                                                                       |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |           |       |           |           |                     |                              |               |              |              |              |              | PROV                                      | APBN         | DAK | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |  |
|           |                                                                                                                       |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |           |       |           |           | Total<br>Volum<br>e | 20<br>25                     | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         | Jumlah       |                                           |              |     |                |            |                |             |  |
| 89        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional                   | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00      | 6,00  | 6,00      | 6,00      | 24,00               |                              | 300,0<br>0    | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 1.200,0<br>0 | 1.200,0<br>0                              |              |     |                |            |                |             |  |
| 90        | Pengadaan truk sampah                                                                                                 | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | unit                            |        | 3,00      | 3,00  | 3,00      | 3,00      | 12,00               |                              | 2.250,0<br>00 | 2.250,0<br>0 | 2.250,0<br>0 | 2.250,0<br>0 | 9.000,0<br>0 |                                           | 9.000,0<br>0 |     |                |            |                |             |  |
| 91        | Pengembangan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah) di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi          | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | kab/k<br>ota                    |        | 6,00      | 6,00  | 6,00      | 6,00      | 24,00               |                              | 300,0<br>0    | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 1.200,0<br>0 | 1.200,0<br>0                              |              |     |                |            |                |             |  |
| 92        | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (bin sampah terpilah 4x50L) | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | unit                            |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00              |                              | 200,0<br>0    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 800,00       | 800,00                                    |              |     |                |            |                |             |  |
| 93        | Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah dalam Pengelolaan                                                   | Provinsi Gorontalo             |                                             |                                      | unit                            |        | 50,0<br>0 | 50,00 | 50,0<br>0 | 50,0<br>0 | 200,00              |                              | 200,0<br>0    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 800,00       | 800,00                                    |              |     |                |            |                |             |  |

| NO<br>MOR | KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                            | DETAIL<br>LOKASI<br>(Kab/Kota) | Estimasi<br>Outcome                         |                                      | Kebutuhan Penanganan menyeluruh |        |  |  |  |  | Indikasi Biaya (juta rupiah) |               |                |                |                |                | Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) |                |            |                |            |                | Cata<br>tan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
|           |                                                                       |                                | Jumla<br>h<br>Pendu<br>duk<br>terlay<br>ani | Luas<br>Wila<br>yah<br>terla<br>yani |                                 |        |  |  |  |  |                              |               |                |                |                |                | PROV                                      | APBN           | DAK        | SWAST<br>A/CSR | ZIS<br>WAF | MASYAR<br>AKAT |             |
|           |                                                                       |                                |                                             |                                      | SATU<br>AN                      | Volume |  |  |  |  | Total<br>Volum<br>e          | 20<br>25      | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                                           |                |            |                |            |                |             |
|           | Destinasi<br>Pariwisata<br>Provinsi (bin<br>sampah terpilah<br>4x50L) |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  |                              |               |                |                |                |                |                                           |                |            |                |            |                |             |
|           | Jumlah Pembiayaan / Pendanaan<br>Pengelolaan Persampahan              |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,<br>00                     | 44.19<br>8,75 | 100.00<br>6,82 | 66.544<br>,49  | 71.308<br>,09  | 282.05<br>8,15 | 54.296,<br>13                             | 225.76<br>2,03 | 500<br>,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |             |
|           | Jumlah Pembiayaan / Pendanaan<br>Sanitasi                             |                                |                                             |                                      |                                 |        |  |  |  |  | 0,<br>00                     | 89.31<br>8,41 | 162.90<br>8,16 | 112.11<br>4,16 | 113.29<br>3,92 | 477.63<br>4,65 | 54.296,<br>13                             | 225.76<br>2,03 | 500<br>,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |             |



## **bab-7**

# **PENUTUP**

## **ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)**

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang telah disusun, diharapkan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan baik bagi unsur pemerintah daerah maupun unsur diluar Pemerintah Daerah Gorontalo yang memfokuskan sumber daya pelaksanaan pembangunan pada peningkatan pencapaian pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo sehingga secara signifikan sumber daya yang dikerahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo guna mengakses layanan sanitasi yang layak.

Implementasi Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai bentuk operasional yang lebih mendetail terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, memberikan arah kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan program kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai bentuk pelaksanaan peran Provinsi Gorontalo dalam membina dan memfasilitasi pencapaian pembangunan sanitasi di wilayahnya sesuai dengan kondisi eksisting pembangunan sanitasi provinsi.